



2022



P-RPJMD

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018 - 2023**





BUPATI NAGEKEO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo harus selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi terwujudnya keberlanjutan pembangunan secara sinergis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo;
 - b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 28 Juni 2019;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 maka

diketahui terjadi ...

diketahui terjadi perubahan yang mendasar antara lain diberlakukannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta adanya bencana non alam berupa pandemik corona virus diseases 2019 (covid-19) yang telah membawa risiko bagi Kesehatan masyarakat dan telah merenggut korban jiwa serta mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Nagekeo;

- d. bahwa terjadinya perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c, menjadi dasar untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

Dan

BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah untuk bersama mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam Program pembangunan yang terpadu, terukur, berkesinambungan dan responsive terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi, serta terciptanya Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang sinergis dengan Perencanaan pembangunan provinsi dan nasional juga harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Perubahan ...

(2) Tujuan Perubahan RPJMD meliputi:

- a. Tersedianya penyesuaian terhadap perubahan regulasi terkini terkait Perencanaan dan Penganggaran Daerah, yang menyebabkan adanya perubahan di tingkat pusat dan provinsi, sehingga perlu disesuaikan dalam perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- b. Tersedianya dokumen yang menjadi acuan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penjabaran tahunannya dalam RKPD;
- c. Sebagai instrument pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2022-2023, dengan focus pada sisa waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan Perubahan RPJMD;
- d. Tersedianya tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah;
- e. Tersedianya instrument Pengawasan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan; dan
- f. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Daerah sisa waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan perubahan RPJMD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah mewujudkan Nagekeo yang sejahtera, nyaman dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata.
- (2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak;
 - b. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan;
 - c. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan;
 - d. Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari;
 - e. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri dan memiliki kebanggaan;
 - f. Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan Nusa Tenggara Timur;
 - g. Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup dan UMKM;
 - h. Mewujudkan mutu sumberdaya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah; dan
 - i. Mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. bab I pendahuluan;

b. bab II ...

- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III gambaran umum keuangan Daerah;
- d. bab IV permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
- e. bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. bab VI Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
- g. bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. bab VIII indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. bab IX penutup.

(4) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan mengenai Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bab V dihapus.

6. Pasal 18 dihapus.

7. Bab VII dihapus.

8. Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

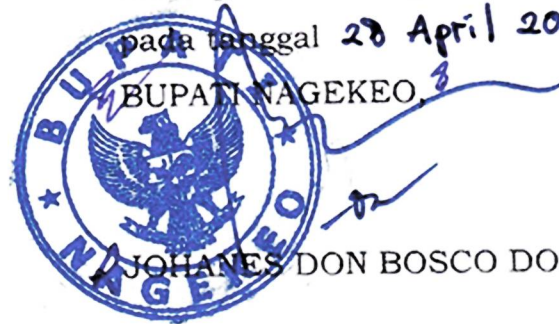
Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 28 April 2022

BUPATI NAGEKEO,



JOHANNES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay

pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,



LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu:(1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan;(4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tatacara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah. Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan desentralisasi

yang dilaksanakan ...

yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari “sistem perencanaan pembangunan nasional”, yang mencakup; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka telah dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2009-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah melalui 2 perodesasi RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2018-2023 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam dokumen RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 memuat Visi yaitu “Mewujudkan Nagekeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata” yang dijabarkan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak; (2) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan; (3) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan; (4) Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari; (5) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan; (6) Mewujudkan Nagekeo sebagai

lambung pangan ...

lumbung pangan NTT; (7) Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM; (8) Mewujudkan mutu sumberdaya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah; (9) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Tahapan penyusunan RPJMD, berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan RPJMD. Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa perubahan RPJMD, secara prinsip hanya dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini, (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

Sesuai hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 untuk pelaksanaan tahun 2019-2020 dan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018 - 2023 perlu dilakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR

LAMPIRAN ...



2022



P-RP-JMD

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018 - 2023**



NAGEKEO 
the heart of flores



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022.

Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 didasari pada kondisi aktual saat ini dimana, (1) penerbitan regulasi baru salah satunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi *Covid-19* yang sedikitnya membutuhkan dua strategi yaitu pengendalian dan penanganannya, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi (3) integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi NTT, terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas, dan (4) penyesuaian prioritas dan target daerah yang didasarkan atas hasil evaluasi RPJMD dan kebijakan *refocussing*.

Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 ini kiranya menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan dalam bingkai pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo sampai akhir periode di tahun 2023.

Dokumen ini telah melalui tahapan yang panjang, sejak rancangan awal sampai dengan penetapan. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam setiap tahapannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua.

Mbay, April 2022





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	15
2.1.1 Aspek Geografi	15
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	33
2.1.3 Aspek Demografi	39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	42
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	42
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	54
2.3 Aspek Pelayanan Umum	59
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	59
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	74
2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan	84
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	90
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	90
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	91
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	92
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	93
2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	97
2.6 Evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Terhadap KLHS	102
2.7 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	130
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	137
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	138
3.1.2 Neraca Daerah	143
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	148
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	148
3.2.2 Analisis Pembiayaan	150
3.3 Kerangka Pendanaan	153
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	158
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	158
4.1.2 Urusan Wajib Non-Layanan Dasar	160
4.1.3 Urusan Pilihan	164
4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan	165



4.2	Isu-Isu Strategis	166
4.2.1	Isu Strategis Global	166
4.2.2	Isu Strategis Nasional dan Regional	175
4.2.3	Isu Strategis Kabupaten Nagekeo	185
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1	Visi	199
5.2	Misi	202
5.3	Keselarasannya RPJMD dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024	206
5.4	Tujuan	210
5.5	Sasaran	210
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	220
6.1	Strategi	221
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	245
6.2.1	Arahan RPJPD Nagekeo pada RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023	245
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nagekeo	246
6.3	Arah Kebijakan Kewilayahan	248
6.3.1	Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya	249
6.3.2	Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah	250
6.3.3	Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	250
6.4	Program Pembangunan Daerah	253
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	266
7.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah	267
BAB VIII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8.1	Indikator Makro Daerah	286
8.2	Indikator Kinerja Utama	287
8.3	Indikator Kinerja Kunci	287
BAB IX	PENUTUP	
9.1	Kaidah Pelaksanaan	313
9.2	Pedoman Transisi	314
9.3	Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	315



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Kemiringan Lahan	19
Tabel 2-2	Curah Hujan Periode 2016 – 2020	20
Tabel 2-3	Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air	23
Tabel 2-4	Rencana Penggunaan Lahan	27
Tabel 2-5	Luas Kawasan Hutan	31
Tabel 2-6	Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata (<i>The Ring Of Tourism</i>)	37
Tabel 2-7	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016-2020	39
Tabel 2-8	Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 - 2020	40
Tabel 2-9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020	40
Tabel 2-10	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut status Pekerjaan Utama Tahun 2016 - 2020	47
Tabel 2-11	PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020	48
Tabel 2-12	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	50
Tabel 2-13	Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020	53
Tabel 2-14	Perkembangan BBLR Tahun 2018 - 2020	56
Tabel 2-15	Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2020	56
Tabel 2-16	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 2016-2020	59
Tabel 2-17	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2016-2020	60
Tabel 2-18	Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2016 - 2020	60
Tabel 2-19	Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2016-2020	61
Tabel 2-20	Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2016-2020	62
Tabel 2-21	Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020	66
Tabel 2-22	Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020	68
Tabel 2-23	Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020	69
Tabel 2-24	Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2020	70
Tabel 2-25	PSKS Tahun 2018 - 2020	71
Tabel 2-26	Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2016-2020	72
Tabel 2-27	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020	73
Tabel 2-28	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020	73
Tabel 2-29	Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2019	74
Tabel 2-30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020	75
Tabel 2-31	Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2016 – 2020	75
Tabel 2-32	Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 - 2020	76
Tabel 2-33	Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016 - 2020	76



Tabel 2-34	Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020	77
Tabel 2-35	Jumlah Fasilitas Perhubungan	77
Tabel 2-36	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2020	78
Tabel 2-37	Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2016 - 2020	79
Tabel 2-38	Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2020	79
Tabel 2-39	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 - 2020	81
Tabel 2-40	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2016 - 2020	81
Tabel 2-41	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah – Buah Tahun 2016 - 2020	82
Tabel 2-42	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur – sayuran Tahun 2016 - 2020	82
Tabel 2-43	Populasi Ternak Tahun 2016 – 2020	83
Tabel 2-44	Jumlah UKM Tahun 2016 - 2020	83
Tabel 2-45	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020	84
Tabel 2-46	Nilai SAKIP Tahun 2016-2020	86
Tabel 2-47	Opini BPK atas LKPD Tahun 2016-2020	86
Tabel 2-48	Nilai MCP Tahun 2018-2020	87
Tabel 2-49	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020	88
Tabel 2-50	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2020	88
Tabel 2-51	Rata rata pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2016 - 2020	90
Tabel 2-52	Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2016-2020	92
Tabel 2-53	Realisasi Investasi Tahun 2018-2020	92
Tabel 2-54	Jenis dan Jumlah Dokumen Izin Tahun 2016-2020	92
Tabel 2-55	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	94
Tabel 2-56	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	98
Tabel 2-57	Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	110
Tabel 2-58	Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	112
Tabel 2-59	Tujuan dan target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional	115
Tabel 2-60	Capaian Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	118
Tabel 2-61	Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan	125
Tabel 2-62	Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data	126
Tabel 2-63	Realisasi SPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2020	133
Tabel 3-1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020	140
Tabel 3-2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2020	142
Tabel 3-3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020	142
Tabel 3-4	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016-2020	143
Tabel 3-5	Neraca Daerah Pemerintah Tahun 2016-2020	146



Tabel 3-6	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Tahun 2016 - 2020	149
Tabel 3-7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020	150
Tabel 3-8	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020	151
Tabel 3-9	Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020	151
Tabel 3-10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020	152
Tabel 3-11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Tahun 2016 - 2020	152
Tabel 3-12	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	154
Tabel 3-13	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2021-2023	155
Tabel 3-14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023	155
Tabel 3-15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023	155
Tabel 5-1	Keselarasan RPJMD Nagekeo dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024	207
Tabel 5-2	Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 - 2023	211
Tabel 5-3	Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 – 2023	212
Tabel 5-4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2018-2023	213
Tabel 6-1	Persandingan Program Prioritas Daerah	223
Tabel 6-2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023	236
Tabel 6-3	Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 – 2031	251
Tabel 6-4	Program Pembangunan Daerah Serta Indikator Kinerja Perubahan RPJMD 2018 -2023	253
Tabel 7-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	268
Tabel 7-2	Realisasi serta Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023	269
Tabel 8-1	Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022-2023	288
Tabel 8-2	Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2022-2023	289
Tabel 8-3	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2023	295



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Pentahapan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025	3
Gambar 1-2	Dimensi Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	6
Gambar 1-3	Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan	
Gambar 2-1	Letak, Luas dan Batas Wilayah	16
Gambar 2-2	Peta Batas Administrasi	17
Gambar 2-3	Peta Sebaran Sumber Mata Air Baku	24
Gambar 2-4	Kelerengan, Curah Hujan, Geologi dan Hidrologi	25
Gambar 2-5	Peta Kerentanan Bencana Banjir dan Longsor	30
Gambar 2-6	Peta Kawasan Hutan	32
Gambar 2-7	Deliniasi <i>The Ring Of Tourism</i>	36
Gambar 2-8	Demografi	41
Gambar 2-9	Kasus Covid-19 Tahun 2020	58
Gambar 2-10	Kondisi Jalan dan Jembatan	67
Gambar 2-11	Kepegawaian	85
Gambar 2-12	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020	89
Gambar 2-13	Indeks SPBE Tahun 2019	89
Gambar 2-14	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	103
Gambar 4-1	Kasus Terkonfirmasi Covid-19	170
Gambar 4-2	<i>Sustainable Development Goals</i>	171
Gambar 4-3	Perekonomian Indonesia Secara Spasial Tahun 2020	177
Gambar 4-4	Sebaran Proyek Strategis Nasional	180
Gambar 5-1	Integrasi Visi, Misi dan Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023	209
Gambar 6-1	Diagram Penyesuaian <i>Platform</i> Pembangunan Daerah	224
Gambar 6-2	Arahan RPJPD Kabupaten Nagekeo untuk RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023	245
Gambar 6-3	Perubahan Arah Kebijakan Makro Pembangunan Tahun 2021-2023	247



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2-1	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020	39
Grafik 2-2	IPM Tahun 2016 – 2020	42
Grafik 2-3	Usia Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020	43
Grafik 2-4	Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020	43
Grafik 2-5	Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020	44
Grafik 2-6	Pengeluaran per Kapita Tahun 2016 – 2020	44
Grafik 2-7	Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020	45
Grafik 2-8	Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2020	46
Grafik 2-9	Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020	48
Grafik 2-10	Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	49
Grafik 2-11	PDRB Per Kapita Tahun 2016 – 2020	51
Grafik 2-12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016 – 2020	51
Grafik 2-13	Laju Inflasi Kota Maumere dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional 2016 – 2020	52
Grafik 2-14	Indeks Gini 2018 – 2020	53
Grafik 2-15	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020	54
Grafik 2-16	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020	54
Grafik 2-17	Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020	55
Grafik 2-18	Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 – 2020	57
Grafik 2-19	Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2020	57
Grafik 2-20	Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2020	59
Grafik 2-21	Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020	61
Grafik 2-22	Rasio Dokter per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020	63
Grafik 2-23	Rasio Bidan, Perawat dan Farmasi per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020	63
Grafik 2-24	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2017-2020	64
Grafik 2-25	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2020	64
Grafik 2-26	Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2020	65
Grafik 2-27	Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2020	65
Grafik 2-28	Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016-2020	68
Grafik 2-29	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2016-2020	69
Grafik 2-30	Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2016 - 2020	70
Grafik 2-31	Destana/Katana Tahun 2020	70
Grafik 2-32	Cadangan Pangan Tahun 2016-2020	74
Grafik 2-33	Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2020	77
Grafik 2-34	Produksi Ikan dan Garam Tahun 2016 - 2020	78



Grafik 2-35	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020	83
Grafik 2-36	Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan	84
Grafik 2-37	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017-2020	91
Grafik 2-38	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2016 – 2020	91
Grafik 2-39	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 -2020	93
Grafik 2-40	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2016-2020	93
Grafik 2-41	Capaian Indikator TPB	102
Grafik 2-42	Capaian Indikator TPB Pada Setiap Pilar	102
Grafik 2-43	Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	104
Grafik 2-44	Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target	105
Grafik 2-45	Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target	107
Grafik 2-46	Indikator TPB yang Belum Memiliki Data	108
Grafik 4-1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 1990 - 2020	167
Grafik 4-2	Rata-rata Temperatur Global Tahun 1880-2020	172
Grafik 4-3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2020	175
Grafik 4-4	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra	176

P-RPJMD

2018-2023



1

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu **dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes** dan **Marianus Waja, SH.** yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 Desember 2018. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2024 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015. Di samping itu, Perubahan RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD secara umum dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan tahap persiapan kemudian penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, lalu penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Di samping itu, penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/ kota juga dilakukan melalui tahapan konsultasi kepada gubernur, kemudian melewati tahap evaluasi oleh gubernur pada saat bupati/ wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD. Setelah evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kemudian rancangan peraturan daerah statusnya menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD (Pasal 70 ayat {2} Peraturan



Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dijelaskan di atas, berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan RPJMD. Pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa perubahan RPJMD, secara prinsip hanya dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 ini, (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga (2019-2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025, karena Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik pada akhir Desember tahun 2018. Arah kebijakan pembangunan daerah yang ditargetkan untuk periode RPJMD III dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 adalah:

- Penegasan dan Penetapan bagi pencapaian Target MDG's;
- Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;





- Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup, melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam yang seimbang (antara pendayagunaan dan konservasi) yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Pembangunan Infrastruktur yang memberi efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi berbasis perdesaan;
- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan pelembagaan Sistem Hukum Daerah;
- Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang demokratis dengan penegakan supremasi hukum, berdasarkan prinsip dan asas *good governance* dan *clean government*.



Sumber: Diolah dari Perda Kabupaten Nagekeo No.03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025

Gambar 1-1 Pentahapan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025

Dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015 yang digantikan dengan target baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam arahan kebijakannya juga mendukung penuh dan mengadopsi 17 tujuan yang telah dibuat dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, arahan kebijakan yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 terkait dengan MDGs akan disesuaikan dengan tujuan baru dalam SDGs.



Di samping melihat arahan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPD untuk RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, penting juga untuk mengetahui bagaimana kerangka perencanaan jangka menengah dan tahunan. Dalam kerangka tersebut, RPJMD dipedomani dan dijabarkan ke dalam Renstra PD serta diterjemahkan ke dalam RPKD. RPJMD kemudian menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Adapun dalam konteks perencanaan pembangunan tahunan, RPJMD dilaksanakan melalui RPKD. Kerangka perencanaan di atas didasarkan pada prinsip pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, telah banyak dinamika yang terjadi baik pada level nasional ataupun Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun 2018, di mana kebijakan nasional yang diperhatikan pada saat itu adalah RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2020 terbit Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dibutuhkan sinkronisasi, integrasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas.

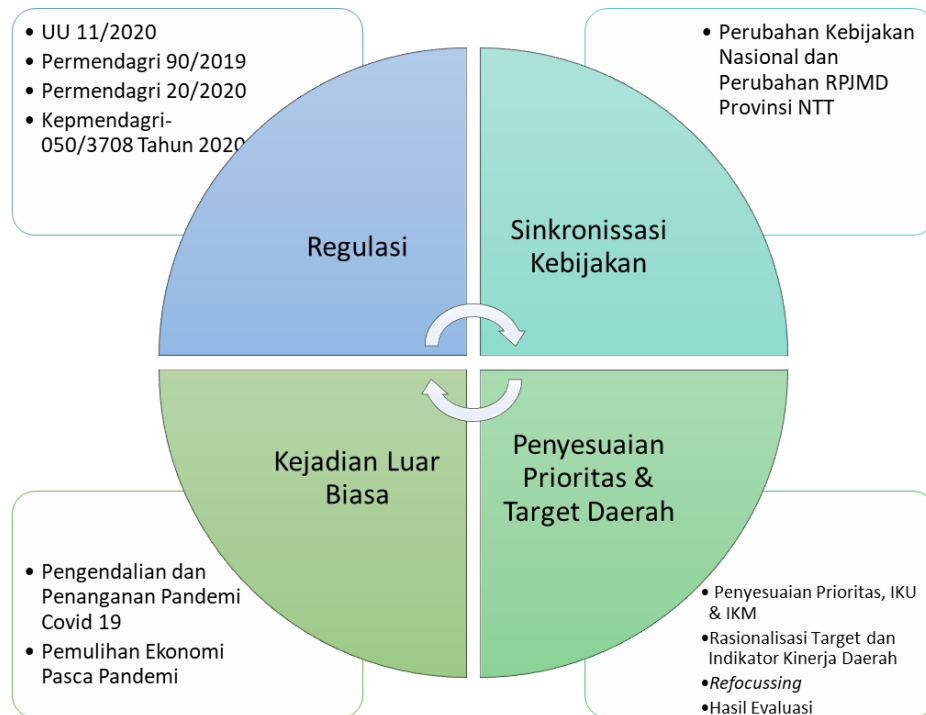




Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 pada pelaksanaan tahun 2019-2020, diketahui terdapat penurunan kinerja indikator makro baik di level nasional, Provinsi NTT, ataupun Nagekeo. Secara umum terjadi kontraksi yang dalam pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami delta penurunan pertumbuhan hingga 7,09%, demikian pula dengan Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo yang turun mencapai 7,88% dan 4,58%, meski di Nagekeo pertumbuhan masih positif di 0,62% namun demikian hal ini menurun jauh dibandingkan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Penurunan kinerja pemerintahan juga terjadi pada IKU dan IKK, dimana persentase capaian IKU dengan predikat sangat tinggi turun dari 71,23% (tahun 2019) menjadi 50% (tahun 2020) dari indikator yang dievaluasi. Capaian kinerja IKK juga menurun dari 77,06% (predikat sangat tinggi) di tahun 2019 menjadi 61,97% di tahun 2020.

Urgensi perubahan RPJMD Nagekeo berpijak pada 4 dimensi yaitu, (1) penerbitan regulasi baru salah satunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi Covid-19 yang sedikitnya membutuhkan dua strategi yaitu pengendalian dan penanganannya, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi (3) integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi NTT, terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas, dan (4) penyesuaian prioritas dan target daerah yang didasarkan atas hasil evaluasi RPJMD dan kebijakan *refocussing*.





Gambar 1-2 Dimensi Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



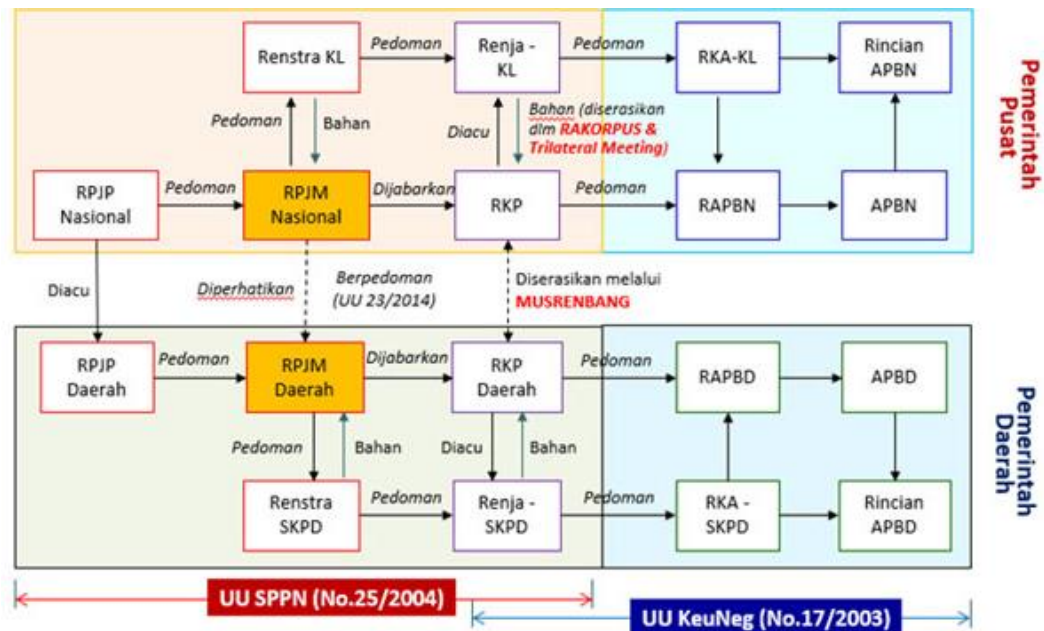
- Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019).





1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra PD. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Gambar 1-3 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Keterangan:

- Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun.
- Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunan Nasional).



- d. KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga dalam satu anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.
- g. Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- h. Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- j. RKA-PD (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dimaksudkan agar sejalan dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga adaptif terhadap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan krisis ekonomi dan kesehatan serta sosial akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020. Perubahan RPJMD disusun sebagai pedoman penetapan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023, yang mencakup dua tahun rencana berjalan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020 serta perubahan rencana dalam tiga tahun ke depan.

Dengan demikian tujuan dari Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah untuk:





1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan dinamika perubahan kebijakan yang terjadi di tingkat nasional maupun Provinsi, serta adaptif terhadap penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai tahun 2023;
3. Menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan antarsektor dan lintas wilayah; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta adaptif terhadap situasi keadaan terkini.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kabupaten Nagekeo yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.





BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Nagekeo.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.



P-RPJMD

2018-2023

2

BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH





BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Nagekeo beberapa tahun terakhir yang mencakup Aspek Geografi Dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Nagekeo.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

a. Letak

Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu di bagian tengah Pulau Flores. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8°26'00"-8°64' 40" Lintang Selatan dan 121°6'20" - 121°32' 00" Bujur Timur. Selain wilayah di pulau Flores, Nagekeo juga memiliki 5 (lima) pulau kecil di Utara yaitu **Pulau Kinde** di depan teluk Kaburea, **Pulau Nusa** di Teluk Toto, **Pulau Ri'i Ta'a** di depan muara Sungai Aesesa, **Pulau Watundoa** di depan tanjung Watundoa dan pulau **Wewotongol** di depan pulau Watundoa.

b. Luas

Kabupaten Nagekeo memiliki luas wilayah 1.416,96 KM² atau 7,72% dari total luas daratan pulau Flores.

c. Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Nagekeo di sebelah **Utara** berbatasan dengan **Laut Flores**, sebelah **Selatan** dengan **Laut Sawu**, sebelah **Timur** dengan **Kabupaten Ende** dan sebelah **Barat** dengan **Kabupaten Ngada**.



LETAK, LUAS DAN BATAS WILAYAH



LUAS WILAYAH
1.416,96
KM²

AESESA SELATAN

Ibukota: Jawakisa
Luas : 71 KM²

5%

AESESA

Ibukota: Danga
Luas : 432,29 KM²

30%

BOAWAE

Ibukota: Boawae
Luas : 325,42 KM²

23%

WOLOWAE

Ibukota: Marilewa
Luas : 182,09 KM²

13%

MAUPONGGO

Ibukota: Mauponggo
Luas : 102,52 KM²

7%

NANGARORO

Ibukota: Nangaroro
Luas : 238,02 KM²

17%

KEO TENGAH

Ibukota: Maundai
Luas : 65,62 KM²

5%

Barat

Kab. Ngada

Utara

Laut Sawu

Laut Sawu

Selatan



Kab. Ende

Timur

8°26' 00" - 8°64' 40" LS
121°6' 20" - 121°32' 00" BT

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN NAGEKEO



Legenda

Ibukota
 ○ Ibukota Kabupaten/Kota
 ○ Ibukota Kecamatan

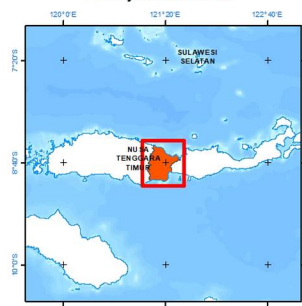
Batas Administrasi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan

Kecamatan

- AESESA
- AESESA SELATAN
- BOAWAE
- KEO TENGAH
- MAUPONGGO
- NANGARORO
- WOLOWAE

Perairan
 ■ Laut

Petunjuk Letak Peta



0 1.5 3 6
 Kilometers
 Skala
 1 : 90.000 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan

Sistem Grid :
 Geografis : Interval Antar Grid 10 Menit
 UTM : Zona 51 S Interval Antar Grid 20.000 Meter

Datum dan Sistem Proyeksi :
 WGS 84/ World Mercator

Peta Dasar dan Administrasi :
 Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000, BIG, 2017
 BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018

Gambar Latar :
 Hillshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG, 2018
 Batimetri, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016





2. Topografi

Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki kondisi topografi dengan hamparan tanah datar, gugusan perbukitan dan pegunungan yang sambung-menyambung dan kompleks dengan beberapa puncak gunung yang berbeda-beda tingginya.

- **Pegunungan dan perbukitan selatan:** Nata, Pondo, Ua, Benu, Koto (1.270 mdpl), Reo, Pumbu, Seatora, Bheto, Sa, Tuka, Ebulobo (2.149 mdpl).
- **Pegunungan dan perbukitan tengah:** Toto (918 mdpl), Sika, Puupode, Bebu, Sepa, Amegelu (1.320 mdpl), Kisa, Mele, Manungae (1.220 mdpl), Begu, Ngaca, Nido, Renduwawo, Poma, Redu, Tanatoro, Solorowa ;
- **Pegunungan dan perbukitan utara:** Wajo, Ndidi, Bedi, Tua Ayo, Wona, Yateguru, Kotadjogo, Watubhaya, Naya, Sudu, Anagara, Socaenga, Wagha, Anaiki, Malakoli, Gegekapa, Watusu'a, Aiyiku, Wodowae, Wolopau, Ngongo, Batanitu, Mala Leji, Kajuwau, Waritiri, Nio Kota, Malamukute'a, Wajo, Utekapa, Rane, Utekapa, Sangatoro, Pamo, Dhawe, Tonga Roe, Wologiri, Wolokota, Woloboa, Wolomeze, Malasera, Ola Dhawe, Alattolo, Waerea, Teotawu, Kekajawareo, Logojaro, Bare, Rasek, Kajulaki, Ba, Nunutua, Pandok, Paakembo, Koroksipi, Korojawa, Weworowet, Watucange, Mbuang, Bunge, Tireng, Watubhakov, Nasijarang.
- **Dataran Rendah:** Dataran rendah terluas hanya terdapat di sepanjang pantai Utara, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Kaburea, Dataran Totomala, Dataran Anakoli, Dataran Aeramo, Dataran Lape, Dataran Danga, Dataran Dhawe, Dataran Mbay, Dataran Towak, Dataran Nggolonio. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran yang relatif sempit: Dataran Nangaroro, Dataran Sawu Mauponggo, Dataran telu, Dataran Mau dan Dataran Aewoe.





- o **Dataran Tinggi:** Dataran tinggi terluas hanya terdapat di kawasan tengah, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Tinggi Madawitu, Dataran Tinggi Rendu, Dataran Malawona di tepian sungai Aesesa, Dataran Raja, Dataran Gero, Dataran Dhereisa, Dataran Nagerawe, Dataran Focolodorawe dan Dataran Munde. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran tinggi yang relatif sempit: Dataran Boloroga, Dataran sambi, Dataran Pusu dan Dataran Kotagana.

Dari segi biofisik, elevasi tanah di Kabupaten Nagekeo sangat bervariasi dari ± 0 m s.d. 925 mdpl.

Tabel 2-1 Kemiringan Lahan

Kemiringan (derajat)	Luas (Ha)	(%)
0 – 8	35.477	25,04
> 8 – 15	36.263	25,59
> 15 – 30	55.162	38,93
> 30 – 45	14.155	9,99
> 45 – 100	638	0.45

Sumber: Bappelitbangda Kab. Nagekeo, Tahun 2021

Kemiringan >15-30 derajat paling dominan dengan luas 55.162 Ha atau 38,93% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo dan terendah pada kemiringan >45 – 100 dengan luas 638 Ha atau 0,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo.

3. Geologi

Kabupaten Nagekeo termasuk daerah vulkanis muda. Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial.

4. Klimatologi

Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis. Musim hujan berlangsung mulai Bulan Desember hingga Maret dan musim kemarau mulai Bulan April hingga November.



Data curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-2 Curah Hujan Periode 2016 – 2020

Kecamatan	Curah Hujan Per Tahun (mm)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mauponggo	1,883	1,499	-*)	-*)	-*)
Keo Tengah	1,085	541	784	1,413	1,903
Nangaroro	2,152	2,051	1,659	1,208	1,956
Boawae	2,134	1,498	1,361	1,308	783
Aesesa (Danga)	593	1,090	676	707	1,107
Aesesa (Boanio)		- *)	-*)	-*)	-*)
Aesesa Selatan	1,136	1,769	1,439	-*)	1,082
Wolowae (Tendakinde)	-*)	-*)	-*)	-*)	147
Wolowae (Anakoli)	1,539	2,033	732	108	645

Sumber: BPS. Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

5. Hidrologi

Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Nagekeo dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Nagekeo adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun.

Air Tanah

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Dengan kondisi seperti itu maka



konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Nagekeo, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah- daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah- daerah yang mengandung aquifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

Air Permukaan

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Nagekeo, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya.

Sungai terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah Sungai Aesesa dengan debit $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim hujan dan $\pm 3 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa terbentang seluas 118.074,29 ha. Secara administratif, DAS Aesesa masuk dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu,





Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Sebagian besar wilayah DAS Aesesa seluas 47.094,14 ha berada di Kabupaten Ngada, dan sisanya seluas 70.980,15 ha berada di Kabupaten Nagekeo. Sub DAS yang berada di wilayah Ngada menuju Nagekeo terdiri dari Sub DAS Waeliang, dan Wulabhara, Waewangawelu, Waegu, Wae Sipi, Kolopenu, Waepana, Wae Woki yang bersama dengan Waewutu, Waebula, Lowobodo, Lowobia, Lowogako, Lowopisa dan Aeca mengalir ke Utara menuju sungai Aesesa. Sub DAS Aemau, wilayah Nagekeo, cabang-cabang hulu sungainya berasal dari pegunungan Toto, pegunungan Amegelu, Pegunungan Ndora yang mengalir ke arah barat bertemu dengan sungai Aeca (Raja) yang berhulu di Nido, membelah celah pegunungan Amegelu dan dataran tinggi Rendu, terus ke Utara dan bergabung dengan sungai Aesesa di Aemau.

Selain sungai Aesesa, terdapat beberapa sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores di Utara dan ke Laut Sawu di Selatan. Pada kawasan Utara dari Timur ke Barat terdapat sungai Nio Niba, Dowo Mbepa dan Dowo Toto yang bermuara di teluk Kaburea (laut Flores). Selain itu terdapat banyak kali mati (hanya mengalir di musim hujan) yang mengalir dari pegunungan dan perbukitan menuju Laut Flores. Pada musim hujan daerah hulu yang kurang vegetasi seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain sungai, juga terdapat danau alami, Zano, yang terletak di perbukitan desa Totomala, kecamatan Wolowae.

Pada kawasan Selatan, dari Timur ke Barat, terdapat sungai Nangaboa, sungai Nangaroro, sungai Nangawona, sungai Maunori, sungai Lowolere, sungai Lowoledho, sungai Waekoko, sungai Lowo Meti, sungai Lowo Lea, sungai Mauwaru, sungai Lowo mere, sungai Aetoyo dan sungai Aesemi yang semuanya bermuara ke Laut Sawu.





Sumber Mata Air

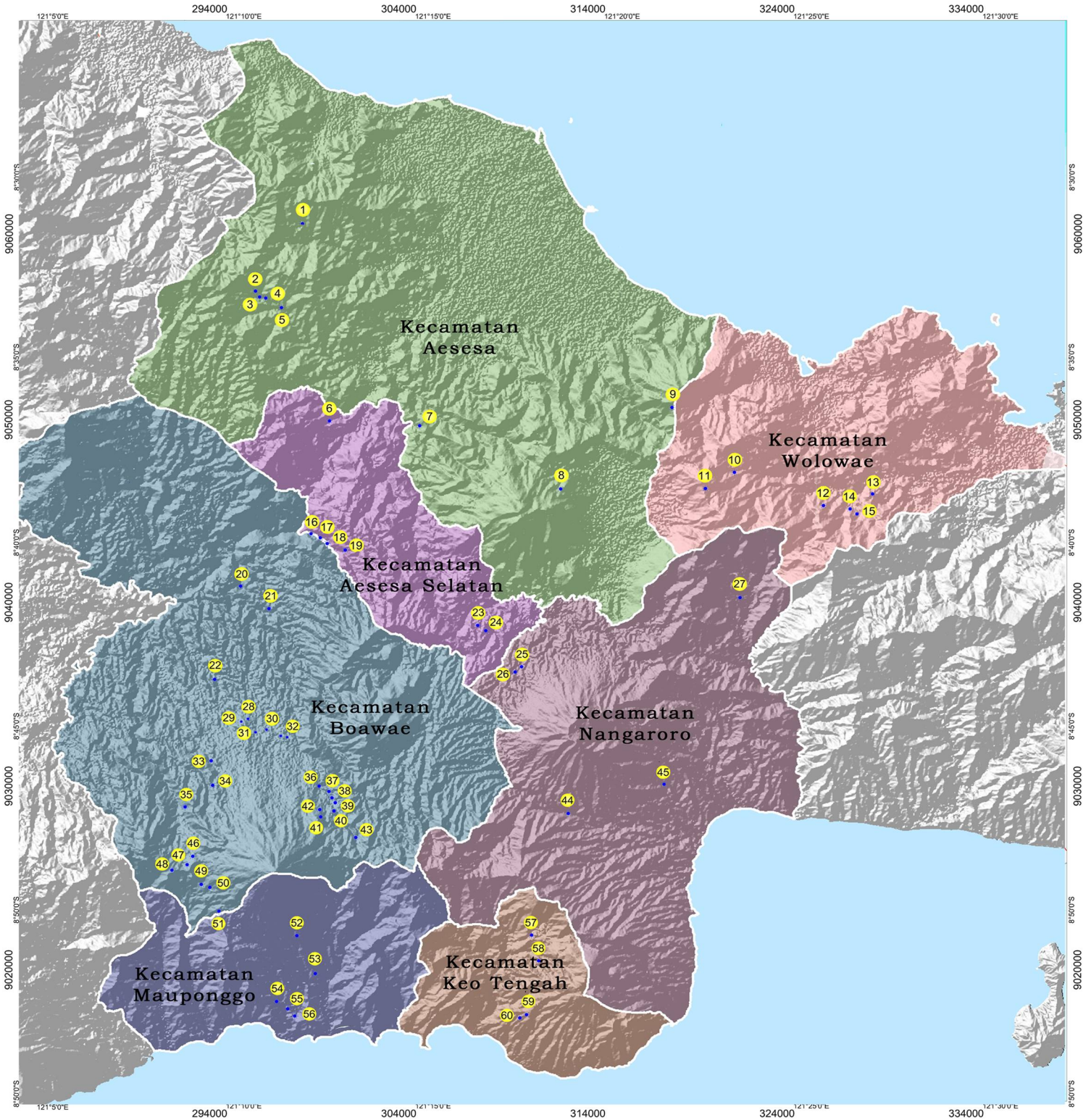
Tabel 2-3 Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air

NO	KECAMATAN	MATA AIR	DEBIT L/d
1	Aesesa	1 Bhangang	0,16
		2 Wuga - wuga 1a	2,10
		3 Wuga - wuga 1b	2,10
		4 Wuga - wuga 1c	2,10
		5 Wuga - wuga 2	1,33
		6 Lowomudu	4,40
		7 Tabalape	0,43
		8 Napujoto II	3,10
2	Aesesa Selatan	1 Zita Lewa	0,91
		2 Pela	0,94
		3 Napu Nipa	4,04
		4 Napu Tere	19,74
3	Boawae	1 Ae Zea	0,87
		2 Pau Jawa	0,35
		3 Napu Moi	0,65
		4 Lowomeli	150,00
		5 Ae Da	2,60
		6 Ae Muku	6,00
		7 Ae Saga	0,53
		8 Ae Go	1,53
		9 Ae Gogo	0,98
		10 Ae Mali	4,00
		11 Pisa	2,20
		12 Matadhuge	--
		13 Pisa Meka	0,05
		14 Ae Lelu II	2,43
		15 Ae Manu	1,00
		16 Oki Oja	0,30
		17 Ae A	1,10
		18 Ae Lade	0,20
		19 Ae Eti	3,50
		20 Kusu Koso	2,00
		21 Ae Menge	1,20
		22 Aebowo	4,31
		23 Bhoba Modho	3,20
		24 Wayupea	1,68
		25 Ae Tunga	4,00
		26 Lowopodo I	5,14
		27 Lowopodo II	0,32
4	Mauponggo	1 Ae Gega	8,20
		2 Eko Dhe	10,70
		3 Theo Dhae	2,50
		4 Ae Nilu	5,38
		5 Aelaba	1,50
		6 Ae Menge	1,20
5	Keo Tengah	1 Betho Pile	2,60
		2 Ae Lado	1,40
		3 Dandu A	2,40
		4 Dandu B	0,85
6	Nangaroro	1 Nete Wulu	7,20
		2 Mala Mude	1,20
		3 Labo Ika	5,50
		4 Uta Ngeta	7,51
		5 Dowo Dambo	5,85
7	Wolowae	1 Zobozamo	0,78
		2 Euwadha	0,12
		3 Muku Dhedo	1,51
		4 Oki Muke	--
		5 Konge I	0,45
		6 Konge I	1,76

Sumber: Rencana Induk Sistem Pengelola Air Minum Kab. Nagekeo, 2020



PETA SUMBER MATA AIR BAKU KABUPATEN NAGEKEO



LEGENDA :

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

- Laut

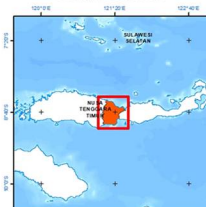


Kecamatan

- AESESA
- AESESA SELATAN
- BOAWAE
- KEO TENGAH
- MAUPONGGO
- NANGARORO
- WOLOWAE



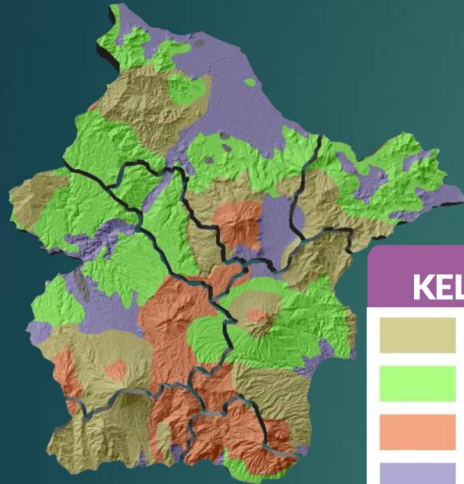
Skala
1 : 90.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,9 km di lapangan
Petunjuk Letak Peta



- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 MA. Bhagang = 0.16 L/d | 25 MA. NeteWulu= 7.2 L/d | 49 MA. Lowopodo I= 5.14 L/d |
| 2 MA. Wuga-wuga 1a= 2.1 L/d | 26 MA. Matamudu= 1.2 L/d | 50 MA. Lowopodo II= 0.32 L/d |
| 3 MA. Wuga-wuga 1b= 2.1 L/d | 27 MA. Labo Ika= 5.5 L/d | 51 MA. Ae Gega= 8.2 L/d |
| 4 MA. Wuga-wuga 1c= 2.1 L/d | 28 MA. Ae Saga= 0.53 L/d | 52 MA. Eko Dhae= 10.7 L/d |
| 5 MA. Wuga-wuga 2= 1.33 L/d | 29 MA. Ae Go= 1.53 L/d | 53 MA. Theo Dhae= 2.50 L/d |
| 6 MA. Zita Lewa= 0.91 L/d | 30 MA. Ae Gogo= 0.98 L/d | 54 MA. Aenilu= 5.38 L/d |
| 7 MA. Lowomudu= 4.4 L/d | 31 MA. Ae Mali= 4.00 L/d | 55 MA. Aelaba= 1.5 L/d |
| 8 MA. Tabalape= 0.43 L/d | 32 MA. Pisa = 2.20 L/d | 56 MA. Ae Menge= 1.2 L/d |
| 9 MA. Napujoto II= 3.1 L/d | 33 MA. Matadhuge= ----- | 57 MA. Betho Pile= 2.6 L/d |
| 10 MA. Zobozamo= 0.78 L/d | 34 MA. Pisa Meka= 0.047 L/d | 58 MA. Ae Lado= 1.4 L/d |
| 11 MA. Euwadha= 0.12 L/d | 35 MA. Ae Lelu II= 2.43 L/d | 59 MA. Dandu A= 2.4 L/d |
| 12 MA. Muku Dhedo= 1.51 L/d | 36 MA. Ae Manu= 1 L/d | 60 MA. Dandu B= 0.85 L/d |
| 13 MA. Oki Muke= ----- | 37 MA. Oki Oja= 0.3 L/d | |
| 14 MA. Konge II= 0.45 L/d | 38 MA. Ae A= 1.1 L/d | |
| 15 MA. Konge III= 1.76 L/d | 39 MA. Ae Lade= 0.2 L/d | |
| 16 MA. Ae Zea= 0.87 L/d | 40 MA. Ae Eli= 3.5 L/d | |
| 17 MA. Pau Jawa= 0.35 L/d | 41 MA. Kusu Kos= 2 L/d | |
| 18 MA. Napu Moi= 0.95 L/d | 42 MA. Ae Menge= 1.2 L/d | |
| 19 MA. Pelas= 0.94 L/d | 43 MA. Ae Bowo= 4.31 L/d | |
| 20 MA. Lowomeli= 150 L/d | 44 MA. Utangeta= 7.51 L/d | |
| 21 MA. Ae Da= 2.6 L/d | 45 MA. Dowodambo= 5.85 L/d | |
| 22 MA. Ae Muku= 6.0 L/d | 46 MA. Bhoba Modho= 3.2 L/d | |
| 23 MA. Napu Nipa= 4.04 L/d | 47 MA. Wayupea= 1.68 L/d | |
| 24 MA. Napu Tere= 19.74 L/d | 48 MA. Ae Tunga= 4 L/d | |

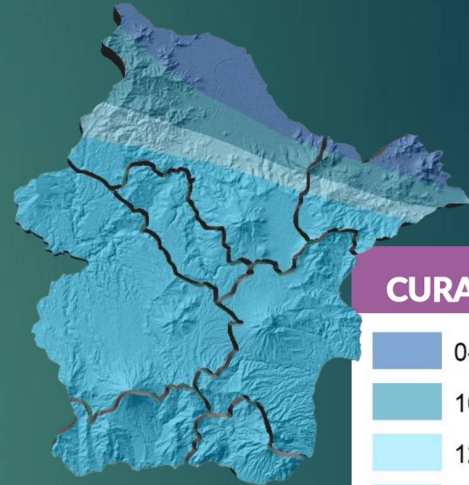


TOPOGRAFI, KLIMATOLOGI, GEOLOGI DAN HIDROLOGI



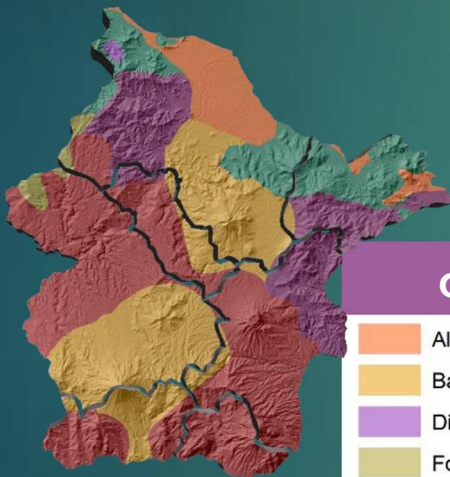
KELERENGAN

- Agak Curam
- Bergelombang
- Curam
- Datar
- Landai



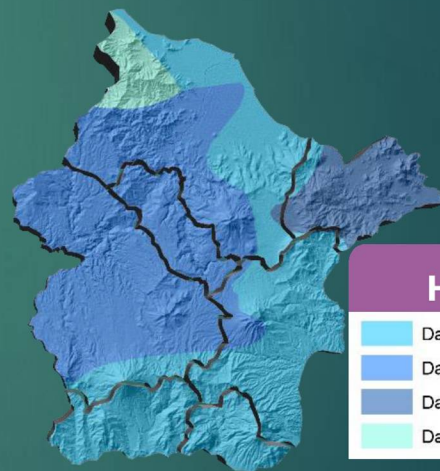
CURAH HUJAN

- 0-1000 mm
- 1000-1250 mm
- 1250-1500 mm
- 1500-2000 mm



GEOLOGI

- Aluvium
- Batuan Gunungapi Muda
- Diorit Kuarsa
- Fomasi Laka
- Fomasi Nagapanda
- Formasi Kiro
- Hasil Gunungapi Tua



HIDROLOGI

- Daerah Aliran Sungai ?????
- Daerah Aliran Sungai Aesesa
- Daerah Aliran Sungai Petipara
- Daerah Aliran Sungai Toring



6. Kondisi Geografi Lainnya

a. Pulau-Pulau

Nagekeo juga memiliki 4 (empat) pulau kecil di Utara: Pulau **Kinde** di depan Teluk Kaburea, Pulau **Nusa** di Teluk Toto, Pulau **Ri'i Ta'a/Pasirita** di depan muara Sungai Aesesa dan Pulau **Watundoa** di depan Tanjung Watundoa.

b. Potensi Satwa dan Tumbuhan Khusus dan Sumber Obat Tradisional

Kabupaten Nagekeo juga memiliki potensi flora dan fauna yang khas. Jenis tanaman endemik ini sering juga dipakai untuk ritus budaya dan pengobatan tradisional antara lain siri putih (beji), kaju ketta (yang biasa dipakai untuk membangun rumah) dan kaju hebu (*Cassia fistula*, yang biasa dipakai untuk pembuatan peo). Selain flora, satwa langka yang terdapat di Kabupaten Nagekeo antara lain Rusa Timor, Burung Maleo (woddo), monyet ekor panjang serta berbagai jenis burung.

c. Bahan Tambang

Pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan beberapa jenis bahan tambang dan galian sebagai berikut:

- Biji besi kadar Ferum (Fe) sekitar 72% di Kecamatan Aesesa;
- Granit di Desa Nggolonio;
- Zeolit di Marapokot di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Wolowae;
- Batu kapur & marmer di Kecamatan Boawae; Pasir batu di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro;
- Tanah liat Kecamatan Aesesa dan Wolowae.





d. Rencana Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Nagekeo yang paling tinggi adalah kawasan peruntukkan pertanian dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-4 Rencana Penggunaan Lahan

Rencana Pola Ruang	Jenis Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	Kawasan Hutan Lindung	11.071
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	56.189
	Kawasan Perlindungan setempat	6.051
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	5.892
	Kawasan Rawan Bencana Alam:	43.706
	o Rawan banjir (Aesesa, Wolowae)	36.076
	o Rawan tanah longsor	6.143
	o Rawan gelombang pasang dan tsunami	1.487
	Kawasan Lindung Geologi	27.571
	Kawasan Lindung Lainnya	4.909
Kawasan Budidaya	Kawasan Hutan Produksi	20.898
	Kawasan Peruntukan Pertanian	99.468
	Kawasan Peruntukan Perikanan	47.922
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	1.857
	Kawasan Peruntukan Industri	7.439
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	7.109
	Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau	27.229
	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	30

Sumber: RTRW Kab. Nagekeo, Tahun 2011

e. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis.



- o Bencana Banjir

Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, yaitu Sungai Aeasa, Sungai Aemau, Sungai Wae Bobo, Sungai Nangamboa dan Sungai Lowoledho.

Kelurahan Mbay II **Kecamatan Aesesa** termasuk wilayah terdampak dengan kelas tinggi dikarenakan memang lokasinya berada berdekatan dengan Sungai Aesesa. Banjir juga terjadi di Kelurahan Danga, Kelurahan Dhawe Kecamatan Aesesa, Desa Tendakinde, Desa Tendatoto, Desa Anakoli **Kecamatan Wolowae**. Banjir yang terjadi di Desa Langedhawe **Kecamatan Aesesa Selatan** dikarenakan lokasi banjir di dekat dengan aliran DAS Aesesa Sub-DAS Aemau. Banjir juga terjadi di Desa Nataute **Kecamatan Nangaroro**, banjir ini disebabkan luapan dari Sungai Nangamboa. Banjir yang terjadi di Kelurahan Mauponggo **Kecamatan Mauponggo** akibat luapan dari Sungai Lowoledho.

- o Bencana Tanah Longsor

Kejadian tanah longsor sering terjadi pada lereng bukit, kejadian besar sampai dengan memakan korban jiwa adalah di Desa Salalejo **Kecamatan Mauponggo**. Tanah longsor juga terjadi di **Kecamatan Keo Tengah**, hampir seluruh desa terdampak. Hal ini dikarenakan kondisi topografi yang sangat curam.

- o Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Abrasi terjadi di **Kecamatan Keo Tengah**, Desa Witurombaua, Udiworowatu dan Desa Kotodermali, **Kecamatan Nangaroro** Desa Podenura, Tonggo, Woewutu, Kelurahan Nangaroro dan Desa Nataute. **Kecamatan Mauponggo**, Desa Keliwatulewa, Kelurahan Mauponggo, Desa Wolotelu, Desa Maukeli, Desa Wolokisa, Desa Lokalaba, Desa Aewoe. **Kecamatan Wolowae**, Desa Anakoli, Desa Totomala, Desa Tendakinde, **Kecamatan**



Aesesa Desa Aeramo, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Desa Tonggurambang, Kelurahan Mbay II, Desa Waekokak, Desa Nggolonio.

o Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yaitu angin kencang. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di bulan Januari-Februari. Paling sering terjadi di **Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae**, dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo.

o Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena ada juga berkaitan dengan kegiatan adat berburu, pada waktu tertentu kegiatan ini dilakukan dengan membakar hutan untuk memburu, agar hewan buruan keluar dari dalam hutan dan memudahkan masyarakat dalam memburu. Lokasinya di **Kecamatan Boawae**, Desa Nagerawe, Desa Alorawe, Desa Focolodorawe, Desa Dherisa, Desa Gero, Kelurahan Ratongamobo, Desa Raja Selatan, Desa Raja, Desa Raja Timur, **Kecamatan Nangaroro**, Desa Ulupulu, Desa Ulupulu I, Desa Bidoa, Desa Woedoa, Desa Wokodekororo, Desa Woewutu, Desa Wokowoe **Kecamatan Aesesa Selatan**, Desa Tengtiba, Desa Renduwawo, Desa Rendubutowe, Desa Renduteno, Desa Langedhawe, **Kecamatan Aesesa**, Desa Tendamude, Desa Tedakisa, Desa Aeramo, Kelurahan Lape, Desa Ngegedhawe, Desa Labolewa, Desa Olaia, Kelurahan Towak, Desa Nggolonio, Kelurahan Dhawe. **Kecamatan Wolowae**, Desa Anakoli, Tendatoto, Tendakinde, Totomala dan Desa Natatoto.

o Bencana Kekeringan

Kekeringan ekstrim yang melanda nagekeo diawali sejak bulan Juni 2018. Seperti di Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae termasuk daerah terdampak dan menyebabkan warga kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih.





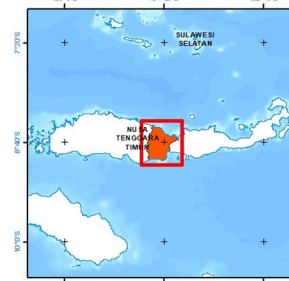
PETA KERENTANAN BENCANA LONGSOR DAN BANJIR KABUPATEN NAGEKEO



Legenda

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ibukota | Batas Administrasi |
| ○ Ibukota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| Kerentanan Bencana Alam | Peraliran |
| ■ Kerentanan Bencana Banjir | ■ Laut |
| ■ Kerentanan Bencana Longsor | |

Petunjuk Letak Peta



Skala
1 : 90.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan

Sistem Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 10 Menit
UTM : Zona 51 S Interval Antar Grid 20.000 Meter

Datum dan Sistem Proyeksi :
WGS 84/ World Mercator

Peta Dasar dan Administrasi :
Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000, BIG, 2017
BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018

Sumber Data :
Peta Kerentanan Banjir dan Longsor
Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2019

Gambar Latar :
Hillshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG, 2018
Batimetri, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016





f. Kawasan Hutan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi.

Tabel 2-5 Luas Kawasan Hutan

Berdasarkan Kelompok Kawasan Hutan

NO	KELOMPOK KAWASAN HUTAN	FUNGSI	LUAS
1	KH Kelibegu	HP	1.899,20
2	KH Lambo	HP	1.653,05
3	KH Mbay	HL	7.854,85
4	KH Ndora	HP	1.044,77
5	KH Keo Kelituka	HP	2.289,37
6	KH Kelikoto Kelireo	HP	2.857,09
7	KH Kemang Boleng	HPT	9.179,34
8	KH Kemang Boleng	HL	1.771,65
9	APL	APL	115.204,05
TOTAL LUAS			28.549

- *APL adalah areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan*

Berdasarkan Kecamatan

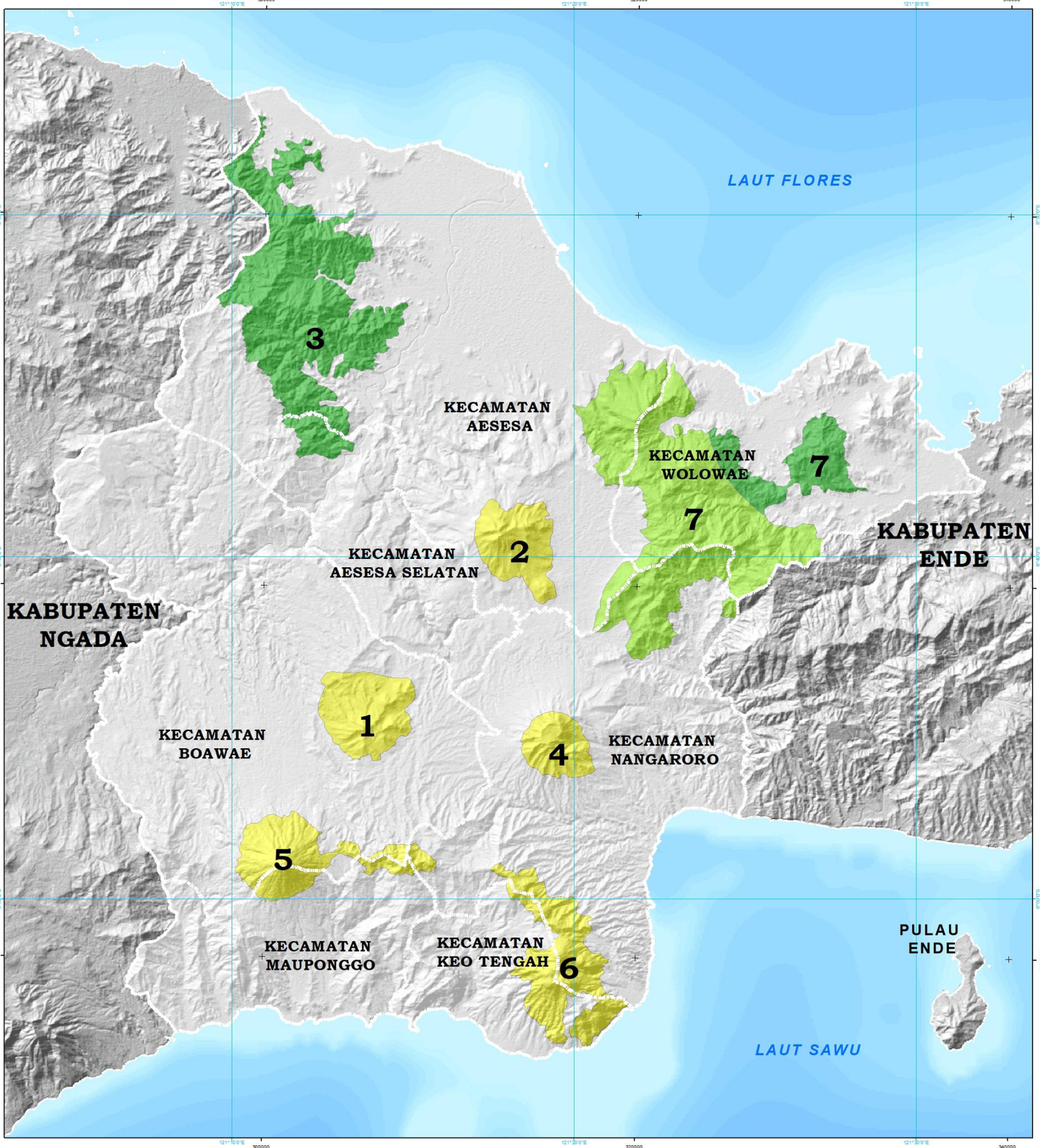
NO	NAMA KECAMATAN	LUAS KAWASAN HUTAN
1	Aesesa	10.987
2	Aesesa Selatan	540
3	Mauponggo	637
4	Boawae	3.397
5	Keo Tengah	1.466
6	Nangaroro	4.608
7	Wolowae	6.914
TOTAL LUAS		28.549

Sumber: UPT Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kabupaten Nagekeo, 2021





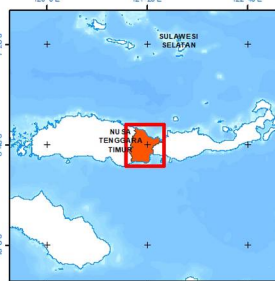
PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN NAGEKEO



Legenda

- Ibukota**
- Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
- Kawasan Hutan**
1. Kawasan Hutan Kelibegu
 2. Kawasan Hutan Lambu
 3. Kawasan Hutan Mbay
 4. Kawasan Hutan Ndora
 5. Kawasan Hutan Keo Kelituka
 6. Kawasan Hutan Kelikoto Kelireo
 7. Kawasan Hutan Kemang Boleng
- Batas Administrasi**
- - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
- Fungsi Kawasan Hutan**
- Area Penggunaan Lain
 - Hutan Lindung
 - Hutan Produksi Terbatas
 - Hutan Produksi
- Perairan**
- Laut

Petunjuk Letak Peta



0 1 2 3 4
Kilometers
Skala
1 : 90.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan

Sistem Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 10 Menit
UTM : Zona 51 S Interval Antar Grid 20.000 Meter

Datum dan Sistem Proyeksi :
WGS 84/ World Mercator

Peta Dasar dan Administrasi :
Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1: 50.000, BIG, 2017
BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018

Peta Kawasan Hutan :
Peta Kawasan Hutan bersumber dari Hasil Geoprocessing

Gambar Latar :
Hillshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG, 2018
Batimetri, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016





2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nagekeo dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

a. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi kawasan persawahan tersebar di Kecamatan Boawae, Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae dan Nangaroro. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Nagekeo dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensinya di setiap wilayah kecamatan. Potensi pengembangan jagung terdapat pada Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, dan Nangaroro. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, pemeliharaan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah.

b. Hortikultura

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Nagekeo diarahkan di Kecamatan Aesesa Selatan, Boawae dan Mauponggo. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Tanaman hortikultura yang cocok dikembangkan di Kabupaten Nagekeo ini adalah kentang, bawang merah dan bawang putih.

c. Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah 18.607,96 ha atau sekitar 13,13% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang tersebar di semua kecamatan, dengan jenis tanaman bervariasi tergantung dari topografi dan iklim masing-masing wilayah. Komoditi perkebunan utama adalah kelapa, kopi, kemiri, cengkeh, jambu mente, vanili, kakao, lada, dan pala yang tersebar di semua wilayah kecamatan.





d. Peternakan

Berdasarkan topografi dan curah hujan kawasan peruntukan peternakan ternak besar dan kecil tersebar di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae dan Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 18.242 ha.

2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Wilayah Kabupaten Nagekeo yang berpotensi sebagai kawasan Minapolitan, yang meliputi Desa Anakoli, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Kelurahan Nangaroro, dan Kelurahan Mauponggo. Potensi perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap atau perikanan laut memiliki potensi pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan Aewoe di Kecamatan Mauponggo;
- b. Pengembangan kawasan perikanan pesisir selatan; Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo;
- c. Pengembangan budidaya perikanan air payau kawasan perikanan pesisir utara; Desa Nangadhero (Kecamatan Aesesa) dan kawasan pesisir Kaburea (Kecamatan Wolowae);
- d. Pengembangan TPI di Marapokot dan Nggolonio di Kecamatan Aesesa; dan
- e. Pengolahan hasil ikan di Marapokot Kecamatan Aesesa.

3. Kawasan Peruntukan Industri

Industri yang telah berkembang adalah industri rumah tangga (*home industry*). Kawasan industri yang dikembangkan yaitu industri garam yang dipusatkan pada dua lokasi, yakni Desa Waekokak Kecamatan Aesesa dan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 2.000 ha.





a. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman seluas kurang lebih 108.955 ha diperuntukan untuk permukiman perkotaan seluas kurang lebih 37.095 ha dan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 71.860 ha. Kawasan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Aesesa dan permukiman perdesaan tersebar di tujuh kecamatan.

b. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan seluas kurang lebih 30 ha ini diperuntukan bagi pelayanan pertahanan keamanan setingkat rayon/sector di masing-masing kecamatan dan pelayanan pertahanan dan keamanan setingkat distrik/resort di pusat perkotaan Mbay.

c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah KSN KAPET Mbay sedangkan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata, yang disesuaikan dengan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

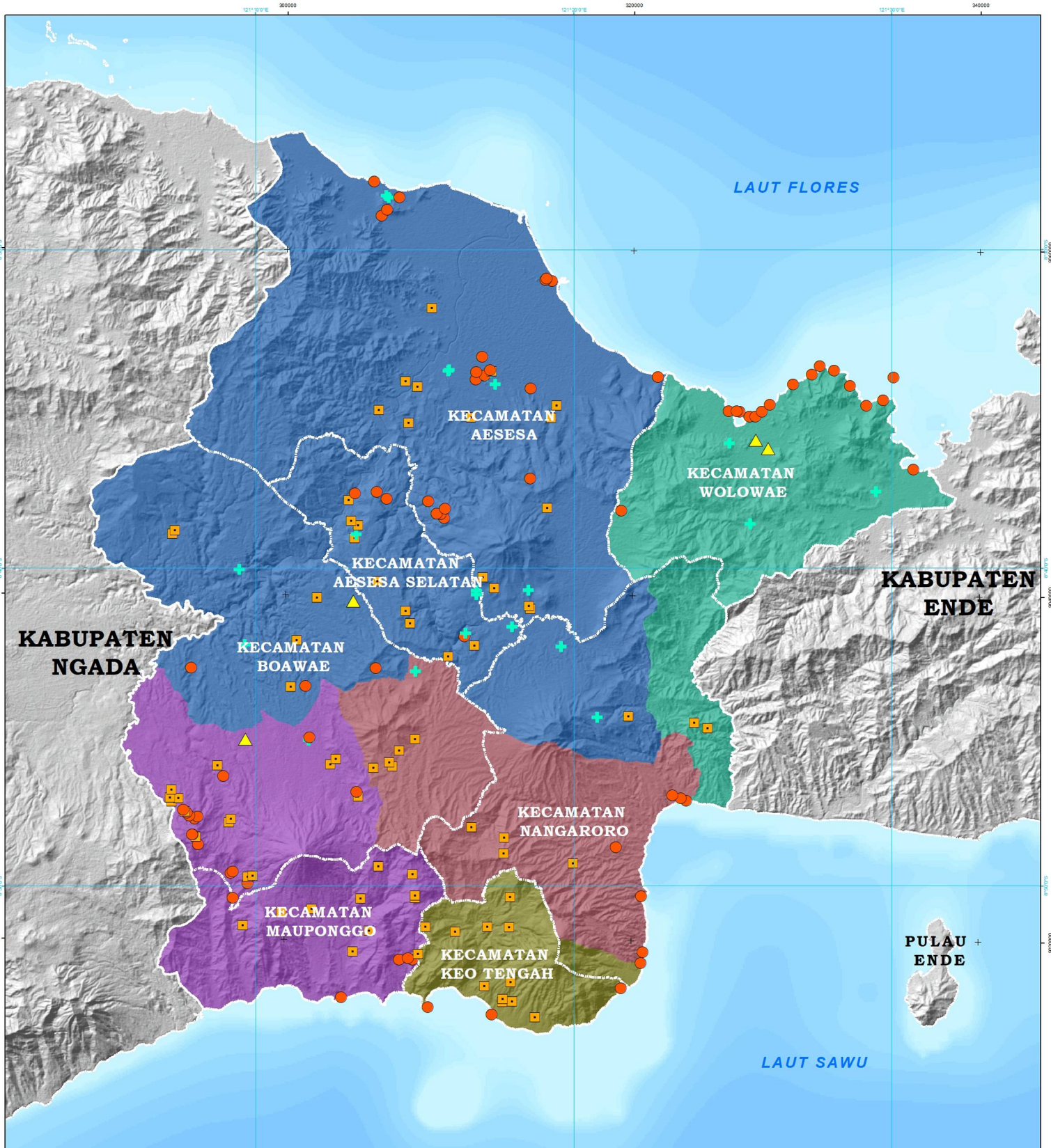
d. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdasarkan dokumen perencanaan Kabupaten Nagekeo yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPARDA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018 - 2023, serta potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nagekeo, maka ditetapkan 5 (lima) deliniasi kawasan pengembangan yang mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Provinsi yang menggunakan konsep “*Ring Of Beauty*”.





PETA RING OF TOURISM KABUPATEN NAGEKEO



Legenda

Ibukota

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Ring Of Nagekeo

- Ring Of Ebulobo
- Ring Of Kota Jogo Kinde
- Ring Of Koto
- Ring Of Lena
- Ring Of Mbay

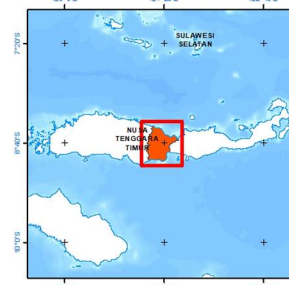
Kelas Prioritas DTW

- Wisata Agro
- Wisata Alam
- Wisata Buatan
- Wisata Budaya

Perairan

- Laut

Petunjuk Letak Peta



Skala
1 : 90.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan

Sistem Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 10 Menit
UTM : Zona 51 S Interval Antar Grid 20.000 Meter

Datum dan Sistem Proyeksi :
WGS 84/ World Mercator

Peta Dasar dan Administrasi :
Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000, BIG, 2017
BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018

Peta Ring Of Mbay dan Kelas Prioritas DTW :
RIPPARKAB Nagekeo dan Survey Lapangan Tahun 2021

Gambar Latar :
Hillshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG, 2018
Batimetri, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016





**Tabel 2-6 Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata
(The Ring Of Tourism)**

No	Kawasan Pengembangan	Tujuan Wisata	Tema Aktivitas Wisata
1	The Ring of Ebulobo , mencakup Kecamatan Mauponggo dan Boawae. Pada kawasan ini, zona inti kawasan meliputi desa Leguderu dan Kelewae serta sebagian desa Rowa dan hierarki utama kawasan the Ring of Ebulobo terdapat di desa Nageoga.	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Pendakian Gunung Ebulobo; b. Wisata Budaya Boawae c. Kelewae Ekowisata & Kuliner Tradisional; d. Wisata Alam Dan Budaya Pajoreja; e. Wisata Bahari Enagera f. Wisata Minat Khusus Petualangan g. Olahraga Pariwisata Ebulobo; h. Ebulobo Festival 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendakian Ebulobo 2142; b. Ebulobo Adventure & Culture Festival; c. Kuliner Dapur Makan Kelewae; d. Boawae Culture Trip; e. Enagera Beach Tour; f. Exotic Pajoreja Village Tour; g. Ebulobo Ecotourism; h. Ebulobo Adventure Blended With Culture Tour; i. Ebulobo Running.
2	The Ring of Koto , mencakup seluruh bagian Kecamatan Keo Tengah dan sebagian Kecamatan Nangaroro yakni Desa Podenura. Pada kawasan the Ring of Koto, zona inti kawasan meliputi desa Keli, desa Lewangere, desa Ngero, desa Wajo, desa Kotawuji Barat, desa Kotawuji Timur, desa Mbaenuamuri desa Udiworowatu serta desa Witorumbaua.	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Budaya Keo Tengah; b. Wisata Bahari Premium c. Seni Pertunjukan Desa Wisata d. Wisata Minat Khusus Experiential e. Produk EKraf Berbasis Perkebunan f. Koto Festival 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Seni Pertunjukan b. Wisata Bahari Laut Sawu c. Wisata Budaya Dan Petualangan Koto d. Wisata Belanja Ekonomi Kreatif e. Wisata Minat Khusus Petualangan f. Wisata Pantai Mauwelu - Enabhala



<p>3</p>	<p>The Ring of Lena, mencakup sebagian Kecamatan Nangaroro dan sebagian Kecamatan Boawae. Pada kawasan the Ring of Lena, zona intikawasan terdapat di desa Nangaroro dan kawasan lindung yang terdapat di desa Raja Kecamatan Boawae.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Bahari Nangaroro b. Wisata Budaya Natalea c. Wisata Religi Bukit Rohani Lena d. Wisata Olahraga Dirgantara e. Integrated Rest Area f. Wisata Rekreasi Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Religi / Pilgrimage b. Wisata Bahari Pantai Ria c. Wisata Bahari Pantai Tonggo d. Wisata Olahraga Dan Kebugaran e. Wisata Budaya f. Wisata Rekreasi Buatan
<p>4</p>	<p>The Ring of Mbay, kawasan ini mencakup seluruh Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagian Kecamatan Boawae dan sebagian Kecamatan Nangaroro. Zona inti kawasan The Ring of Mbay terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan. Kawasan penyangga the Ring of Mbay meliputi desa Towak, Nggolombay, Dhawe, Renduteno, Tedakisa, serta Tedamude.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Kota Mbay b. Wisata Bahari Marapokot – Ri’i Ta’a c. Wisata Petualangan Dan Olahraga Weworowet d. Wisata Petualangan Dan Budaya Kampung Kawa e. Wisata Petualangan Air Terjun Ngabatata f. Wisata Mice Kota Mbay g. Wisata Edukasi Budaya & Warisan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mbay City Tour (Shopping, Trails, Hiking, Sightseeing, Agrotourism); b. Mbay Mice Tourism (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition); c. Festival Budaya Esu Kose Rendu’s Heritages Trail; d. Kawa Traditional Village Cultural Experience; e. Weworowet Adventure & Sport Tourism; f. Ngabatata Adventure Trails; g. Marapokot – Ri’i Ta’a Experiences
<p>5</p>	<p>The Ring of Kotajogo-Kinde, mencakup 3 desa di Kecamatan Nangaroro (desa Utetoto, desa Nataute, serta desa Odaute) serta Kecamatan Wolowae. Pada kawasan the Ring of Kotajogo-Kinde, zona inti kawasannya adalah desa Totomala dan sebagian desa Anakoli dengan kawasan sekitarnya sebagai kawasan penyangga dan kawasan pendukung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Pantai Kota Jogo; b. Wisata Bahari Pantai Utara; c. Wisata Safari Watu Api (Totomala); d. Wisata Bahari Nusa Kinde; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kota Jogo Beach Tours; b. Watuapi Safari Tours; c. Kota Jogo Ecotourism (Agrotourism); d. Kota Jogo - Kinde Blue Safari Tours; e. Nusa Kinde The Pearl Of Nagekeo Tours; f. Kaburea Edutours; g. Pu’u Nio Experiential Tours;

Sumber: Road Map Pariwisata Kabupaten Nagekeo, 2021





2.1.3 Aspek Demografi

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan.

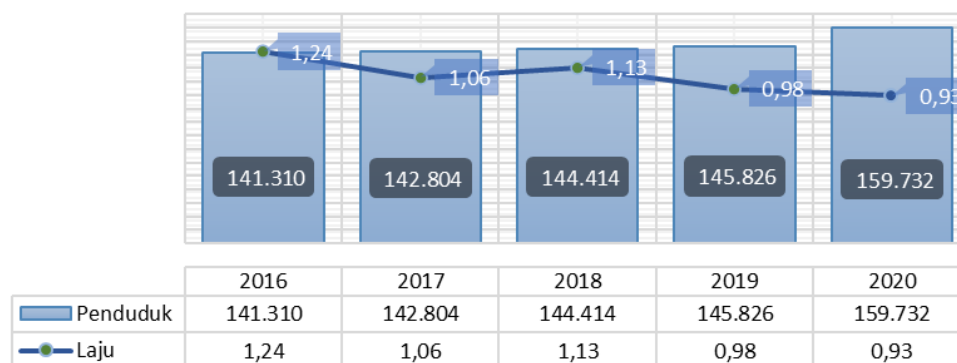
1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya mengalami peningkatan, Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016 - 2020

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aesesa	36.813	37.205	37.623	38.236	43.684
2.	Nangaroro	18.651	18.847	19.060	19.111	21.634
3.	Boawae	36.833	37.223	37.642	37.928	40.820
4.	Mauponggo	22.330	22.565	22.820	22.835	24.640
5.	Wolowae	5.308	5.366	5.427	5.534	5.983
6.	Keo Tengah	14.585	14.737	14.904	15.083	15.592
7.	Aesesa Selatan	6.790	6.861	6.938	7.099	7.379
JUMLAH TOTAL		141.310	142.804	144.414	145.826	159.732

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-1 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020



2. Penduduk menurut Usia

Di tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak ada di kelompok umur 5 - 9 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 15.035 jiwa, dan paling sedikit ada di rentang usia 70-74 tahun sebanyak 3.391 jiwa.

Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 - 2020

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	16.283	16.323	16.389	16.446	14.797
2	5-9	15.486	15.467	15.475	15.446	15.035
3	10-14	15.801	15.886	15.970	16.016	13.546
4	15-19	13.174	13.291	13.365	13.432	14.006
5	20-24	8.621	8.876	9.131	9.332	14.156
6	25-29	8.955	9.105	9.317	9.566	13.093
7	30-34	9.663	9.632	9.606	9.583	11.327
8	35-39	9.319	9.381	9.441	9.497	11.403
9	40-44	8.770	8.832	8.899	8.936	10.817
10	45-49	7.679	7.772	7.863	7.930	9.482
11	50-54	7.282	7.410	7.540	7.652	8.100
12	55-59	6.155	6.343	6.523	6.685	6.483
13	60-64	4.977	5.184	5.406	5.615	5.649
14	65-69	3.407	3.481	3.573	3.683	4.587
15	70-74	2.556	2.594	2.639	2.689	3.391
16	≥75	3.182	3.227	3.277	3.318	3.860
JUMLAH TOTAL		141.310	142.804	144.414	145.826	159.732

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

3. Penduduk menurut Pendidikan

Sampai dengan tahun 2020 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ada pada kelompok penduduk dengan Pendidikan SD/MI atau sederajat. Persentase penduduk pada kelompok ini berada pada angka 39,27%.

Tabel 2-9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 - 2020

IJAZAH TERTINGGI	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak Punya Ijazah	29,82	32,06	28,37	27,59	21,95
SD/MI Sederajat	40,08	32,13	35,49	34,25	39,27
SLTP/MTS Sederajat	9,29	13,37	12,64	12,41	13,65
SLTA/MA	11,78	10,98	12,84	15,69	16,13
SMK/MAK	2,00	2,67	2,16	1,55	0,41
DIPLOMA I/II	0,76	0,63	-	0,34	0,54
DIPLOMA III	0,88	2,37	-	1,84	1,76
DIPLOMA IV/S1/S2/S3	5,39	5,81	6,39	6,32	6,29

Sumber: BPS Propinsi NTT, 2021

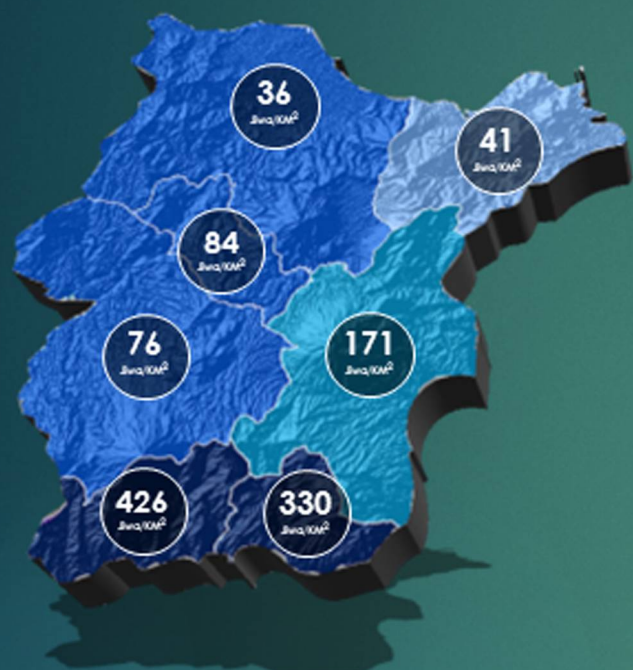


DEMOGRAFI

KEPADATAN PENDUDUK

113

Jiwa/KM²



JUMLAH PENDUDUK

159.732

Jiwa

78.955



Laki - laki

80.777

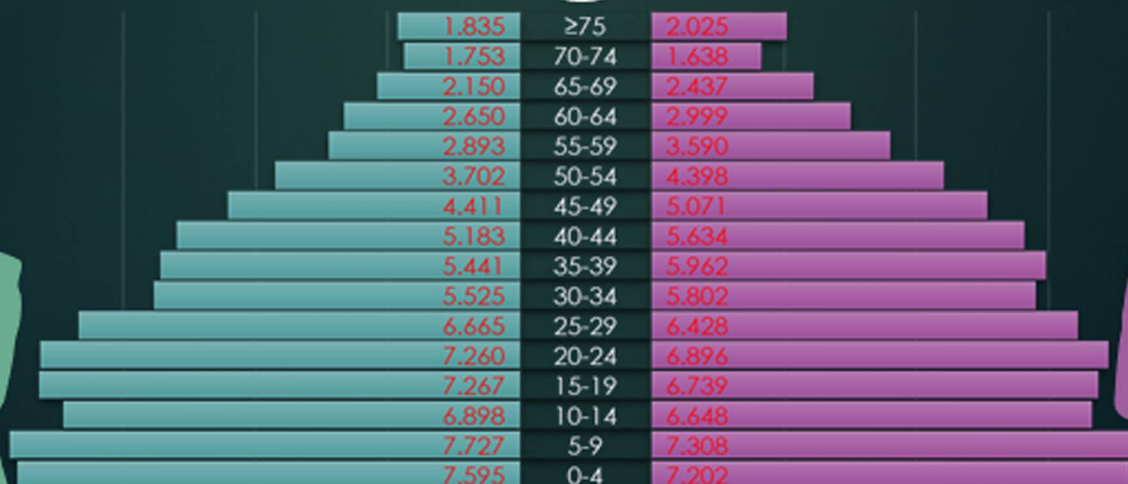


Perempuan



98

SEX RATIO



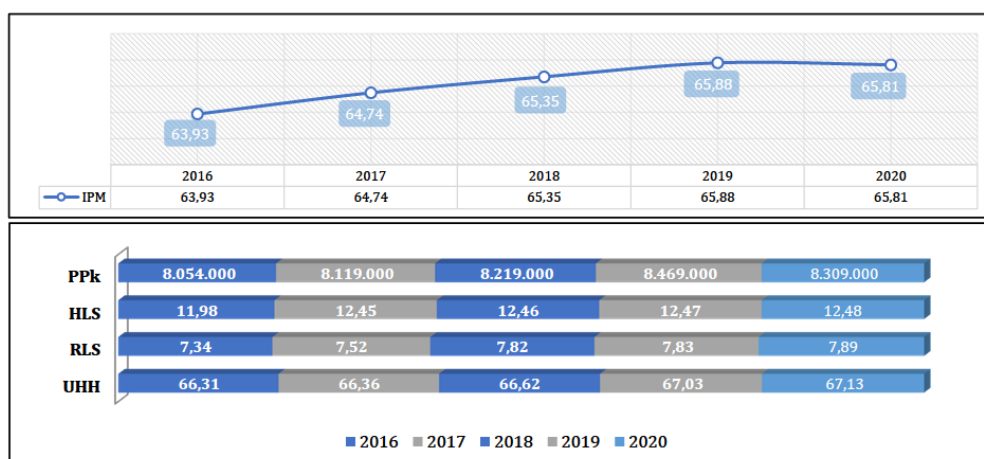
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, fokus kesejahteraan sosial serta fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Diagram di bawah menunjukkan IPM Kabupaten Nagekeo, dibanding dengan IPM Provinsi NTT dan Indonesia secara nasional.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-2 IPM Tahun 2016 - 2020

Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). UHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-3 Usia Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020

UHH penduduk nagekeo mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada di angka 67,03 tahun di tahun 2020, Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan di Nagekeo menjelang tahun 2020 akan dapat hidup sampai dengan 67 tahun kedepan.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-4 Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020

HLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 12,48 tahun pada 2020, ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.



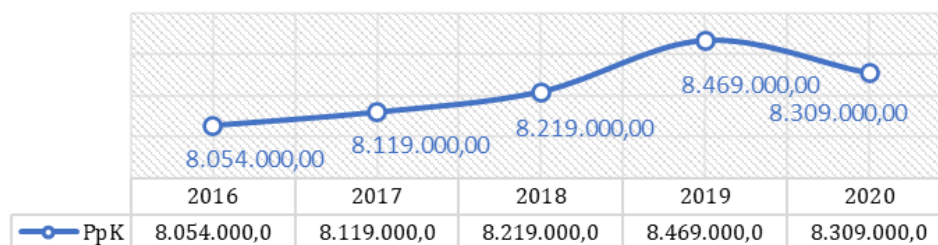
Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-5 Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020

RLS Kabupaten Nagekeo terus mengalami perbaikan. Secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagekeo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga hampir menamatkan kelas VIII SMP. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dasar di setiap wilayah.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

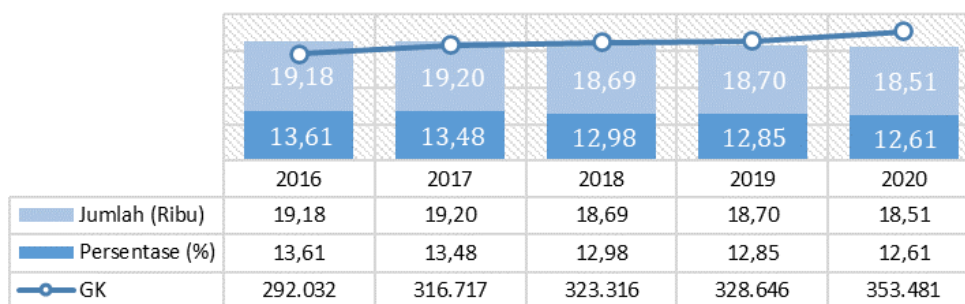
Grafik 2-6 Pengeluaran per Kapita Tahun 2016 - 2020



Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan di tahun 2020. Kondisi ini merupakan dampak ekonomi pandemi covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Nagekeo dan nasional namun dampak ekonomi atas pandemi covid-19 dirasakan secara global.

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-7 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

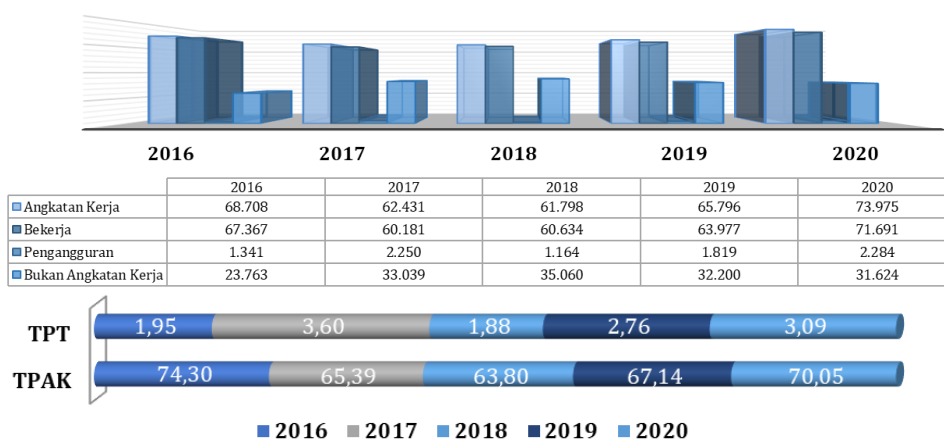
Penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari baik dari segi jumlah maupun persentasenya, dimana pada tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 13,61% menjadi 12,61% di tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari berbagai program



pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah seperti Pengembangan Desa Tertinggal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jamkesmas, Jamkesda, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSDA, bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagainya. Berbagai program tersebut tetap perlu dievaluasi agar secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah/daerah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (**TPAK**) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (**TPT**). **TPAK** adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. **TPT** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada.



Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-8 Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2020



TPT bergerak naik menjadi 3,09% di tahun 2020 setelah tahun sebelumnya (2019) sudah sempat menurun menjadi 2,76%. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja baru sebanyak 8.179 (108,49%) dari tahun sebelumnya. Namun demikian, terjadi peningkatan penyerapan angkatan kerja baru sebesar 7.714 (130,75%) dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin melalui peningkatan TPAK pada tahun 2020 sebesar 70,05% dari tahun sebelumnya sebesar 67,14%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi. Pemerintah terus-menerus melakukan stimulus terhadap faktor-faktor pendorong keberhasilan ini melalui optimalisasi kinerja APBD pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong investasi.

Dari status pekerjaan utama angkatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-10 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut status Pekerjaan Utama Tahun 2016 - 2020

NO	JENIS PEKERJAAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	13.837	12.859	13.208	15.374	20.797
2	Pekerja Bebas (Pertanian & Non Pertanian)	5.658	2.403	3.771	4.716	5.249
3	Buruh/Karyawan/Pegawai	6.683	5.072	15.983	11.374	11.122
4	Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	7.442	630	825	1.191	2.309
5	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	13.926	18.400	14.623	19.207	18.398
6	Berusaha Sendiri	19.821	10.817	12.224	12.115	13.816
J U M L A H		67.367	60.181	60.634	63.977	71.691

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

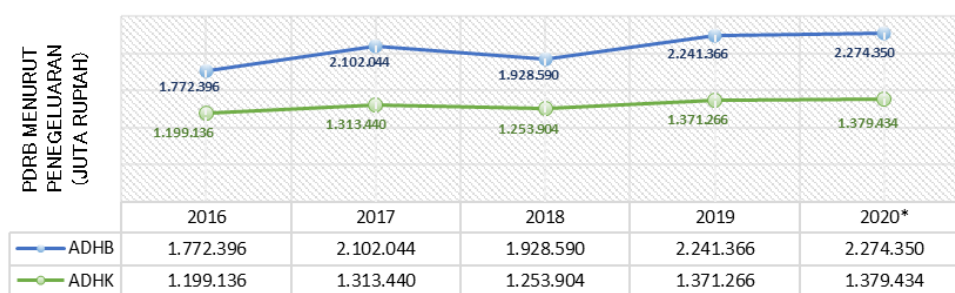
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu **Lapangan Usaha** dan **Pengeluaran**. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen pengeluarannya.



PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 – 2020, Komponen Rumah Tangga di tahun 2020 Jumlah pengeluarannya paling banyak yaitu sebesar 1.206.837 Juta Rupiah. PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 – 2020 menunjukkan Komponen Pengeluaran paling banyak yaitu komponen Konsumsi Rumah Tangga, di tahun 2020 sebesar 1.683.728 Juta Rupiah.

PDRB menurut pengeluaran ADHB maupun ADHK menunjukkan tren positif di tahun belakangan walupun sempat mengalami penurunan di tahun 2018.



Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-9 Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020

Kontribusi pengeluaran menurut komponen pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-11 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020

PDRB Menurut Pengeluaran ADHB

N o	KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.433.184	1.641.910	1.550.665	1.724.725	1.683.728
2	Konsumsi LNPRT	124.057	151.073	134.980	163.581	158.159
3	Konsumsi Pemerintah	926.571	1.128.252	1.000.922	1.157.682	1.071.467
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	590.099	726.536	671.041	758.230	727.710
5	Perubahan Inventori	14.326	27.771	18.274	30.816	33.319
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	1.315.840	1.573.497	1.447.292	1.593.668	1.400.033
PDRB		1.772.396	2.102.044	1.928.590	2.241.366	2.274.350

Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021



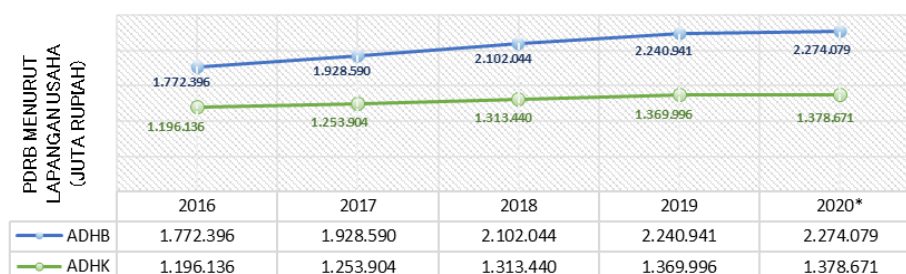
PDRB Menurut Pengeluaran ADHK

No	KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.089.942	1.188.963	1.140.066	1.225.592	1.208.837
2	Konsumsi LNPRT	97.335	111.790	102.324	117.350	112.349
3	Konsumsi Pemerintah	650.394	717.768	671.435	734.364	678.710
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	432.369	504.861	479.988	517.410	490.214
5	Perubahan Inventori	9.368	16.843	11.482	18.344	19.773
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		1.199.136	1.313.440	1.253.904	1.371.266	1.379.434

Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 1.178.990,6 Juta di tahun 2020 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi 544.768,2 Juta di tahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 706.852,3 Juta di tahun 2020 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi 305.050,8 Juta di tahun 2020. PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB maupun ADHK menunjukkan tren positif atau terus meningkat. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-10 Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020



Tabel 2-12 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

NO	LAPANGAN USAHA	RDRB ADHB (Juta Rupiah)					RDRB ADHK (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	956.737	1.028.503	1.100.364	1.157.248	1.179.031	644.794	669.594	688.798	704.776	707.474
2	Pertambangan dan Penggalan	12.295	12.652	13.546	14.543	14.247	8.871	9.195	9.739	10.343	10.081
3	Industri Pengolahan	29.551	32.040	34.829	38.189	37.524	21.618	22.494	23.553	25.335	24.748
4	Pengadaan Listrik & Gas	690	760	884	890	1.045	410	412	465	467	547
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	187	196	210	214	218	140	143	152	154	156
6	Konstruksi	85.385	93.074	104.538	119.483	112.092	60.250	63.405	68.598	75.364	70.788
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil & Sepeda Motor	96.939	104.979	116.939	129.919	128.277	67.172	70.813	75.918	81.223	77.716
8	Transportasi dan Pergudangan	52.404	55.446	58.558	61.081	59.582	34.761	36.017	37.595	38.885	37.775
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.410	2.711	2.999	3.172	2.863	1.683	1.796	1.952	2.039	1.860
10	Informasi dan Komunikasi	74.810	81.477	87.585	98.024	106.857	66.356	71.025	75.506	82.763	90.230
11	Jasa Keuangan & Asuransi	25.312	28.299	30.812	33.122	35.604	17.428	18.496	19.105	20.001	21.564
12	Real Estat	13.050	13.819	14.932	15.215	15.334	8.817	9.170	9.746	9.840	9.971
13	Jasa Perusahaan	745	813	860	890	636	510	526	542	558	388
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.012	443.356	501.593	534.351	544.768	244.426	261.201	281.265	298.619	305.051
15	Jasa Pendidikan	23.188	25.485	28.129	29.402	30.795	15.597	16.202	16.967	17.218	17.577
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.517	1.651	1.788	1.898	2.109	1.167	1.212	1.268	1.320	1.409
17	Jasa lainnya	3.164	3.331	3.479	3.724	3.368	2.137	2.204	2.272	2.362	2.099
PDRB		1.772.396	1.928.590	2.102.044	2.241.366	2.274.350	1.196.136	1.253.904	1.313.440	1.371.266	1.379.434

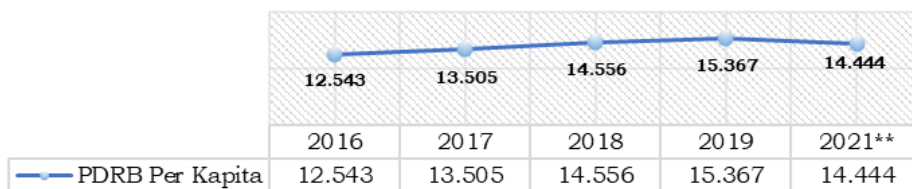
Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021



5. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan setiap tahunnya, jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo di tahun 2020 mencapai 15,450 juta rupiah yang mana di tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar 12,54 juta rupiah dan 15,367 juta rupiah di tahun 2019.

Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan tingkat pendapatan masyarakat. Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Nagekeo dari Tahun 2016 - 2020.

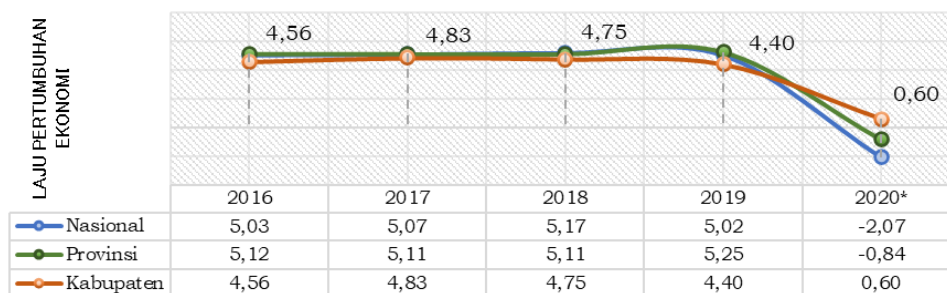


Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2021

Grafik 2-11 PDRB Per Kapita Tahun 2016 – 2020

6. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami perlambatan signifikan di Tahun 2020 menjadi 0,62 yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 4,40. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka mengendalikan penyebaran virus *Covid-19*.



Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

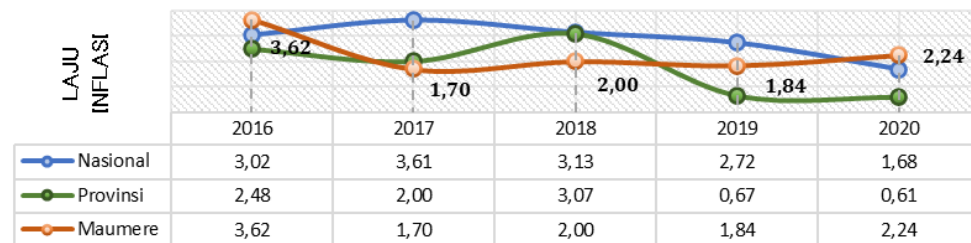
Grafik 2-12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Namun demikian Laju Pertumbuhan Ekonomi Nagekeo masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional yang masing pada tahun 2020 berada di angka minus (-) 0,84 dan minus (-) 2,07.

7. Inflasi

Saat ini laju inflasi untuk wilayah Kabupaten Nagekeo belum dapat dihitung sehingga untuk gambaran umum saat ini memakai laju inflasi kota terdekat yaitu Kota Maumere. Adapun laju inflasi di Kota Maumere adalah sebagai berikut:

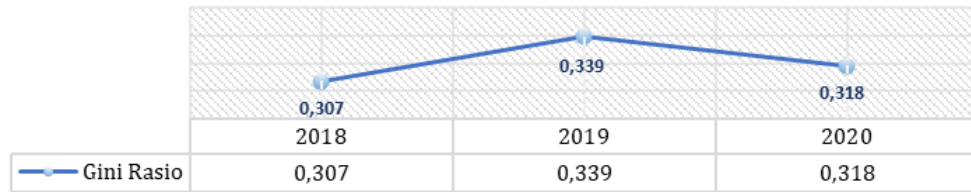


Sumber: BPS Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo, 2021

Grafik 2-13 Laju Inflasi Kota Maumere dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional 2016 – 2020

8. Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (**Gini Ratio**). Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan **Rendah** (Gini Ratio < 0,3), **Sedang/Moderat** ($0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$) dan **Tinggi** (Gini Ratio > 0,5). Indeks Gini Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2021

Grafik 2-14 Indeks Gini 2018 – 2020

Indeks Gini Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 berada pada kategori ketimpangan “**Moderat**” dan bergerak tipis dari kondisi tahun 2018. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan; pasar tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja yang semakin seimbang antara pekerja formal dan informal; dan semakin meratanya distribusi kekayaan. Ketiga faktor kunci ini terus didorong melalui perkuatan sinergisitas progam-program jaring pengaman sosial dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa/kelurahan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2-13 Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020

Uraian	Capaian Per Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf (%)	99,54	99,55	99,13	98,50	94,50

Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Angka Melek Huruf Kabupaten Nagekeo tahun 2020 sebesar 94,50% Angka Melek Huruf terus menurun dari tahun 2017 yang berada di angka 99,55% yang meningkat dari angka 99,54% di tahun 2016.

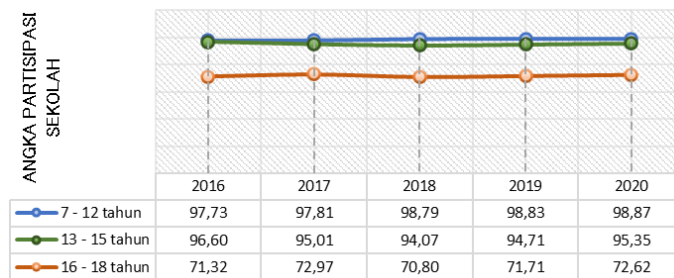


2. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dipakai beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

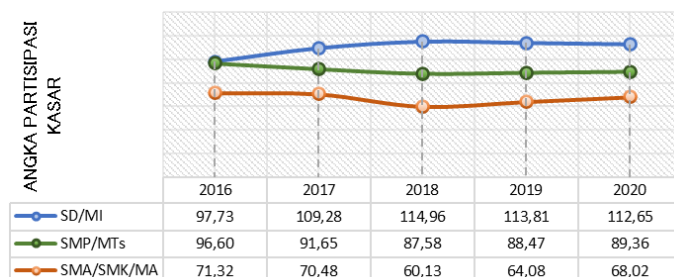


Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Grafik 2-15 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020

Angka Partisipasi Kasar

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



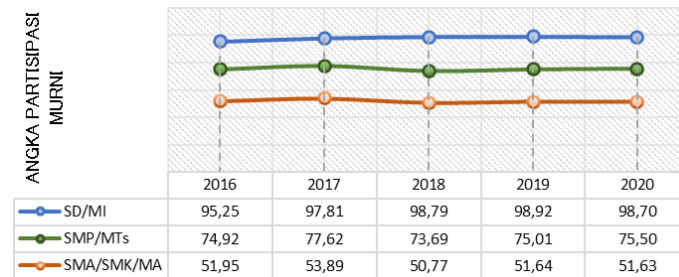
Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Grafik 2-16 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020



Angka Partisipasi Murni

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.



Sumber : BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

**Grafik 2-17 Angka Partisipasi Murni
Tahun 2016 – 2020**

Secara umum, tingkat partisipasi cenderung berbanding terbalik dengan usia. Semakin tinggi usia, tingkat partisipasi sekolah semakin menurun, Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kemudahan akses pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau sederajat, Jenjang tinggi seperti SMA atau Sederajat dan Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang lebih susah dijangkau baik karena ketersediaan infrastruktur yang terbatas maupun biaya pendidikan yang lebih tinggi.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator kesehatan dalam penilaian SDGs adalah status gizi balita, yang diukur berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan. Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Berat Bayi Lahir Rendah

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat <2.500gram tanpa memandang usia kehamilan. BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan berhubungan dengan kejadian stunting.



Selain menjadi salah satu penyebab utama kematian pada masa neonatal, bayi dengan BBLR memiliki risiko morbiditas dan mortalitas, penyakit kronis dan tumbuh kembang yang terhambat. Berdasarkan studi epidemiologi, bayi dengan BBLR memiliki risiko terjadinya stunting daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal.

Tabel 2-14 Perkembangan BBLR Tahun 2018 - 2020

NO	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR DITIMBANG								
		2018			2019			2020		
		JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%
1	DANGA	825	52	6,30	770	40	5,19	771	50	6,49
2	JAWAKISA	144	7	4,86	128	6	4,69	143	11	7,69
3	BOAWAE	605	69	11,40	530	55	10,38	605	5	0,83
4	MAUPONGGO	327	29	8,87	310	-	-	335	1	0,30
5	MAUNORI	222	13	5,86	200	17	8,50	214	4	1,87
6	NANGARORO	283	14	4,95	316	2	0,63	334	20	5,99
7	KABUREA	102	9	8,82	91	11	12,09	104	9	8,65
	KABUPATEN	2.508	193	7,70	2.345	131	5,59	2.506	100	3,99

Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Tabel 2-15 Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2020

NO	PUSKESMAS	BALITA TAHUN 2018			BALITA TAHUN 2019			BALITA TAHUN 2020		
		JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%	JUMLAH	KASUS	%
1	MAUPONGGO	1.409	572	40,60	1.434	347	24,20	1.627	337	20,71
2	MAUNORI	950	324	34,11	907	319	35,17	997	240	24,07
3	NANGARORO	1.108	392	35,38	1.335	540	40,45	1.439	322	22,38
4	BOAWAE	2.222	963	43,34	2.577	338	13,12	2.895	241	8,32
5	JAWAKISA	551	172	31,22	589	143	24,28	641	116	18,10
6	DANGA	2.083	664	31,88	2.520	371	14,72	2.374	157	6,61
7	KABUREA	415	140	33,73	422	36	8,53	416	20	4,81
	KABUPATEN	8.738	3.227	36,93	9.784	2.094	21,40	10.389	1.433	13,79

Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan, 2021

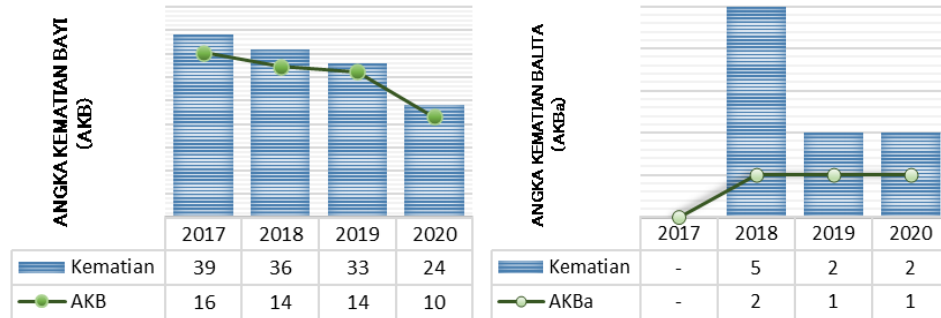
Perkembangan BBLR dan Balita Stunting mengalami tren positif, jumlah BBLR dan Balita Stunting terus menurun, persentase di tahun 2020 adalah 3,99% dari 2.506 bayi baru lahir ditimbang tahun 2020 untuk BBLR dan 13,79% dari 10.389 balita untuk stunting.



4. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) ditampilkan dalam grafik berikut:

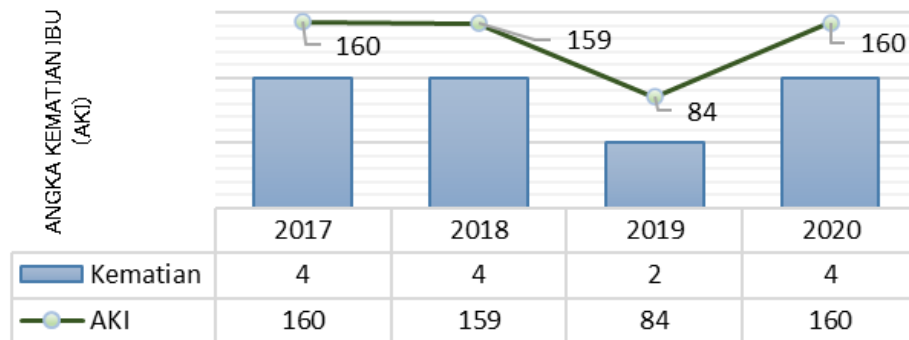


Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021

Grafik 2-18 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 - 2020

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) ditampilkan dalam grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021

Grafik 2-19 Angka Kematian Ibu Tahun 2017 - 2020

AKI di Kabupaten Nagekeo masih tinggi, dimana target SDGs 2030 yaitu AKI: 70 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Kabupaten Nagekeo di tahun 2020 berada di angka 160 walaupun sempat turun di tahun 2019. Sedangkan untuk AKB dan AKBa berada di angka 10 untuk AKB dan 1 untuk AKBa, angka - angka ini sudah melebihi target SDGs 2030 yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 25 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBa, kelahiran hidup di Kabupaten Nagekeo sebesar 2.506 kelahiran di tahun 2020.





5. *Coronavirus Disease 2019*

Wabah COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan China akhir Desember 2019. *World Health Organization* (WHO) menamai virus tersebut *Novel Coronavirus (2019-nCoV)* pada 12 Januari 2020 dan kemudian mengubahnya menjadi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* pada 12 Februari 2020. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global.



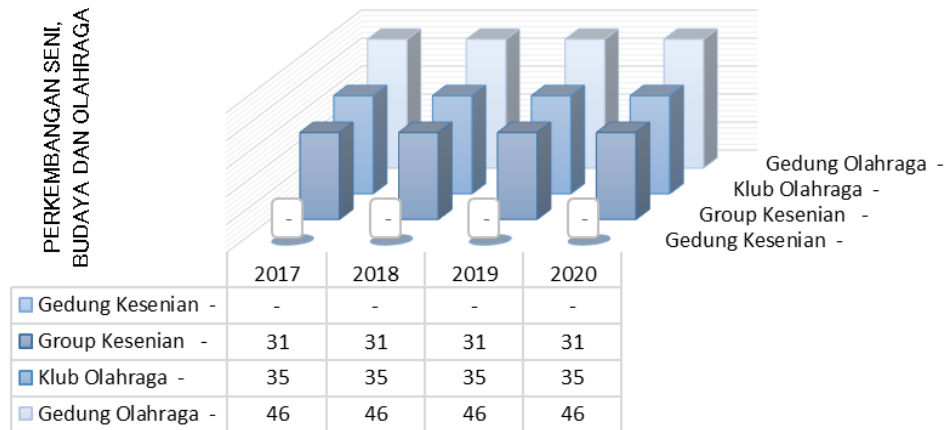
Gambar 2-9 Kasus Covid-19 Tahun 2020

Di Kabupaten Nagekeo kasus pertama terkonfirmasi terjadi pada bulan Mei 2020, sebanyak 3 orang terkonfirmasi saat itu. Jumlah itu tidak bertambah sampai dengan bulan juli, hal ini tidak lepas dari kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* oleh Satgas penanganan di daerah. Posko - posko dibentuk di perbatasan untuk mengawasi perlintasan orang antar wilayah. Bulan agustus angka terkonfirmasi meningkat dan terus bertambah sampai akhir tahun 2020. Pelonggaran atas aktivitas perlintasan orang antar wilayah/daerah untuk mencegah dampak ekonomi memberikan kontribusi pada kondisi ini. Namun begitu angka kematian atas penyakit ini tidak ada sampai dengan akhir tahun 2020. Penambahan kasus terkonfirmasi diimbangi juga dengan angka kesembuhan. Sampai dengan akhir tahun 2020 hanya tersisa 2 orang yang belum sembuh dari 25 kasus terkonfirmasi.



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Grafik 2-20 Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2020

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

a) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-16 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 2016-2020

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD/MI	177	177	177	177	177
Jumlah Ruang Kelas SD/MI	1.201	1.217	1.223	1.223	1.297
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	19.036	19.663	19.657	16.586	15.521
Rasio Gedung SD/MI terhadap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun	93	90	90	107	114

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan jumlah penduduk, sedangkan jumlah sekolah SD/MI tidak bertambah.



Sementara itu rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun atau usia sekolah setara SMP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-17 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2016-2020

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SMP/MTs	56	56	56	56	56
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs	353	353	353	353	416
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	9.718	9.917	10.770	7.096	10.474
Rasio Gedung SMP/MTs terhadap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun	58	56	52	79	53

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah dari tahun 2016-2020 selalu mengalami naik turun, hal ini mengikuti perkembangan penduduk usia 13 - 15 tahun. Jumlah Sekolah SMP/MTs tidak mengalami penambahan dari segi jumlah.

b) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-18 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2016 - 2020

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Guru SD/MI	1.757	1.794	1.803	1.734	1.768
Jumlah Murid SD/MI	20.322	20.019	20.122	19.167	18.499
Rasio per 1.000 SD/MI	86	85	90	90	95
Perbandingan Guru-Murid	12	12	11	11	10

Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Jumlah guru SD/MI cenderung menurun jumlahnya dan di sisi lain jumlah murid SD/MI juga menurun angkanya sehingga perbandingan guru- murid cenderung menurun, dimana tahun 2020 perbandingan guru-murid adalah 1: 10 yang artinya 10- 11 murid SD/MI dilayani oleh 1 guru.



Rasio guru terhadap murid pada pendidikan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-19 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2016-2020

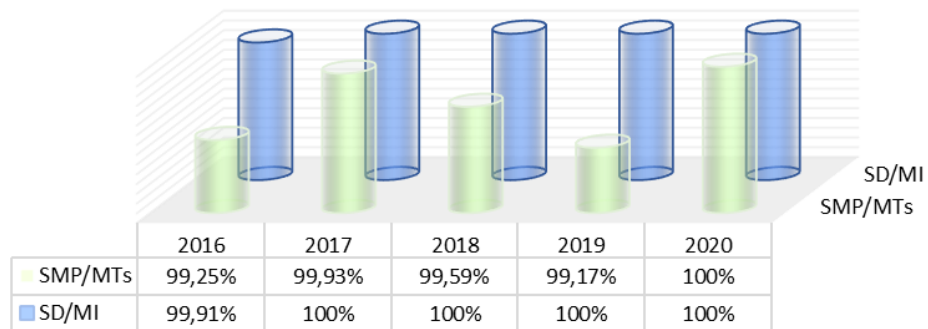
RATIO GURU-MURID	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Guru SMP/MTs	844	864	864	835	869
Jumlah Murid SMP/MTs	8.536	8.734	9.039	9.021	9.092
Rasio Guru-Murid per 1.000 SMP/MTs	99	99	95	95	95
Perbandingan Guru-Murid	10	10	10	11	10

Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SMP/MTs tidak jauh berbeda dengan rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SD/MI. Rasio guru murid di tahun 2020 adalah 1:10 dimana 1 guru melayani kurang lebih 10-11 murid.

c) Angka Kelulusan

Data Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo.2021

Grafik 2-21 Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan SD dan SMP selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 untuk SD yaitu 99.91%, SMP 99.25% dan tahun 2020 SD dan SMP 100%.



2. Kesehatan

a) Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan ditentukan oleh rasio-rasio keseimbangan yang meliputi rasio jumlah fasilitas Kesehatan berbanding jumlah penduduk dan rasio tenaga dokter (tenaga Kesehatan) berbanding jumlah penduduk.

Tabel 2-20 Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2016-2020

FASILITAS KESEHATAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	JUMLAH	RASIO	JUMLAH	RASIO	JUMLAH	RASIO	JUMLAH	RASIO	JUMLAH	RASIO
Rumah Sakit	1	0,71	1	0,70	1	0,69	1	0,69	1	0,63
Puskesmas	7	4,95	7	4,90	7	4,85	7	4,80	7	4,38
Pustu	34	24,06	34	23,81	36	24,93	34	23,32	34	21,29

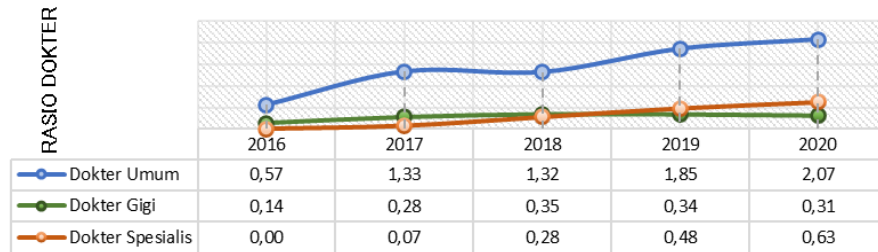
Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya terus menurun hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk sedangkan jumlah Fasilitas Kesehatan tidak bertambah. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 4,43 yang artinya bahwa cakupan pelayanan 1 puskesmas jika dirata-ratakan adalah 1 puskesmas melayani sekitar 22.819 penduduk. Jika melihat dari aspek wilayah kerja dengan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan maka nagekeo sudah memenuhi amanat permenkes dimaksud. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah menjadi pertimbangan dalam membangun fasilitas Kesehatan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan.



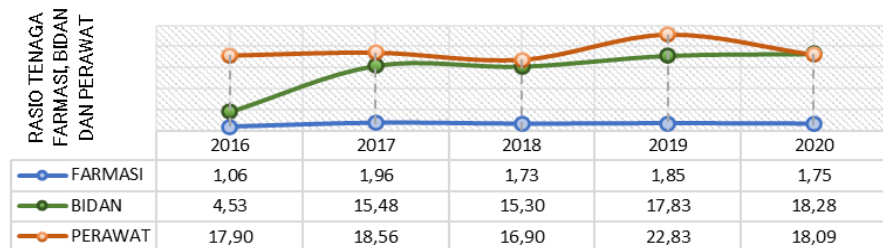
b) Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-22 Rasio Dokter per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-23 Rasio Bidan, Perawat dan Farmasi per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020

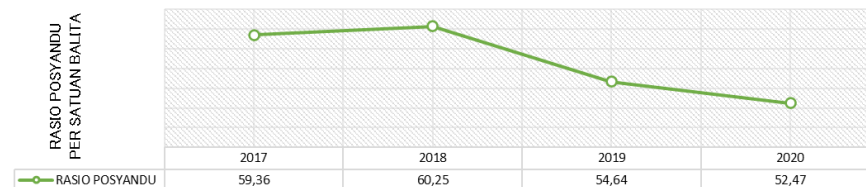
Rasio tenaga Kesehatan terus membaik dari tahun ke tahun, penambahan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam pengadaan tenaga Kesehatan baik lewat jalur rekrutmen ASN (PNS dan PPK) maupun lewat jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT). Perbaikan rasio paling signifikan adalah jumlah bidan dimana di tahun 2020 sudah mencapai 18,28 per 10.000 penduduk. Sedangkan dokter spesialis di tahun 2020 rasionya berada di angka 0.63 per 10.000 penduduk dan dokter umum 2,07 per 10.000 penduduk yang artinya 1 dokter dapat melayani sekitar 4.841 penduduk.





c) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan KB. Tujuan posyandu antara lain: Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.



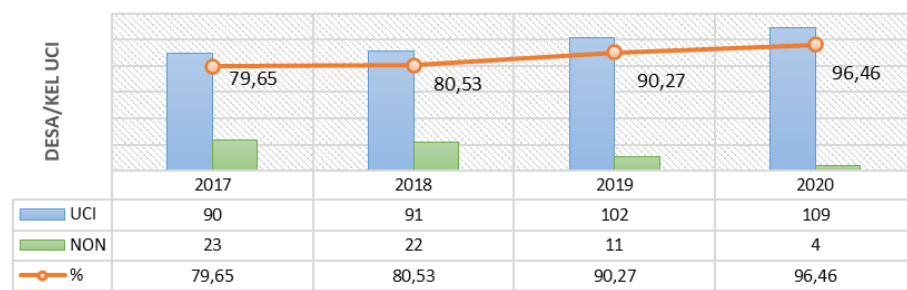
Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Grafik 2-24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2017-2020

Rasio Posyandu di Kabupaten Nagekeo tergolong memadai dan setiap tahunnya mengalami perbaikan dari segi rasio cakupan pelayanannya. Dimana di tahun 2020 cakupan pelayanan posyandu sudah mencapai 1: 52,47 yang artinya 1 Posyandu melayani 52 – 53 Balita.

d) Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun).



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Grafik 2-25 Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2017-2020

Persentase Desa/Kelurahan UCI di tahun 2020 sudah mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 109 dari 113 Desa/Kelurahan di Nagekeo, tersisa 4 desa/ kelurahan yang belum masuk kategori Desa/Kelurahan UCI.

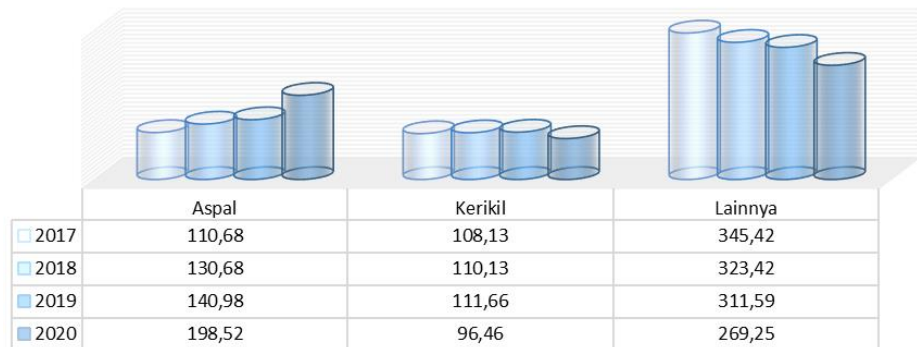


3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

Jalan

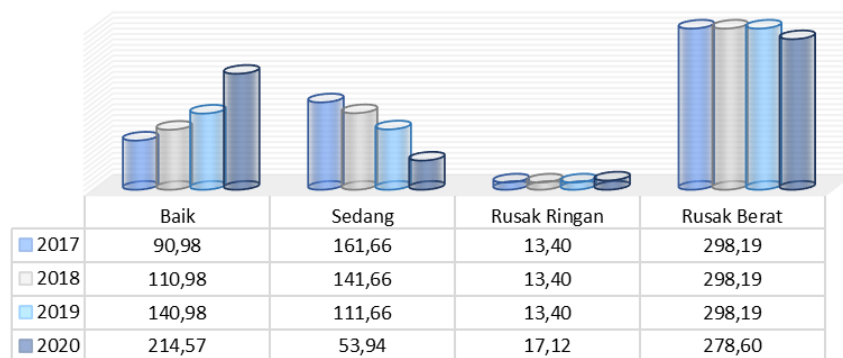
Jenis permukaan jalan diidentifikasi berdasarkan perkerasan untuk melihat kualitas jalan dalam peningkatan aksesibilitas suatu wilayah. Panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2017-2020 ditampilkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Grafik 2-26 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2020

Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penambahan panjang dari 110,68 KM pada tahun 2017 menjadi 198,52 kilometer di tahun 2020 ini berbanding lurus dengan pengurangan panjang jalan dengan jenis permukaan lainnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Grafik 2-27 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2020



Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sudah mencapai 214,57 KM yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan jalan pada kondisi sedang, hal ini juga menunjukkan kinerja dalam penambahan maupun peningkatan kondisi jalan. Namun intervensi terhadap jalan dengan kondisi rusak berat belum cukup berarti, intervensi baru terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan kondisi jalan sepanjang 20 KM.

Jembatan

Kondisi topografi Kabupaten Nagekeo mengharuskan dibangunnya banyak jembatan dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, saluran dan kondisi terpisah oleh kondisi alam. Secara keseluruhan di Kabupaten Nagekeo terdapat 51 jembatan dengan Panjang total 892 M dengan dan sebagian besar berada dalam kondisi baik dan kondisi yang lain adalah rusak ringan namun masih bisa dilewati kendaraan.

Tabel 2-21 Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020

NO	RUAS JALAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN M	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang
1	Aemali - Danga	12	256	10	2	
2	Boawae - Olakile - Batas Ngada	3	38	2	1	
3	Rega - Sawu	4	35	4		
4	Raterunu - Watuapi	2	39	2		
5	Kajulaki - Malabai	5	58	2	3	
6	Dalam Kota Mbay	2	8	2		
7	Boasabi - Alorawe - Nagerawe	2	70	2		
8	Roe - Ratedao - Nebe	5	29,5	3	2	
9	Raja - Jawakisa	2	35	2		
10	Mala - Watugase	1	7,5	1		
11	Mauponggo - Ngera - Puuwada	4	105	4		
12	Mauponggo - Maunori	1	60			1
13	Aewoe - Wayupe	2	23	1	1	
14	Olakile - Nagerawe	2	75	2		
15	Lena - Sorowea	1	8	1		
16	Kotakeo - Mbeku	2	30	2		
17	Kotakeo - Pusu - Ua - Liabanga	1	15	1		
TOTAL		51	892	41	9	1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021



JEMBATAN



PANJANG TIAP KONDISI JALAN





b) Irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten terpanjang ada di Kecamatan Boawae dan Mauponggo yaitu 50.086 M dan 51.271 M yang mengairi Luas Lahan Fungsional sebesar 617,74 Ha dan 473,77 Ha.

Tabel 2-22 Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020

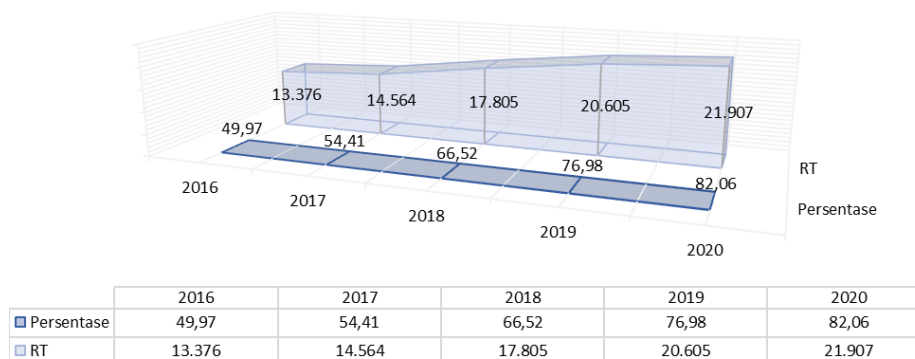
NO	KECAMATAN	LUAS POTENSIAL (HA)	LUAS FUNGSIONAL (HA)	PANJANG SALURAN INDUK (m)	PANJANG SALURAN SEKUNDER (m)	PANJANG SALURAN TERSIER (m)	TOTAL PANJANG IRIGASI
1	Boawae	902,37	617,74	39.566	7.523	2.997	50.086
2	Mauponggo	566,67	473,77	42.045	5.854	3.372	51.271
3	Nangaroro	135	67,3	10.554	2.443	543	13.540
5	Keo Tengah	73	54	5.439	62	43	5.544
6	Wolowae	498	442	4.968	629	1.130	6.727
7	Aesesa	889	623,7	7.310	2.701	-	10.011
TOTAL		3.064,03	2.278,50	109.881,80	19.211,90	8.085,00	137.178,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

c) Air Bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program penyediaan air bersih baik yang dilaksanakan oleh BLUD-SPAM maupun pelaksanaan program PAMSIMAS.

Perkembangan rumah tangga berakses air minum pada tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

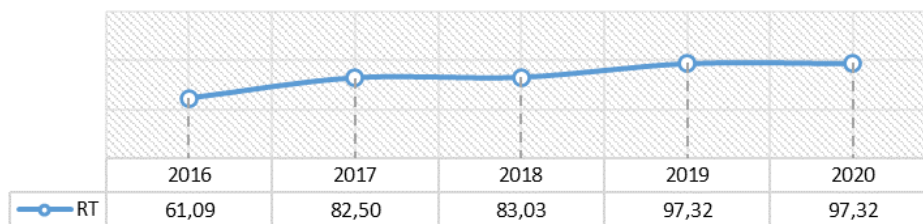


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Grafik 2-28 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016-2020



d) Sanitasi



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Grafik 2-29 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2016-2020

Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat secara pesat dari posisi 61,09% di tahun 2016 dan mencapai 97,32% pada tahun 2020.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu 13.245 unit dan mengalami penurunan ke angka 11.820 unit pada tahun 2020. Penurunan angka RTLH ini dilaksanakan melalui program pemerintah dengan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dialokasikan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Desa.

Tabel 2-23 Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020

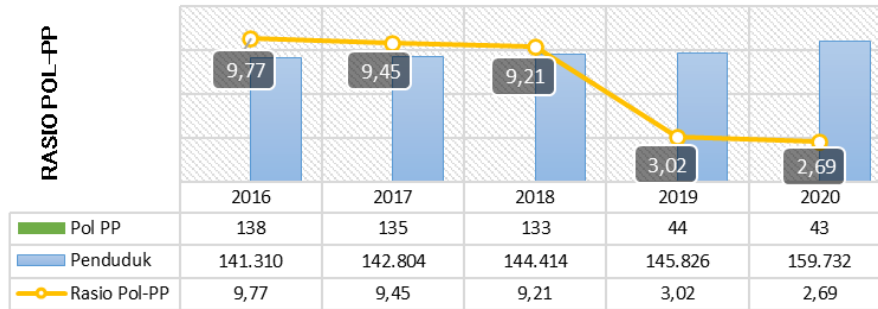
	2019		2020	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Rumah Layak Huni (RLH)	13.186	49,89	14.876	55,72
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	13.245	50,11	11.820	44,28
TOTAL	26.431		26.696	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

5. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

Rasio jumlah Pol-PP terus menurun tiap tahunnya, penurunan drastis terjadi di tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memperpanjang kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) yang mana sebelumnya personil Pol-PP banyak berasal dari THL, rekrutan baru tidak sebanyak jumlah sebelumnya.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Grafik 2-30 Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2016 - 2020

Bencana

Kejadian bencana di Kabupaten Nagekeo masih tinggi, kejadian ini didominasi oleh bencana kebakaran disusul oleh bencana tanah longsor dan bencana banjir.

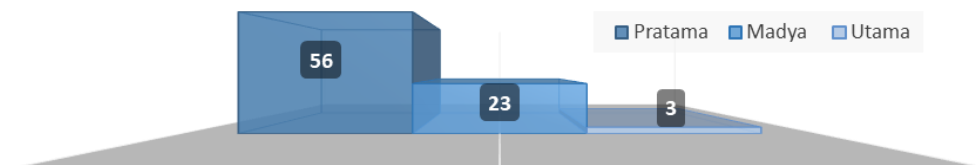
Tabel 2-24 Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2020

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN		
		2018	2019	2020
1	Kebakaran	21	14	21
2	Banjir	6	22	10
3	Tanah Longsor	22	13	9
4	Puting Beliung	11	8	8
5	Gagal Panen	1	-	-
6	Kekeringan	-	7	13
7	Abrasi Pantai	-	-	5
TOTAL		61	64	66

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kriteria Destana/Katana Kabupaten Nagekeo tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Grafik 2-31 Destana/Katana Tahun 2020



6. Sosial

PMKS

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Di Kabupaten Nagekeo terdapat 19 jenis PMKS yang dari segi jumlah bertambah tiap tahunnya. Jumlah PMKS terbanyak berasal dari jenis fakir miskin yang pada tahun 2020 berjumlah 76.539 jiwa. Capaian penanganan terhadap PMKS terbilang baik dengan capaian di atas 90an persen. Penanganan dari kelompok jenis disabilitas yang masih kurang, di tahun 2020 dari 866 jiwa yang tertangani hanya 81 kemudian belum adanya penanganan terhadap Anak Balita Terlantar, BWBLP dan waria.

PSKS

PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2-25 PSKS Tahun 2018 - 2020

NO	PSKS	2018	2019	2020
1	Pekerja Sosial Profesional			
	- Pekerja Sosial Anak	2	2	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat			
	- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	15	15	15
	- Pendamping Program ASLUT	6	6	6
	- Pendamping KUBE	8	8	8
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	41	41	41
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (9 Panti)	9	9	9
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8	8	8
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan			
	- Kecamatan Aesesa	1	1	1
	- Kecamatan Aesesa Selatan	1	1	1
	- Kecamatan Wolowae	1	1	1
	- Kecamatan Nangaroro	1	1	1
	- Kecamatan Keo Tengah	1	1	1
	- Kecamatan Boawae	1	1	1
	- Kecamatan Mauponggo	1	1	1
	TOTAL	96	96	96

Sumber: Dinas Sosial, 2021



Tabel 2-26 Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2016-2020

NO	JENIS PMKS	2016		2017		2018		2019		2020	
		JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI	JUMLAH	PMKS TERTANGANI
1	Anak Balita Terlantar	295		295		139		159		159	
2	Anak Terlantar	569		569		594		432	147	432	150
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	45	45	57	57	18	18	24	24	28	28
4	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	57	-	57	18	18	24	24	28	28
5	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-		1	1	1	1		
6	Lanjut Usia Terlantar	725	512	725	522	882	182	4.124	1.743	4.124	1.248
7	Penyandang Disabilitas	937	35	937	68	1.059	8	866	130	866	81
8	Waria	16		16		16		16		16	
9	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	98		98		110		110		110	
10	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	38	38	38	38	33	33	33	33	40	40
11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5		5		1		1			
12	Korban Trafficking	-		-		1	1	1	1		
13	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-		-		-		24	24		
14	Korban Bencana Alam	9.422	9.422	10.146	10.146	11.165	11.165	13.883	13.883	4.560	4.560
15	Korban Bencana Sosial	223	223	537	537	75	75	120	120	925	925
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-		-		615		595		595	
17	Fakir Miskin	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	76.539	76.539
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15		15		22		22		22	
19	Komunitas Adat Terpencil	360	360	360	360						
JUMLAH		80.769	78.713	81.819	79.806	82.770	79.522	88.456	84.151	88.444	83.599
PERSENTASE		97,45%		97,54%		96,08%		95,13%		94,52%	

Sumber: Dinas Sosial, 2021



2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Pelatihan kompetensi bagi Pencari Kerja dilakukan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja/lapangan usaha untuk mengurangi pengangguran, sekaligus untuk mempercepat proses penanggulangan pengangguran. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan Tenaga Kerja yang ditempatkan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-27 Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020

TENAGA KERJA	2016	2017	2018	2019	2020
Dilatih	32	9	15	86	69
Ditempatkan	7	27	15	45	69
Persentase	22%	300%	100%	52%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Secara jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahunnya terus bertambah walaupun tidak semua ditempatkan seperti yang terjadi pada tahun 2016, selebihnya bahwa pelatihan tenaga kerja sudah disesuaikan dengan permintaan akan tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari posisi 23 kasus yang dilaporkan di tahun 2016 menurun signifikan menjadi 3 kasus di tahun 2020 dan atas setiap laporan tersebut semuanya dapat diselesaikan.

Tabel 2-28 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan	23	20	18	12	3
2	Kasus yang ditangani	23	20	18	12	3
3	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, P3A, 2021



3. Pangan

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan kebutuhan untuk pemenuhan pangan masyarakat setempat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketersediaan pangan di Kabupaten Nagekeo terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, di tahun 2019

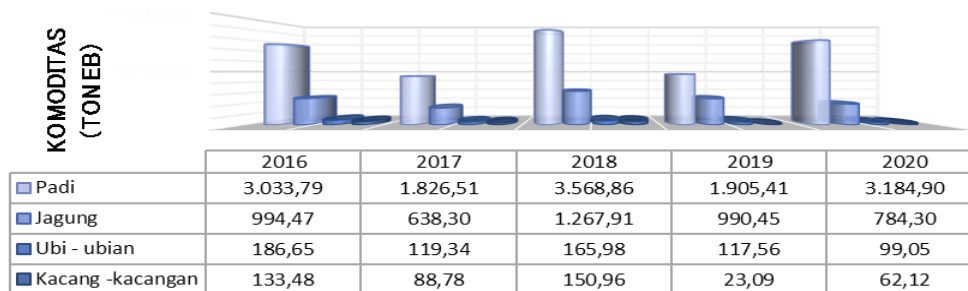
Tabel 2-29 Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2019

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	71,58	74,43	75,92	87,16	78,79

Sumber: Dinas Pangan, 2020

Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengangani potensi kekurangan pangan di masa mendatang, pada tahun 2020 ada 3.184,9 Ton EB (Equivalen Beras) padi diikuti dengan persediaan komoditas jagung sebesar 784,3 Ton EB sebagai cadangan pangan.



Sumber: Dinas Pangan, 2021

Grafik 2-32 Cadangan Pangan Tahun 2016-2020

4. Lingkungan Hidup

Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep IKLH dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kualitas Lingkungan yaitu Kualitas Air/Sungai, Kualitas Udara, dan Tutupan Hutan.



**Tabel 2-30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2016 - 2020**

INDIKATOR	CAPAIAN PERTAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	57,50	57,50	70,00	68,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A	N/A	88,02	91,28	91,82
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	27,03	27,03	27,03	27,03	27,04
IKLH			54,47	59,20	58,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

IKLH Kabupaten Nagekeo masih berada di angka 56,76 dan masuk pada kategori “**Kurang**”, kondisi kurang ini sangat dipengaruhi IKTL dan IKA yang masih rendah.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut disajikan capaian pelayanan Dokumen Kependudukan periode tahun 2016 - 2020.

**Tabel 2-31 Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan
Tahun 2016 - 2020**

NO	JENIS LAYANAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kartu Keluarga (KK)	85,04	87,98	78,87	83,15	86,63
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	66,75	72,65	79,01	80,65	81,33
3	Akte Kelahiran	25,49	30,46	36,63	41,09	44,39
4	Akte Perkawinan	23,70	30,13	46,54	56,73	61,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Sampai dengan tahun 2020 jenis pelayanan dokumen kependudukan dengan cakupan yang masih rendah adalah Penerbitan Akte Kelahiran, per kondisi 2020 baru mencapai 44,39% akta yang diterbitkan, selain itu cakupan Penerbitan Akte Perkawinan juga masih pada level yang belum cukup baik, cakupannya masih berada di angka 62,63%.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-Rata Jumlah LPM

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberi pelatihan ataupun bantuan agar dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi ataupun kualitas hidup masyarakat.

Jumlah LPM mengalami penurunan di tahun 2020 namun untuk Jumlah kelompok binaan LPM tetap berada di angka 377 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016.



Tabel 2-32 Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LPM	113	116	116	116	97
2	Kelompok Binaan LPM	377	377	377	377	377
3	Rata-rata	3,34	3,34	3,34	3,34	3,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Jumlah Kelompok Binaan PKK menurun drastis di tahun 2020 menjadi 1.151 dari tahun sebelumnya sebesar 2.708 kelompok. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan virus *covid-19*.

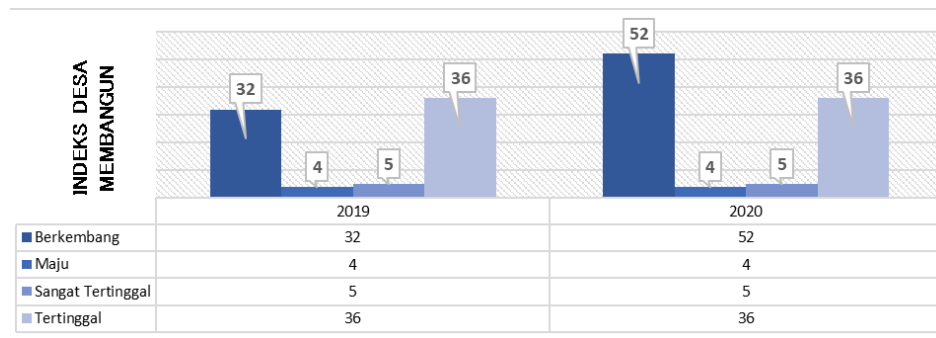
Tabel 2-33 Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKK	113	116	121	121	121
2	Kelompok Binaan PKK	2.615	2.708	2.708	2.708	1.151
3	Rata-rata	23,14	23,34	22,38	22,38	9,51

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021

Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Mengacu pada IDM di Kabupaten Nagekeo masih terdapat 5 **Desa Sangat Tertinggal** yang tersebar di Kecamatan Aesesa: 1 Desa, Aesesa Selatan: 2 Desa dan Keo Tengah: 2 Desa. Sedangkan **Desa Maju** berjumlah 4 desa yang semuanya berada di Kecamatan Aesesa. **Desa Tertinggal** sebanyak 36 desa dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Nangaroro dengan 10 desa dan **Desa Berkembang** sebanyak 52 desa dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Boawae dengan 15 desa.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021

Grafik 2-33 Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2020

7. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Rasio Akseptor KB

Peserta KB setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tahun 2020 peserta KB mencapai 11.222 dengan Rasio Aseptor KB 64,95% dari 17.278 PUS.

Tabel 2-34 Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020

URAIAN	CAPAIAN PER TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
PUS	16.945	17.099	16.979	16.992	17.278
Peserta KB	9.467	9.611	10.221	10.923	11.222
Rasio Akseptor KB	55,87	56,21	60,2	64,28	64,95

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

8. Perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Fasilitas perhubungan yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah 2 Pelabuhan, 1 Pelabuhan Niaga Marapokot serta 1 Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) Marapokot. Kabupaten Nagekeo belum memiliki fasilitas lain seperti terminal ataupun bandar udara.

Tabel 2-35 Jumlah Fasilitas Perhubungan

FASILITAS PERHUBUNGAN	JUMLAH
Terminal Bis	-
Bandar Udara	-
Pelabuhan Laut	2

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021



9. Perpustakaan

Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat menyediakan sarana bahan bacaan untuk masyarakat.

Tabel 2-36 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2020

PENGUNJUNG	JUMLAH PENGUNJUNG			
	2017	2018	2019	2020
Pelajar	15.577	13.655	2.970	1.021
Umum/Mahasiswa	2.454	2.240	12.977	822
TOTAL	18.031	15.895	15.947	1.843

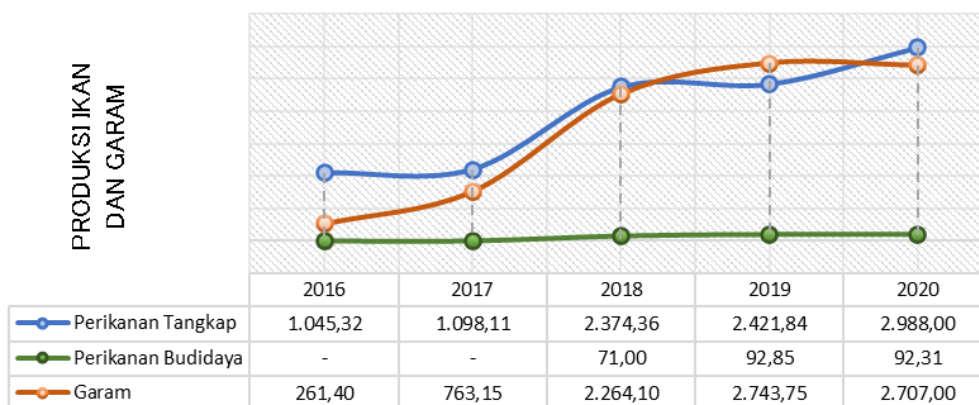
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2021

Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun 2020 mengalami penurunan drastis hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, pembatasan aktivitas masyarakat memberi pengaruh kepada kondisi ini.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami tren peningkatan tiap tahunnya, capaian tahun 2020 sebanyak 2.988 ton untuk perikanan tangkap dan 92,31 ton untuk perikanan budidaya, produksi garam juga meningkat setiap tahunnya dan berada di angka 2.707 ton di tahun 2020.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Grafik 2-34 Produksi Ikan dan Garam Tahun 2016 - 2020



2. Pariwisata

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 lewat pembatasan pergerakan masyarakat antar wilayah lewat kebijakan PSPB, PPKM dan lain sebagainya. Selain itu kebijakan secara global dalam penanganan covid-19 dengan adanya pembatasan perpindahan orang antar negara memberi dampak kepada tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara.

Tabel 2-37 Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2016 - 2020

WISATAWAN	2016	2017	2018	2019	2020
Mancanegara	197	371	220	324	-
Nusantara	9.082	8.377	12.507	10.247	7.416
Total	9.279	8.748	12.727	10.571	7.416
Rata-rata lama tinggal	1	1	1	1,5	1,5

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

3. Pertanian

Pemanfaatan Lahan

Kondisi pemanfaatan lahan potensial baik untuk lahan basah maupun kering dari tahun 2017 – 2020 cenderung stagnan. Tingkat pemanfaatan lahan hanya mencapai 65% untuk lahan basah dan 45% untuk lahan kering.

Tabel 2-38 Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2020

JENIS LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)			
	2017	2018	2019	2020
LAHAN BASAH				
Potensial	11.143	11.143	11.163	11.163
Fungsional	7.001	7.243	7.249	7.261
	18.144	18.386	18.412	18.424
LAHAN KERING				
Potensial	76.548	76.548	76.548	76.528
Fungsional	34.793	34.663	34.657	34.645
	111.341	111.211	111.205	111.173

Sumber: Dinas Pertanian, 2021



Tingkat Produktivitas

Luas Tanam untuk Tanaman Pangan didominasi oleh Padi dan Jagung. Pada tahun 2020 Luas Tanam Padi seluas 11.474 Ha dengan Luas Panen 10.347 Ha dan Produksi sebesar 41.467 Ton dan Luas Tanam Jagung seluas 8.012 Ha dengan Luas Panen 5.026 Ha serta Produksi sebesar 20.638 Ton.

Luas Lahan untuk Tanaman Perkebunan terbesar adalah Kelapa dan Jambu Mete dengan Luas Lahan 6.593,11 Ha untuk Kelapa dan 3.790,62 Ha untuk Jambu Mete Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Kelapa dan Kemiri, Produksi Kelapa sebesar 3.744,90 Ton dan Kemiri sebesar 1.210,80 Ton. Dengan produktivitas terbesar adalah kelapa yaitu sebesar 759 KG/Ha.

Luas Tanam untuk Tanaman Hortikultura dari tanaman buah - buahan terbesar adalah Mangga dan Pepaya dengan Luas Tanam sebesar 7.049 Ha untuk Mangga dan 610,67 Ha untuk Pepaya. Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Mangga dan Pisang, Produksi Mangga sebesar 6.919 Ton dan Pisang sebesar 5.520 Ton.

Luas Tanam untuk Tanaman Hortikultura dari tanaman sayur - sayuran terbesar adalah Kangkung dan Ketimun dengan Luas Tanam 57 Ha untuk Kangkung dan 38 Ha untuk Ketimun. Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Kangkung dan Petsai/Sawi, Produksi Kangkung sebesar 992 Ton dan Pisang sebesar 335 Ton.

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi/Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Komoditas Perkebunan disajikan dalam tabel di bawah ini. (Sumber: Dinas Pertanian, 2020)



Tabel 2-39 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 - 2020

No.	Tanaman Pangan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi
		Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton	Ha	Ha	Ton
1	Padi	10.628	10.544	50.613	11.088	10.316	43.555	12.701	11.622	41.090	10.073	11.140	41.813	11.474	10.347	41.467
	Padi Sawah	9.604	9.520	47.734	10.539	9.891	42.406	11.331	10.789	39.305	9.692	9.884	39.603	10.122	9.649	39.782
	Padi Bukan lahan sawah	1.024	1.024	2.879	549	425	1.149	1.370	833	1.785	381	1.256	2.210	1.352	698	1.685
2	Jagung	5.366	4.627	15.472	6.375	5.661	20.413	6.090	5.476	23.805	3.824	6.245	29.203	8.012	5.026	20.638
	Jagung Hibrida	3.422	2.734	10.629	3.721	3.475	15.066	4.192	2.847	14.139	3.416	5.361	27.610	5.381	3.748	15.872
	Jagung Komposit	839	834	2.311	905	866	2.913	590	979	4.317	101	43	195	793	610	2.707
	Jagung lokal	1.105	1.059	2.532	1.749	1.320	2.434	1.308	1.650	5.349	307	841	1.398	1.838	668	2.059
3	Ubi Kayu	1.211	1.211	12.520	612	776	8.279	627	658	7.128	306	452	4.716	585	446	4.795
4	Ubi jalar	280	280	2.417	225	270	2.340	69	245	2.284	58	127	1.065	76	54	341
5	Sorgum	2	2	1	2	-	1	-	1	1	-	8	-	10	10	7
6.	Kedelai	279	162	108	186	212	89	659	558	380	1	38	11	21	29	27
7	Kacang Tanah	183	183	158	58	53	47	108	128	115	9	38	31	168	155	210
8	Kacang Hijau	98	98	57	23	20	12	54	71	42	30	30	16	90	90	50
	Jumlah	18.047	17.107	81.346	18.569	17.308	74.736	20.308	18.759	74.845	14.301	18.078	76.855	20.436	16.157	67.535

Tabel 2-40 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2016 - 2020

No.	Komoditas Perkebunan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Luas Lahan	Produksi	Produktivitas	Luas Lahan	Produksi	Produktivitas	Luas Lahan	Produksi	Produktivitas	Luas Lahan	Produksi	Produktivitas	Luas Lahan	Produksi	Produktivitas
		Ha	Ton	KG/Ha	Ha	Ton	KG/Ha	Ha	Ton	KG/Ha	Ha	Ton	KG/Ha	Ha	Ton	KG/Ha
1	Kelapa	8.613	4.362	759,00	8.653,00	4.478,00	778,00	8.653,00	4.480,00	777	8.648,00	4.490	777	6.593,11	3.744,90	859,00
2	Jambu Mete	5.243	1.373	599	5.241,00	1.379,00	599,00	5.241,00	1.379,00	596	5.425,00	1.392	598	3.790,62	721,21	531,00
3	Kopi															
	Arabika	320	127	591	319	130	591	319	130	588	317	130	590	307,86	124,71	577
	Robusta	675	248	719	672	252	718	672	252	706	667	261	717	642,51	204,8	595
4	Kakao	2.042	548	519	2.053,00	559,00	522,00	2.054,00	561,00	521	2.051,00	569	523	1.891,41	536,61	536,00
5	Kemiri	2.730	1.365	734	2.725,00	1.378,00	741,00	2.271,00	1.379,00	737	2.715,00	1.412	750	2.376,20	1.210,80	723,00
6	Kapuk	49	12	261	47	11	250	46	11	244	45	11	250	45	11,2	255
7	Cengkeh	989	216	421	991	221	432	1.321,00	220,00	426	1.341,90	227	433	1.191,02	256,80	504,00
8	Pinang	39	10	333	38	9,3	321	37	9,3	291	37	12	384	57,65	18,5	429
9	Vanili	5	0	0	3	2	0	3	2	0	2	0	0	3,8	0	0
10	Lada	12	4	400	12	4	400	12	4	444	12	4	410	9,2	3,4	425
11	Asam	65	8	471	65	8	471	64	8	421	65	9	474	157,91	34	367
12	Jarak Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pala	317	29	282	331	37	339	362	39	339	432	43	348	416,7	41,5	302
14	Kapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tembakau	183	101	552	225	123	547	25	123	4.920	11	5	455	9	5,2	578
16	Sirih	25	5	357	25	5	357	21	5	336	22	6	306	22,04	5,37	307
17	Lontar	58	16	333	58	17	354	53	13	279	50	10	254	136,24	23,5	238
	Total	21.365	8.424	675	21.458	8.613	685	21.154	8.615	693	21.841	8.580	687	17.650	6.943	700



Tabel 2-41 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah – Buah Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Buah - buahan	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton
1	Alpukat	74	46	120	65,1	65,1	155	65,02	65,02	83,8	62,86	62,86	170	62,86	62,86	164
2	Belimbing	2,74	1,08	9	2,22	2,22	21	2,27	2,27	5,07	2,19	2,19	54	2	2	2
3	Durian	17,49	7,94	14,68	17,83	17,83	100	17,89	17,89	53,3	17,89	17,89	114	17,15	17,15	118
4	Jambu Biji	22,1	4,9	29,15	19,4	19,4	33	19,36	19,36	81,7	19,34	19,34	59	18,3	18,3	50
5	Jambu air	12,5	2,7	8	11,4	11,4	26	10,84	10,84	23,2	9,6	9,6	15,8	6,93	6,93	18
6	Jeruk Siam /Kepron	29,58	14,87	82,9	28,86	28,86	146	28,36	28,36	46	28,28	28,28	34	26,27	26,27	187
7	Jeruk Besar	5,5	0,9	8,7	4	4	0	3	3	0	3,8	3,8	17	1,5	1,5	10
8	Mangga	1.546,20	709,40	6.246,00	1.503,40	1.503,4	6.326,00	1.495,21	1.495,21	2.715,20	1.496,31	1.496,31	7.049,00	1.494,51	1.494,51	6.919,00
9	Nangka/Cempedah	133,1	92,6	623,9	128,5	128,5	1120	127,66	127,66	583,20	127,7	127,7	518	127,49	127,49	569
10	Nenas	150,7	119,7	1327	150,1	150,1	1653	148,21	148,21	45,5	14,87	14,87	612	145,75	145,75	574
11	Pepaya	618,9	265,1	9771,8	616,5	616,5	6771	616,63	616,63	4891	610,15	610,15	497	610,67	610,67	4648
12	Pisang	215,8	83,7	3.924	212	212	5839	211,36	211,36	6242	205,84	205,84	3181	202,59	202,59	5520
13	Rambutan	49,7	39	82,3	49,2	49,2	265	49,39	49,39	105,2	15,41	15,41	50,8	49,36	49,36	204
14	Salak	2	1,3	15,8	1,8	1,8	23	1,7625	1,7625	20	1,74	1,74	10,6	1,7	1,7	19
15	Sawo	24,8	9,3	31	38,7	38,7	132	23,53	23,53	47,1	22,9	22,9	78	22,04	22,04	77
16	Sirsak	18,6	11,4	65,9	10,7	10,7	79	10,45	10,45	41	25,5	25,5	28	10,1	10,1	41
17	Sukun	86,6	55,8	368	77,5	77,5	429	58,81	58,81	154,8	58,8	58,8	70	57,8	57,8	215
	Jumlah	3.010	1.466	18.804	2.937	2.937	23.118	2.890	2.890	14.509	2.723	2.723	12.558	2.857	2.857	19.335

Tabel 2-42 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur – sayuran Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Sayur - Sayuran	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton
1	Bawang merah	4	4	41,5	7	7	105	3	3	12	7	7	54,5	3	3	29
2	Petsai/sawi	19	19	251	13	13	186	11	11	118,3	15	15	202	24	24	335
3	Kacang Panjang	7	7	11,5	3	3	5	3	3	12	1	1	10	0	0	0
4	Cabe besar	3	3	12	6	6	22	7	7	38,5	9	9	90,5	16	16	54
5	Cabe Rawit	10	10	56,15	21	21	85	5	5	16,02	8	8	41	12	12	66
6	Tomat	14	14	63,3	9	9	22	10	10	86,5	14	14	314,5	6	6	44
7	Terung	32	32	79	9	9	16	45	45	371,7	11	11	312	7	7	80
8	Kangkung	17	17	231	12	12	319	15	15	205	20	20	402,5	57	57	992
9	Bayam	22	22	103	14	14	76	17	17	17	13	13	102	16	16	63
10	Ketimun	4	4	8	4	4	19	6	6	15	1	1	20	38	38	38
	Jumlah	132	132	856	98	98	855	122	122	892	99	99	1.549	179	179	1.701

Populasi Ternak

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah unggas sedangkan populasi hewan besar terbesar yaitu kambing yang secara konsisten bertambah dan pada tahun 2020 populasinya sudah mencapai 46.803 ekor.

Tabel 2-43 Populasi Ternak Tahun 2016 – 2020

JENIS TERNAK	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	34.186	33.236	35.638	35.804	34.902
Kerbau	6.275	7.126	7.534	7.663	6.176
Kuda	3.407	2.211	2.493	1.963	1.549
Kambing	41.126	43.392	45.942	46.135	46.803
Domba	6.692	6.618	6.799	6.894	8.217
Babi	86.981	94.322	100.714	101.184	83.923
Unggas	536.190	1.244.186	1.325.576	1.351.117	1.583.316

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Nagekeo, 2021

4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Grafik 2-35 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020

Jumlah Koperasi aktif di tahun 2020 menurun menjadi 71 koperasi atau 71% dari jumlah 100 koperasi yang ada.

Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2-44 Jumlah UKM Tahun 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
UKM	988	150	506	630	10.124

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Jumlah UKM tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dikarenakan data 2020 bersumber dari pencatatan/pelaporan UKM yang terkena dampak pandemi *covid-19* dalam rangka pemberian bantuan presiden (Banpres).

2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu terlaksananya sistem penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, lewat evaluasi ini dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

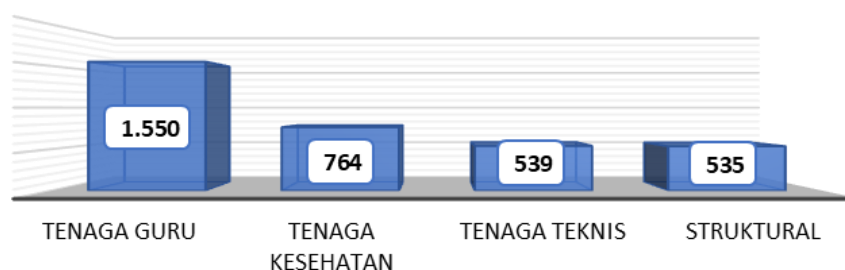
1. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah

Tabel 2-45 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

PENDIDIKAN TERAKHIR	2016	2017	2018	2019	2020
Sampai dengan SD	11	11	8	4	3
SLTP/MTs	26	23	18	15	14
SLTA/SMK/MA	876	891	673	576	502
D1/D2/D3	854	1.149	958	205	893
D4/S1	1.726	1.211	1.527	734	1.930
S2/S3	40	39	50	1.819	46
Jumlah	3.533	3.324	3.234	3.353	3.388

Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021



Grafik 2-36 Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan

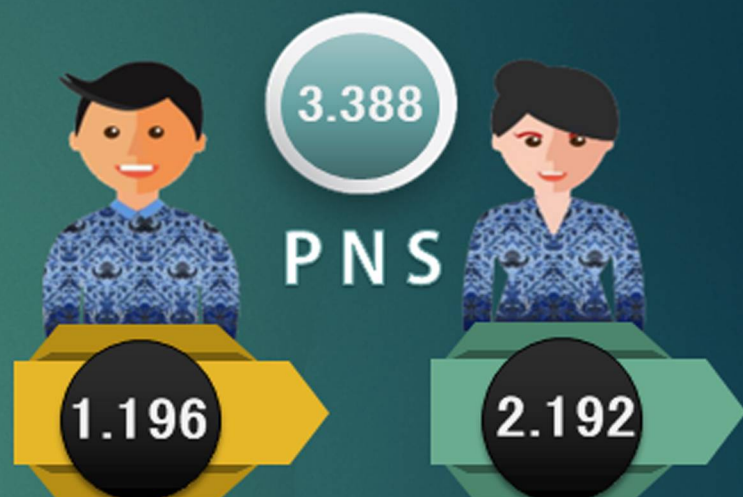
Dari komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Nagekeo berdasarkan klasifikasi jabatan jumlah ASN terbanyak berasal dari klasifikasi jabatan Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. Tenaga guru berjumlah 1.550 orang dan Tenaga Kesehatan berjumlah 764 orang.



KEPEGAWAIAN

3.388 PNS ASN PPPK 27

TINGKAT PENDIDIKAN



KLASIFIKASI JABATAN



BERDASARKAN JABATAN PER JENIS KELAMIN

STRUKTURAL	JFU	JFT
316	398	482
LAKI - LAKI		
PEREMPUAN		
219	520	1.453
535	918	1.935



2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP merupakan integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Evaluasi SAKIP ini untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.

Penilaian SAKIP dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah **D** dengan rentang nilai **0-30**. Kemudian kategori **C** untuk nilai **30-50**, **CC** untuk nilai **50-60**, **B** untuk nilai **60-70**, **BB** untuk nilai **70-80**, dan **A** untuk nilai **80-90**. Adapun kategori tertinggi yaitu **AA** dengan hasil penilaian **90-100**.

Tabel 2-46 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	18,58	20,89	21,22	21,28	21,38
2	Pengukuran Kinerja	25	11,94	13,66	15,94	16,09	16,15
3	Pelaporan Kinerja	15	9,18	9,9	10,18	10,18	10,25
4	Evaluasi Internal	10	5,09	4,62	4,9	5,14	5,14
5	Capaian Kinerja	20	11,39	10,99	9,58	9,66	9,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,18	60,06	61,82	62,35	62,67
	Tingkat Akuntabilitas		CC	B	B	B	B

3. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2-47 Opini BPK atas LKPD Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP



Jenis penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebagai berikut: **Wajar Tanpa Pengecualian** (*unqualified opinion*); **Wajar Dengan Pengecualian** (*qualified opinion*); **Tidak Wajar** (*adversed opinion*) dan **Tidak Menyatakan Pendapat** (*disclaimer of opinion*).

4. *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Adapun area intervensinya meliputi: **Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perizinan, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa**. Tujuan MCP adalah mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2-48 Nilai MCP Tahun 2018-2020

NO	AREA INTERVENSI	2018		2019		2020	
		Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	62	50	60	50	17	50
2	Pengadaan Barang dan Jasa	51	31	33	25	24	25
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66	50	25	25	9	25
4	Kapabilitas APIP	60	60	3	25	20	25
5	Manajemen ASN	45	50	37	50	46	50
6	Optimalisasi Pendapatan Daerah	38	25	13	25	26	25
7	Manajemen Aset Daerah	71	50	21	25	0	25
8	Tata Kelola Dana Desa	69	60	35	25	5	25

Keterangan :

● 0% - 25% ● 25% - 50% ● 50% - 75% ● 75% - 100%

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi digambarkan dalam warna **merah**, **kuning**, **biru**, dan **hijau** yang menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. **Merah**, berarti implementasi rendah, dibawah 25%. Sebaliknya, yang berwarna **hijau** menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut.



5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo tahun 2020 adalah **48,41** dengan kategori **"C"**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2-49 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	2020
A	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20	9,22
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	3,84
3	Reform	30	9,44
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT		60	22,5
B	Nilai Hasil Evaluasi		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,36
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,30
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	7,83
4	Kinerja Organisasi	10	3,43
TOTAL KOMPONEN HASIL		40	25,92
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100	48,41

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2020

6. Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Alokasi Khusus Nonfisik; Dana Otonomi Khusus; Dana Desa; dan Hibah) dan belanja tertentu. (Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa).

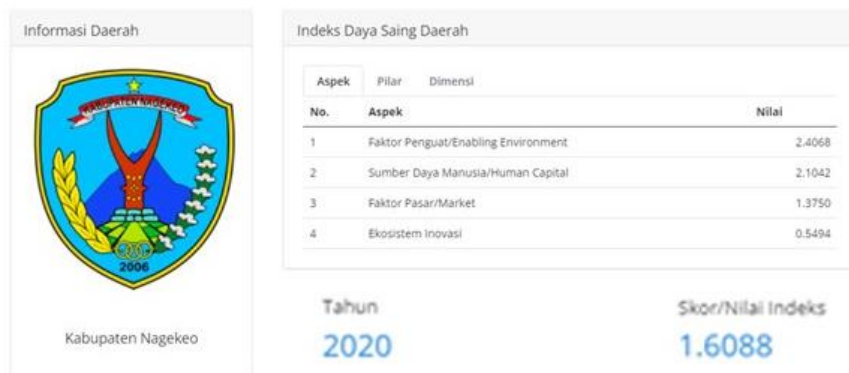
Tabel 2-50 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks KFD	0,52	0,38	0,423	0,315	0,332
	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah



7. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah adalah Profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

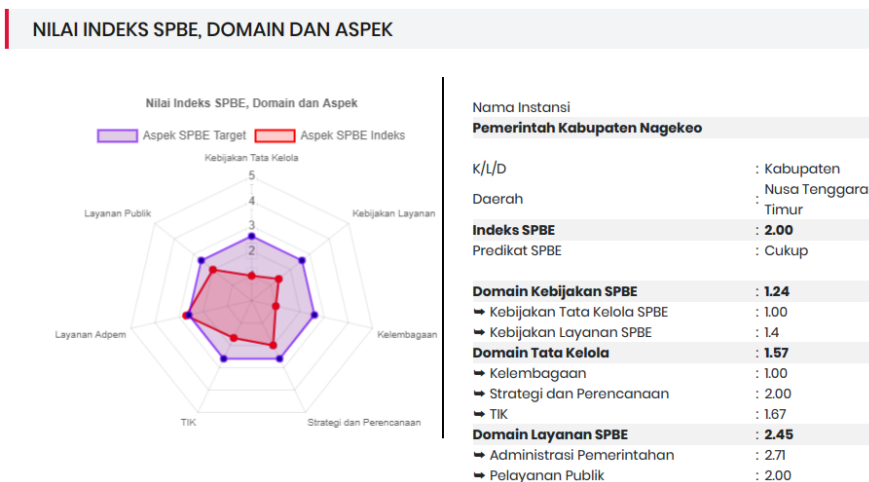


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021

Gambar 2-12 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020

8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Evaluasi SPBE menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE.



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020

Gambar 2-13 Indeks SPBE Tahun 2019



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tahun 2020 total pengeluaran per kapita Kabupaten Nagekeo adalah sebesar Rp.699.970,00 sebulan, pengeluaran per Kapita terbesar adalah untuk Kelompok Makanan yaitu sebesar Rp.392.662,00 dan Pengeluaran untuk Kelompok Bukan Makanan sebesar Rp.307.308,00. Untuk kelompok makanan ini pengeluaran terbesar adalah untuk jenis makanan padi – padian dan diikuti dengan jenis Makanan dan Minuman Jadi. Sedangkan dari Kelompok Bukan Makanan pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan yaitu sebesar Rp.181.174,00.

**Tabel 2-51 Rata rata pengeluaran Per Kapita
Sebulan Tahun 2016 - 2020**

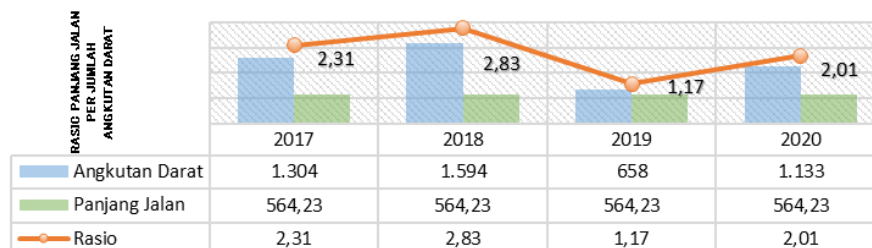
JENIS PENGELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Makanan					
Padi - padian	114.129	100.615	102.334	83.889	91.789
Umbi - umbian	5.342	6.330	5.772	4.578	4.033
Ikan	27.766	41.437	28.873	31.172	43.157
Daging	15.059	15.612	21.348	14.132	19.440
Telur dan Susu	12.564	22.700	16.349	14.651	19.483
Sayur - sayur	35.968	42.556	41.227	37.233	41.666
Kacang - kacang	3.169	6.130	5.799	4.322	5.584
Buah - buahan	10.700	16.185	16.984	12.269	16.046
Minyak dan Lemak	11.452	11.819	10.747	9.479	12.196
Bahan Minuman	18.371	17.190	17.960	16.056	18.344
Bumbu - bumbu	5.478	6.373	7.912	6.963	7.921
Konsumsi Lainnya	3.193	4.197	3.863	3.024	3.594
Makanan dan Minuman Jadi	36.891	66.209	68.269	52.448	63.777
Tembakau/Rokok dan Sirih	43.853	41.547	40.325	42.994	45.632
Jumlah	343.935	398.900	387.762	333.210	392.662
Kelompok Bukan Makanan					
Perumahan	159.329	187.935	175.528	148.634	181.174
Aneka Barang dan Jasa	33.457	97.758	72.614	54.749	60.656
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	12.898	18.345	15.281	13.660	16.206
Barang Tahun Lama	13.465	66.797	25.104	19.382	20.739
Pajak, Asuransi	7.540	24.590	18.646	18.129	16.017
Keperluan Pesta dan Upacara	4.394	4.834	9.203	8.115	12.516
Jumlah	231.083	400.259	316.376	262.669	307.308
TOTAL	575.018	799.159	704.138	595.879	699.970

Sumber: BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.



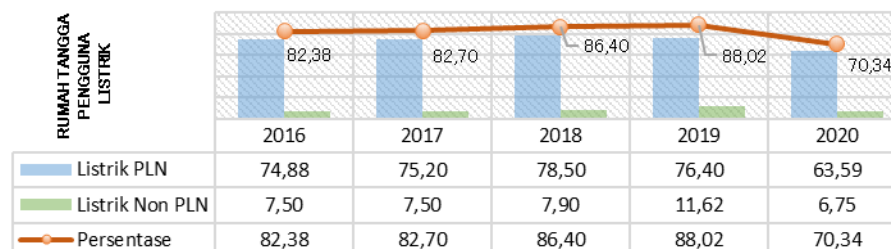
Sumber : BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-37 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017-2020

Rasio jalan di tahun 2020 adalah 2,01, nilai ini berarti 1 km jalan di Kabupaten Nagekeo melayani 2 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami penurunan di tahun 2020 dimana hanya terdapat 73,34% rumah tangga yang menggunakan listrik. Penggunaan listrik terbesar bersumber dari PLN sebesar 63,59% dan sebesar 6,75% berasal dari listrik non-PLN atau sumber penerangan listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator dan pembangkit listrik EBT.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Grafik 2-38 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2016 - 2020



3. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

Tabel 2-52 Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2016-2020

HOTEL DAN PENGINAPAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Hotel/Penginapan	14	15	15	15	15
Jumlah Kamar	144	175	175	175	175

Sumber: Dinas Pariwisata 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang dapat mendorong investasi adalah kemudahan berusaha dan perizinan yang mudah.

Realisasi Investasi

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Kabupaten Nagekeo. Nilai investasi yang tersaji adalah nilai investasi setiap tahunnya bukan nilai investasi secara akumulatif.

Tabel 2-53 Realisasi Investasi Tahun 2018-2020

URAIAN	REALISASI INVESTASI (RP)		
	2018	2019	2020
Nilai Investasi	601.821.803.020	33.660.490.900	107.400.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021

Jenis Perizinan

Perizinan diarahkan untuk semakin mudah dan sederhana dari segi prosedur mendapatkan dan semakin cepat dalam memperolehnya.

Tabel 2-54 Jenis dan Jumlah Dokumen Izin Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	REALISASI PER TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jenis Perizinan	10	14	14	13	12
2	Jumlah Dokumen Izin	1.054	712	872	904	886

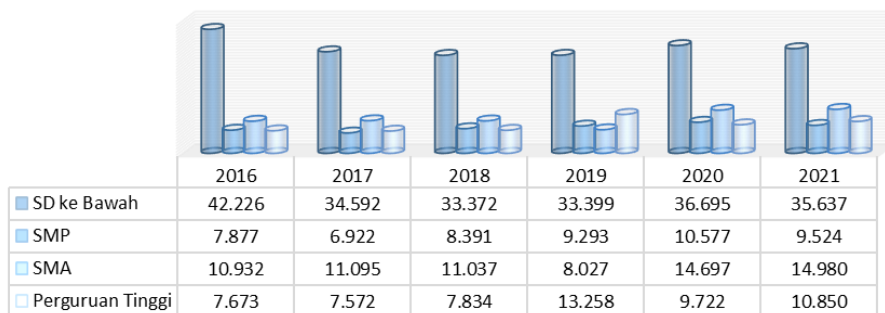
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021



2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah atau yang tidak mengenyam bangku Pendidikan.

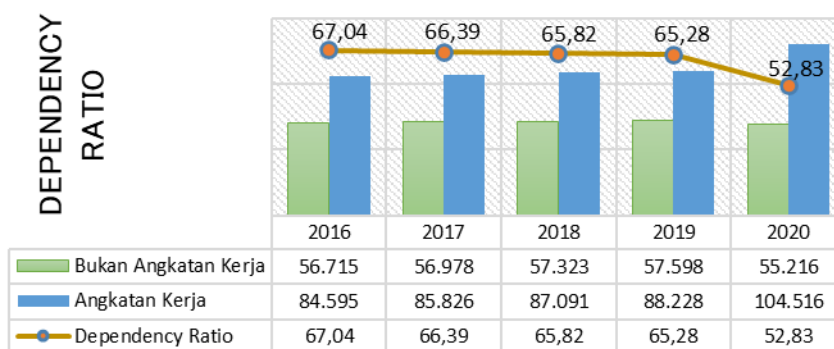


Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-39 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 -2020

2. Tingkat Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan/ angka beban ketergantungan Kabupaten Nagekeo sebesar 52,83% pada 2020 yang terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja memiliki tanggungan sebanyak 52 orang yang bukan angkatan kerja (belum produktif dan/dianggap tidak produktif lagi).



Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021

Grafik 2-40 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2016-2020



Tabel 2-55 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	63,93	64,74	65,18	65,88	65,81
1.1.1.2	Pertumbuhan PDRB	4,56	4,83	4,75	4,31	0,63
1.1.1.3	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)	1,772	1,928	2,102	2,240	2,274
1.1.1.4	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)	1,196	1,254	1,313	1,369	1,378
1.1.1.5	Laju Inflasi	3,62	1,7	2	1,84	2,24
1.1.1.6	PDRB Per Kapita	12.543	13.505	14.556	15.367	15.450
1.1.1.7	Penduduk Miskin (%)	13,61	13,48	12,98	12,85	12,61
1.2	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1.2.1.1	Angka Melek Huruf (%)	99,54	99,55	99,13	98,50	94,50
1.2.1.2	Angka Partisipasi Sekolah					
1.2.1.2.1	7 - 12 Tahun	97,73	97,81	98,79	98,83	98,87
1.2.1.2.2	13 - 15 Tahun	96,60	95,01	94,07	94,71	95,35
1.2.1.2.3	16 - 18 Tahun	71,32	72,97	70,80	71,71	72,62
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar					
1.2.1.3.1	SD	97,73	109,28	114,96	113,81	112,65
1.2.1.3.2	SMP	96,60	91,65	87,58	88,47	89,36
1.2.1.3.3	SMA	71,32	70,48	60,13	64,08	68,02
1.2.1.4	Angka Partisipasi Murni					
1.2.1.4.1	SD	95,25	97,81	98,79	98,92	98,70
1.2.1.4.2	SMP	74,92	77,62	73,69	75,01	75,50
1.2.1.4.3	SMA	51,95	53,89	50,77	51,64	51,63
1.2.1.5	Rata rata Lama Sekolah	7,34	7,52	7,82	7,83	7,89
1.2.2	Sosial Kemasyarakatan					
1.2.2.1	Usia Harapan Hidup	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13
1.2.2.2	Persentase Balita Gizi Buruk					
1.2.2.2.1	Berat badan Lahir Rendah (BBLR) (%)	N/A	N/A	7,70	5,59	3,99
1.2.2.2.2	Balita Stunting	N/A	N/A	36,93	21,40	13,79
1.2.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB)	N/A	16	14	14	10
1.2.2.4	Angka Kematian Balita (AKBa)	N/A	-	2	1	1
1.2.2.5	Angka Kematian Ibu (AKI)	N/A	160	159	84	160
1.2.2.6	Covid-19					
1.2.2.6.1	Terkonfirmasi	N/A	N/A	N/A	N/A	25
1.2.2.6.2	Meninggal	N/A	N/A	N/A	N/A	-
1.2.2.3	Rasio Penduduk yang Bekerja					
1.2.2.3.1	Angkatan Kerja	68.708	62.431	61.798	65.796	73.975
1.2.2.3.2	Bukan Angkatan Kerja	23.763	33.039	35.060	32.200	31.624
1.2.2.3.3	Tingkat Pengangguran	1,95	3,60	1,88	2,76	3,09
1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga					
1.2.3.1	Gedung Kesenian	N/A	-	-	-	-
1.2.3.2	Grup Kesenian	N/A	31	31	31	31
1.2.3.3	Klub Olah Raga	N/A	35	35	35	35
1.2.3.4	Gedung Olah Raga	N/A	46	46	46	46
2	PELAYANAN UMUM					
2.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB					
2.1.1	Pendidikan					
2.1.1.1	Pendidikan Dasar					
2.1.1.1.2	Rasio Ketersediaan SD/MI	93	90	90	107	114
2.1.1.1.3	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	58	56	52	79	53
2.1.1.1.4	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	12	12	11	11	10
2.1.1.2	Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs	10	10	10	11	10
2.1.1.2.1	Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	99,91	100	100	100	100
2.1.1.2.2	Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs	99,25	99,93	99,59	99,17	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2	Kesehatan					
2.1.2.1	Fasilitas Kesehatan					
2.1.2.1.1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	N/A	59,36	60,25	54,64	52,47
2.1.2.1.2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0,71	0,70	0,69	0,69	0,63
2.1.2.1.3	Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk	4,95	7,00	4,90	4,85	4,80
2.1.2.1.4	Rasio Pustu per 100.00 Penduduk	24,06	23,81	24,93	23,32	21,29
2.1.2.2	Tenaga Kesehatan					
2.1.2.2.1	Rasio Dokter per 10.000 penduduk	0,57	1,33	1,32	1,85	2,07
2.1.2.2.2	Rasio Dokter Gigi per 10.000 penduduk	0,14	0,28	0,35	0,34	0,31
2.1.2.2.3	Rasio Dokter Spesialis per 10.000 penduduk	-	0,07	0,28	0,48	0,63
2.1.2.2.4	Rasio Tenaga Farmasi per 10.000 penduduk	1,06	1,96	1,73	1,85	1,75
2.1.2.2.5	Rasio Bidan per 10.000 penduduk	4,53	15,48	15,30	17,83	18,28
2.1.2.2.6	Rasio Perawat per 10.000 penduduk	17,90	18,56	16,90	22,83	18,09
2.1.2.3	Desa/Kelurahan UCI	N/A	90	91,00	102,00	109,00
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
2.1.3.1	Jenis Permukaan jalan					
2.1.3.1.1	Aspal	N/A	110,68	130,68	140,98	198,52
2.1.3.1.2	Kerikil	N/A	108,13	110,13	111,66	96,46
2.1.3.1.3	Lainnya	N/A	345,42	323,42	311,59	269,25
2.1.3.2	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan					
2.1.3.2.1	Baik	N/A	90,98	110,98	140,98	214,57
2.1.3.2.2	Sedang	N/A	161,66	141,66	111,66	53,94
2.1.3.2.3	Rusak	N/A	13,40	13,40	13,40	17,12
2.1.3.2.4	Rusak Berat	N/A	298,19	298,19	298,19	278,60
2.1.3.3	Persentase RT Berakses Air Minum	49,97	54,41	66,52	76,98	82,06
2.1.3.4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	61,09	82,50	83,02	97,06	97,32
2.1.3.5	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	N/A	N/A	N/A	13.245	11.820
2.1.4	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
2.1.4.1	Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk	9,77	9,45	9,21	3,02	2,69
2.1.4.2	Persentase PMKS yang mendapat bantuan	24,80	97,50	96,80	95,13	94,52
2.1.5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.5.1	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani	100	100	100	100	100
2.1.6	Pangan					
2.1.6.1	Ketersediaan Pangan (KG/kapita/tahun)	71,58	74,43	75,92	87,16	N/A
2.1.6.2	Cadangan Pangan (Ton EB)	4.348,39	2.672,93	5.153,71	3.036,51	4.130
2.1.7	Lingkungan Hidup					
2.1.7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	54,47	59,20	58,76
2.1.7.1.1	Indeks Kualitas Air	50,00	57,50	57,50	70,00	68,00
2.1.7.1.2	Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	88,02	91,28	91,82
2.1.7.1.3	Indeks Tutupan Lahan	27,03	27,03	27,03	27,03	27,04
2.1.8	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.1.8.1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	85,04	87,98	78,87	83,15	86,63
2.1.8.2	Cakupan Penerbitan KTP	66,75	72,65	79,01	80,65	81,33
2.1.8.3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	25,49	30,46	36,63	41,09	44,39
2.1.8.4	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	23,70	30,13	46,54	56,73	61,63
2.1.9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.1.9.1	Rata-rata Kelompok Binaan LPM	3,34	3,34	3,34	3,34	3,30
2.1.9.2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	23,14	23,34	22,38	22,38	9,51
2.1.9.3	Indeks Desa Membangun					
2.1.9.3.1	Desa Sangat Tertinggal	N/A	N/A	N/A	5	5
2.1.9.3.2	Desa Tertinggal	N/A	N/A	N/A	36	36
2.1.9.3.3	Desa Berkembang	N/A	N/A	N/A	32	52
2.1.9.3.4	Desa Maju	N/A	N/A	N/A	4	4
2.1.10	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
2.1.10.1	Rasio Akseptor KB	55,87	56,21	60,20	64,28	64,95
2.1.11	Perhubungan					
2.1.11.1	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.12	Perpustakaan					
2.1.12.1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	N/A	18.031	15.895	15.947	1.843
2.2	PELAYANAN URUSAN PILIHAN					
2.2.1	Kelautan dan Perikanan					
2.2.1.1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.045,32	1.098,11	2.374,36	2.421,84	2.988,00
2.2.1.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	-	-	71,00	92,85	92,31
2.2.1.3	Produksi Garam (ton)	261,40	763,15	2.264,10	2.743,75	2.707,00
2.2.2	Pariwisata					
2.2.2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan					
2.2.2.1.1	Jumlah Wisatawan Manca Negara	197	371	220	324	-
2.2.2.1.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	9.082	8.377	12.507	10.247	7.416
2.2.2.2	Rata rata Lama Tinggal (hari)	1	1	1	1,5	1,5
2.2.3	Pertanian					
2.2.3.1	Persentase Pemanfaatan Lahan (%)	N/A	47,66	47,79	47,78	47,79
2.2.3.2	Produktifitas Tanaman Pangan (KW/HA)	294,35	290,56	308,97	298,86	286,92
2.2.3.3	Produktifitas Tanaman Perkebunan (KG/Ha)	7.331	7.420	11.625	7.269	7.226
2.2.4	Peternakan					
2.2.4.1	Sapi	34.186	33.236	35.638	35.804	34.902
2.2.4.2	Kerbau	6.275	7.126	7.534	7.663	6.176
2.2.4.3	Kuda	3.407	2.211	2.493	1.963	1.549
2.2.4.4	Kambing	41.126	43.392	45.942	46.135	46.803
2.2.4.5	Domba	6.692	6.618	6.799	6.894	8.217
2.2.4.6	Babi	86.981	94.322	100.714	101.184	83.923
2.2.4.7	Unggas	536.190	1.244.186	1.325.576	1.351.117	1.583.316
2.2.5	Koperasi dan UKM					
2.2.5.1	Persentase Koperasi Aktif	83,95	83,95	83,95	87,10	71,00
2.2.5.2	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	988	150	506	630	10.124
3	DAYA SAING DAERAH					
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
3.1.1	Pengeluaran per Kapita (RP/Bulan)	575.018	799.159	704.138	595.879	699.970
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
3.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat	N/A	2,31	2,83	1,17	2,01
3.2.2	Persentase RT yang menggunakan listrik	82,38	82,70	86,40	88,02	70,34
3.2.3	Ketersediaan Penginapan	14	15	15	15	15
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi					
3.3.1	Jenis Perizinan	10	14	14	13	12
3.3.2	Realisasi Investasi	N/A	N/A	601.821.803.020	33.660.490.900	107.400.000.000
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia					
3.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	11,17	12,58	12,92	20,72	13,56
3.4.2	Rasio ketergantungan	67	66	66	65	53
4	PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN					
4.1.1	SAKIP	56	60,06	61,82	62,35	62,67
4.1.2	Opini atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4.1.3	MCP					
4.1.3.1	Perencanaan dan Penganggaran	N/A	N/A	62	60	17
4.1.3.2	Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	51	33	24
4.1.3.3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	N/A	N/A	66	25	9
4.1.3.4	Kapabilitas APIP	N/A	N/A	60	3	20
4.1.3.5	Manajemen ASN	N/A	N/A	45	37	46
4.1.3.6	Optimalisasi Pendapatan Daerah	N/A	N/A	38	13	26
4.1.3.7	Manajemen Aset Daerah	N/A	N/A	71	21	0
4.1.3.8	Tata Kelola Keuangan Desa	N/A	N/A	69	35	5
4.1.4	Indeks Kapasitas Fiskal	0,520	0,380	0,423	0,315	0,332
4.1.5	IDSD	N/A	N/A	N/A	N/A	1,61
4.1.6	Indeks SPBE	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A



2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Target RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2020 yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka diperoleh hasil berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 79 Indikator yang ditetapkan terlihat sebagian besar bisa di evaluasi, dimana pada tahun 2019, hanya 161 Indikator (89,94%) yang datanya tersedia serta di tahun 2020 hanya 174 Indikator (97,21%) yang datanya dapat terpenuhi. Bila melihat pada jumlah Indikator yang ada maka memang dapat dimaklumi kesulitan terjadi mengingat IKU yang ditetapkan terlalu banyak sehingga tidak efektif, hal ini juga dapat dilihat dari penetapan IKU daerah lainnya yang lebih rasional, oleh karenanya di rekomendasikan agar IKU RPJMD Kabupaten Nagekeo lebih dirampingkan kepada indikator yang utama saja, indikator lainnya yang lebih spesifik di tempatkan pada indikator kinerja kunci di setiap urusan.

Oleh karenanya terkait dengan penetapan indikator dan target IKU selain penting dilakukan perampingan, maka penetapan target diharapkan benar-benar disesuaikan dengan sektor yang tetap berkinerja positif maupun sektor yang terdampak pandemic Covid-19 saat ini, sehingga lebih rasional dan relevan dengan perkembangan yang terjadi.



Tabel 2-56 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

NO	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator				Total	Hasil Evaluasi	Temuan dan Rekomendasi
			2019		2020				
			√	Ø	√	Ø			
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.	1. Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk-produk unggulan secara berkesinambungan	14	0	14	0	14	Sasaran ini memiliki 14 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 secara umum indikator memiliki evaluasi sangat tinggi, namun terdapat indikator yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan jumlah rumah tidak layak huni sehingga diharapkan kegiatan industri maupun bantuan untuk rutilahu di Nagekeo dapat lebih dikembangkan lagi dengan menyesuaikan kondisi akibat Covid-19 ini.
		2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat.	5	0	5	0	5	Sasaran kedua ini memiliki 5 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Perlu dipertahankan pencapaiannya. Besarnya angka pengaduan yang ditindaklanjuti menunjukkan SATPOL PP melakukan pelayanan yang optimal pada masyarakat.
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan	3. Meningkatnya pelayanan kesehatan	10	0	10	0	10	Sasaran ketiga ini memiliki 10 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 perlu meningkatkan sarana dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	9	0	9	0	9	Sasaran keempat memiliki 9 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		5. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral.	5	0	5	0	5	Sasaran kelima ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 untuk indikator kasus kenakalan remaja dan kriminalitas masih sangat perlu ditingkatkan.
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan	6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	12	0	12	0	12	Sasaran keenam yakni meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki 12 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata 2019 - 2020 diatas target, namun terdapat 1 indikator yang dapat ditingkatkan yaitu SMP/MTs sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya dapat menambah jumlah partisipasinya,



NO	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator				Total	Hasil Evaluasi	Temuan dan Rekomendasi
			2019		2020				
			√	Ø	√	Ø			
		7. Meningkatkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif	5	0	5	0	5	Sasaran ketujuh ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 perlu meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.
		8. Meningkatkan prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya.	4	0	4	0	4	Sasaran 8 memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
4	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari	9. Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	10	3	11	2	13	Sasaran 9 ini memiliki 13 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 3 indikator yang tidak dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		10. Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana.	1	0	1	0	1	Sasaran 10 ini memiliki 1 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		11. Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak.	9	2	9	2	11	Sasaran 11 ini memiliki 9 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan	12. Meningkatkan kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo	2	0	2	0	2	Sasaran 12 ini memiliki 2 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020, memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		13. Meningkatkan kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan	2	0	2	0	2	Sasaran 13 ini memiliki 2 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		14. Meningkatkan kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo	6	0	6	0	6	Sasaran 14 ini memiliki 6 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.



NO	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator				Total	Hasil Evaluasi	Temuan dan Rekomendasi
			2019		2020				
			√	Ø	√	Ø			
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT	15.Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	13	0	13	0	13	Sasaran 15 memiliki 13 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, meskipun rata-rata capaian sasaran ini menunjukkan angka yang tinggi, namun perlu peningkatan kinerja pada indikator luas tanam lahan perkebunan, produktivitas produk perkebunan, padi dan produksi tanaman perkebunan.
		16.Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	5	0	5	0	5	Sasaran 16 ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator produk pertanian organik yang tersertifikasi dan jumlah produk pertanian organik yang bersertifikat.
7	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehumanan	17.Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan.	6	4	10	0	10	Sasaran 17 ini memiliki 10 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 4 indikator yang tidak dapat di evaluasi pada tahun 2019	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan nusantara pada desa atau kampung wisata yang berbasis komunitas dan terintegrasi wisata bahari, agrowisata, ekowisata dan budaya.
		18.Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan;	4	0	4	0	4	Sasaran 18 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator pembangunan bandara di Nagekeo dan panjang jalan penghubung ke obyek wisata dalam keadaan baik.
		19.Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition)	3	0	3	0	3	Sasaran 19 ini memiliki 3 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan terhadap indikator cakupan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri.
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah	20.Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah;	6	0	6	0	6	Sasaran ke 20 memiliki 6 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		21.Meningkatnya derajat literasi masyarakat.	1	0	1	0	1	Sasaran 21 ini memiliki 1 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Dibutuhkan identifikasi faktor penghambat tidak tercapainya target sasaran ini. Ke depan penting untuk meningkatkan kinerja sasaran ini.
		22.Tumbuhnya industri kreatif.	3	1	4	0	4	Sasaran 22 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan terhadap indikator pertumbuhan industri dan tim kreatif percepatan pengembangan daya saing wilayah.



NO	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator				Total	Hasil Evaluasi	Temuan dan Rekomendasi
			2019		2020				
			√	Ø	√	Ø			
							terdapat 1 indikator yang tidak dapat di evaluasi.		
		23.Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing	10	1	10	1	11	Sasaran ke 23 memiliki 11 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.	24.Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi	4	0	4	0	4	Sasaran 24 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		25.Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan	8	1	8	1	9	Sasaran 25 ini memiliki 9 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 1 indikator yang tidak dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan indikator jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan secara online.
		26.Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN	3	0	3	0	3	Sasaran 26 ini memiliki 6 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
		27.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.	9	0	9	0	9	Sasaran ke 27 memiliki 9 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi.	Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu ditingkatkan pada indikator adanya sistem informasi manajemen kecamatan yang terhubung dengan desa.
Total			161	18	174	5	179		

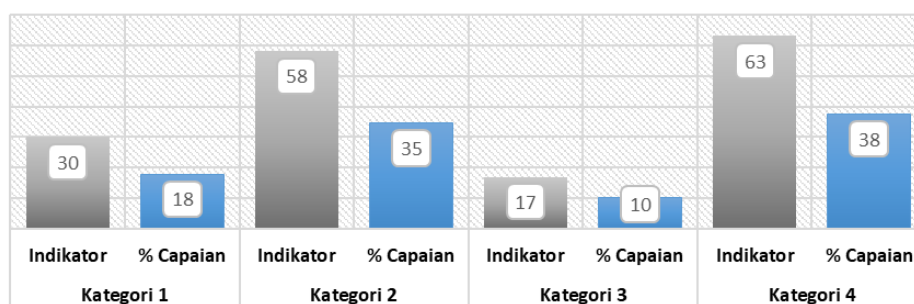
Keterangan:

- √ Indikator yang dapat dievaluasi
- Ø Indikator yang tidak dapat dievaluasi



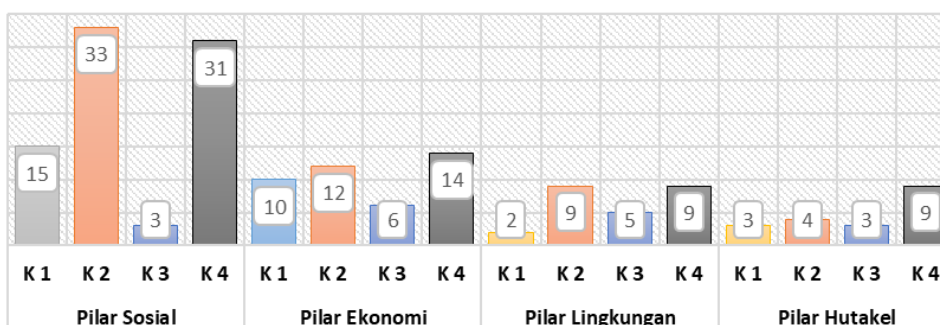
2.6 Evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Terhadap KLHS

Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan sebanyak 88 indikator (52,38%) dari 168 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Indikator-indikator tersebut telah tercantum di dalam Program dan Kegiatan pada OPD. Sebanyak 30 indikator (17,86%) yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sedangkan 58 Indikator (34,52%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Selanjutnya ada 17 indikator yang belum dilaksanakan dan 63 Indikator (37,50%) yang tidak memiliki data.



Grafik 2-41 Capaian Indikator TPB

Indikator terbanyak yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo terdapat pada Pilar Sosial, yaitu mencapai 82 indikator (48,81%), urutan selanjutnya adalah Pilar Ekonomi sebanyak 42 indikator (25%), Pilar Lingkungan 25 indikator (14,88%), kemudian Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 19 indikator (11,31%).



Grafik 2-42 Capaian Indikator TPB Pada Setiap Pilar

TPB yang telah dilaksanakan terbanyak terdapat pada **Pilar Sosial**: 48 indikator (54,55%), **Pilar Ekonomi**: 22 indikator (25,00%), **Pilar Lingkungan**: 11 indikator (12,50%) dan **Pilar Hukum dan Tata Kelola**: 7 indikator (7,95%).





SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

<p>Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>11</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">18</td></tr> </table>	1	2	3	4	2	11	1	4	18				<p>Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">11</td></tr> </table>	1	2	3	4	1	4	0	6	11				<p>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>11</td><td>7</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">28</td></tr> </table>	1	2	3	4	11	7	0	10	28				<p>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">13</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	7	2	4	13			
1	2	3	4																																																
2	11	1	4																																																
18																																																			
1	2	3	4																																																
1	4	0	6																																																
11																																																			
1	2	3	4																																																
11	7	0	10																																																
28																																																			
1	2	3	4																																																
0	7	2	4																																																
13																																																			
<p>Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">12</td></tr> </table>	1	2	3	4	1	4	0	7	12				<p>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">12</td></tr> </table>	1	2	3	4	1	4	4	3	12				<p>Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">1</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	0	0	1	1				<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>9</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">19</td></tr> </table>	1	2	3	4	3	9	3	4	19			
1	2	3	4																																																
1	4	0	7																																																
12																																																			
1	2	3	4																																																
1	4	4	3																																																
12																																																			
1	2	3	4																																																
0	0	0	1																																																
1																																																			
1	2	3	4																																																
3	9	3	4																																																
19																																																			
<p>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">9</td></tr> </table>	1	2	3	4	1	3	0	5	9				<p>Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	0	0	3	3				<p>Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">6</td></tr> </table>	1	2	3	4	1	2	1	2	6				<p>Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">1</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	1	0	0	1			
1	2	3	4																																																
1	3	0	5																																																
9																																																			
1	2	3	4																																																
0	0	0	3																																																
3																																																			
1	2	3	4																																																
1	2	1	2																																																
6																																																			
1	2	3	4																																																
0	1	0	0																																																
1																																																			
<p>Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">1</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	1	0	0	1				<p>Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">0</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	0	0	0	0				<p>Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	0	2	0	2	4				<p>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">19</td></tr> </table>	1	2	3	4	3	4	3	9	19			
1	2	3	4																																																
0	1	0	0																																																
1																																																			
1	2	3	4																																																
0	0	0	0																																																
0																																																			
1	2	3	4																																																
0	2	0	2																																																
4																																																			
1	2	3	4																																																
3	4	3	9																																																
19																																																			
<p>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">10</td></tr> </table>	1	2	3	4	6	0	3	1	10				<p>CAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN NAGEKEO</p>		<p>CAPAIAN INDIKATOR</p> <p>KATEGORI</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>30</td><td>58</td><td>17</td><td>63</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">168</td></tr> </table>	1	2	3	4	30	58	17	63	168																											
1	2	3	4																																																
6	0	3	1																																																
10																																																			
1	2	3	4																																																
30	58	17	63																																																
168																																																			

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD, 2021

Gambar 2-14 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Kabupaten Nagekeo telah berhasil mencapai 30 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 17,86 persen dari 168 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo. Capaian tersebut proporsinya adalah 34,09 persen jika dibandingkan dengan jumlah indikator TPB yang telah dilaksanakan sebanyak 88 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2-43 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sebanyak 11 indikator.

Tujuan (*goal*) yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Nagekeo dan sudah mencapai target nasional adalah sebanyak 10 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB/SDGs dengan jumlah indikator sebanyak 30 indikator atau 17,86 persen dari total indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 168 indikator. Ke-30 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tersebut harus dipertahankan tingkat capaiannya agar tetap baik bahkan dapat diupayakan untuk ditingkatkan lagi melalui perancangan dan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat dan berkelanjutan serta tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang tercakup dalam 30 indikator tersebut, namun tidak memerlukan upaya tambahan (*business as usual*).



2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional

Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun Belum mencapai target nasional adalah sebanyak 58 indikator dari 168 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo. Indikator pada kategori ini terdapat pada 12 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB, dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 2-44 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target

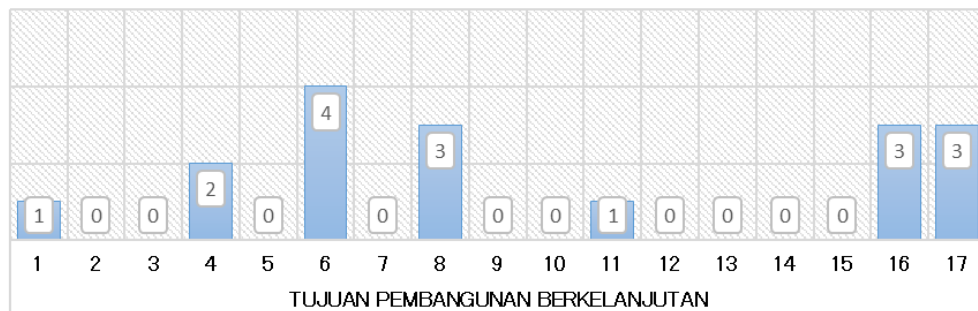
Dari grafik dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional adalah Tujuan 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) sebanyak 11 indikator, selanjutnya Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) sebanyak 9 indikator, selanjutnya tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) masing-masing sebanyak 7 indikator. Dengan demikian, Kabupaten Nagekeo masih memiliki tugas untuk menyelesaikan sejumlah 58 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 maupun RPJMN tahun 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan diperlukannya upaya-upaya tambahan pada tahun-tahun mendatang agar tujuan pencapaian target nasional dapat tercapai.



Tujuan (*goal*) yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional adalah sebanyak 12 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB dengan jumlah target 32 dan jumlah indikator sebanyak 58 indikator dari total keseluruhan indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo sebanyak 168 indikator. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target harus ditingkatkan capaiannya melalui upaya tambahan.

3. Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Jumlah indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum mencapai target nasional sebanyak 17 indikator yang terdiri atas tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) 4 indikator, Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua), 16 (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan) dan 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan) masing-masing 3 indikator. Selanjutnya Tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) ada 2 indikator. Selebihnya Tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) masing-masing sebanyak 1 indikator. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB Belum dilaksanakan dan belum mencapai target ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 2-45 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target

Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum mencapai target nasional ada 17 indikator dari 7 TPB. Dibandingkan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan, jumlah indikator yang masuk dalam kategori-3 ini lebih sedikit, namun Pemerintah Kabupaten Nagekeo harus tetap berusaha untuk mengimplemantasikan 17 indikator tersebut melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi OPD yang ada di Kabupaten Nagekeo.

4. Indikator TPB yang Tidak/Belum Ada Data

Masih terdapat sejumlah indikator yang belum memiliki data. Jumlah indikator TPB yang Belum memiliki data sebanyak 63 indikator atau 37,50 persen dari jumlah indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo sebanyak 168 indikator. Indikator TPB yang belum mempunyai data ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB yang belum memiliki data ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 2-46 Indikator TPB yang Belum Memiliki Data

Terdapat 15 TPB dari 16 TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo yang belum memiliki data sehingga belum dapat dilakukan pengolahan data untuk mengetahui capaian dan gap terhadap RPJMN atau target nasional. Jumlah indikator TPB yang belum memiliki data dengan jumlah tertinggi adalah pada **Tujuan 3** (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) sebanyak 10 indikator dan diikuti **Tujuan 16** (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) sebanyak 9 indikator. Selanjutnya **Tujuan 5** (Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) dan **Tujuan 2** (Menghilangkan Kelaparan) berturut-turut sebanyak 7 dan 6 indikator; **Tujuan 9** (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) sebanyak 5 indikator. Sedangkan sepuluh tujuan lainnya memiliki jumlah indikator yang belum memiliki data masing-masing sebanyak ≤ 4 indikator.

Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian capaian 16 TPB indikator pembangunan berkelanjutan yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang dianalisis terbanyak, yaitu TPB 3 diikuti TPB 8, TPB 16, dan TPB 1. Jumlah indikator ke-4 TPB tersebut sebanyak 84 indikator atau 50 persen dari total indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo.



Rincian tingkat ketercapaian ke-4 TPB dimaksud adalah:

- 1. Tujuan 1** yaitu tanpa kemiskinan, merupakan tujuan dengan jumlah indikator menduduki peringkat keempat dengan jumlah indikator yang dinilai sebanyak 18 indikator atau 10,71 persen dari total keseluruhan indikator. Dari TPB ini sebanyak 2 indikator (11,11%) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target; 11 indikator (61,11%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 1 indikator belum dilaksanakan, dan 4 indikator belum memiliki data;
- 2. Tujuan 3** yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera, merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang dinilai paling banyak yaitu 28 indikator atau 16,67 persen dari total keseluruhan indikator. Sebanyak 11 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 7 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dan 10 indikator belum memiliki data;
- 3. Tujuan 8** yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak, merupakan TPB dengan jumlah indikator menduduki peringkat dua, dengan total indikator yang dinilai sebanyak 19 indikator atau 11,31 persen dari total keseluruhan indikator. Dari 12 indikator yang sudah dilaksanakan baru 3 indikator sudah mencapai target nasional dan 9 indikator lainnya belum mencapai target nasional, sedangkan 3 indikator belum dilaksanakan serta 4 indikator yang tidak memiliki data;
- 4. Tujuan 16** yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 19 indikator. Dari 7 indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 indikator sudah mencapai target nasional dan 4 indikator yang belum mencapai target nasional, sedangkan 3 indikator belum dilaksanakan serta 9 indikator belum memiliki data.





Tabel 2-57 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
<p>1 NO POVERTY</p>	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(b) 1.4.1.(j)	2
<p>2 ZERO HUNGER</p>	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5	2.2.2.(b)	1
<p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* 3.1.2* 3.1.2.(a)	3
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1* o 2.2* 3.2.2.(a)	3
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1.(a) 3.3.2.(a) 3.3.3*	3
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	1
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1.(b)	1
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the <i>Doha Declaration</i> tentang <i>The TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1(a)	1
	<p>5 GENDER EQUALITY</p>	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.2.(a)
<p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	Pada tahun 2030, meningkatkan Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(c)	1
	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1.(a)	1






8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) 8.3.1.(b)	2
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1*	1
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.2*	1
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1.(a)	1
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.1.(b)	3
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(c)	1
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b)	1
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c)	3
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d)	3
10 TUJUAN	20 TARGET	30 INDIKATOR	



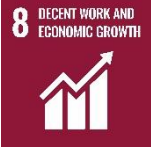
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021







Tabel 2-58 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

SDGs	INDIKATOR		TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. Target RPJMN 2024: 90%	Dinas Kesehatan	85%	85%	90%	93%	90%
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Target RPJMN 2024: 100%	Disdukcapil	25,49%	66%	83,22%	89,15 %	89,24 %
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Target RPJMN 2024: 60%	Dinas Kesehatan	68,3%	64%	76%	68,5%	76,2%
	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). Target RPJMN 2024: 183	Dinas Kesehatan	149	201	159	84	160
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).		98,5%	99,6%	99,7%	92,3%	100%
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 16		1,5	0	2	3,4	3,2
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 10		11	13	7,6	11,3	5,2
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). Target RPJMN 2024: 16		4,8	2,8	2	2,5	4,4
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Target RPJMN 2024: 0,18%		Dinas Kesehatan	0	14 Orang	0	0



SDGs	INDIKATOR		TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Target RPJMN 2024: 190		41,97	100	162	112	93
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2024		3,2	0,4	0,1	0,1	-
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Target RPJMN 2024: 34,1%		NA	49	48,30	18	20,5
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012- 2013: 18,3%).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluar Berencana	54,79%	57,79%	57,36%	36,56%	38,88%
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 96%	Dinas Kesehatan	79,04 %	NA	71,43 %	100%	100%
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Dinas PMD dan P3A	NA	NA	100%	100%	100%
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/ kel. yang melaksanakan STBM menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Target RPJMN 2024: 90%	Dinas Kesehatan	71	53	82	100	113
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Meningkatnya PDB per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Bappelitbangda	1,77 T	1,93 T	2,10 T	2,24 T	2,24 T
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). Target RPJMN 2024: 51%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	NA	NA	NA	90%	57,5 %



SDGs	INDIKATOR		TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		NA	NA	NA	53,34 %	61%
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		Rp. 1.320.000 /bln	Rp. 1.425.000 /bln	Rp. 1.825.000 /bln	Rp. 1.850.000 /bln	Rp. 1.985.000 /bln
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 15,7 juta (naik dari 14,9 juta)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	NA	NA	NA	7,47 %	8,61 %
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (baseline 014:60,9%)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60,83 %	62,63 %	64,63 %	NA	64,63%
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki- laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	NA	NA	L= 0 %, P= 100 %	L=45,45 %, P=54,55	L=11,7 6 %, P=18,2 4%
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	Meningkatnya penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Bappelitbangda	90%	93%	95%	96%	98%
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Target RPJMN 2024: 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,49%	66%	83,22%	89,15 %	89,24 %
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik	91,92 %	96,23 %	100%	100%	98,57 %
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSD sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Badan Pusat Statistik	84%	95,83 %	90%	90,32 %	78,13 %

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021

Tabel 2-59 Tujuan dan target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
1 NO POVERTY 	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	1
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(b) 1.3.1.(c) 1.3.1.(d)	3
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(d) 1.4.1.(e) 1.4.1.(g) 1.4.1.(hg)	4
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a) 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(d)	4
2 ZERO HUNGER 	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a)	1
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional	2.2.1* 2.2.2* 2.2.2.(a)	3
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	1
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.2*	1
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.2.(a)	1
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	• 7.1* 3.7.1.(a) 3.7.2*	3
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	• 8.2* 3.8.2.(a)	2
	4 QUALITY EDUCATION 	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(a) 4.1.1.(b) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e) 4.1.1.(g)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan		4.2.2.(a)	1



SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
	prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar		
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	4.c.1*	1
5 GENDER EQUALITY 	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1.(a) 5.2.2*	2
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.5.1*	1
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	5.6.1.(a)	1
6 CLEAN WATER AND SANITATION 	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a) 6.2.1.(b) 6.2.1.(d)	3
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2.(b)	1
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1*	1
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2.(a)	1
	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	8.6.1*	1
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(a) 8.9.1.(b) 8.9.2*	3
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	8.10.1.(a)	1
	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	• c.1* 9.c.1.(a) 9.c.1.(b)	3
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.5.1.(a) 11.5.1.(c)	1






SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
13 CLIMATE ACTION 	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.2*	1
15 LIFE ON LAND 	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	15.1.1.(a)	1
	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1.(a)	1
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1.(a)	1
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(b)	1
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	16.7.1.(a) 16.7.1.(b)	2
12 TUJUAN	32 TARGET	58 INDIKATOR	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021

Tabel 2-60 Capaian Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJM 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Target RPJM 2024: 6-7%	Dinas Sosial	42,59 %	42,17 %	41,66 %	41,31 %	46,27 %
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kepesertaan Program SJSN Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	52 Orang	18 Orang	134 Orang	313 Orang	397 Orang
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12% (2015: 14,84%)	Dinas Sosial	3,74 %	7,26 %	0,76 %	15,01 %	9,35 %
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).		3,245	3,238	6,679	NA	NA
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Dinas Kesehatan	NA	55 %	90,5 %	93 %	NA
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.		49 %	44 %	76,4 %	91 %	92 %
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,56 %	90 %	89,06 %	100 %	93,45 %



SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).		53,5 %	83 %	70,93 %	83,49 %	65,59 %
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah)	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	9 Lokasi	11 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	3 Lokasi
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).		NA	27 %	15 %	NA	NA
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Badan Penanggulangan Bencana	NA	NA	10 Desa	10 Desa	2 Desa
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013:19,6 %).	Dinas Kesehatan	3 %	2,9 %	2,1 %	8 %	14 %
	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 14%		38 %	39 %	30,2 %	11,6 %	22,1 %
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	9,4%	NA
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).		95	110	75	NA	NA
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Dinas Kesehatan	2.675	2.479	1.967	NA	NA





SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polres	NA	NA	NA	4	3
	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). Target RPJMN 2024: 63,4%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31,42 %	32,50 %	NA	NA	32,5
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15- 49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.		57,4 %	56,2 %	50,2 %	64,28 %	64,95 %
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>) atau kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR</i>) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48). Target RPJMN:18	Dinas Kesehatan	86,1	NA	NA	90,8	89
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 98%		27.80	25,3	68.60	60,8	24,5
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Bappelitbangda	41%	NA	NA	NA	41 %
	4 QUALITY EDUCATION 	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%). Target RPJMN 2024: 84,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	NA	NA	NA	5,65 %
4.1.1.(b)		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	16,67 %		6,67 %	13,33 %	8,93 %	3,57 %



SDGs	INDIKATOR	TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Target RPJMN 2024: 81,33%							
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118,25 %	106,48 %	102,95 %	102,09 %	100,37 %	
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015:100,7%).		84,64 %	88,02 %	85,54 %	131,13 %	85,05 %	
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). Target RPJMN 2024: 9,18 tahun		8,94 Tahun	8,94 Tahun	8,32 Tahun	8,90 Tahun	8,94 Tahun	
	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).		83,72%	58%	57,95%	62%	60,31%	
	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 81,8%		TK = 4,48%	4,95 %	5,20%	7,94%	7,94%	
SD =				NA	NA	13,40%	25,47%		
SMP=			NA	NA	24,89%	25,41%			
5 GENDER EQUALITY	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	66,7 %	82,35 %	100%	54,55 %	88,24 %	
	5.2.2* Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		66,7 %	82,35 %	100 %	54,55 %	88,24 %	
	5.6.1.(a) <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurunnya <i>unmeetneed</i> kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012 - 2013: 11,4 %). Target RPJMN 2024: 7,4 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	22,54%	24,01%	21,39%	17,53%	16,30%	





SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
6 CLEAN WATER AND SANITATION 	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun & air	Dinas Kesehatan	9,34 %	14,24 %	NA	NA	Meningkat
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79,36 %	64,90 %	NA	NA	64,90%
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 90%	Dinas Kesehatan	9 Desa	8 Desa	13 Desa	12 Desa	16 Desa
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Dinas Lingkungan Hidup	100	91	91	NA	91% (menurun)
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024 : 5,5 - 6,5%	Bappeda	3,27 %	3,86 %	NA	NA	3,86%
	8.5.2.(a)	pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 3,6 - 4,3%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	NA	NA	NA	56,74 %	48,94%
	8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.		NA	NA	NA	14,07 %	23,13%
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Dinas Pariwisata	197 Wisatawan	371 Wisatawan	220 Wisatawan	474 Wisatawan	0
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		9082	8952	11676	14478	7040
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Target RPJMN 2024: 15 Juta (naik dari 13 juta)		93 Pekerja	110 Pekerja	149 Pekerja	162 Pekerja	1038 Pekerja





SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Bank= 15,3 unit ATM= 57,5 unit	Bappelitbangda	NA	NA	NA	NA	Bank = 13 unit, ATM = 20 Unit
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Bappeda/ Bagian Perkonomian dan SDA	30 KM	30 KM	30 KM	30 KM	30 KM
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobilebroadband</i> .	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinas Komunikasi dan Informasi	NA	70,09	71,52	69,07	70,67
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		37,38	41,88	65,71	69,01	70,67
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		NA	14,20	19,08	23,81	26,26
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	171 (Tinggi)	167 (Tinggi)	161 (Tinggi)	156 (Tinggi)	152 (Tinggi)
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		NA	NA	NA	10 Buah Rambu	1 Unit Stasiun
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		NA	NA	NA	6 Orang	0
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019. Target RPJMN 2019: Meningkatkan dan/atau mempertahankan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup	28.549	28.549	28.549	28.549	28549



SDGs	INDIKATOR		TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024	OPD PELAKSANA	CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polres	NA	1	1	1	0
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemda (Provinsi/Kab./Kota).	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target RPJMN 2024: B ke atas 100%	Bagian Organisasi	56,18 %	60,06 %	61,81 %	62,35 %	62,67 %
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0
	16.7.1.(b)	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I =20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Badan Pegawai dan Pendidikan Latihan	19.31 %	18.88 %	18.88 %	NA	NA




Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021



Tabel 2-61 Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan

SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(c)	1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1*	1
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1*	1
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(f)	1
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.1.(b)	1
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	6.4.1.(b)	1
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	6.5.1.(g)	1
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1*	1
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2*	1
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(c)	1



SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.2*	1
 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1* 16.6.1.(a)	2
	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	16.b.1.(a)	1
 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	Memperkuat mobilisasi sumberdaya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meingkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1* 17.1.1.(a) 17.1.2*	3
7 TUJUAN	14 TARGET	17 INDIKATOR	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021

Tabel 2-62 Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data

SDGs	TARGET (ISU STRATEGIS)	INDIKATOR	
 1 NO POVERTY	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a)	1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(k)	1
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* 1.a.2*	2
 2 ZERO HUNGER	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a)	3
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1.(a) 2.2.2.(c)	2



	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala, dan nelayan termasuk melalui akses yang aman dan sama	2.3.1*	1
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.5*	1
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a) 3.4.1.(c)	2
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1.(e) 3.5.2*	2
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.2.(a)	1
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a)	1
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	3.9.3.(a)	1
	Memperkuat pelaksanaan <i>The Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1*	1
	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1*	1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1*	1
	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1*	1
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1*	1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1.(a) 4.6.1.(b)	2
	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	4.a.1*	1



<p>5 GENDER EQUALITY</p>	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1* 5.3.1.(a)	2
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.5.2*	1
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	5.6.1* 5.6.1.(b)	2
<p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a) 6.1.1.(b) 6.1.1.(c)	3
<p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	Bauran energi terbarukan	7.2.1*	1
<p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	8.2.1*	1
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1.(c)	1
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1*	1
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	8.10.1.(b)	1
<p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1* 9.2.1.(a)	2
	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.1* 9.3.2*	2
	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan	9.5.1*	1
<p>10 REDUCED INEQUALITIES</p>	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1*	1



	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	1
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	10.3.1.(a)	1
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.2.(a)	1
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1.(a)	1
	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.2.(a)	1
	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1.(a)	1
	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1.(a)	1
	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	1
	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.2.(a) 16.1.3.(a) 16.1.4*	3
	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.1.(a) 16.2.3.(a)	2
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	16.5.1.(a)	1
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1* 16.9.1.(a)	2
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2.(c)	1
	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan Negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(d)	1
15 TUJUAN	46 TARGET	63 INDIKATOR	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021



2.7 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memenuhi taraf hidup masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

4. Bidang Urusan Pendidikan

Ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan yang dilaksanakan dalam penerapan SPM di daerah yakni:

1. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 13 indikator pelayanan.
2. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dengan 14 indikator pelayanan

5. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar untuk bidang urusan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo adalah terdapat 12 indikator yang terdiri dari:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar



6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10. Upaya Kesehatan Jiwa pada orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

6. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat
2. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
3. Penyediaan air minum
4. Penyediaan sanitasi
5. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
6. Perizinan Jasa Konstruksi
7. Informasi Penataan Ruang

7. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 2 (dua) indikator pendukung SPM yakni Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana alam dan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Yang Terkena Relokasi pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar





menyelenggarakan jenis pelayanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

9. Bidang Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar untuk bidang urusan sosial yang terdapat di Kabupaten Nagekeo adalah terdapat 5 indikator yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

Berdasarkan evaluasi SPM urusan sosial untuk semua pelayanan dasar memiliki capaian yang sangat tinggi dan untuk indikator yang belum dapat di evaluasi karena Dinas Sosial tidak pernah melakukan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis, karena sesuai data yang ada di Dinas Sosial, tidak terdapat gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Nagekeo.





Tabel 2-63 Realisasi SPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
A	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		
I.	Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota		
1.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang Setiap Rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap Rombel	SD SMP	92 76 N/A 90%
2.	Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik Disetiap SMP dan/MTs tersedia 1 satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	33 N/A
3.	Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya,	SD SMP	90 100 33,93% 44%
4.	Disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SMP	98 78%
5.	Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik	SD	53 99,40%
	Disetiap satuan pendidikan tersedia 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100 100%
6.	Disetiap SMP/MTs yang tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	43 94,90%
7.	Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik SI atau D-IV	SD	55 100%
	Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	27 N/A
8.	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan ,untuk daerah khusus masing-masing sebanyak	SD	26 78%
	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV telah memiliki sertifikat pendidik Minimal 35% dan untuk daerah khusus 20%	SMP	26 12%
9.	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA Bahasa Indonesia, dan Bahasa	SMP	34 1%
10.	Semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	19 51,19%
11.	Semua Kepala sekolah SMP/Mts berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	45 58%
12.	Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik	SD	100 100%
13.	Kabupaten /Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif		100 N/A
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD SMP	23 25 N/A 75%
II.	Pendidikan Dasar oleh Satuan Dasar Pendidikan		
15.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya Oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SD	97 N/A



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	
16.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya Oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	89	N/A
17.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan Optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	98	N/A
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	75	72,02%
		SMP	89	58%
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	50	N/A
		SMP	32	96%
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut a) Kelas I 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX . 27 jam per minggu;		18	100%
21.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku,	SD	89	98,21%
		SMP	96	N/A
22.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	SD	82	100%
		SMP	57	100%
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	SD	67	N/A
		SMP	47	96%
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	SD	67	N/A
		SMP	47	96%
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	SD	63	N/A
		SMP	43	100%
26.	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian ekhbir (USIUN) kepada orang tua peserta didik	SD	91	97%
		SMP	51	100%
27.	Kepala Sekolah menyampaikan Rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada kepada Dinas Pendidikan Kab atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester;	SD	91	N/A
		SMP	57	N/A
28.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD	100	95%
		SMP	100	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Target		Realisasi	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
B	BIDANG URUSAN KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3.919	100	2.484	63,38%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.741	100	2.484	66,40%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.663	100	2.506	70,33%
4	Pelayanan kesehatan balita	16.508	100	8.301	50,28%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	18.915	100	10.634	56,22%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	89.349	100	784	46,76%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	21.839	100	10.317	47,24%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	34.435	100	6.428	18,67%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	1.657	100	1.016	65,25%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	116	100	151	130,17%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.917	100	1.763	91,97%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	4.188	100	2.295	54,80%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Target	Realisasi
C	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM		
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100	81,84
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100	100
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100	50,25
4	Tersedianya tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	44,43	44,81
5	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum	100	81,84
6	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	100	97,06
7	Tersedianya layanan izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100	100
8	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota	100	100
D	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Persentase Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial	100	100
E	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar	100%	76.19%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	N/A



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Target	Realisasi
F	BIDANG URUSAN SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	95,26%
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	85,71%
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	99,84%
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	N/A
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	100%

Sumber: *Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Nagekeo; Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nagekeo Tahun 2020, 2021*



P-RPJMD

2018-2023



3

BAB III
GAMBARAN UMUM
KEUANGAN DAERAH



BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis tingkat capaian dari target yang ditetapkan dan direalisasikan sehingga memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis Keuangan Daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan daerah yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan mendorong atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pencapaian diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Rasio Keuangan untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah adalah



sebagai berikut yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Kecerahan Belanja dari APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo sementara untuk mengukur Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan dengan Perhitungan Share and Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Perubahan paradigma pembangunan nasional yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah merupakan sebuah langkah strategis dalam menjawab permasalahan ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah dengan kemampuan sendiri. Namun harapan tersebut sulit diwujudkan ketika mencermati hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD dimana masih sangat tinggi tingkat ketergantungan fiskal baik provinsi maupun pemerintah pusat.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut memberi dampak pada berkurangnya anggaran untuk membiayai pembangunan daerah (belanja publik), sehingga kapasitas fiskal yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan daerah sangat tergantung pada besar kecilnya kegiatan operasional pemerintah daerah (belanja aparatur). Kapasitas fiskal yang terbatas, memacu pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah agar dapat menutupi defisit fiskal dan mengelola potensi-potensi pengeluaran pembiayaan daerah untuk memanfaatkan surplus fiskal.





3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen yang sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan, terutama menghadapi berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer yang mengharuskan daerah harus mampu meningkatkan kemampuan fiskalnya. Pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten Nagekeo tahun 2016-2020 adalah 2,40 persen. Pertumbuhan terbesar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 29,61 persen. Sementara itu, penerimaan dari PAD Kabupaten Nagekeo masih sangat kecil. Rata-rata pertumbuhan PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2016-2020 sebesar 4,19 persen. Rendahnya PAD ini merupakan indikasi yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan Daerah kita kepada pusat.

Peluang peningkatan PAD masih sangat besar. Tax Ratio Kabupaten Nagekeo tahun 2021 sebesar 2,3 persen. Hal ini berarti masih terbuka peluang yang cukup besar untuk meningkatkan PAD di masa yang akan datang. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan potensi PAD yang cukup besar untuk digali dan dikembangkan.





**Tabel 3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	722.085.467.322,77	759.738.196.694,67	696.630.225.672,54	792.635.809.857,57	784.151.338.330,89	2.40
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.671.653.790,77	32.372.074.879,96	30.850.179.938,54	31.068.286.543,57	33.159.170.059,48	2.96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.826.537.828,00	3.861.828.983,00	3.987.565.806,00	4.104.233.825,00	4.060.107.523,00	1.51
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.082.418.594,00	2.848.254.837,75	2.892.244.913,00	2.605.747.079,00	2.867.696.241,48	-1.48
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah	3.569.456.788,00	4.347.398.602,00	4.084.564.733,00	4.090.136.438,00	3.809.587.236,35	2.26
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	19.193.240.580,77	21.314.592.457,21	19.885.804.486,54	20.268.169.201,57	22.421.779.058,65	4.22
2.1	PENDAPATAN TRANSFER	611.055.750.156,00	576.105.600.035,00	559.693.838.683,00	638.951.136.810,00	570.980.766.458,00	-1.26
2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	611.055.750.156,00	576.105.600.035,00	559.693.838.683,00	638.951.136.810,00	570.980.766.458,00	-1.26
	Dana Bagi Hasil Pajak	10.222.127.518,00	7.908.197.999,00	6.631.577.497,00	5.831.166.209,00	6.514.114.523,00	-9.78
	Dana Bagi Hasil SDA	463.088.638,00	715.762.654,00	771.495.651,00	690.575.649,00	933.322.195,00	21.75
	Dana Alokasi Umum	433.196.524.000,00	429.644.584.000,00	432.406.320.000,00	454.351.825.000,00	412.477.821.000,00	-1.08
	Dana Alokasi Khusus	167.174.010.000,00	137.837.055.382,00	119.884.445.535,00	178.077.569.952,00	151.055.508.740,00	0.70
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.358.063.376,00	151.260.521.779,71	106.086.207.051,00	122.616.386.504,00	180.011.401.813,41	29.61
1.3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60.300.341.000,00	121.559.350.000,00	75.953.714.000,00	86.209.887.000,00	112.865.822.000,00	27.12
	Dana Penyesuaian	814.956.000,00	45.504.203.000,00	0,00	0,00	23.710.906.000,00	1.333,94
	Dana Desa	59.485.385.000,00	76.055.147.000,00	75.953.714.000,00	86.209.887.000,00	89.154.916.000,00	11.16
1.3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.084.165.287,00	15.101.232.305,71	13.911.932.384,00	17.327.327.750,00	15.803.314.333,41	11.03
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.084.165.287,00	15.101.232.305,71	13.911.932.384,00	17.327.327.750,00	15.803.314.333,41	11.03
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3	Bantuan Keuangan	1.206.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	1.206.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Pendapatan Hibah	8.767.557.089,00	808.411.000,00	13.761.620.667,00	19.079.171.754,00	30.673.337.000,00	402.73
1.3.5	Pendapatan Lainnya	0,00	13.791.528.474,00	2.458.940.000,00	0,00	20.668.928.480,00	-

Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020



3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2016-2020 sebesar minus 1,65 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan belanja daerah sebesar minus 2,25 persen pada tahun 2018 akibat besarnya SiLPA dan penurunan belanja pada tahun 2020 sebesar minus 6,82 persen akibat *refocusing* dan realokasi berkaitan dengan penanggulangan *Covid-19*.

Sementara itu, rerata pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2016-2020 sebesar 3,34 persen yang bersumber dari *refocusing* dan realokasi untuk penanggulangan covid-19 pada belanja bantuan sosial sebesar 630,23 persen dan belanja tidak terduga sebesar 200,82 persen serta belanja hibah sebesar 25,27 persen. Sedangkan rerata pertumbuhan belanja langsung tahun 2016-2020 mengalami kontraksi sebesar minus 6,38 persen. Hal ini disebabkan karena rerata penurunan belanja modal sebesar minus 12,71 persen akibat *refocusing* dan realokasi berkaitan dengan penanggulangan *Covid-19*.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada kebutuhan dukungan pembiayaan dari pusat melalui APBN dan DAK Agar mendorong pariwisata di Nagekeo yang telah dikembangkan, juga mendorong sumber pendanaan lain baik melalui APBN, Provinsi maupun KPBU dan CSR.





Tabel 3-2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Daerah	775.936.291.838,80	736.553.625.109,94	719.985.970.970,34	774.330.245.043,25	721.550.188.332,04	-1.65
1.1	Belanja Tidak Langsung	358.870.166.356,00	363.952.917.481,00	379.414.390.562,00	394.901.930.764,00	409.115.521.617,00	3.34
1.1.1	Belanja Pegawai	239.323.708.907,00	220.337.225.281,00	233.925.061.253,00	249.661.834.301,00	243.883.463.855,00	0.66
1.1.2	Belanja Hibah	6.471.012.500,00	16.294.690.000,00	15.951.917.355,00	5.627.855.000,00	6.533.900.000,00	25.27
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	250.750.000,00	180.290.000,00	109.720.000,00	2.899.600.000,00	4.216.650.000,00	630.23
1.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	603.891.000,00	659.262.000,00	678.838.600,00	735.851.000,00	496.388.926,00	-3.00
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	111.739.871.200,00	125.664.154.200,00	126.015.653.200,00	132.976.790.463,00	136.310.005.709,00	5.19
1.1.6	Belanja Tidak Terduga	480.932.749,00	817.296.000,00	2.733.200.154,00	3.000.000.000,00	17.675.113.127,00	200.82
1.2	Belanja Langsung	417.066.125.482,80	372.600.707.628,94	340.571.580.408,34	379.428.314.279,25	312.434.666.715,04	-6.38
1.2.1	Belanja Pegawai	29.516.672.380,00	36.339.816.375,00	45.872.083.195,00	31.426.590.158,00	31.834.199.015,00	4.79
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.194.385.577,00	146.080.861.971,00	143.787.372.833,34	148.696.186.655,35	163.157.134.824,75	2.87
1.2.3	Belanja Modal	241.355.067.525,80	190.180.029.282,94	150.912.124.380,00	199.305.537.465,90	117.443.332.875,29	-12.71

Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020

Tabel 3-3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Pembiayaan Netto	117.355.533.675,24	64.854.621.619,21	86.424.836.467,94	61.614.967.554,86	78.110.474.113,64	-3.35
3.1	Penerimaan Pembiayaan	117.355.533.675,24	64.854.621.619,21	88.424.836.467,94	63.114.967.554,86	80.110.474.113,64	-2.52
3.1.1	Penggunaan SilPA Tahun Lalu	116.679.901.953,24	64.629.351.619,21	88.230.365.467,94	63.011.098.554,86	79.920.824.613,64	-2.46
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	675.631.722,00	225.270.000,00	194.471.000,00	103.869.000,00	189.649.500,00	-11.08
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.08
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemda	-	-	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	-25.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-

Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka neraca adalah salah satu komponen dari Laporan Keuangan yang sangat penting dalam melakukan perhitungan kinerja keuangan daerah tersebut, dan data yang ada pada pos-pos dalam neraca ini kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan seperti Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Leverage (Mahmudi, 2016)

Tabel 3-4 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016-2020

NO	RASIO KEUANGAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Likuiditas					
	Rasio Lancar	12,95 : 1	22,52 : 1	18,12 : 1	6,57 : 1	6,27 : 1
	Rasio Kas	7,71 : 1	15,92 : 1	11,76 : 1	4,97 : 1	5,06 : 1
	Rasio Cepat	8,56 : 1	17,70 : 1	13,39 : 1	5,41 : 1	5,55 : 1
	Working Capital to Total Aset	0,06 : 1	0,07 : 1	0,05 : 1	0,05 : 1	0,07 : 1
2	Rasio Solvabilitas	188,87 : 1	329,02 : 1	335,76 : 1	115,90 : 1	76,21 : 1
3	Rasio Utang (Leverage)					
	Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,01 : 1	0,00 : 1	0,00 : 1	0,01 : 1	0,01 : 1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020, diolah

Rasio Lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi hutangnya, nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Untuk Kabupaten Nagekeo Rasio Lancar tahun 2016 adalah 12,95 : 1, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 6,27 : 1 penurunan rasio ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 sudah menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga ada penurunan nilai pada sisi aset yaitu penurunan jumlah aset lancar dikarenakan adanya penyisihan piutang dan pada aset tetap dikarenakan adanya penyusutan aset tetap. Walaupun terjadi penurunan pada nilai aset untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi nilai rasionya masih dianggap aman artinya keuangan Pemerintah



Kabupaten Nagekeo pada dua tahun tersebut masih dalam kategori lancar. Penurunan ini juga otomatis berimbas pada rasio likuiditas lainnya, rasio solvabilitas dan rasio leveragenya.

Rasio Kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek/surat berharga yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Nagekeo rasio kasnya pada tahun 2016 adalah 7,71 : 1 dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,06 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dapat memenuhi utang yang harus segera dipenuhi.

Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik. Rasio ini bermanfaat untuk Pemerintah daerah dalam membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang lancar. Untuk Kabupaten Nagekeo tahun 2016 rasio cepatnya sebesar 8,56 : 1, tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,55 : 1. Walaupun terjadi penurunan rasio ini masih pada batas aman, semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah.

Working Capital to Total Aset Ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi kerja netto. Analisis modal kerja ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik. Rasio modal kerja Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 adalah 0,06 : 1 dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,07 : 1.





Hal ini menunjukkan bahwa, likuiditas organisasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori aman.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas untuk Kabupaten Nagekeo pada tahun 2016 adalah 188,87 : 1 dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 76,21 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi dalam dua tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Nagekeo secara keuangan sangat likuid dan solvabel bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (*over likuid*).

Rasio utang (*leverage ratio*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit, rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Komponen dari rasio utang ini adalah rasio utang terhadap ekuitas.

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over leverage*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Untuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2016 rasionya adalah 0.01 : 1 dan pada tahun 2020 tetap sebesar 0.01 : 1. Besaran rasio ini masih relatif sangat kecil sehingga masih dalam batas aman.

Selanjutnya mengenai gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 3-5.





Tabel 3-5 Neraca Daerah Pemerintah Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	27.630.671.303,21	45.123.653.500,94	10.361.911.195,86	20.147.431.222,31	64.714.277.367,61
Kas di Bendahara Penerimaan	203.303.382,00	353.200,00	-		
Kas di Bendahara Pengeluaran	332.804.190,00	77.780.265,00	60.000,00	8.624.043,00	
Kas di BLUD	7.176.536,00	709.458,00	27.351.808,00	96.211.400,00	135.829.523,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	2.904.256.985,00	2.310.602.059,00	1.544.604.730,00	1.807.659.713,00	22.205.712.437,00
Kas Dana BOS	5.341.080.140,00	2.906.463.126,00	2.831.882.082,00	7.254.611.408,00	2.391.163.756,00
Setara Kas	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.346.191,00	57.430.187,00
Jumlah Kas	71.419.292.536,21	90.419.561.608,94	64.765.809.815,86	89.343.883.977,31	144.504.413.270,61
Piutang Pajak	3.368.605.372,00	1.951.039.319,00	2.204.324.182,00	2.740.219.922,00	2.712.039.447,00
Piutang Retribusi daerah	1.070.300.316,00	1.151.129.620,00	1.238.088.440,00	1.342.096.357,00	1.629.363.407,00
Piutang BLUD	743.862.000,00	832.504.406,00	1.077.114.886,00		
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	176.221.600,00	0,00	1.183.545.189,00	1.404.506.193,00
Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Pusat	3.637.583.688,00	3.124.470.860,00	4.721.256.712,00	4.478.899.966,00	5.617.340.605,00
Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Provinsi	2.166.830.762,00	4.858.654.483,88	1.693.432.862,00	807.452.514,00	1.757.739.131,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.160.491,85
Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.450.627.607,34)	(2.640.379.962,06)	(2.993.079.091,72)	(3.447.296.860,72)	(4.078.985.567,67)
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	221.903.333,33	220.403.333,33	302.063.333,33	302.063.333,33	302.063.333,33
Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	177.988.944,00	140.713.944,00	454.881.444,00	446.456.444,00	593.841.444,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	0,00	402.383.112,25	402.383.112,25	433.981.872,94	433.981.872,94
Piutang Lain - Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(46.828.283,33)	(118.305.265,55)	(128.513.477,73)	(308.742.213,67)	(409.662.055,33)
Jumlah Piutang	7.889.618.524,66	10.098.835.450,85	8.971.952.402,13	7.978.676.523,88	14.227.388.302,12
Persediaan	40.631.291.979,02	27.373.325.579,18	24.660.018.202,96	20.735.133.065,12	20.503.515.349,95
Jumlah Persediaan	40.631.291.979,02	27.373.325.579,18	26.033.989.089,39	20.735.133.065,12	20.503.515.349,95
JUMLAH ASET LANCAR	119.940.203.039,89	127.891.722.638,97	99.771.751.307,38	118.057.693.566,31	179.235.316.922,68
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman kepada Koperasi, UKM dan Pokmas	8.837.641.230,00	8.434.951.105,17	8.182.405.447,70	9.848.902.103,00	9.659.252.603,00
Investasi Non Permanen Lainnya	1.019.310.000,00	1.019.310.000,00	1.019.310.000,00		
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih				(1.363.186.176,50)	(3.657.602.379,50)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	28.699.670.000,00



U R A I A N	REALISASI (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	32.856.951.230,00	32.454.261.105,17	34.201.715.447,70	33.485.715.926,50	34.701.320.223,50
ASET TETAP					
Tanah	765.293.609.660,00	764.352.907.660,00	764.521.625.660,00	775.713.073.993,71	770.140.914.631,71
Peralatan dan Mesin	128.556.911.043,64	150.825.318.771,65	158.132.271.123,46	184.277.084.216,55	240.485.543.093,72
Gedung dan Bangunan	283.904.477.192,44	307.790.848.198,39	348.367.926.416,56	426.651.820.842,52	460.400.224.407,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	576.529.676.487,54	657.647.674.830,72	796.652.497.102,60	886.403.766.247,07	946.061.335.101,52
Aset Tetap Lainnya	21.064.819.025,69	18.218.786.156,58	20.995.273.689,58	23.966.712.031,58	24.846.672.511,58
Konstruksi dalam Pengerjaan	104.163.465.362,92	120.412.239.025,44	79.583.734.657,39	99.126.947.739,51	73.827.959.370,87
Akumulasi Penyusutan	(313.264.755.510,46)	(374.852.738.827,79)	(498.443.033.740,83)	(530.302.260.382,92)	(620.493.552.120,07)
JUMLAH ASET TETAP	1.566.248.203.261,77	1.644.395.035.814,99	1.669.810.294.908,76	1.865.837.144.688,02	1.895.269.096.997,31
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	81.960.000,00	81.960.000,00	-	-	-
Tagihan Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	1.833.452.328,00	2.318.757.588,36	2.692.082.628,44	7.272.388.629,54	7.803.356.863,57
Aset Tak Berwujud	2.340.007.960,00	2.116.805.650,00	1.905.518.340,00	3.835.839.600,00	2.090.961.143,00
Aset Lain-Lain	25.780.407.849,00	59.362.568.269,06	40.171.129.517,53	84.490.322.823,66	58.062.172.716,32
JUMLAH ASET LAINNYA	30.035.828.137,27	63.880.091.507,41	44.768.730.485,97	66.532.233.676,86	68.046.490.722,89
JUMLAH ASET	1.749.081.185.668,92	1.868.621.111.066,54	1.848.552.492.149,81	2.083.912.787.857,69	2.177.252.224.866,38
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.573.503.237,00	2.380.014.674,00	1.696.718.645,72	9.423.351.608,12	3.792.789.158,12
Hutang Beban	-	29.000.000,00	-	-	-
Hutang Jangka Pendek Lainnya	6.687.478.300,20	3.270.422.850,00	3.808.887.680,00	8.557.521.553,74	24.776.839.961,21
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.260.981.537,20	5.679.437.524,00	5.505.606.325,72	17.980.873.161,86	28.569.629.119,33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	9.260.981.537,20	5.679.437.524,00	5.505.606.325,72	17.980.873.161,86	28.569.629.119,33
EKUITAS	1.739.820.204.131,72	1.862.941.673.542,54	1.843.046.885.824,09	2.065.931.914.695,83	2.148.682.595.747,05
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	1.749.081.185.668,92	1.868.621.111.066,54	1.848.552.492.149,81	2.083.912.787.857,69	2.177.252.224.866,38



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan Tabel 3-5 di atas realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020 dengan penyerapan rata-rata belanja daerah sebesar (-) 6,29%, dengan rata-rata penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar (-) 5,28% dan Belanja Langsung sebesar 7,34%.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditampilkan pada Tabel 3-6 sebagai berikut:



Tabel 3-6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Aparatur Daerah	320.875.142.012,00	313.388.875.160,00	335.440.564.477,00	339.513.853.334,68	331.664.162.122,00
1.1	Belanja Tidak Langsung	239.323.708.907,00	220.337.225.281,00	233.925.061.253,00	249.661.834.301,00	243.883.463.855,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	203.634.581.327,00	186.036.629.641,00	195.068.004.673,00	211.313.357.601,00	212.621.173.790,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	34.129.127.580,00	32.559.995.640,00	36.779.856.580,00	36.158.476.700,00	29.072.290.065,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.560.000.000,00	1.740.600.000,00	2.077.200.000,00	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**	-	-	-	-	-
1.2	Belanja Langsung	81.551.433.105,00	93.051.649.879,00	101.515.503.224,00	77.899.737.575,00	78.443.707.995,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	9.405.647.600,00	10.155.399.000,00	10.969.417.248,00	11.066.374.500,00	14.856.246.000,00
2	Belanja Honorarium Non PNS**)	18.615.186.000,00	24.093.320.125,00	32.751.511.947,00	14.794.979.808,00	8.324.840.040,00
3	Belanja Honorarium Non Pegawai**)	-	420.450.000,00	225.800.000,00	2.191.700.000,00	2.237.050.000,00
4	Upah Kerja	2.264.056.698,00	1.961.019.417,00	2.033.891.087,00	2.244.667.100,00	13.175.101.320,00
5	Belanja Uang Lembur**)	1.495.838.780,00	1.620.857.250,00	1.815.744.000,00	1.627.452.500,00	1.905.740.200,00
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.315.000.000,00	1.375.000.000,00	1.355.000.000,00	1.180.000.000,00	970.000.000,00
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	-	330.492.000,00	36.714.135,00	60.000.000,00	1.084.866.526,00
8	Belanja premi asuransi kesehatan	7.169.909.555,00	7.524.611.941,00	8.464.375.574,00	8.996.918.139,00	8.515.131.906,00
9	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	665.457.146,00	755.725.000,00	583.726.516,00	504.455.150,00	736.934.250,00
10	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	467.062.700,00	362.700.500,00	357.852.750,00	540.863.280,00	369.329.000,00
11	Belanja pakaian kerja**)	235.230.000,00	49.750.000,00	86.442.000,00	137.414.750,00	101.700.000,00
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	239.253.000,00	257.356.000,00	214.007.750,00	292.156.230,00	103.513.000,00
13	Belanja perjalanan dinas**)	39.678.791.626,00	44.144.968.646,00	42.621.020.217,00	34.262.756.118,00	26.063.255.753,00
14	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Modal (Kantor, Mobil dan Motor Dinas, Meubelair, peralatan dll)	9.796.697.400,00	11.612.438.715,00	4.310.425.028,00	11.952.281.458,68	9.336.990.272,00
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.127.194.500,00	3.829.739.000,00	-	1.598.699.733,91	971.293.000,00
2	Pengadaan Alat Kantor	233.176.000,00	290.986.000,00	375.758.462,00	1.163.499.009,00	1.230.209.628,00
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.785.652.350,00	3.400.324.572,00	1.768.369.784,00	5.632.696.853,77	4.314.675.654,00
4	Pengadaan Komputer	2.660.298.500,00	3.179.117.143,00	1.779.005.782,00	3.360.078.657,00	2.106.022.878,00
5	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	381.658.000,00	219.051.000,00	28.015.000,00	25.812.000,00	36.300.000,00
6	Pengadaan Alat Studio	587.661.000,00	503.031.000,00	354.776.000,00	165.495.205,00	634.417.112,00
7	Pengadaan Alat Komunikasi	21.057.050,00	190.190.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	44.072.000,00



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 - 2020

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	2014	287.655.983.891,00	493.609.337.359,00	58,28%
2	2015	300.824.143.384,00	624.658.139.493,60	48,16%
3	2016	320.875.142.012,00	775.936.291.838,80	41,35%
4	2017	313.388.875.160,00	736.553.625.109,94	42,55%
5	2018	335.440.564.477,00	721.985.970.970,34	46,46%
6	2019	339.513.853.334,68	775.830.245.043,25	43,76%
7	2020	331.664.162.122,00	723.550.188.332,04	45,84%

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dalam sistem penganggaran di gunakan dalam memanfaatkan Surplus dan menutup Defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara apabila APBD diperkirakan memperoleh surplus, pemerintah daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran tersebut untuk melakukan investasi atau memberi pinjaman daerah kepada masyarakat melalui wadah IKM atau pokmas-pokmas. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran tahun 2016 - 2020.



Tabel 3-8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	722.085.467.322,77	759.738.196.694,67	696.630.225.672,54	792.635.809.857,57	784.151.338.330,89
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	775.936.291.838,80	736.553.625.109,94	719.985.970.970,34	774.330.245.043,25	721.550.188.332,04
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit riil	(53.850.824.516,03)	23.184.571.584,73	(25.355.745.297,80)	16.805.564.814,32	60.601.149.998,85

Tabel 3-9 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	722.085.467.322,77	759.738.196.694,67	696.630.225.672,54	792.635.809.857,57	784.151.338.330,89
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	775.936.291.838,80	736.553.625.109,94	719.985.970.970,34	774.330.245.043,25	721.550.188.332,04
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
A	Defisit riil	(53.850.824.516,03)	23.184.571.584,73	(25.355.745.297,80)	16.805.564.814,32	60.601.149.998,85
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	116.679.901.953,24	64.629.351.619,21	88.230.365.467,94	63.011.098.554,86	79.920.532.369,19
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	675.631.722,00	225.270.000,00	194.471.000,00	103.869.000,00	189.649.500,00
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	117.355.533.675,24	64.854.621.619,21	88.424.836.467,94	63.114.967.554,86	80.110.181.869,19
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	63.504.709.159,21	88.039.193.203,94	63.069.091.170,14	79.920.532.369,18	140.711.331.868,04



Tabel 3-10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SILPA	63.504.709.159,21	100	88.039.193.203,94	100	63.069.091.170,14	200,76	79.920.532.369,19	100	140.711.624.112,49	100
1	Pelampauan penerimaan PAD	1.548.446.775,77	2,44	749.106.915,21	0,85	2.287.368.276,54	3,63	2.029.440.986,57	2,54	818.555.402,00	0,58
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	939.250.245,00	1,48	2.211.335.689,71	2,51	0,00	0,00	1.521.076.293,00	1,90	466.967.819,00	0,33
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.560.667,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	38.523.763.359,24	60,66	69.155.948.157,02	78,55	44.031.376.281,60	69,81	51.959.127.315,88	65,01	67.100.599.186,92	47,69
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	6.687.478.300,20	10,53	3.270.422.850,00	3,71	3.808.887.680,00	6,04	8.557.521.553,74	10,71	3.722.549.585,21	2,65
6	Kegiatan lanjutan	15.805.770.479,00	24,89	12.652.379.592,00	14,37	10.549.898.265,00	16,73	15.853.366.220,00	19,84	68.602.952.119,36	48,75

Tabel 3-11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	116.679.901.953,24	64.629.351.619,21	88.230.365.467,94	63.011.098.554,86	140.711.624.112,49
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	9.260.981.537,20	5.679.437.524,00	1.696.718.645,72	9.423.351.608,12	3.792.789.158,12
3	Kegiatan Lanjutan	42.300.326.731,00	18.199.662.993,00	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	65.118.593.685,04	40.750.251.102,21	86.533.646.822,22	53.587.746.946,74	136.918.834.954,37

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, diolah 2021



3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah terkait struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2023. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja



Tabel 3-12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

NO	URAIAN	APBD		PROYEKSI 2023	Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.860.944.530	68.213.344.512	69.577.611.402	36,56%
4.1.01	Pajak Daerah	4.848.118.698	26.012.893.195	26.533.151.058,90	219,28%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.686.842.489	13.030.787.156	13.291.402.899,12	65,57%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.688.014.444	4.200.000.000	4.284.000.000,00	7,94%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.637.968.899	24.969.664.161	25.469.057.444,22	-0,30%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	668.476.224.613	684.481.194.518	698.170.818.408	2,20%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.978.178.377	661.983.148.282	675.222.811.247,64	2,24%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236	22.498.046.236	22.948.007.160,72	1,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.514.680.000	6.558.922.100	6.690.100.542	-27,86%
4.3.01	Pendapatan Hibah			-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.514.680.000	6.558.922.100	6.690.100.542,00	-27,86%
	Jumlah Pendapatan	723.851.849.143	759.253.461.130	774.438.530.353	3,45%
5.1	BELANJA OPERASI	519.862.944.565	540.069.276.534	507.490.737.516	-1,07%
5.1.01	Belanja Pegawai	277.492.973.965	319.690.084.331	326.083.886.017,62	8,60%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.938.329.050	175.659.301.963	135.792.563.453,26	-20,29%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	11.911.941.550	18.693.715.240	19.067.589.544,80	29,47%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.519.700.000	26.026.175.000	26.546.698.500,00	29,77%
5.2	BELANJA MODAL	195.016.705.275	118.951.240.133	124.235.914.936	-17,28%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	92.500.000	3.000.000.000	1571,62%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.477.183.609	14.808.293.491	15.104.459.360,82	-37,52%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.073.988.823	10.946.938.400	11.165.877.168,00	-37,85%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.368.300.521	80.751.903.282	82.366.941.347,64	1,87%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.079.432.322	12.351.604.960	12.598.637.059,20	247,99%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.800.000	-	-	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.791,56	47,76%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.791,56	47,76%
5.4	BELANJA TRANSFER	139.732.366.600	124.474.931.480	126.964.430.110	-4,46%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.063.000.000	1.052.020.780	1.073.061.195,60	0,48%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.669.366.600	123.422.910.700	125.891.368.914,00	-4,50%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.711.624.113	39.759.092.695	0	-85,87%
6.1.03	Pinjaman Daerah	-	0	-	0,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	141.711.624.113	40.759.092.695	1.000.000.000	-84,39%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				0,00%
6.2.01	Pengembalian Pinjaman pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo	-	-	0	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-		0	0,00%
	Pemberian Pinjaman	-		0	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%
	Pembiayaan Netto	136.711.624.113	35.759.092.695	-4.000.000.000	-92,51%



Tabel 3-13 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2021-2023

NO	BELANJA	APBD		PROYEKSI
		2021	2022	2023
5.1	BELANJA OPERASI	305.924.615.515	364.409.974.571	371.698.174.062
5.1.01	Belanja Pegawai	277.492.973.965	319.690.084.331	326.083.886.017,62
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.911.941.550	18.693.715.240	19.067.589.544,80
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.519.700.000	26.026.175.000	26.546.698.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.792
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.791,56
5.4	BELANJA TRANSFER	139.732.366.600	124.474.931.480	126.964.430.110
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.063.000.000	1.052.020.780	1.073.061.195,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.669.366.600	123.422.910.700	125.891.368.914,00
6.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Jumlah Belanja Periodik	456.608.438.931	505.402.011.729	515.410.051.964

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3-14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD		PROYEKSI
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	723.436.149.143,00	759.253.461.130,00	774.438.530.352,60
2	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	141.711.624.113	40.759.092.695	1.000.000.000
	Total Penerimaan	865.147.773.256,00	800.012.553.825,00	775.438.530.352,60
				Dikurangi :
3	Belanja dan pengeluaran Pembiayaan dan wajib dan mengikat	456.608.438.931	505.402.011.729	515.410.051.964
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	408.539.334.325,00	294.610.542.096,00	260.028.478.389,02

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022

Tabel 3-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD		Proyeksi
		2021	2022	2023
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	408.539.334.325,00	294.610.542.096,00	260.028.478.389,02
2	Prioritas I	183.842.700.446,25	132.574.743.943,20	117.012.815.275,06
3	Prioritas II	126.647.193.640,75	91.329.268.049,76	80.608.828.300,60
4	Prioritas III	98.049.440.238,00	70.706.530.103,04	62.406.834.813,36

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022



Dari Tabel 3-14 di atas, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo dari Tahun 2021-2023 dapat membiayai 3 (tiga) prioritas sebagaimana penjelasan berikut:

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan arahan ketentuan peraturan perundangan, misalnya pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pemenuhan SPM, contohnya untuk prioritas bidang pendidikan dan Kesehatan.

Program Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pemenuhan standar pelayanan minimal.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk program prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

c. Prioritas III

Merupakan program prioritas di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan prioritas dan berhubungan dengan program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan





layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III juga dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



P-RPJMD

2018-2023



4

BAB IV **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU** **STRATEGIS DAERAH**



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Secara umum bagian ini menguraikan dua bahasan utama, yaitu permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dan isu-isu strategis baik pada tataran global, nasional atau regional/Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo merupakan suatu kondisi/keadaan yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap tujuan pembangunan yang diharapkan. Sedangkan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi peluang atau permasalahan di masa yang akan datang. Artinya isu strategis bukanlah suatu kondisi aktual yang dapat diselesaikan atau dimanfaatkan, namun penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menjadikannya sebagai peluang atau permasalahan pembangunan di masa yang akan datang.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang sekolah yang lebih tinggi;
- 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah masih dibawah standar menamatkan pendidikan dasar (SD dan SMP);
- 3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf;





- 4) Adanya *Learning Lost* (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), *Learning Gap* (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid) dan ketertinggalan pembelajaran akibat pembelajaran melalui media daring.

2. Kesehatan

- 1) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat nagekeo, hal ini tergambar dari cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKI) dan status gizi bayi yang buruk (Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR dan stunting), serta masih terjadinya kasus kematian balita dan ibu;
- 2) Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan serta masih kurangnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana pendukung pada fasilitas – fasilitas kesehatan tersebut;
- 3) Masih kurangnya infrastruktur kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Minimnya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang meliputi jalan dan jembatan, sarana prasarana pemerintah dan infrastruktur publik lainnya;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;
- 3) Belum optimalnya sistem pelayanan air bersih, terutama tingkat pelayanan BLUD-SPAM;
- 4) Kurangnya pemeliharaan terhadap sumber air baku yang sudah ada;
- 5) Masih lemahnya pengendalian terhadap ketaatan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah.





4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah;
- 2) Belum adanya data base sasaran penerima penerima bantuan perumahan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Masih kurangnya personil Polisi Pamong Praja;
- 3) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah/lahan;
- 4) Masih tingginya potensi bencana alam.

6. Sosial

- 1) Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Upaya penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dengan basis data sasaran yang kurang valid;
- 3) Belum tersusunnya manajemen data kemiskinan secara dinamis *by name by adres* lintas perangkat daerah dan belum sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan.

4.1.2 Urusan Wajib Non-Layanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

- 1) Minimnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor formal;
- 2) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalam partai politik;
- 2) Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;



- 3) Masih rendahnya peran pemberdayaan bagi perempuan serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam mengelola faktor-faktor produksi dalam mendukung ekonomi keluarga.

3. Ketahanan Pangan

- 1) Masih diperlukan penanganan serius terkait tingkat keamanan pangan karena dipengaruhi oleh pasokan dari daerah lain;
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi.

4. Lingkungan Hidup

- 1) Masih kurangnya keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup;
- 2) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terutama terutama sumbangan tutupan lahan bagi kualitas lingkungan hidup.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah.

5. Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih rendahnya pelayanan Dokumen Kependudukan terutama penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- 2) Masih rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih banyaknya desa dengan status Desa Tertinggal dan masih adanya Desa Sangat Tertinggal;
- 2) Masih belum nampaknya peran BUMDes sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa;
- 3) Masih rendahnya kualitas aparatur desa baik dari segi kemampuan administratif maupun kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.





7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat dari tingginya kelahiran (natalitas);
- 2) Masih rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam menggunakan alat kontrasepsi.

8. Perhubungan

- 1) Masih minimnya infrastruktur transportasi untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan moda transportasi yang melayani daerah - daerah terpencil;
- 3) Masih minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 4) Belum adanya sarana pengujian kendaraan bermotor serta SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

9. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Belum semua wilayah terjangkau jaringan telpon/internet.

10. Koperasi dan UMKM

- 1) Masih terbatasnya kapasitas SDM pelaku UMKM;
- 2) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM;
- 3) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan pada kelembagaan koperasi.

11. Penanaman Modal

- 1) Masih rendahnya minat investasi;
- 2) Belum optimalnya perizinan terpadu satu pintu berbasis *One Single Submission* (OSS).





12. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana olah raga serta event bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
- 2) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

13. Statistik

- 1) Masih minimnya ketersediaan data yang memenuhi standar data yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten dan belum berjalannya Satu Peta.

14. Kebudayaan

- 1) Melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda;
- 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan;
- 3) Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan cagar budaya untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal;

15. Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya upaya peningkatan literasi masyarakat;
- 2) Minimnya inovasi dalam mengembangkan minat baca masyarakat terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung perpustakaan digital (*e-library*).

16. Kearsipan

Belum adanya sistem manajemen arsip terpusat memanfaatkan teknologi informasi lewat pengarsipan digital.





4.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan;
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

- 1) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi wisata yang ada;
- 2) Belum tumbuhnya kultur wisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk mendorong terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat;
- 3) Kurangnya sinergi pada pengelolaan pariwisata antar instansi terkait;
- 4) Destinasi pariwisata belum dikembangkan kearah ekonomi kreatif yang terintegrasi;
- 5) Upaya penyiapan masyarakat dan pelaku pariwisata belum optimal;
- 6) Minimnya upaya promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 7) Minimnya infrastruktur dasar yang memudahkan aksesibilitas para wisatawan.

3. Pertanian

- 1) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian termasuk masih sangat rendahnya sumbangan hasil hutan bagi PDRB;
- 2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
- 3) Minimnya upaya ekstensifikasi lahan pertanian;
- 4) Adanya degradasi tanah akibat dari pemakaian bahan kimia dalam mengendalikan hama dan organisme pengganggu;
- 5) Keberadaan kelembagaan petani yang masih bersifat formalitas dan belum menjadi pendorong sektor pertanian;
- 6) Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM penyuluh pertanian.





4. Perdagangan dan Industri

- 1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pasar baik di tingkat kabupaten maupun pasar kecamatan;
- 2) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- 3) Dominasi barang impor (barang diimpor lebih besar dari barang yang diekspor);
- 4) Belum adanya produksi usaha mikro kecil dan menengah yang menembus pasar regional maupun nasional.

5. Peternakan

- 1) Belum optimalnya nilai tambah produk peternakan;
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan populasi dan produktifitas sektor peternakan;
- 3) Belum optimalnya pengendalian penyakit ternak.

4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

- 1) Masih adanya deviasi antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum berlangsung secara optimal;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD);
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana termasuk fungsional perencana yang ada di OPD.

2. Bidang Keuangan

- 1) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar;
- 2) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Belum diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah;



3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai;
- 2) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
- 3) Belum dilakukan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia ASN secara komprehensif.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan riset;
- 2) Belum adanya Rencana Induk Kelitbangan;
- 3) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Global

1. Ekonomi Global

Dana Moneter Internasional (IMF) pada triwulan IV tahun 2018 telah telah mengeluarkan laporan tentang *World Economic Outlook* yang mengatakan tren perlambatan ekonomi global masih akan tetap terjadi hingga 2020 mendatang. Beragam faktor kompleks yang mempengaruhi arah perekonomian global antara lain ancaman suku bunga di Amerika Serikat (AS), perlambatan ekonomi China, gejolak pasar keuangan dan kondisi geopolitik yang rapuh. Pelemahan harga komoditas dunia dan volatilitas nilai tukar mata uang mempengaruhi kondisi perekonomian global.

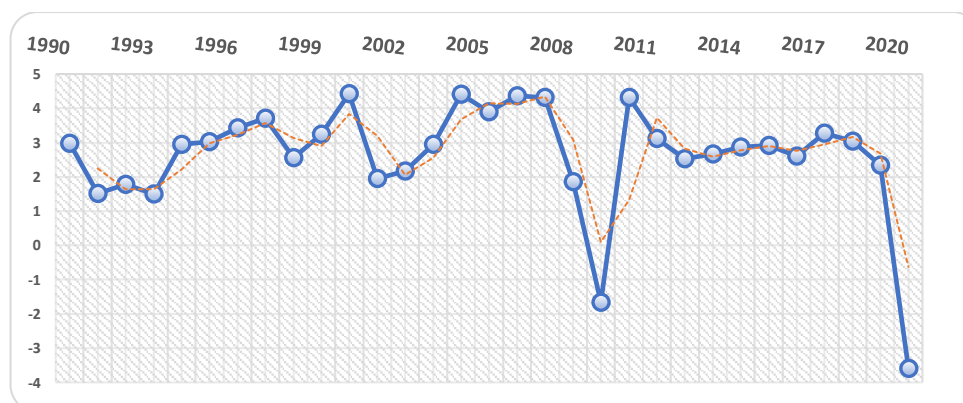
Tahun 2019, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju akan mengalami peningkatan sebesar 2 %, dan diperkirakan 1,7% di tahun 2020. Pada saat yang sama, ada juga perlambatan pertumbuhan di negara berkembang. IMF memproyeksi tingkat pertumbuhan 4,5% pada 2019 dan membaik menjadi 4,9% pada 2020. Meskipun pertumbuhan





perekonomian mulai menunjukkan gejala positif tetapi tetap perlu diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, China dan negara-negara sedang berkembang di Eropa. Selain itu adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kondisi di atas merupakan gambaran ekonomi dan proyeksi pertumbuhan yang diasumsikan pada keadaan beberapa tahun lalu. Namun dengan hantaman Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, optimisme pertumbuhan ekonomi yang membaik justru harus berkontraksi cukup dalam hingga turun menjadi -3,59% di tahun 2020. Jika dilihat dalam deret waktu 30 tahun ke belakang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 merupakan kondisi terparah yang dialami dalam sejarah perekonomian dunia pada kurun waktu tersebut.



Sumber: Bank Dunia, 2020

Grafik 4-1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 1990 - 2020

Meskipun demikian, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung di tahun 2021 akan tumbuh pada angka 5,6%. Jika angka pertumbuhan tersebut tercapai, maka hal ini merupakan loncatan ekonomi *post-recession* (setelah resesi) terbesar dalam kurun waktu 80 tahun ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa output global diperkirakan akan tumbuh di angka 4,9%, di mana angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelum terjadinya



Pandemi. Selain itu, pertumbuhan tersebut akan sangat bergantung kepada status ekonomi satu negara, di mana negara-negara yang relatif miskin akan tertinggal karena harus terus berjuang dalam menangani Pandemi Covid-19.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 telah menghantam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek kesehatan dan ekonomi di semua negara tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kasus secara global yang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 80.773.033 orang, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 1.783.619. Sementara di Indonesia sendiri, jumlah kasus terkonfirmasi positif adalah sebanyak 743.198 dengan jumlah sembuh sebanyak 611.097 (82,23%), 22.138 kasus meninggal (2,98%) dan sisanya kasus aktif.

Apabila dilihat dalam sejarah satu abad ke belakang, Pandemi Covid-19 bukanlah satu-satunya pandemi yang pernah dialami umat manusia. Pada tahun 1918-1920 pernah terjadi pandemi yang dikenal sebagai Flu Spanyol (*Spanish Flu*) yang diperkirakan menelan jumlah korban jiwa antara 17 – 100 juta. Kemudian pada tahun 1957-1958 telah terjadi juga pandemi yang disebut dengan Flu Asia (Asian Flu) dengan tipe H2N2. Hanya saja jumlah korban jiwa diperkirakan tidak sebanyak pada kejadian Flu Spanyol, yaitu antara 1-4 juta jiwa. Beberapa pandemi lainnya terjadi berurutan dari mulai Flu Hongkong (1968-1970), SARS (2002-2003), Flu Burung (2009-2010), Ebola (2014-2016), MERS (2012-sekarang), dan Covid-19 pada penghujung 2019 atau awal 2020 hingga sekarang.



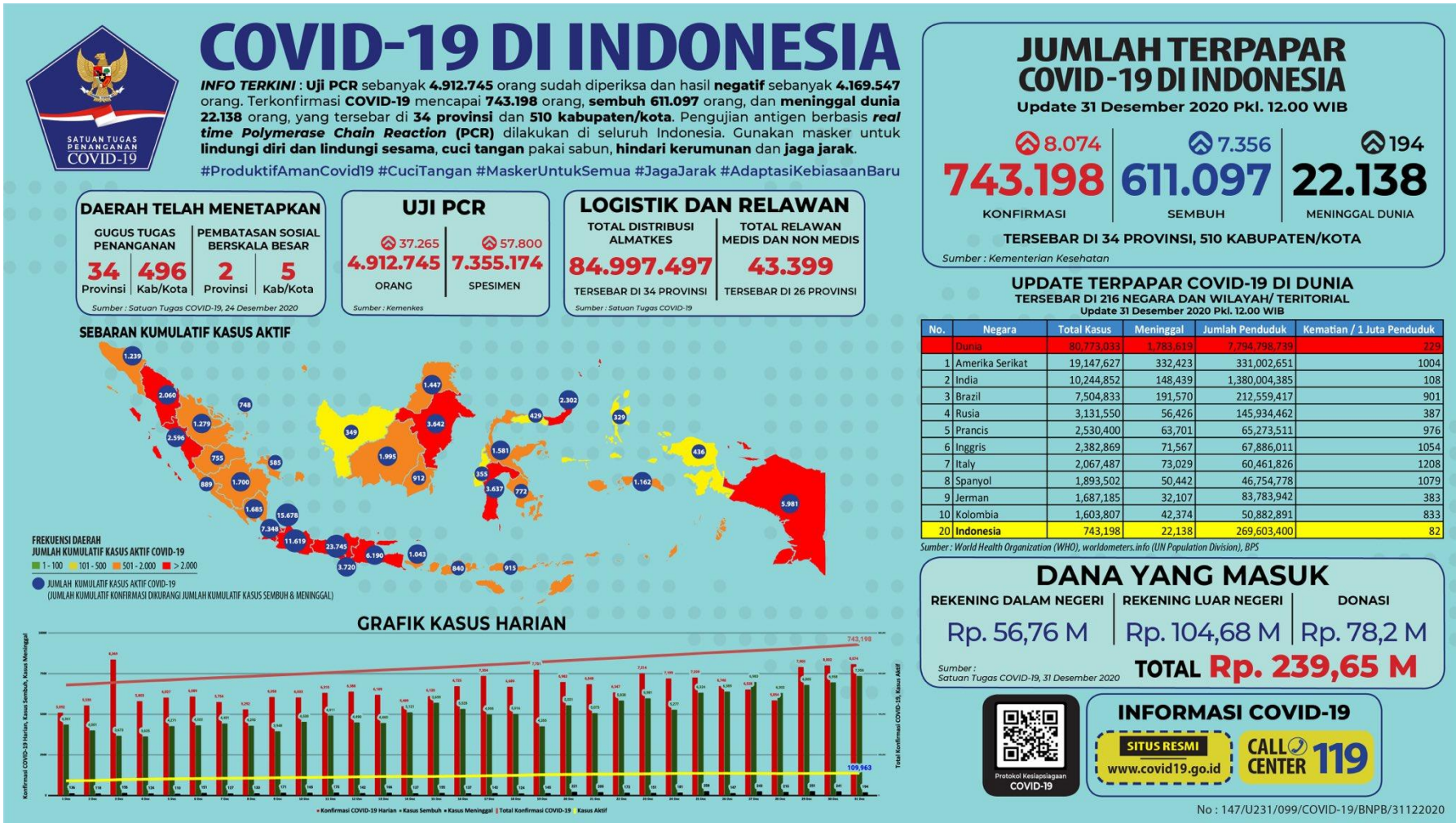


Apa yang membuat Pandemi Covid-19 ini berbeda dengan pandemi lainnya adalah karena krisis kesehatan ini menyebabkan krisis pada bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial. Di Indonesia sendiri, pembelajaran langsung di sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi masih harus dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring (*online*). Di samping itu, kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa dibatasi dengan kapasitas dan jenis kegiatan tertentu saja pada saat diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan penurunan produktivitas.

Pada konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang dihadapkan dengan kondisi pandemi yang melanda pada tahun 2020 dan berlangsung hingga saat ini, mengharuskan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan penyesuaian target dan/atau indikator kinerja pemerintahan yang terdampak olehnya. Beberapa kinerja sektor PDRB Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 mengalami penurunan laju pertumbuhan yang signifikan diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh hanya 0,54% dan industri pengolahan -2,11%, demikian juga untuk kinerja sektor pariwisata yang menurun di tahun 2020.

Berbagai dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-29, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2023. Sehingga pada perubahan RPJMD ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah rasionalisasi terhadap indikator-indikator target capaian yang terdampak seperti pada sektor-sektor yang telah disebutkan dan sektor-sektor lainnya baik pada indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja kunci Perangkat Daerah.





Sumber : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021.

Gambar 4-1 Kasus Terkonfirmasi Covid-19



3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kesepakatan dunia internasional dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait kemanusiaan, yang dirancang akan tercapai pada tahun 2030. Majelis Umum PBB menetapkan sebanyak 17 tujuan yang saling terkait, di mana pencapaiannya membutuhkan peran aktif seluruh negara, dan institusi yang berada di bawahnya.



Gambar 4-2 Sustainable Development Goals

	Mengakhiri kemiskinan dengan segala bentuknya	1
	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	2
	Menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua orang pada setiap tingkatan usia	3
	Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mempromosikan kesempatan belajar yang panjang untuk semua orang	4
	Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	5
	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	6
	Menjamin energi yang ramah lingkungan, terjangkau dan dapat diandalkan bagi semua orang	7
	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap, inklusif dan berkelanjutan serta mendorong tenaga kerja yang produktif, pekerjaan yang tetap dan layak bagi semua orang	8
	Membangun infrastruktur yang resilient (andal), industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan inovasi	9
	Mengurangi ketidakmerataan di dalam negara dan antarnegara	10
	Mewujudkan kota dan hunian masyarakat yang inklusif, aman, resilient dan berkelanjutan	11
	Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan	12
	Menetapkan aksi dalam menghadapi perubahan iklim dan segala macam dampaknya	13
	Melestarikan samudra, laut, dan sumber daya maritim dengan pemanfaatan yang berkelanjutan	14
	Melindungi, mengembalikan, dan mendorong penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan melawan deforestasi, serta menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan kerugian-kerugian keanekaragaman hayati.	15
	Mendorong perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, membuka akses keadilan bagi semua kalangan dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua tingkatan	16
	Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global demi pembangunan yang berkelanjutan	17

Selain 17 tujuan di atas, SDGs juga disertai dengan penetapan 169 target yang dikaitkan dengan sasaran dan lingkup agenda kegiatan bertema inklusif, berkelanjutan dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut kemudian menjadi agenda dunia selama 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia.

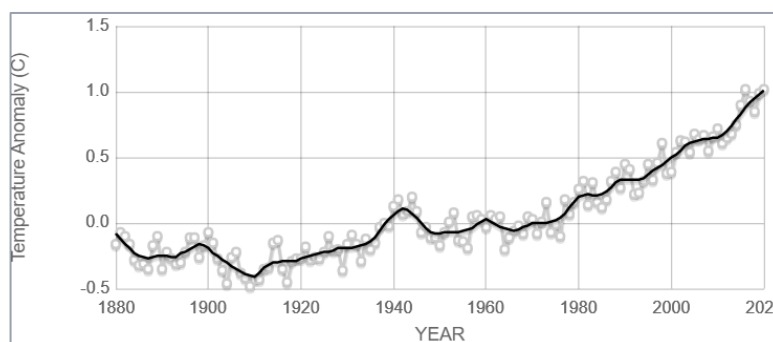




4. Lingkungan hidup

Isu lingkungan hidup yang paling menjadi perhatian seluruh dunia saat ini adalah isu perubahan iklim (*climate change*). Perubahan iklim merupakan akibat meningkatnya suhu bumi secara global (*global warming*) yang disebabkan oleh aktivitas manusia melalui pembakaran bahan bakar fosil, dan emisi gas rumah kaca. Dalam beberapa hal, perubahan iklim ini menjadi sebab terjadinya bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan, badai tropis, dan banjir yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut. Pada kasus lainnya, naiknya suhu global ini juga menjadi penyebab mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan.

Kenaikan suhu bumi secara global diamati sejak pra-industrialisasi hingga sekarang. Sejak periode pra-industrialisasi, aktivitas manusia telah meningkatkan rata-rata temperatur bumi secara global di angka 2°C . Kini angka tersebut meningkat $0,2^{\circ}\text{C}$ setiap satu dekade. Tren kenaikan tersebut diduga besar akibat dari aktivitas manusia sejak tahun 1950-an (NASA, 2020).



Sumber: NASA/ GISS, 2020

Grafik 4-2 Rata-rata Temperatur Global Tahun 1880-2020

Berdasarkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), setiap negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk menahan laju kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu hingga di bawah $1,5^{\circ}\text{C}$ dari



tingkat pra-industrialisasi. Langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim global. Komitmen ini juga sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjamin hak bangsa atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga penanganan perubahan iklim merupakan salah satu agenda penting nasional yang perlu diwujudkan bersama-sama dengan seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Dua agenda utama Pemerintah dalam menangani perubahan iklim adalah melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Adapun Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/ NDC*) pada periode pertama adalah target Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030. Sektor-sektor yang dijadikan target sasaran dalam penurunan emisi tersebut antara lain sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan juga pertanian.

5. Revolusi Industri

Era industri 4.0 yaitu industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan dan rekayasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi, hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah





satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna. Universal dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

6. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi pemerintah daerah ke depan. Kebutuhan tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi dan modal yang lintas batas negara menuntut kesiapan mengantisipasinya secara tepat dan cepat.

7. Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kebaikan tercepat kunjungan wisata yang merupakan hasil dari transformasi digital. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) mengatakan berbagai keberhasilan kebijakan *visa free, sustainable tourism observatories dan conservatories, go digital, story telling on tourism dan homestay* yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pariwisata di Indonesia.

UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “*Sustainable Tourism Development*” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan 5 *Sustainable Tourism Observatories* yang terus mengalami perkembangan positif.



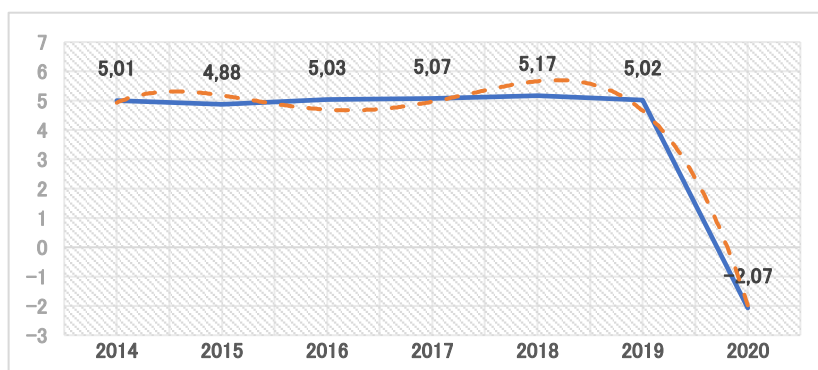


4.2.2 Isu Strategis Nasional dan Regional

A. Nasional

1. Perekonomian Nasional

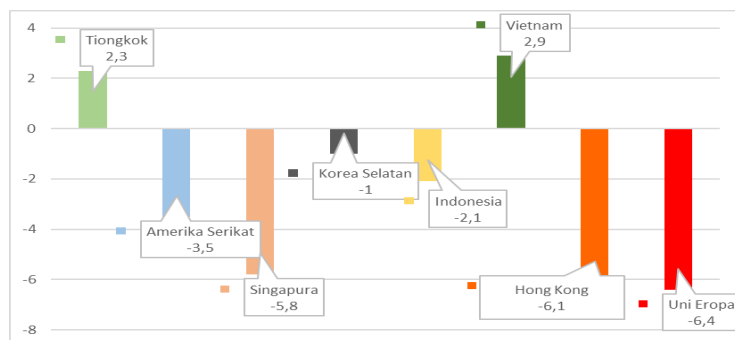
Perekonomian nasional pada tahun 2020 telah dihantam Pandemi Covid-19. Akibatnya Indonesia mengalami resesi, di mana ekonomi nasional pada kuartal II, III, dan IV mengalami pertumbuhan negatif, dengan angka pertumbuhan -1,26, -3,49% (yoy), dan -2,19% (yoy). Namun kondisi ini tidak terjadi pada kuartal I tahun 2020, dikarenakan pada saat itu Pemerintah belum menerapkan kebijakan PSBB sehingga pertumbuhan ekonomi nasional masih di angka 2,97%. Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 adalah -2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021).



Sumber: BPS, 2021

Grafik 4-3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2020

Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 hampir terjadi secara menyeluruh di dunia termasuk pada negara-negara mitra dagang Indonesia. Akan tetapi kontraksi tersebut tidak terjadi pada negara Tiongkok dan Vietnam, di mana pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut masing-masing adalah 2,3% dan 2,9% pada tahun 2020. Dari sekian negara mitra dagang Indonesia, pertumbuhan ekonomi terparah terjadi di Uni Eropa yaitu -6,4%.

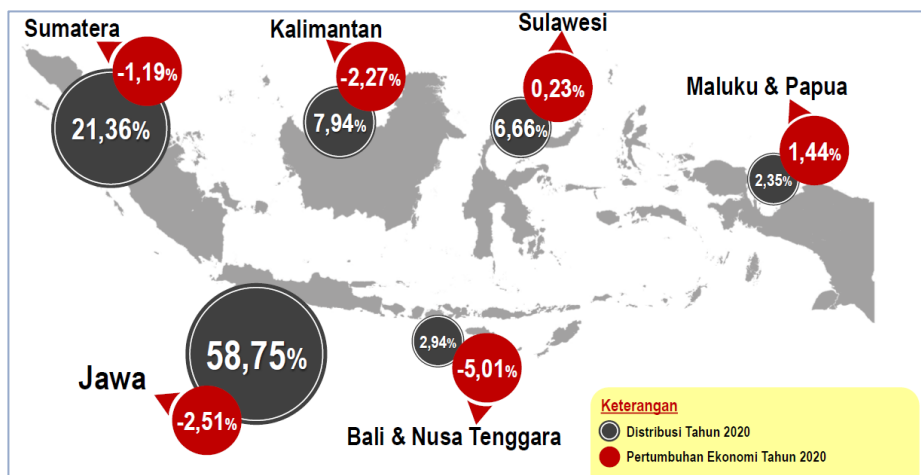


Sumber: BPS, 2021

Grafik 4-4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2020 menjadi -2,07% (c to c), namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal III. Bank Indonesia, memperkirakan kecenderungan ini secara bertahap akan semakin membaik di tahun 2021. Tren perbaikan tersebut, khususnya pada kuartal IV 2020 ditopang dengan realisasi stimulus dan kontribusi sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dilihat secara spasial, ekonomi nasional tahun 2020 masih didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 58,75%, kemudian disusul Koridor Sumatera sebesar 21,36%. Adapun kontribusi ekonomi Koridor Bali dan Nusa Tenggara terhadap nasional masih sebesar 2,94%. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 secara spasial memperlihatkan perbedaan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi Koridor Bali dan Nusa Tenggara merupakan yang paling terdampak akibat Covid-19 dengan pertumbuhan -5,01%. Sementara Koridor Maluku dan Papua masih memperlihatkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 1,44%.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 4-3 Perekonomian Indonesia Secara Spasial Tahun 2020

Rata-rata pertumbuhan ekonomi per koridor menunjukkan angka pertumbuhan negatif kecuali pada Koridor Maluku & Papua, serta Sulawesi. Dengan melemahnya perekonomian nasional pada tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, maka Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun atau meningkat 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020. Anggaran PEN tahun 2021 difokuskan pada lima bidang yaitu kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tentu perlu dukungan semua *stakeholders* termasuk pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Nagekeo. Sehingga kebijakan pembangunan Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023 juga berupaya untuk bersinergi dengan program nasional terutama dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan agenda pemulihan ekonomi.



2. Undang - undang Cipta Kerja

Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang - undang Cipta Kerja merupakan *Omnibus Law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum (sapu jagat). Undang - undang Cipta Kerja ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha dalam rangka peningkatan investasi. Selain itu, UU ini juga disusun untuk menyelesaikan hambatan dalam berinvestasi, khususnya dikarenakan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang masih saling tumpang tindih, serta banyaknya regulasi yang tidak harmonis khususnya pada regulasi daerah dan pusat. Pada dasarnya, melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi.

Deregulasi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.





3. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun. Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar Rp 4.092 triliun.

Sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bendungan Mbay Kabupaten Nagekeo merupakan 1 dari 11 bendungan baru proyek strategis nasional (PSN) yang rencananya dibangun pada 2021-2027.

Bendungan Mbay ini direncanakan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan anggaran Rp.1,915 triliun dan nantinya Bendungan Mbay ini akan menghasilkan air baku 0,21 m³/detik dan memberikan manfaat irigasi terhadap 5.899 ha lahan pertanian.



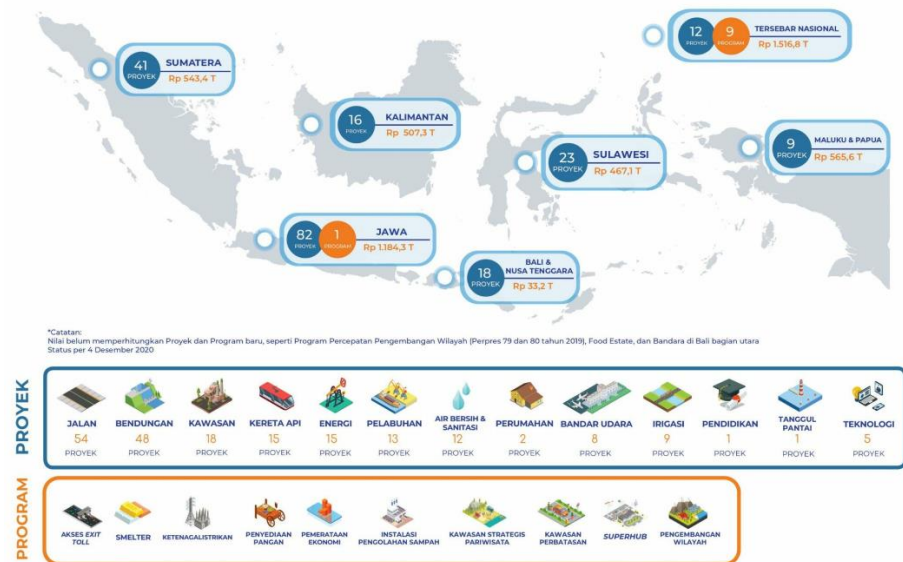


Bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo adanya investasi PSN pembangunan Bendungan Mbay memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri dan kehadiran PSN ini dapat menimbulkan *multiplier effect* secara sosial dan ekonomi. Selain itu dalam jangka pendek keberadaan PSN dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan berusaha bagi warga nagekeo.

Setiap pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur pasti mempunyai dampak sosial, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo harus mempunyai antisipasi terhadap dampak sosial yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan pembangunan Bendungan Mbay, potensi permasalahan itu terutama berhubungan dengan lahan masyarakat yang berada di area pembangunan Bendungan Mbay.

Sebaran Proyek Strategis Nasional

Di dalam Perpres No. 109 Tahun 2020, terdapat **201 Proyek** dan **10 Program PSN** dengan **nilai investasi sekitar Rp4.817,7 Triliun**.



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2021

Gambar 4-4 Sebaran Proyek Strategis Nasional



B. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni melibatkan semua stakeholders dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan kelembagaan.

Beberapa isu yang perlu diperhatikan sebagaimana dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 diantaranya adalah:

1. **Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan**

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

2. **Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan yang Berkelanjutan**

- Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.





Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017.

- Luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.
- Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%.
- Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.
- Belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.





4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 70,81%.





6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

7. Dampak Covid-19

Dampak Covid-19 mengharuskan Pemerintah NTT mengambil sejumlah kebijakan yang dapat menopang golongan masyarakat ekonomi rentan, salah satu kebijakannya dengan menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.





Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi. Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT melalui penguatan pada sisi produksi dan *demand*. Penguatan ini perlu diarahkan pada pengembangan *market place* bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.

4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Nagekeo

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Berdasarkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo, kajian terhadap isu-isu strategis global, nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur maka ditetapkan isu strategis sebagai acuan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode perencanaan tahun 2018 – 2023.

Isu – isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:





1. Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19 di Nagekeo

Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih terus berlangsung hingga kini, memerlukan perhatian dan penanganan serius dari setiap pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya melemahkan sistem kesehatan nasional, namun juga melemahkan ekonomi nasional hingga terjadi resesi di tahun 2020 lalu. Dampak ini juga dialami oleh semua daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Nagekeo, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melemah jika dibandingkan dengan periode tahun 2019, yaitu menurun dari 5,2% di tahun 2019 menjadi 0,62% di tahun 2020. Pada konteks perdagangan daerah, kebijakan PSBB dan juga PPKM mengakibatkan penurunan transaksi dagang yang signifikan seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terutama pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian pelaksanaan program perlindungan sosial untuk menjaring masyarakat-masyarakat miskin/rentan miskin agar daya beli masyarakat tetap terjaga sangat penting untuk dilakukan.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun terdampak akibat dari kebijakan ini, yang salah satu faktornya juga diakibatkan oleh turunnya mobilitas masyarakat. Program penguatan UMKM juga perlu menjadi perhatian utama, seperti dalam bentuk pelatihan/bimbingan *marketplace* (pasar online), dan penguatan modal untuk usaha agar sektor ini bisa tetap tumbuh. Sektor-sektor yang terdampak lainnya antara lain adalah transportasi, pariwisata, hotel dan restoran. Pandemi juga mengakibatkan angka pengangguran bertambah tinggi.

Untuk mengatasi persoalan dan isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyusun kebijakan ekonomi makro dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dilaksanakan dengan cara:





- a. Meningkatkan/mengoptimalisasikan sektor perekonomian yang selama ini memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB yakni pertanian, perikanan dan kehutanan, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi;
- b. Meningkatkan nilai ekspor produk barang dan jasa untuk mengimbangi besarnya impor yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan dalam daerah Kabupaten Nagekeo yang saat ini berada pada angka 41,41%;
- c. Menurunkan nilai ICOR Kabupaten Nagekeo dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan barang-barang modal untuk peningkatan pendapatan.
- d. Mendorong angkatan kerja baru untuk bergerak di sektor pertanian yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan;
- e. Mendorong sektor jasa dan ekonomi kreatif bagi angkatan kerja baru yang berpendidikan;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga vokasional untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan terlatih;
- g. Memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

Bersamaan dengan kebijakan makro terkait pemulihan ekonomi di atas, Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga menyusun strategi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai berikut:

- a. Penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan daerah
- b. Percepatan program vaksinasi
- c. Penerapan protokol kesehatan ketat dalam setiap aktivitas
- d. Evaluasi perkembangan dan penyesuaian kebijakan sesuai status PPKM daerah
- e. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
- f. Peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga
- g. Melanjutkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan pola new normal
- h. Memberikan prioritas pembangunan padat karya
- i. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;





- j. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara;
- k. Peningkatan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan pertumbuhan PDRB;
- l. Peningkatan kinerja sektor UMKM terhadap total nilai tambah sektor industri;
- m. Peningkatan proporsi pajak terhadap total PDRB.
- n. Pemberdayaan masyarakat lokal dan ibu rumah tangga
- o. Pemulihan segala aktivitas dengan beradaptasi pada kondisi pandemi.

2. Peningkatan pelayanan kependidikan dan kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo mengedepankan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, alokasi anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada aspek ekonomi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP. Di samping itu, peningkatan pelayanan kependidikan juga harus berfokus pada pemerataan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki untuk tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/sederajat.

Kebijakan ini perlu dilakukan melalui peningkatan pemenuhan SPM pendidikan dasar, peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif (persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B),





pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi pendidik untuk guru TK, SD, dan SMP.

Pembangunan bidang pendidikan, saat ini menemui isu baru yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi diantaranya adalah *learning lost* (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), *learning gap* (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid), dan ketertinggalan pelajaran secara umum. Untuk itu ke depan, butuh upaya-upaya yang lebih proaktif oleh tenaga pendidik seperti melakukan pendampingan guru terhadap murid yang tidak memiliki akses internet dan teknologi serta pelatihan literasi digital bagi guru untuk membantu peserta didik menemukan metode atau cara pembelajaran digital yang tepat.

Kemudian dalam pembangunan bidang kesehatan, tujuan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan semua pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo masih dihadapkan pada kondisi terbatasnya SDM kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun penyebarannya serta fasilitas kesehatan yang belum memadai. Terkait manajemen operasional rumah sakit dan puskesmas yang belum berjalan dengan baik juga merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga perlu diupayakan dengan peserja jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan.

Lalu dalam bidang ekonomi, masih terdapat tantangan pembangunan di mana tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo relatif masih tinggi. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka





mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang ditempuh harus didasarkan pada data yang akurat dan valid agar memenuhi prinsip tepat program dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

3. Pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo terletak pada daerah rawan letusan gunung berapi, rawan longsor, rawan banjir, kekeringan, kebakaran (padang rumput), dan tsunami sehingga kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana sudah saatnya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak (*stakeholder*) termasuk di dalamnya lembaga-lembaga swasta yang fokus terhadap kebencanaan dan perubahan iklim. Peringatan dini tentang bahaya letusan gunung api, banjir, tsunami dan rawan longsor disosialisasikan secara kontinyu kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana alam/bencana sosial. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, mulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat pemerintah. Di samping itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada murid-murid di sekolah tentang bagaimana cara menghadapi bencana-bencana yang mungkin terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena aspek penanganan kebencanaan membutuhkan integrasi kegiatan pra bencana (edukasi dan sosialisasi), saat bencana dan pasca bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan upaya penting dalam penanganan kebencanaan, di samping itu pendampingan psikososial bagi korban bencana.





4. Peningkatan produktivitas, ketahanan pangan dan daya saing ekonomi masyarakat yang berkelanjutan pada sektor pertanian, pariwisata dan sektor unggulan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir produktivitas pertanian di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan. Hal ini tentu berakibat pada penurunan PAD karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo. Peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan cara ekstensifikasi lahan pertanian khususnya pada lahan kering yang berpotensi dapat menjadi lahan sawah. Peningkatan produktivitas pertanian perlu didorong agar tidak terjadi kerawanan pangan, mengurangi jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, dan untuk mewujudkan Nagekeo sebagai salah satu lumbung pangan di NTT.

Di samping pertanian, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki. Optimalisasi pengembangan objek dan daya tarik wisata menjadi perhatian serius pemerintah untuk dapat menjadi pintu gerbang bagi masuknya pelancong nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain diharapkan akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya. Selain menambah daya tarik daerah tujuan wisata alam dan budaya, Nagekeo juga perlu memiliki bandara dan pelabuhan laut terbaik di Flores.

Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis perusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, kelautan serta pariwisata, guna mewujudkan ciri pembangunan ekonomi “strategi samudera biru” (*Blue Ocean Strategy*) sebagai daya saing ekonomi daerah.





5. Peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan.

Pembiayaan pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu dieksplorasi dan dilembagakan. Salah satu bentuk kearifan lokal Nagekeo: “**To’o Jogho Waga Sama**” yang berarti gotong royong adalah salah satu contoh mekanisme pembiayaan yang melibatkan masyarakat. Di dunia modern, pembiayaan yang melibatkan masyarakat kini dikenal dengan istilah “*Crowd Funding*”. Tanggung jawab dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme “tanggung jawab sosial perusahaan” (*Corporate Social Responsibility*) yang dilembagakan. Pengelolaan atas kedua jenis pembiayaan di atas harus dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah. Sinergitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional yang berkiprah di Nagekeo perlu ditingkatkan. Salah satu upayanya adalah membentuk Sekretariat Bersama LSM (Sekber-LSM) di lingkungan Bapelitbangda.

Tidak hanya itu, pembangunan juga memerlukan sentuhan budaya melalui integrasi nilai-nilai budaya leluhur. Budaya yang diwariskan oleh generasi terdahulu mengandung nilai luhur yang sangat bernilai. Nilai luhur yang dimaksud antara lain adalah: keharmonisan hubungan dengan pencipta, alam dan sesama; semangat melayani dan peduli sesama dengan tulus, sabar, jujur dan adil; semangat pengembangan diri yang terus menerus. Seluruh lapisan masyarakat Nagekeo perlu memahami, mendalami dan mengamalkan nilai luhur itu dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemahaman, pendalaman, dan pengamalan nilai luhur itu akan menjadi landasan moral dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.





6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar tingkatan pemerintahan.

Peningkatan pelayanan publik merupakan agenda kerja yang terus berkesinambungan sehingga membutuhkan suatu inovasi (pembaruan). Peningkatan pelayanan publik dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Peran teknologi dan informasi dalam peningkatan pelayanan publik menjadi begitu penting di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini supaya mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga agenda reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama pembentuk tata kelola pemerintah yang baik. Peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja pemerintahan yang transparan.

Saat ini masih belum semua penyelenggara pemerintahan (instansi) di Kabupaten Nagekeo dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu dibutuhkan *benchmarking* terhadap OPD di Nagekeo yang berhasil menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola tersebut, agar OPD lain dapat mengikuti dan menjadikannya sebagai *modelling* dalam membangun organisasi yang baik.





Presiden Joko Widodo telah mengarahkan untuk melakukan Reformasi Birokrasi berupa penyederhanaan Birokrasi guna meningkatkan Kinerja Organisasi dan memotong mata rantai pelayanan birokrasi dalam mempercepat pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut arahan presiden Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang **Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional**. Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik. Instansi pemerintah perlu melaksanakan beberapa tahapan. Tahapan itu antara lain identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang akan dialihkan, penyelarasan tunjangan dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, serta penyelarasan kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan Administrasi. Dengan penyederhanaan birokrasi ini Indonesia diharapkan mampu mereplikasi model-model organisasi yang lebih lincah, dinamis, dan fleksibel sehingga menjadi birokrasi yang responsif terhadap perubahan dan tantangan ke depan di era disruptif ini serta mampu menjadi katalisator pembangunan nasional.

7. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta efisiensi dan efektifitas penggunaan energi dan sumber daya air dalam pembangunan serta kebutuhan pertanian, perkebunan dan industri.

Sumber energi baru dan terbarukan di Nagekeo belum dimanfaatkan secara optimal karena masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk meningkatkan pemanfaatannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,





perlu dilakukan dengan eksplorasi dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan.

Aplikasi teknologi energi baru dan terbarukan antara lain pada pertanian, proses pasca panen, rumah tangga, industri kecil. Di samping penggunaan energi, efisiensi juga perlu didorong dalam hal penggunaan sumber daya air bagi kebutuhan pertanian, perkebunan dan industri. Untuk itu dapat diberlakukan pemberian insentif atas penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*. Demikian juga pentingnya dalam meningkatkan anggaran untuk kebutuhan riset dan pengembangan teknologi dan industri.

8. Pembangunan *Central Business District* di Nagekeo serta peningkatan pengelolaan kebersihan dan keindahan fasilitas publik

Pasar sebagai lembaga perdagangan merupakan tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) yang memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sebagai pusat distribusi, pembentukan harga dan promosi. Ketiga fungsi pasar tersebut pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kabupaten Nagekeo telah memiliki aktivitas pasar di berbagai tingkatan namun belum didukung dengan fasilitas pasar yang layak dan memadai. Pasar dengan konsep modern juga perlu dikembangkan salah satunya dengan membangun *Mbay Trading Center* di Kabupaten Nagekeo.

Perkembangan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan jumlah sampah dan limbah meningkat sehingga perlu ditangani secara serius. Penanganan sampah dan limbah harus dilakukan dalam bentuk pelayanan publik yang mencakup rumah tangga, lingkungan pemukiman, area komersial, sentra produksi pertanian, dan tempat pelayanan umum yang lain.





Tata kelola pelayanan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya, pengolahannya (*reuse & recycle*), hingga ke tempat pemrosesan akhir perlu segera diadakan dan diselenggarakan secara lintas sektoral. Hingga saat ini ibukota Kabupaten Nagekeo, Kota Mbay, telah memiliki *master plan* dan *Detail Engineering Design* (DED) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU), namun masih bermasalah karena status kepemilikan lahan. Selain itu, tata kelola pelayanan penanganan sampah masih dalam proses penataan ulang kelembagaan dan kewenangan pengelolaannya.

9. Penegasan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa dan bangunan pemerintah yang mangkrak serta peningkatan tata kelola aset daerah.

Permasalahan hak atas tanah di Kabupaten Nagekeo perlu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Selain untuk memberi kepastian dan ketegasan hak atas tanah, penyelesaian persoalan ini juga merupakan landasan bagi penyelesaian masalah lain yang berkaitan dengan hak tanah, antara lain penyelesaian bangunan dan aset yang mangkrak.

Revitalisasi kearifan lokal berkaitan dengan hak atas tanah perlu dihidupkan kembali. Di Nagekeo dikenal dengan “**PATA PEKA MENA, SEZU ZEBU ZALE, TI’I MA’E WIKI, PATI MA’E LAI, NGAZA TI’I WIKI, PATI LAI KE PIRE**”. Tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah atau Pihak manapun melalui upacara adat “RITUAL” atau dengan kata lain “PASI”, maka tanah yang telah diserahkan tersebut tidak bisa diambil kembali atau pengerjaannya dihalangi, karena hal itu berarti PAMALI atau PIRE.

Di samping itu, terdapat isu lain yang menyangkut aset dan kekayaan Pemerintah Daerah. Sementara ini sejumlah aset yang telah sah milik pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Sejumlah bangunan yang dibangun sejak beberapa tahun lalu, kini dalam kondisi yang





tidak terawat, tidak dimanfaatkan dan bermasalah secara hukum. Bangunan itu antara lain Gedung DPRD Nagekeo, Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Perumahan Malasera, Perumahan Malaputi, Water Treatment Plant, Alat pertanian, Mesin VCO di Keo Tengah, Mesin pompa air laut pada sawah garam rakyat di Tonggurambang dan Makipaket, sumur bor & pompanya, embung-embung, tanah dan bangunan KUD.

10. Pemerataan pembangunan, peningkatan sinergisitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah.

Sarana dan prasarana dasar di Nagekeo saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, masih terdapat desa-desa dan sentra produksi yang belum mendapatkan akses transportasi, sehingga pemasaran produk masih sangat terbatas.

Kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan. Kerusakan itu tidak hanya terjadi pada jalan lingkungan, desa, dan kabupaten, tetapi juga jalan propinsi. Kondisi jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing daerah menjadi rendah. Ketersediaan alat transportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas alat transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri.

Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk sinergi antara agenda pemerintahan desa dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu melakukan kerja sama daerah terutama dalam meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah perbatasan.





11. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi.

Cakupan akses pelayanan sumber air bersih dan air minum yang layak di Kabupaten Nagekeo saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber air baku untuk SPAM, kurangnya pemeliharaan terhadap sumber air baku yang sudah ada, dan rusaknya jaringan perpipaan yang diakibatkan oleh faktor usia dan sekelompok masyarakat.

Peningkatan pelayanan air bersih perlu diupayakan dengan cara pembangunan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau di Kabupaten Nagekeo. Di samping itu juga penting untuk meningkatkan cakupan akses layanan air minum yang aman dan berkelanjutan, karena saat ini kualitas air tanah maupun air permukaan yang digunakan oleh masyarakat kurang memenuhi syarat kesehatan baik secara fisik, kimia maupun bakteriologis akibat kondisi alam dan adanya pencemaran lingkungan. Pada konteks kelembagaan, hal yang harus diperhatikan adalah aspek penataan dan jaringan informasi sumber daya air.

Kemudian terkait sanitasi juga perlu menjadi perhatian, di mana cakupan sanitasi yang layak saat ini masih rendah. Terdapat beberapa faktor penyebab seperti dari sisi *supply* yaitu kurangnya ketersediaan sanitasi yang layak, dan juga dari sisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik. Kesadaran masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, artinya dalam hal kemampuan keluarga dalam menyediakan sistem sanitasi yang layak juga masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3.



P-RPJMD

2018-2023



5

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi yang akan dicapai dalam masa jabatan lima tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Nagekeo. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 mempedomani visi RJPD Nagekeo Tahun 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan juga memperhatikan RPJMN 2015-2019. Adapun visi RPJPD 2009-2025 Kabupaten Nagekeo yang menjadi salah satu pedoman RPJMD Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Manusia Kabupaten Nagekeo yang Mandiri, Maju, Adil, Berdayaguna dan Berdayasaing Dalam Hubungan yang Serasi dan Seimbang Dengan Komunitas Masyarakat Daerah Lainnya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

*“Nagekeo Sebagai Kabupaten yang Sejahtera, Nyaman,
dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor
Pertanian dan Pariwisata”*



Rumusan atas Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima pilar di bawah ini:

- **Sejahtera;** Rakyat cukup pangan, sandang, papan dan mampu memenuhi semua kebutuhan hidup secara layak. Setiap anggota masyarakat hidup dengan nutrisi yang baik, pakaian yang cukup, rumah layak huni dan sanitasi yang baik, memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan meraih pendidikan yang baik.
- **Nyaman;** Rakyat betah hidup di wilayah kabupatennya, karena ada lingkungan hidup yang asri, suasana kehidupan sosial yang tertib, berkeadilan dan saling menghormati.
- **Bermartabat;** Rakyat memiliki harga diri karena mereka mampu hidup mandiri, beretos kerja tinggi, setiap warga usia produktif memiliki pekerjaan. Tidak ada pengangguran. Nagekeo tidak tertinggal dari wilayah lain, bahkan lebih maju dari kabupaten lain di Flores.
- **Pertanian;** Pertanian dalam arti luas mencakup perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Sektor pertanian yang dibangun disesuaikan dengan daya dukung masing-masing wilayah. Sebagian besar rakyat hidup bercocok tanam dan beternak, sebagian kecil hidup di pesisir pantai dan menjadi nelayan, mengusahakan budi daya ikan dan tambak garam. Dengan lahan yang cukup luas, Nagekeo bisa menjadi lumbung pangan bagi NTT.
- **Pariwisata;** Nagekeo diupayakan menjadi pintu gerbang bagi masuknya wisatawan nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya. Selain menambah daya tarik daerah tujuan wisata alam dan budaya, Nagekeo harus memiliki bandara dan pelabuhan laut terbaik di Flores.





NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN SEJAHTERA, NYAMAN, DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA

MISI



1

Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan



2

Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari



3

Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.



4

Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah.

Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

5



Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan.

6



Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan.

7



Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/ singah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.

8



Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur & penerapan teknologi informasi & komunikasi.

9





5.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nagekeo ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian visi dan telah mempedomani misi dari RJPD Nagekeo Tahun 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan juga memperhatikan RPJMN 2015-2019. Visi dijabarkan secara lebih konkret ke dalam 9 (Sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Gambaran kesejahteraan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi manakala seseorang atau keluarga sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya: sandang, pangan dan papan. Pada tataran kebijakan, keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Indikasi paling dasar atas peningkatan kesejahteraan adalah peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan daya beli.

Kemajuan perekonomian di daerah tidak semata domain Pemerintah Daerah melalui pengelolaan APBD-nya, namun ditopang pula oleh seluruh pemangku kepentingan seperti dunia usaha, perbankan, sektor swasta dan tantunya masyarakat yang berdaya. Upaya memajukan perekonomian daerah juga dilakukan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai dengan keunggulan komparatif wilayahnya. Kekayaan sumber daya alam harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik, fokus dan berkelanjutan, berorientasi bisnis dan memberi dampak (*multiplier effect*).





2. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagekeo dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain adalah ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo selama ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan sehingga dibutuhkan perencanaan secara seksama.

3. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan

Pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dasar ini juga memastikan capaian tingkat pembangunan manusia yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Untuk itu dibutuhkan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penyediaan layanan dasar.





4. Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari.

Lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah suatu ekosistem terdiri atas berbagai subistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbeda, dan berkelanjutan. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya, dan bertanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi.

Melalui misi ini pemerintah ingin menghidupkan kembali nilai nilai pokok warisan budaya masyarakat Nagekeo yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta keutuhan hidup sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Nilai nilai budaya dan kearifan lokal budaya Nagekeo telah diajarkan oleh generasi pendahulu dalam ungkapan lokal seperti: **To'o Jogho Wagha Sama** (gotong royong), **Kia Zi'a Tabhe Pawe** (cinta kasih), **Pese Tenu** (nasihat), **wua mesu** (belas kasihan).

5. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan.

Masyarakat yang bermartabat dan berkarakter erat kaitannya dengan lingkungan yang bermartabat dan berkarakter pula. Lingkungan sangatlah penting bagi perkembangan individu. Lingkungan yang bermartabat dan berkarakter adalah lingkungan yang mendukung terciptanya perwujudan nilai-nilai karakter dalam kehidupan, seperti karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ciptaan-Nya, cinta kasih, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, suka menolong, gotong royong dan kerjasama.





6. Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Komponen utama ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Nagekeo berupaya dalam meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta berupaya memenuhi pasokan kebutuhan pangan NTT secara luas. Upaya ini dapat ditempuh melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan produksi hasil pangan.

7. Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak utama pemangunan daerah. Hal ini didukung oleh penerapan kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang juga memprioritaskan pembangunan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang menjadikan Nagekeo sebagai pintu Gerbang Pariwisata di Pulau Flores dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.





8. Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah.

Infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci untuk mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan sejahtera dari sisi ekonomi. Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier, dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

9. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*, yang mensyaratkan profesionalisme aparatur pemerintah. Profesionalisme menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

5.3 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Salah satu hal yang perlu penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Nagekeo adalah menyangkut prioritas dan target pembangunan nasional dan juga target pembangunan Provinsi NTT. Akan tetapi sebelum penyesuaian hal tersebut, penting untuk menyesuaikan visi, misi dan fokus pembangunan baik pada tingkat nasional dan juga Provinsi NTT. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah mempedomani dokumen RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, serta visi dan misi yang disusun dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Keselarasan visi, misi, dan fokus pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 5-1 Keselarasan RPJMD Nagekeo dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024

VISI

RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023	KABUPATEN NAGEKEO	
		RPJPD 2009-2025	RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong	NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terwujudnya manusia kabupaten nagekeo yang mandiri, maju, adil, berdayaguna dan berdayasaing dalam hubungan yang serasi dan seimbang dengan komunitas masyarakat daerah lainnya dalam bingkai NKRI	Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata

MISI

RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023	KABUPATEN NAGEKEO	
		RPJPD 2009-2025	RPJMD 2018-2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>); 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab berdasarkan Falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan Manusia Nagekeo yang Berkualitas dan Berdayasaing Regional, Nasional, dan Global; 3. Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang Demokratis Berlandaskan Hukum; 4. Mewujudkan Nagekeo sebagai Wilayah yang Berketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan; 5. Mewujudkan Nagekeo sebagai Wilayah yang Memiliki Keseimbangan dalam Pengelolaan Lingkungan; 6. Mewujudkan Posisi dan Peran Nagekeo dalam Pergaulan antar Daerah dan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak; 2. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan; 3. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan; 4. Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari; 5. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan; 6. Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT; 7. Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM; 8. Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah; 9. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.



PRIORITAS PEMBANGUNAN

RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023	KABUPATEN NAGEKEO	
		RPJPD 2009-2025	RPJMD 2018-2023
<p>Secara umum arah dan kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tercermin pada 7 agenda pembangunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif 3. Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja 4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik 5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi 6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegasan dan Penetapan bagi pencapaian Target MDG's; 2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; 3. Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup, melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam yang seimbang (antara pendayagunaan dan konservasi) yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Pembangunan Infrastruktur yang memberi efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi berbasis perdesaan; 5. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan pelembagaan Sistem Hukum Daerah; 6. Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang demokratis dengan penegakan supremasi hukum, berdasarkan prinsip dan asas <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan 3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting 4. Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik

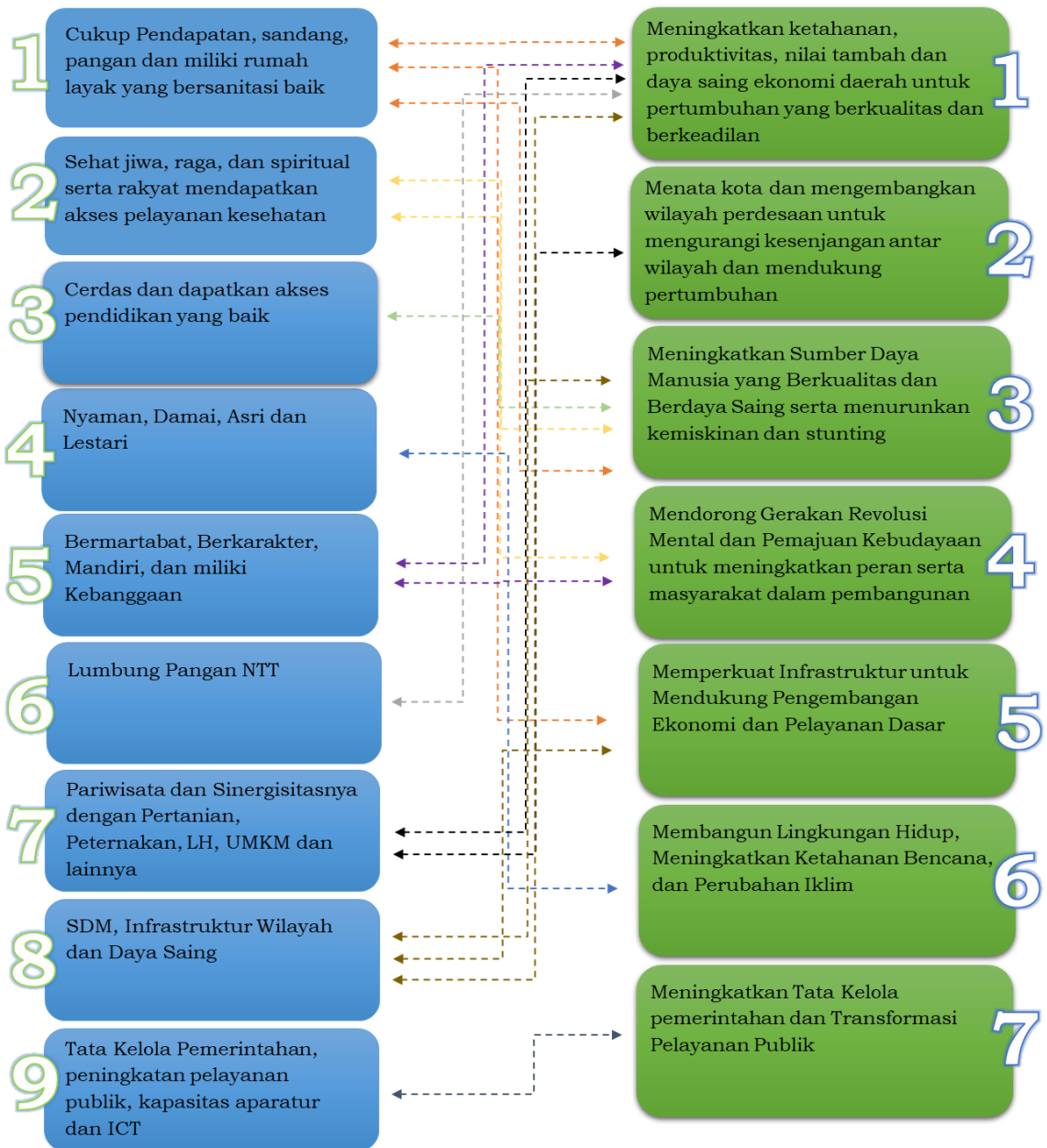


VISI

*Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman,
dan Bermartabat Melalui Pembangunan
Sektor Pertanian dan Pariwisata*

MISI

7 **PRIORITAS DAERAH**



Gambar 5-1 Integrasi Visi, Misi dan Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023





5.4 Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran disertai dengan target yang akan dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi daerah juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

5.5 Sasaran

Dalam mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan sasaran untuk menunjang tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya disertai dengan target yang akan dicapai. Sasaran pada setiap tujuan yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.





Tabel 5-2 Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 - 2023

RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
MISI 1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.
1. Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai	1. Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai
MISI 2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
2. Kenyamanan terjamin	2. Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan
MISI 3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan.
3. Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan	3. Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan
MISI 4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari.
4. Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari	4. Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari
MISI 5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan.
5. Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.	5. Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.
MISI 6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.
6. Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT	6. Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT
MISI 7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.
7. Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan	7. Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan
MISI 8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah.
8. Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah	8. Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah
MISI 9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan	9. Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan



**Tabel 5-3 Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo
Tahun 2021 – 2023**

RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk-produk unggulan secara berkesinambungan 2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 5. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral. 6. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 7. Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif 8. Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya. 9. Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 10. Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana. 11. Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak. 12. Meningkatnya kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo 13. Meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan 14. Meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo 15. Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 16. Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 17. Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan. 18. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan; 19. Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition) 20. Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola kependudukan 2. Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 3. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 5. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan 6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat 7. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 8. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 9. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS 10. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 11. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 12. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 13. Menguatnya karakter peserta didik 14. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 15. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 16. Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim 17. Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan 18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan 19. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah



RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
21. Meningkatnya derajat literasi masyarakat. 22. Tumbuhnya industri kreatif. 23. Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing 24. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi; 25. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan 26. Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN 27. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.	21. Meningkatnya Iklim Investasi 22. Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah 23. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi 24. Meningkatnya status pembangunan desa dan status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi 25. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN 26. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 5-4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2018-2023

“Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata”

NO	MISI/TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak	
	Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial	
		Angka Kemiskinan (%)
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan	1 Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati
	Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	2 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
		3 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan	
	Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan	
		Usia Harapan Hidup
3	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4 Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten
		5 Persentase FKTP sesuai standar
4	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	6 Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun
		7 Cakupan Desa UCI
		8 Desa/Kelurahan dengan prevalensi stunting dibawah 10%
		9 Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun
		10 Angka Kematian Bayi (AKB) per tahun
		11 Prevalensi balita stunting



NO	MISI/TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	12	Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD
		13	Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat	14	Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	15	Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)
		16	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
8	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	17	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
9	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS	18	Indeks Keluarga Sehat
10	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	19	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan		
	Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan		
		Harapan Lama Sekolah	
		Rata-rata Lama Sekolah	
11	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	20	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)
		21	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum
12	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	22	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD)
		23	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI)
		24	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs)
13	Menguatnya karakter peserta didik	25	Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi
14	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	26	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya
		27	Angka Melek Huruf
15	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	28	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal
4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari		
	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari		
		Penuntasan pencapaian target SDG's Nasional (168 indikator)	
16	Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim	29	Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu
		30	Indeks Kerentanan (SIDIK)
		31	Bauran Energi Baru Terbarukan
		32	Indeks Risiko Bencana
		33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		34	Indeks Kualitas Air
		35	Indeks Kualitas Udara
		36	Indeks Kualitas Tutupan Lahan



NO	MISI/TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan		
	Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan)	
17	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan	37	Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		38	Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran
		39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		40	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga
		41	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		42	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		43	Indeks Pemenuhan Hak Anak
		44	Indeks Perlindungan Anak
		45	Angka kejadian konflik sosial
		46	Angka partisipasi pemilu
		47	Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat
		48	Nilai kegemaran membaca masyarakat
49	Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan		
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT		
	Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT		
		Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB	
18	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	50	Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS)
		51	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK)
		52	Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian
19	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	53	Indeks ketahanan pangan
7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM		
	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan		
		Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB	
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah	54	Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB
		55	Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB
		56	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata
		57	Rata-rata lama tinggal wisatawan
		58	Persentase koperasi sehat
21	Meningkatnya Iklim Investasi	59	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah		
	Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah		
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	
22	Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah	60	Indeks Inovasi Daerah
		61	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA
		62	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi
		63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



NO	MISI/TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
23	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi	64	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
		65	Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet
		66	Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)
		67	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
		68	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		69	Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi
		70	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber)
		71	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik
		72	Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman
		73	Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
		74	Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung
		75	Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya
		76	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
		77	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
		78	Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		79	Persentase Rumah Layak Huni
		80	Rasio Konektivitas Daerah
24	Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan	81	Indeks Desa Membangun (IDM)
		82	Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan
		83	Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan	
		Indeks Reformasi Birokrasi	
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN	84	Nilai SAKIP Daerah
		85	Nilai MCP Pengawasan
		86	Indeks Kapasitas Fiskal
		87	Nilai MCP tata kelola keuangan desa
		88	Nilai MCP pengadaan barang dan jasa
		89	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
		90	Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi
		91	Maturitas SPIP
		92	Level Kapabilitas APIP
		93	Indeks Kualitas Kebijakan
		94	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja
		95	Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi
		96	Indeks Sistem Merit
		97	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja
		98	Indeks Pencapaian SPM
		99	Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran
		100	Opini LKPD
		101	Indeks Pelayanan Publik



NO	MISI/TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
26	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	102	Kualitas Pengelolaan Arsip
		103	Indeks SDI
		104	Indeks SPBE



P-RPJMD

2018-2023



6

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah melalui pemberdayaan seluruh potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada target pembangunan nasional, dan provinsi, maka strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan serta program pembangunan yang merupakan pengejawantahan dari seluruh rencana implementasi pembangunan daerah agar terarah dan efektif.

Strategi dan arah kebijakan juga merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kegiatan, pelayanan maupun tata kelola, serta perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi.

Sejalan dengan itu, dengan memperhatikan perkembangan terkini, dengan berpedoman pada perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, serta mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dua tahun berjalan yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020, maka beberapa penyesuaian perlu dilakukan terhadap strategi dan arah kebijakan hingga program pembangunan dalam Perubahan RPJMD.



6.1 Strategi

Menghadapi perkembangan yang terjadi, maka beberapa perubahan strategi diperlukan selain tetap dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, perubahan dimaksud khususnya berupa strategi menghadapi pandemi dan pemulihan pasca pandemi. Sehingga perubahan strategi pembangunan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penanganan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19; melalui penyiapan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penerapan protocol kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, vaksinasi massal, serta pemberian bantuan pada masyarakat terdampak.
2. *Refocussing* dan realokasi kebijakan penganggaran; sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2020 guna mengatasi pandemi Covid-19, dengan melakukan berbagai pengalihan terhadap program kegiatan secara selektif yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi dan dampaknya bagi pembangunan dan masyarakat.
3. Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19 di Nagekeo; akselerasi pembangunan di segala bidang yang terkendala sebagai dampak pandemi serta pengembangan sektor pertanian berupa beras, jagung, hortikultura, peternakan sapi dan pariwisata dengan pengembangan 5 (lima) ring berupa wisata alam, budaya dan ekonomi kreatif serta sektor strategis lainnya.
4. Pembangunan dengan skema padat karya dan pemberdayaan wanita dilakukan sebagai salah satu wujud percepatan pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara ragam strategi sebelumnya tetap terus dijalankan guna penguatan efisiensi dan efektifitas pembangunan bagi masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan guna perwujudan visi dan misi pembangunan daerah, yaitu melalui:



5. Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB); pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Garis-garis Besar Kebijakan untuk setiap pemangku kepentingan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Nagekeo.
6. *Community Action Plan (CAP)*; instrumen atau teknik untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan proses perencanaan dengan keikutsertaan secara aktif masyarakat di lokasi sasaran. Output dari proses (CAP) adalah suatu rencana tindakan bersama masyarakat yang bermuara pada hasil, berjangka waktu, menunjukkan pelaksanaan kegiatan, serta strategi pada pelaksanaan yang disepakati oleh seluruh pihak.
7. *Community Based Information Network (COMBINE)*; jaringan antar berbagai sistem informasi berciri lokal yang memberdayakan komunitas dan mewujudkan hubungan interdependen antar wilayah dan masyarakat.
8. *Management Information System (MIS)*; proses mengelola arus informasi, pada seluruh jaringan kerja pemerintah daerah. Semua organisasi perangkat daerah diharuskan untuk memahami manajemen informasi di lingkungan kerjanya, hubungannya dengan instansi lain, maupun sistem dan alur kerja semua pemangku kepentingan yang ada dalam lingkup pelayanannya. Output dari MIS adalah pelaporan berkala dan terjadwal, dan pertukaran informasi dan data yang terlaksana secara otomatis dan *real time* yang dapat membantu tindakan manajemen.
9. *Money Follow Programme and Problem Solving Oriented*; pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program prioritas yang disusun harus menggunakan data dan informasi yang akurat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan





yang ada dalam lingkup tugas setiap organisasi perangkat daerah, sehingga tercapai perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas).

Penyesuaian Program Prioritas Daerah

Penyesuaian program prioritas daerah pada umumnya merupakan arahan bupati terkait program-program yang saat ini berjalan ataupun rencana kedepannya, pada RPJMD Murni sebelumnya program prioritas daerah merupakan arah kebijakan yang melibatkan masyarakat berupa “Gerakan”, namun pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 berubah menjadi program prioritas daerah dengan 7 poin dengan tetap melibatkan masyarakat dengan tujuan membangun setiap sektor di Kabupaten Nagekeo. Adapun sandingan program prioritas daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:

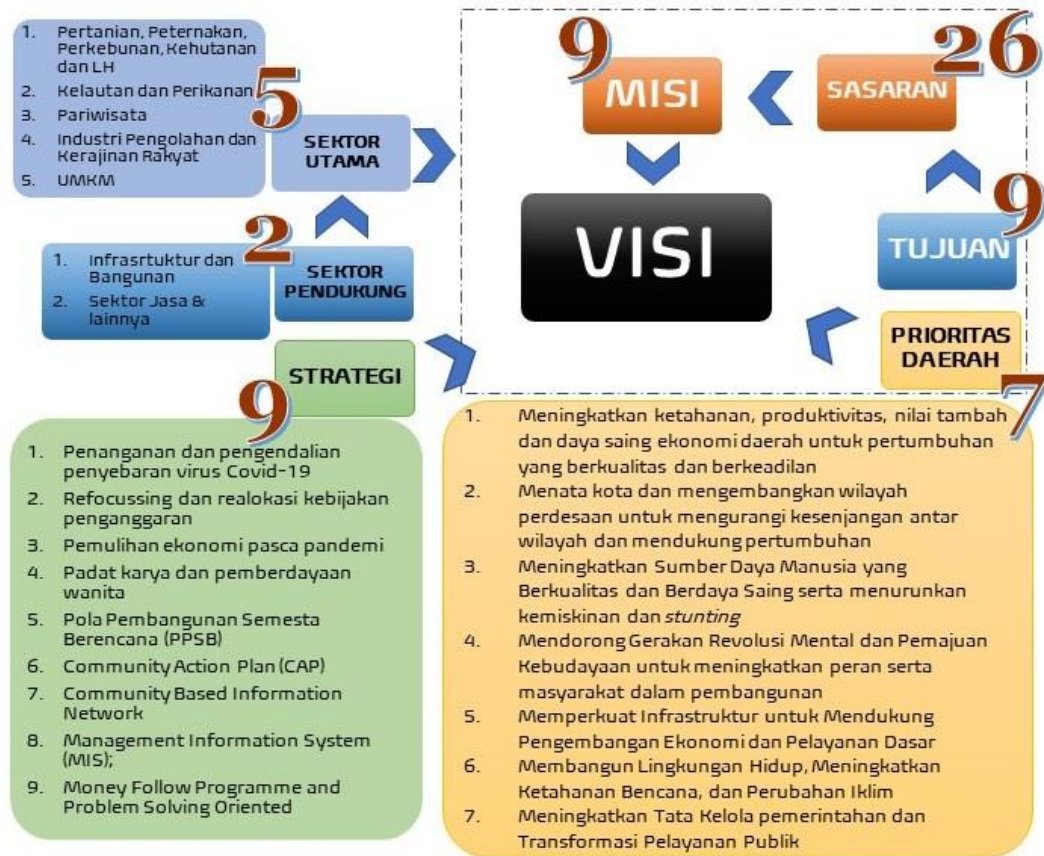
Tabel 6-1 Persandingan Program Prioritas Daerah

RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
1. Gerakan Desa Membangun dengan 7 program	1. Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Gerakan Kota Membangun	2. Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan
3. Kabupaten Sadar Investasi	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting
4. Gerakan Revitalisasi Pasar Rakyat	4. Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
5. Gerakan Sadar Keterkaitan Antar Pelaku, Antar Sektor dan Antar Wilayah	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Gerakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Gerakan Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	7. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik



Penyesuaian Platform Kepala Daerah

Secara umum, pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan beberapa pergeseran kebijakan sesuai perkembangan yang terjadi, dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 6-1 Diagram Penyesuaian Platform Pembangunan Daerah

Berdasarkan platform pembangunan daerah tersebut terdapat 5 sektor utama yang mencakup sektor primer dan sekunder, yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kelautan dan Perikanan
3. Pariwisata
4. Industri pengolahan dan kerajinan rakyat
5. UMKM.



Selain itu, terdapat dua sektor pendukung yaitu Infrastruktur/ Bangunan dan Jasa:

1. Infrastruktur/Bangunan:
 - a. Infrastruktur dasar: air minum dan air bersih.
 - b. Infrastruktur pertanian: embung, irigasi, dan jalan tani.
 - c. Infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara).
 - d. Infrastruktur energi dan energi terbarukan: listrik masuk setiap rumah.
 - e. Infrastruktur telekomunikasi.
 - f. Sarana Prasarana Pemerintahan.
 - g. Properti.
2. Sektor Jasa dan sektor lainnya:
 - a. Jasa keuangan.
 - b. Jasa angkutan.
 - c. Jasa persewaan.
 - d. Jasa pemeritahan umum
 - e. Jasa lainnya.
 - f. Pertambangan dan Penggalian (khusus sub sektor Penggalian).
 - g. Sektor pendukung lainnya

Selanjutnya, Prioritas Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 dijabarkan melalui beberapa program strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
 - a. Pemanfaatan lahan kering menjadi lahan basah seperti sawah ataupun perkebunan untuk kegiatan pertanian masyarakat dalam mendorong produk-produk unggulan pertanian





- b. Mendorong usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) dalam rangka optimalisasi lahan pertanian
- c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan pertanian yang terdampak akibat pembangunan bandara dan waduk untuk mendorong peningkatan produksi beras yang telah mengalami penurunan sebelumnya
- d. Membangun *ranch* ternak dan agrosilvopastura yang berwawasan lingkungan untuk kegiatan penggemukan sapi dan pemanfaatan feses peternakan menjadi bahan untuk mengembalikan kesuburan tanah/lahan pertanian
- e. Pemberian bantuan 5 ekor sapi untuk setiap rumah tangga miskin di daerah guna mendukung program provinsi yakni Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Persawahan Mbay, DAS, daerah konservasi hulu akan menjadi sumber HMT. Kotorannya akan menjadi bahan baku pupuk organik di Aeram. OPD teknis melakukan pendampingan intensif dalam rangka pemenuhan target pengantarpulauan sapi, pemenuhan kebutuhan HMT dan gerakan Nagekeo Organik. Model kegiatan ini akan dikembangkan di seluruh wilayah Nagekeo.
- f. Menumbuhkan generasi baru petani, pekebun, peternak dan nelayan yang beorientasi pasar.
- g. Membangun jejaring kerja sama lembaga pendidikan vokasional dengan petani dan pengerajin untuk melahirkan inovasi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas.
- h. Fasilitasi kerja sama pembiayaan usaha masyarakat dengan lembaga keuangan.
- i. Mengembangkan industri olahan dan kerajinan rakyat, seperti anyam-anyaman, tenun ikat, gerabah, kerajinan bambu, dsb
- j. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata.
- k. Mendorong pengembangan pertanian organik yang terintegrasi dengan padi, ikan dan ternak.





1. Melakukan revitalisasi pasar di beberapa kecamatan untuk mendukung produk-produk unggulan masyarakat serta menyampaikan secara rutin harga ukur pasar ataupun pembuatan website untuk info harga produk. Serta membuka akses pasar keluar daerah untuk produk-produk unggulan lokal.
 - m. Pengembangan sektor pariwisata berdasarkan dokumen *road map* pariwisata Nagekeo.
 - n. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
 - o. Pengembangan Desa Wanatani khususnya tanaman Bambu dalam rangka mendukung Ekonomi Hijau (*Green Economy*).
 - p. Gerakan penanaman serentak dan pergiliran tanam serta penggunaan pupuk *organic* untuk irigasi Mbay.
 - q. Pengembangan sekolah lapang pertanian dan peternakan.
 - r. Klinik penyuluhan petani (untuk irigasi mbay dilakukan secara terpadu di setiap pintu sekunder bersama petugas pengairan, penyuluh, pengamat OPT serta penyediaan saprodi, bengkel alsintan dan benih unggul).
2. Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan:
 - a. Percepatan revisi dokumen peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten Nagekeo serta penyesuaian RDTR Kota Mbay.
 - b. Pendampingan masyarakat desa dan kota melalui perencanaan berbasis masyarakat.
 - c. Peningkatan jejaring kerja sama antar desa dan desa kota.
 - d. Gerakan Desa Membangun dan Gerakan Kota Membangun.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan *stunting*





- a. Peningkatan sosialisasi terkait pemberdayaan wanita untuk pengetahuan mengenai Kesehatan gizi dan reproduksi untuk mendorong peran ibu rumah tangga dalam keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - c. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - d. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
 - e. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
 - f. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan.
 - g. Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja.
 - h. Literasi digital untuk mendorong profesi guru dalam model pembelajaran era digital sebagai dasar pelatihan dalam mengajar di kelas awal khususnya baca dan tulis
 - i. Percepatan fungsi rumah sakit Aeram dan Rumah Sakit Raja sebagai rumah sakit rujukan.
 - j. Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga desil 6
 - k. Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi Dasar untuk jenjang pendidikan dasar.
 - l. Menempatkan ASN di setiap Tata Usaha sekolah untuk mendukung urusan administrasi kepegawaian para guru, bendahara sekolah
4. Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- a. Pengelolaan kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak pekerja masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada, serta dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi.
 - b. Pengembangan kebudayaan





- c. Pengembangan HAKI
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - a. Menyediakan infrastruktur transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, terminal)
 - b. Mendorong rencana pembangunan Bandara Surabaya II dan Pelabuhan Marapokot dan Pelabuhan Rakyat Todo sebagai Garda Maritim Nagekeo untuk mendorong pengembangan pariwisata dan sektor unggulan daerah serta menunjang kegiatan masyarakat
 - c. Menyediakan infrastruktur pertanian dalam arti luas (waduk, embung, saluran irigasi, jalan tani, tempat pelelangan ikan, *ranch*, pelabuhan ternak, *holding ground* ternak sebelum pengapalan, rumah potong hewan dan fasilitas pengolahan daging, pabrik pupuk organik, pabrik pakan, balai benih ikan, pertanian, peternakan dan kehutanan)
 - d. Mendorong pembangunan infrastruktur energi dengan target semua desa masuk listrik melalui pengembangan jaringan PLN dan non PLN;
 - e. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan: pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan.
 - f. Mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga menjangkau semua desa.
 - g. Membangun infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air bersih untuk setiap rumah.
 - h. Memfasilitasi investor lokal yang memiliki modal dan keterampilan untuk berinvestasi di lahan-lahan yang belum tergarap dengan sistem sewa tanah yang saling menguntungkan.





- i. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan perijinan, pelayanan prima dan kepastian usaha.
- j. Pembangunan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi: jalan dan jembatan, pelabuhan dan bandara.
- k. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan: sanitasi dan sistem persampahan.
- l. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital: jaringan internet sampai desa.
- m. Pengembangan infrastruktur jalan:
 - Ruas jalan Mauponggo – Ngera – Puuwada
 - Ruas jalan Raja - Maunori
 - Ruas jalan Anakoli – Fataleke
 - Ruas jalan Kajulaki – Malabay – Nagerawe - Rowa
 - Ruas jalan Kotakeo – Pusu – Ua
 - Ruas jalan Aemali - Danga
 - Ruas jalan dalam Kota Mbay, terutama ruas jalan menuju Bandara dan ruas jalan Eltari
 - Ruas jalan lingkaran luar Dadiwuwu – Aemau
 - Ruas Jalan Dadiwuwu - Aeramo
 - Pengembangan jalan menuju kawasan pariwisata dan pertanian.
- n. Adanya pengoptimalan pemanfaatan TPA eksisting dan rencana pembangunan TPA di Towak untuk mengelola timbunan sampah di Kabupaten Nagekeo.
- o. Ada pemilahan jenis sampah dari setiap rumah tangga, hotel, restoran, industri dan fasilitas umum melalui gerakan masyarakat yang menggunakan dana minimal (terbatas untuk publikasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat).





- p. Ada jaringan antara rumah tangga penghasil sampah dengan pemanfaat sampah, baik organik maupun non organik. OPD yang memiliki tupoksi mengolah sampah organik maupun non organik dapat membina jaringan dengan penghasil sampah. Pupuk organik untuk kebutuhan pertanian bisa dihasilkan dari kegiatan ini. Sampah yang belum bisa diolah melalui jaringan ini akan diproses lebih lanjut di TPA oleh OPD terkait.
 - q. Pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dengan teknologi tenaga surya untuk percepatan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dan fasilitas publik serta perkantoran.
 - r. Revitalisasi sarana air bersih dan kelembagaannya yang telah dibangun, baik melalui program pemberdayaan baik melalui kegiatan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
 - s. Klinik konsultasi teknis, manajerial dan pembiayaan untuk perumahan masyarakat
 - t. Peningkatan kapasitas pelayanan BLUD SPAM untuk akses air bersih masyarakat
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- a. Sosialisasi kepada para pelajar terkait pengetahuan proses evaluasi ketika terjadi bencana dan pemanfaatan penggunaan lahan terbuka ataupun Gedung sebagai tempat evakuasi bencana
 - b. Penerapan metode pemanenan dan pengelolaan air hujan (*rainwater harvesting*) yang dipadukan dengan konservasi lahan secara vegetatif dan mekanik.
 - c. Kerja sama antar daerah yang memiliki keterkaitan penyebab dan dampak bencana.
 - d. Gerakan penyelamatan sempadan pantai melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan vegetasi





- pantai. Untuk daerah sempadan pantai yang sudah rusak, dilakukan gerakan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
- e. Menyediakan ruang konsultasi teknis resiko bencana dalam setiap perencanaan konstruksi, baik rumah tangga maupun fasilitas publik.
 - f. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan desa tangguh bencana.
 - g. Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan privatisasi mata air yang sangat dibutuhkan publik.
 - h. Mendorong pemanfaatan sampah untuk bahan kerajinan lokal guna peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian lingkungan.
 - i. Sosialisasi kepada para pelajar terkait pengetahuan proses evakuasi ketika terjadi bencana dan pemanfaatan penggunaan lahan terbuka ataupun Gedung sebagai tempat evakuasi bencana
 - j. Gerakan panen air dalam rangka limpasan air nol melalui pembangunan embung mini, jebakan air, sumur resapan, terassing di lereng perbukitan, tandon air bawah tanah, kolam retensi, situ dan lobang resapan biopori. OPD yang menangani bencana bersama masyarakat pemilik lahan dengan dana minimal bisa membantu pembuatan jebakan air, embung mini, kolam retensi di daerah hulu dan hilir secara swakelola. OPD yang menangani lingkungan dan hutan dapat membuat jebakan vegetasi, penghijauan dan reboisasi. OPD yang menangani sektor kemakmuran dapat memanfaatkan air. Masyarakat dilatih untuk berkebun yang baik dan benar di daerah hulu dengan memperhatikan aspek konservasi. Selain itu masyarakat yang memiliki adat





berburu dan beternak diberdayakan untuk tidak membakar hutan.

- k. Penampungan air hujan di setiap rumah tangga dan fasilitas publik serta perkantoran melalui pembangunan tendon air hujan serta pembuatan biopori, sumur resapan, dan PAH.
- l. Gerakan konservasi DAS dari hulu sampai hilir dengan mendorong pembentukan komunitas pencinta dan pemanfaat DAS (untuk produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT), perlindungan daerah sempadan, dsb.).
- m. Gerakan membuat sekat api di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan.
- n. Kerja sama antar daerah yang memiliki keterkaitan penyebab dan dampak bencana.
- o. Gerakan penyelamatan sempadan pantai melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan vegetasi pantai. Untuk daerah sempadan pantai yang sudah rusak, dilakukan gerakan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
- p. Menyediakan ruang konsultasi teknis resiko bencana dalam setiap perencanaan konstruksi, baik rumah tangga maupun fasilitas publik.
- q. Gerakan 1 ASN, 1 Pohon Lokal. Setiap ASN diwajibkan menanam dan memelihara 1 pohon lokal di setiap lingkungan kerja yang akan diatur lebih lanjut oleh OPD teknis.
- r. Gerakan penghijauan dan reboisasi daerah hulu yang melibatkan sekolah, masyarakat dan dunia usaha.





7. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik

- a. Restruktur Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan guna penyesuaian dengan regulasi terkini serta dalam upaya akselerasi pencapaian visi – misi kepala daerah dengan berdasarkan evaluasi kinerja tahun-tahun berjalan
- b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
- c. Menetapkan alokasi anggaran belanja publik sesuai skala prioritas dan digunakan dengan efisien, efektif dan ekonomis serta relevan.
- d. Memperkuat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari aspek SDM dan penganggaran dalam rangka peningkatan pengawasan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah.
- e. Menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berbasis elektronik.
- f. Meningkatkan manajemen SDM aparatur melalui peningkatan kompetensi, penerapan kode etik, penerapan reward and punishment (tunjangan berbasis kinerja) untuk peningkatan kinerja daerah.
- g. Menyediakan advokasi bagi aparatur yang menghadapi persoalan hukum akibat kebijakan yang diambil.
- h. Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum di daerah.
- i. Memfasilitasi pembangunan kantor polres, kejaksaan negeri, dan pengadilan negeri sesuai kebutuhan instansi masing-masing
- j. Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang minimal mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, kependudukan, pengaduan dan pelayanan informasi publik.





- k. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa perbaikan tata kelola, sarana perkantoran dan budaya kerja.
- l. Penyediaan informasi publik yang up to date.
- m. Penyediaan saluran pengaduan masyarakat.
- n. Penambahan jumlah tenaga teknis fungsional untuk semua sektor unggulan dan pendukung.
- o. Pemanfaatan radio milik daerah (RSN) sebagai sarana komunikasi publik.
- p. Perbaikan manajemen asset daerah
- q. Melibatkan Ketua RT sebagai enumerator tingkat paling bawah bersama petugas teknis sektoral.
- r. Mengembangkan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Nagekeo.
- s. Membangun kerja sama dengan instansi vertikal untuk penyediaan data yang dibutuhkan daerah (BPS, BPN, BMKG, BPTP, dsb.).
- t. Menyediakan data tenaga kerja di masing-masing desa menurut umur, pekerjaan dan status perkawinan; data jumlah tenaga kerja yang keluar daerah dan keluar negeri menurut umur, pekerjaan dan status perkawinan.
- u. Bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Nagekeo untuk menyediakan Peta Tata Guna Lahan yang akan di-update setiap tahun

Dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2023 dan telah disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada tabel 6-2.





Tabel 6-2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023

Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 1.	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak			
Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai	1 Meningkatkan ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk-produk unggulan secara berkesinambungan	1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan, 2 Penerapan IPTEK untuk pengembangan sektor unggulan 3 Membuka akses pasar keluar daerah 4 Mendorong pengembangan pertanian organik yang terintegrasi dengan padi, ikan dan ternak 5 Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif; 6 Meningkatkan produktifitas BUMDes untuk mengolah hasil unggulan dan menyediakan jasa pelayanan dasar bagi warga. 7 Meningkatkan jumlah pengusaha muda	1 Meningkatnya tata kelola kependudukan 2 Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	1 Peningkatan Pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat 2 Akselerasi penguatan ekonomi keluarga 3 Keperantaraan usaha dan dampak sosial 3 Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial 4 Meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial 5 Meningkatkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 6 Perlindungan sosial adaptif 7 Peningkatan kesejahteraan sosial 8 Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
	2 Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat.	1 Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa 2 Mendorong keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa 3 Mendorong keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kota 4 Mendorong kesadaran akan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah 5 Mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan		





Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 2.	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.			
Kenyamanan terjamin	3 Merangkainya pelayanan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 2 Perbaikan dan peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat 	3 Merangkainya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Peningkatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta perubahan perilaku hidup sehat masyarakat	4 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1 Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		<ol style="list-style-type: none"> 2 Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah 3 Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat 4 Peningkatan kapasitas dan kualitas suplai air bersih 	5 Merangkainya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedarifatan	1 Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa termasuk pengendalian penyebaran covid-19 dan variannya, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, serta penyakit gigi dan mulut
		5 Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai mori.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sikap hormat menghormati dan menghargai perbedaan; 2 Penyadaran kaum muda untuk berdiskusi secara ekonomi. 	
			6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan pelaksanaan jaminan kesehatan
			7 Merangkainya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			8 Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	1 Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan
			9 Merangkainya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS	1 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			10 Terkendainya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	1 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk





Tujuan	RAJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 3.	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan			
Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan	6 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Pelibatan seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan IT dalam penyelenggaraan pendidikan	11 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	1 Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
		2 Mendorong setiap insan Nagekeo untuk belajar seumur hidup		2 Peningkatan tata kelola pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
		3 Penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	12 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1 Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
		4 Peningkatan proporsi biaya proses belajar di semua sekolah	13 Menguatnya karakter peserta didik	Peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti
	7 Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif	1 Penyederhanaan perijinan usaha;	14 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1 Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		2 Pengembangan ekonomi kreatif;		2 Peningkatan tata kelola pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
		3 Inovasi permodalan untuk rakyat yang menjamin arus kas dan perlindungan dari tengkulak	15 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	1 Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra
	8 Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains dan budaya	1 Pembinaan pemuda, atlet, seniman, dan siswa		
		2 Penyediaan sarana prasarana olahraga, sanggar, laboratorium budaya, dan taman pustaka peradaban literasi		
		3 Penyelenggaraan event olahraga, seni, sains dan budaya		





Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 4.	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari.			
Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari	9 Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1 Penyadaran masyarakat untuk peduli dan cinta lingkungan; 2 Pengarusutamaan wawasan lingkungan hidup ke seluruh kegiatan pembangunan, termasuk AMDAL 3 Pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan; 4 Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Taman Pemakaman Umum	16 Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim	1 Penanggulangan Bencana 2 Peningkatan Ketahanan Iklim 3 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4 Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	10 Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana.	1 Penyadaran masyarakat untuk sadar, tanggap, dan siaga terhadap ancaman dan risiko bencana 2 Penyadaran masyarakat tentang siklus hidrologis 3 Penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi tanah dan air		5 Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7 Pemulihan Lahan Berkelanjutan 8 Pengelolaan Limbah
	11 Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak.	1 Pengarusutamaan layak anak dan perempuan dalam perencanaan dan penyediaan permukiman 2 Peningkatan kualitas keluarga melalui kelahiran yang terencana 3 Penumbuhan dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial 4 Perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi PMKS		



Tujuan	RPJMD 2018 - 2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Mini 5.	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkeadilan, mandiri, dan memiliki kebanggaan.			
Masyarakat yang mandiri, berkeadilan dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.	12 Meningkatkan kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo	1 Pengembangan kualitas dan daya saing produk Nagekeo	17 Meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berkeadilan secara ekonomi, dan berkeadilan dalam Kebudayaan	1 Perwujudan Nagekeo Layak Anak melalui penguatan Sistem Pelindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya
	13 Meningkatkan kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan	1 Revitalisasi situs dan ritual budaya yang hidup di masyarakat 2 Pengarusutamaan budaya Nagekeo dalam berbagai aspek kehidupan		2 Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
	14 Meningkatkan kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo	1 Literasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan oleh masyarakat		3 Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPC 4 Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti 5 Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental 6 Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila 7 Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme 8 Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 9 Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 10 Penyelarasan relasi agama dan budaya 11 Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 12 Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan 13 Peningkatan budaya literasi 14 Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi 15 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan 16 Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 17 Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga 18 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 19 Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional





Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 6.	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.			
Menjadikan Nagekeo sebagai Lumbung Pangan yang sehat bagi NTT	15 Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zonasi peruntukan wilayah peternakan dan pertanian 2 Pengembangan pola pertanian terpadu untuk menjamin ketahanan pangan 3 Extensifikasi dan intensifikasi pertanian 4 Penerapan Panca Usaha Tani 	18 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar 2 Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi
	16 Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kapasitas petani 2 Peningkatan proses pasca panen 3 Sertifikasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 	19 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan 2 Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 3 Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional





Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023		
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi	
Misi 7.	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan / singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.				
Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan	17 Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nagekeo sebagai pintu masuk pariwisata Flores; 2 Pengembangan potensi wisata unggulan Nagekeo menjadi obyek wisata; 3 Peningkatan kapasitas pelaku industri wisata 4 Konsep eco-tourism yang terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan 	20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan industriasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir 2 Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata 3 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital 4 Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar 5 Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha 6 Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi 7 Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up 8 Meningkatkan nilai tambah usaha sosial 9 Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa 10 Meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif 11 Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital 	
	18 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pariwisata 		21 Meningkatnya iklim Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan
	19 Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelenggaraan event secara berkala 			



Tujuan	RPJMD 2018 - 2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023			
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi		
Misi 8.	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah.					
Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah.	20 Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Akses pendidikan bagi seluruh masyarakat 2 Peningkatan mutu Akademi Komunitas Negeri Nagekeo 	24 Meningkatkan status pembangunan desa dan status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan pelayanan dasar 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah 3 Pelaksanaan otonomi daerah 4 Penguatan konektivitas 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim 		
	21 Meningkatkan derajat literasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kemampuan literasi pada semua sektor untuk mengatasi kesulitan hidup 		22 Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri 2 Penguatan kerja sama dengan pendidikan tinggi 3 Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi 4 Penguatan pendamping pembangunan 5 Pengelolaan manajemen talenta nasional 	
	22 Tumbuhnya industri kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan produk unggulan Nagekeo 			23 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau 2 Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan 3 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi 5 Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur 6 Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi 7 Konektivitas Jalan 8 Konektivitas Laut 9 Konektivitas Udara 10 Transportasi Perdesaan dan Perkotaan 11 Perluasan Jaringan Internet dan Pemanfaatannya 12 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan 13 Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi 14 Penyediaan Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau di Perdesaan dan Perkotaan
	23 Meningkatkan infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan pasar konvensional 2 Pengembangan central busines district 3 Peningkatan konektivitas antar wilayah 4 Perencanaan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan kepentingan pengisi ruang 5 Pengembangan permukiman yang layak huni 6 Optimalisasi potensi air baku untuk kegiatan 				



Tujuan	RPJMD 2018 -2023		PERUBAHAN RPJMD 2018 -2023	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
Misi 9.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.			
Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan	24 Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi;	1 Penerapan model "developing people through works" demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara berbasis meritokrasi.	25 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN	1 Penguatan implementasi manajemen ASN
	25 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan	1 Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; 2 Penataan peraturan perundang-undangan; 3 Peningkatan tata kelola dan tata laksana perangkat daerah; 4 Peningkatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah		2 Reformasi sistem akuntabilitas kinerja 3 Transformasi pelayanan publik
	26 Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dan KKN	1 Peningkatan tata kelola dan tata laksana pelayanan publik yang responsif, ramah, tuhu, tepat waktu dan zero mistake 2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	26 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Pematuhan kelembagaan dan proses bisnis
	27 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.	1 Peningkatan tata kelola pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2 Peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak penunjang SPBE		





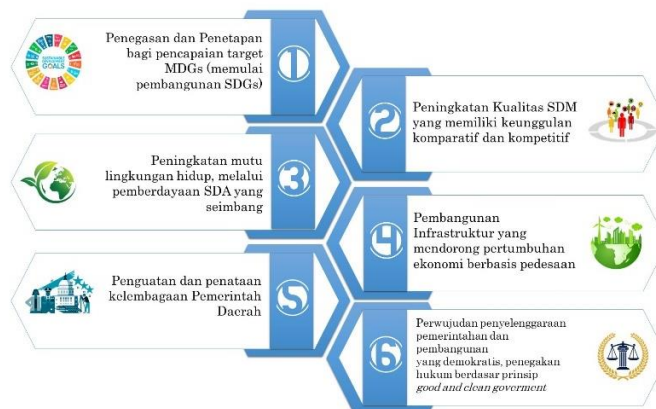
Selanjutnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo tahun 2018 – 2023 dan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi terhadap tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Nagekeo tahun 2028-2023, yaitu sebagai berikut:

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1 Arahan RPJPD Nagekeo pada RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023

RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 menjadi salah satu dokumen yang dipenonomi dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 menetapkan 4 tahapan pembangunan yaitu RPJMD I (2009-2013), RPJMD II (2014-2018), RPJMD III (2019-2023), dan RPJMD IV (2024-2025). Perubahan RPJMD Nagekeo merupakan bagian dari tahapan pembangunan ke-3 yang berfokus pada 6 aspek pembangunan (lihat Gambar 6-2).



Gambar 6-2 Arahan RPJPD Kabupaten Nagekeo untuk RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023



Terdapat beberapa arahan target dalam RPJPD yang perlu menjadi perhatian diantaranya menyangkut target pembangunan kualitas SDM, pendidikan, tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa target kinerja pembangunan yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD ke-3:

1. Pertumbuhan IPM dari 66,8 di tahun 2018 menjadi 67,8 di akhir tahun 2023;
2. Meningkatnya persentase penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan/ijazah SMA/SMK dari 55% di tahun 2018 menjadi 65% di akhir tahun 2023;
3. Jumlah Rumah Tangga Miskin berkurang dari 42,06% di tahun 2018 menjadi 35% di tahun 2023;
4. Pendapatan perkapita Kabupaten Nagekeo Rp4.624.658,00 di tahun 2018 menjadi Rp5.087.123,00 pada tahun 2023;
5. Pertumbuhan ekonomi dari 6,80% di tahun 2018 menjadi 7,00% pada akhir tahun 2023.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nagekeo

Arah kebijakan adalah susunan alur prioritas pembangunan yang menjadi pedoman dalam merumuskan strategi yang di pilih di setiap tahunnya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi kunci kesinambungan kebijakan dan sekaligus memberikan fokus yang jelas dan terarah, meski memiliki prioritas yang berbeda di setiap tahunnya namun berkelanjutan guna mencapai tujuan akhir yang diinginkan dalam pembangunan.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan peran pemerintah sebagai *fasilitator* dan *regulator*. Sebagai *fasilitator* Pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Sebagai *fasilitator*, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat yang diberdayakan.





Pemerintah sebagai *regulator* adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Namun demikian, saat ini perkembangan tata kelola pemerintahan telah menuntut pemerintah daerah untuk berperan lebih maksimal memberi perannya bagi masyarakat. Dimana pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sekedar berperan sebagai *fasilitator* dan *regulator* semata, akan tetapi juga menjadi *enabler* bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat, keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan di daerahnya. Memberikan ragam program/kegiatan sebagai stimulus berkembangnya sosial dan ekonomi di masyarakat bukan malah berkompetisi dengan rakyatnya serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan inovasi bagi kemajuan daerah serta merawat demokrasi demi terwujudnya keadilan sosial.

Menghadapi pandemi saat ini, perubahan arah kebijakan untuk dilakukan, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam pembangunan, sehingga arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo ditujukan sebagai berikut:



Gambar 6-3 Perubahan Arah Kebijakan Makro Pembangunan Tahun 2021 -2023



6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Penataan ruang Kabupaten Nagekeo bertujuan untuk “mewujudkan Kabupaten Nagekeo sebagai sentra komoditas pertanian Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan yang didukung oleh agropolitan yang integratif, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan.”

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Nagekeo dan masyarakatnya meliputi:

- a. Pengembangan Perkotaan Mbay sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
- b. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan *industrial estate*, pengembangan kawasan agroindustri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan;





- c. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional yang direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal dan pelabuhan;
- e. Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
- f. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
- g. Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi,
- h. Keterampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

6.3.1 Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah KAPET Mbay yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.





- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan Mbay di Kecamatan Aesesa yang berfungsi sebagai pusat KAPET Mbay dan ibukota Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan road map Pariwisata Nagekeo
 - c. Kawasan DI Mbay
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa perkampungan tradisional dan kawasan situs arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae.

6.3.2 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional; dan
- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

6.3.3 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan kembali kawasan Mbay sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRWN terbaru. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di kawasan sekitar Sungai Aesesa dan Taman Laut Tonggo di Kecamatan Nangaroro.

Untuk program detailnya dapat dilihat pada tabel indikasi program RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 dibawah ini:





**Tabel 6-3 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Nagekeo
Tahun 2011 - 2031**

No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
C. RENCANA KAWASAN STRATEGIS					
C.1 Kawasan Strategis Ekonomi (Pengembangan KAPET Kota Mbay)					
1	Pengembangan kawasan	Pemusatan Permukiman Penduduk	Aesesa, Aesesa Selatan, Kawasan perkotaan	APBD Kabupaten/	Bappeda Kabupaten /Provinsi
		penyediaan sarana dan prasarana			
		Penyediaan utilitas penunjang			
2.	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Laut dan Udara	Fungsionalisasi pelabuhan laut Marapokot	Kecamatan Aesesa	APBN	Dinas Perhubungan
		Mengoperasikan kembali Pelabuhan Udara Surabaya II	Kecamatan Aesesa	APBN	Dinas Perhubungan
	Pengembangan Kawasan Persawahan Beririgasi Teknis	Mengoptimalkan lahan tidur dan lahan kritis untuk lahan produktif	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN	Dinas Pertanian
		Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN	Dinas Pertanian
	Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering, Peternakan, tambak	Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan, perikanan	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN	Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan
	Pengembangan Kawasan Pembangunan Kehutanan	Pemulihan fungsi daerah tangkapan air (recharge area),	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN dan APBD	PU
		Pengaturan tata air	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN dan APBD	PU
		Pencegahan banjir dan erosi	DAS Aesesa	APBN dan APBD	PU
		Menjaga kelestarian fisik alami	Tersebar di kabupaten Nagekeo	APBN dan APBD	PU
	Pengembangan Kawasan Garam Industri	Pembangunan industri garam	Kecamatan Aesesa dan Wolowae	APBD dan Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengembangan Kawasan Pertambangan	Pemanfaatan tambang untuk kegiatan non konstruksi Pemanfaatan bahan tambang	Kecamatan Boawae	APBD dan Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Kajian kelayakan eksplorasi kawasan pertambangan	Kecamatan Boawae	APBD dan Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pelestarian Kawasan DAS Aesesa	program pelestarian alam Aesesa	DAS Aesesa	APBD	PU
		Pengembalian fungsi awal pada lokasi yang telah rusak. Aesesa	DAS Aesesa	APBD	PU
		Penyediaan sistem pengamanan banjir	DAS Aesesa	APBD	PU



No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Pelestarian Kawasan Pengamanan Pantai	Pembebasan kegiatan budidaya dari area sempadan pantai	sepanjang Kaburea sampai Nanganumba dan sepanjang pesisir pantai dari Batawa sampai Nangaroro	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Kawasan Industri dan Perdagangan	Pengembangan pusat bisnis (penyediaan sarana dan prasarana sektor perdagangan dan jasa)	Kecamatan Aesesa	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Peningkatan Kerjasama terpadu antar kecamatan		APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
C.2 Kawasan Strategis					
1	Peningkatan nilai ekonomis kawasan	Pemanfaatan aset wisata, penelitian dan pendidikan	Kecamatan Boawae	APBD Propinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan lokasi tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Boawae	APBD Propinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pelestarian kawasan bersejarah dan adat	Pengembangan lokasi tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Boawae	APBD Propinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembinaan masyarakat sekitar kawasan bersejarah	Pelatihan tentang pentingnya keberadaan bangunan bersejarah	Kecamatan Boawae dan Aesesa	APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengendalian kegiatan kawasan budaya	Penyusunan pedoman perlindungan kawasan cagar budaya	Kecamatan Boawae dan Aesesa	APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
C.3 Kawasan Strategis					
1	Pelestarian kawasan DAS	Penanaman pohon di sekitar DAS	Kecamatan Aesesa	APBN dan APBD	PU
		Pembangunan sistem pengamanan banjir	Kecamatan Aesesa	APBN dan APBD	PU
2	Pelestarian taman laut	Penyusunan peraturan kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kecamatan Aesesa	APBN dan APBD	Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup
		Pembuatan peta bagi kegiatan yang dilarang atau yang diperbolehkan	Kecamatan Aesesa	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup
		Peningkatan sistem patrol pantai	Kecamatan Aesesa	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup





6.4 Program Pembangunan Daerah

Tabel 6-4 Program Pembangunan Daerah Serta Indikator Kinerja Perubahan RPJMD 2018 -2023

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak	MISI
	Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial	1
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan	
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
1	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	
4	Persentase kepemilikan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin	
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
6	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	
8	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
9	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	
10	Persentase pemanfaatan data kependudukan	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
11	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	Dinas Sosial
12	Cakupan profil kependudukan	
2	Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
13	Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
14	Persentase korban bencana yang tertangani	Dinas Sosial
7	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
15	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	
8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
16	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
17	Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	
18	Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial	
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
19	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar	
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan	MISI
2	Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan	2
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
11		
20	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
21	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Dinas Kesehatan
22	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	
23	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS	
24	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar	Dinas Kesehatan
25	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	
26	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas	
27	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	BLUD RSD Aeramo
28	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	
29	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	
30	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
31	Persentase pemenuhan pelayanan Rumah Sakit	BLUD RSD Aeramo
4	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
32	Persentase bumil KEK	Dinas Kesehatan
33	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	
34	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	
35	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	
36	Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup	
37	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	
38	Prevalensi Wasting pada balita	
39	Persentase posyandu aktif	
40	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
41	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan
42	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	
43	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
44	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
45	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
46	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
47	Angka kesakitan malaria (API)	
48	Cakupan vaksinasi Covid-19	
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat	
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
49	Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan	
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
50	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Kesehatan BLUD RSD Aeramo





NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
51	Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar	BLUD RSD Aeraemo
8	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	
18	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
52	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Dinas Kesehatan
9	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS	
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
53	Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS	Dinas Kesehatan
54	Persentase Keluarga mempunyai akses air bersih	
55	Persentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	
56	Persentase Desa STBM	
57	Persentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	
10	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
58	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	
21	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
60	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	
22	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
61	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan	MISI 3
	Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan	
11	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	
23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
62	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
63	Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	
64	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras	
65	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	
66	Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	
67	Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	
68	Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	
69	Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	
70	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71	Rata-rata kekompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	
72	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
73	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
12	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	
24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
74	APM PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
75	APM SD/MI	
76	APM SMP/MTs	
13	Menguatnya karakter peserta didik	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
77	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
78	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar	
79	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar	
14	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	
26	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
80	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
81	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI	
82	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs	
83	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB	
27	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
84	Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B)	
15	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	
28	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
85	Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal	
4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari	MISI 4
	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari	
16	Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim	
29	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
86	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	Dinas Lingkungan Hidup
87	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	
30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
88	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	
31	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
89	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten	
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
90	Persentase penanganan pra bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
92	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
93	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal	
33	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
94	Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
34	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
95	Besaran Energi Baru Terbarukan	Sekretariat Daerah
35	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
96	Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup
36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
97	Jumlah pengurangan timbulan sampah	
98	Jumlah penanganan timbulan sampah	





NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
37	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
99	Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten	
38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
100	Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
39	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
101	Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten	
40	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
102	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH	
41	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
103	Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten	
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.	MISI 5
17	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
104	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	
43	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
105	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	
44	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
106	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	
45	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
107	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan	
108	Persentasae kampung adat yang direvitalisasi	
46	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
109	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan	
110	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/ menonton secara langsung pertunjukan seni	
47	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
111	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
112	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
113	Persentase Desa Layak Anak	
50	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
114	Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan	
51	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
115	Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah	
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
116	Persentase ormas yang aktif	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
117	Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud	
54	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
118	Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
55	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
119	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	
56	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
120	Persentase cabang olahraga yang dibina	
57	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
121	Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
122	Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan	
59	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
123	Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan	
60	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
124	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
61	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
125	Persentase parpol yang aktif	
62	PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga	
126	Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja	
127	Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi	
63	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
128	Angka kekerasan pada anak	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
64	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
129	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penanganan dan layanan komprehensif dari P2TP2A	
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
130	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	Seluruh Kecamatan
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT	MISI
	Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT	6
18	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	
66	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
131	Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	
67	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
132	Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
133	Produksi Garam rakyat	
68	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
134	Produksi Perikanan Tangkap	
69	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
135	Konsumsi Ikan per kapita per tahun	
70	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
136	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Dinas Pertanian
137	Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan	Dinas Peternakan
71	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
138	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	Dinas Peternakan
72	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
139	Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani	Dinas Pertanian
140	Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi	
141	Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian	
142	Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (Ha)	
143	Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (Ha)	
73	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
144	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Dinas Pertanian
145	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	
146	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	
147	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	Dinas Peternakan
74	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
148	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian	Dinas Pertanian
149	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan	Dinas Peternakan
75	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
150	Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih	Dinas Pertanian
151	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak	Dinas Peternakan
19	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	
76	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
152	Persentase daerah rentan pangan	Dinas Pangan
77	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
153	Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	
78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
154	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan	
79	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
155	Persentase cadangan pangan masyarakat	
156	Skor Pola Pangan Harapan	
7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM	MISI
20	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan	7
80	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
157	Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara	Dinas Pariwisata
81	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
158	Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub	
82	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
159	Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif	
83	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
160	Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar	
84	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
161	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
162	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi	
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
163	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	
87	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
164	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	
88	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
165	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	
89	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
166	Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini	
90	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
167	Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan	
91	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
168	Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	
92	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	
169	Persentase pengendalian izin usaha industri	
93	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
170	Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
94	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
171	Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	
95	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
172	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
96	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
173	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	
97	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
174	Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
175	Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
176	Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan	
99	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
177	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
178	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	
21	Meningkatnya Iklim Investasi	
100	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
179	Waktu penerbitan izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
101	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
180	Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	
102	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
181	Nilai realisasi investasi	
103	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
182	Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
104	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
183	Besaran Rencana Investasi yang diajukan	
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah	MISI
	Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah	8
22	Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah	
105	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
184	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
185	Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/Kota	
106	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
186	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri	
107	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
187	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
108	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
188	Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja	
109	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
189	Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi	
110	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
190	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City	Dinas Komunikasi dan Informatika
111	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
191	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan	
112	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
192	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
113	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
193	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas	
114	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
194	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung	
115	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
195	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
116	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
196	Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil	
117	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
197	Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
118	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
198	Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	
119	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
199	Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman prioritas	
120	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
200	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	BLUD SPAM
201	Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan	
121	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
202	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	
203	Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal	
122	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
204	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina	
123	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205	Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman	
124	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
206	Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni	
125	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
207	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas	
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
208	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	BLUD SPAM
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
209	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	
210	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	
211	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	
212	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
213	Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang	
214	Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	
215	Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang	
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
216	Rasio Konektivitas Darat	
130	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
217	Rasio Konektivitas Perairan	Dinas Perhubungan
131	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
218	Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	





NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
24	Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan	
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
219	Jumlah desa maju	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
220	Jumlah desa berkembang	
221	Jumlah desa tertinggal	
222	Jumlah desa sangat tertinggal	
223	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Seluruh Kecamatan
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
224	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	
134	PROGRAM PENATAAN DESA	
225	Jumlah desa persiapan yang ditetapkan	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
135	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
226	Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi	
136	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
227	Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah	Sekretariat Daerah
228	Cakupan peta kadastral kabupaten	
229	Persentase bidang tanah aset pmda dan masyarakat miskin yang disertifikasi	
137	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
230	Cakupan penetapan tanah ulayat	
138	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	
231	Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	
139	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
232	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
140	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
233	Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan	
141	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
234	Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Diredistribusi	
142	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
235	Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
143	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
236	Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman	
144	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
237	Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang dibangun	
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	MISI
	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan	9
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN	
145	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
238	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
146	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
239	Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
147	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
240	Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	Sekretariat Daerah
148	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
241	Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B	
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
242	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	
243	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	
150	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
244	Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
151	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
245	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	Seluruh Kecamatan
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
246	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	
153	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
247	Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
248	Solvabilitas Jangka Panjang	
249	Solvabilitas Layanan	
154	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
250	Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah	
251	Fleksibilitas Keuangan	
252	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending	
253	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakteristik Kualitatif	
254	Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran	
255	Solvabilitas Jangka Pendek	
256	Solvabilitas Operasional	
155	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
257	Persentase pertumbuhan PAD	
156	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
258	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
259	Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi	
157	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
260	Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjurusan, sertifikasi dan diklat fungsional	
158	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
261	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
159	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
262	Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	
160	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PD
263	Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
264	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	
265	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan	
161	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
266	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	
26	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	
162	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
267	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung	Dinas Komunikasi dan Informatika
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
268	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
269	Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data	
165	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
270	Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
166	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
271	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola	

P-RPJMD

2018-2023



7

BAB VII

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayainya. Dalam ketersediaan sumber pembiayaan yang relatif terbatas, secara holistik pemerintah tentu lebih memprioritaskan penanganan pada sektor/bidang yang bersifat strategis dan atau berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas, sedangkan sektor/bidang lain ditangani oleh masyarakat dengan regulasi – regulasi yang ditetapkan pemerintah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan





daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

7.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program-program seluruh perangkat daerah Nagekeo beserta indikator kinerja (*outcome*) dan juga pagu indikatif target, dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Nagekeo hingga tahun 2023. Program pembangunan Nagekeo juga merupakan bentuk pengejawantahan dari arah kebijakan dan juga fokus pembangunan yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2023.

Pada Perubahan RPJMD ini telah dilakukan penyesuaian terhadap target-target capaian indikator yang kinerja capaian pada tahun sebelumnya terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Program pembangunan Kabupaten Nagekeo dituangkan dalam dua tabel yaitu indikasi rencana program pada RPJMD awal dan pada Perubahan RPJMD Nagekeo Tahun 2018-2023.





Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	APBD		PROYEKSI
		2021	2022	2023
5.1	BELANJA OPERASI	519.862.944.565	540.069.276.534	507.490.737.516
5.1.01	Belanja Pegawai	277.492.973.965	319.690.084.331	326.083.886.017,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.938.329.050	175.659.301.963	135.792.563.453,26
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.911.941.550	18.693.715.240	19.067.589.544,80
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.519.700.000	26.026.175.000	26.546.698.500,00
5.2	BELANJA MODAL	195.016.705.275	118.951.240.133	124.235.914.936
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	92.500.000	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.477.183.609	14.808.293.491	15.104.459.360,82
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.073.988.823	10.946.938.400	11.165.877.168,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.368.300.521	80.751.903.282	82.366.941.347,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.079.432.322	12.351.604.960	12.598.637.059,20
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.800.000	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.791,56
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.951.456.816	11.517.105.678	11.747.447.791,56
5.4	BELANJA TRANSFER	139.732.366.600	124.474.931.480	126.964.430.110
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.063.000.000	1.052.020.780	1.073.061.195,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.669.366.600	123.422.910.700	125.891.368.914,00
JUMLAH BELANJA		860.563.473.256	795.012.553.825	770.438.530.353

**Tabel 7-2 Realisasi serta Proyeksi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023**

**NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN SEJAHTERA, NYAMAN DAN BERMARTABAT
MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PEERTANIAN DAN PARIWISATA**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023						
									851.840.036.402	846.131.775.723	860.563.473.256	785.126.670.419	919.749.336.058						
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak															MISI 1			
	Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial																		
									3.481.645.139	3.303.219.510	4.279.171.162	2.742.937.536	3.240.692.000						
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan								1.319.322.000	1.550.492.450	2.396.333.644	1.415.835.236	1.232.342.000						
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								319.528.750	365.324.700	744.502.829	535.891.000	535.891.000						
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	37.78 %	41.09 %	47.40 %	49.68 %	87.93 %	90%	90%	111.835.063	127.863.645	260.575.989	187.561.850	187.561.850						
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	90.08 %	92.00 %	95.54 %	94.51 %	95%	97%	97%	95.858.625	109.597.410	223.350.849	160.767.300	160.767.300						
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79.882.187	91.331.175	186.125.708	133.972.750	133.972.750						
	Persentase kepemilikan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin	44.10 %	51.04 %	63.12 %	62.79 %	87.76 %	90.00 %	90.00 %	31.952.875	36.532.470	74.450.283	53.589.100	53.589.100						
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-						
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								502.619.750	601.981.900	1.196.100.166	674.788.236	541.295.000						
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	86.50 %	83.15 %	86.63 %	82.32 %	93.77 %	95.00 %	95.00 %	225.818.950	273.591.000	538.245.076	377.075.986	243.582.750						
	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	76.35 %	80.00 %	81.10 %	84.59 %	92.00 %	95.00 %	95.00 %	201.407.900	237.192.000	478.440.066	216.518.000	216.518.000						
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	N/A	5.72 %	20.94 %	40.00 %	50.00 %	50.00 %	75.392.900	91.198.900	179.415.024	81.194.250	81.194.250						
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								484.215.500	571.185.850	431.904.101	194.243.000	144.243.000						
	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	290.529.300	342.711.510	263.786.785	151.338.000	101.338.000						
	Persentase pemanfaatan data kependudukan	0%	0%	0%	25%	40%	60%	60%	193.686.200	228.474.340	168.117.316	42.905.000	42.905.000						
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								12.958.000	12.000.000	23.826.548	10.913.000	10.913.000						
	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	24 dokumen	6.000.000	6.000.000	10.877.060	5.000.000	5.000.000						
	Cakupan profil kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	6.958.000	6.000.000	12.949.488	5.913.000	5.913.000						
2	Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan								2.162.323.139	1.752.727.060	1.882.837.518	1.327.102.300	2.008.350.000						
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								141.481.000	173.348.000	154.674.651	157.069.000	304.000.000						
	Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan	N/A	38,10%	31,03%	44,74%	36,36%	37,33%	37,33%	141.481.000	173.348.000	154.674.651	157.069.000	304.000.000						
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								473.279.966	506.622.000	337.928.902	269.494.800	389.000.000						
	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	473.279.966	506.622.000	337.928.902	269.494.800	389.000.000						
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								21.852.000	35.522.060	13.378.500	7.971.000	15.000.000						
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21.852.000	35.522.060	13.378.500	7.971.000	15.000.000						

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023								
4	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														174.075.000	10.734.000	-	-	25.000.000		
	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	N/A	500 Orang	500 Orang	500 Orang	1000 Orang	1000 Orang	3500 Orang	174.075.000	10.734.000	-	-	25.000.000	Dinas Sosial							
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														1.217.926.173	798.692.000	1.153.347.078	696.243.000	1.052.350.000		
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	80,46%	86,79%	92,96%	93,78%	94,55%	95,12%	95,12%	989.234.173	678.398.000	1.153.347.078	696.243.000	917.350.000	Dinas Sosial							
	Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial	21,88%	35,42%	34,72%	40,51%	53,24%	57,87%	57,87%	228.692.000	120.294.000	-	-	135.000.000	Dinas Sosial							
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														133.709.000	227.809.000	223.508.387	196.324.500	223.000.000		
	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar	33.78 %	34,51%	34,17%	30,73%	32,65%	37,58%	37.58 %	133.709.000	227.809.000	223.508.387	196.324.500	223.000.000	Dinas Sosial							
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan																				MISI 2
	Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan														119.403.667.257	137.902.377.571	139.541.658.367	89.785.564.815	87.447.125.851		
3	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan														84.790.115.008	100.273.694.728	105.501.060.231	50.907.215.527	59.854.960.301		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														84.790.115.008	100.273.694.728	105.501.060.231	40.393.194.303	49.354.960.301		
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1 : 2.889 rasio	1 : 2.197 rasio	1 : 1.997 rasio	1 : 1.625 rasio	1 : 1.625 rasio	1 : 1.625 rasio	1 : 1.625 rasio	57.872.669	-	-	-	-								
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	41.01 %	73%	51%	66%	80%	85%	85%	57.872.669	44.365.696.960	28.200.932.230	9.196.598.693	-								
	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	N/A	0%	20%	30%	70%	80%	80%	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan							
	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS	71.43 %	80%	80%	82%	100%	100%	100%	1.229.090.250	976.169.230	-	100.000.000	3.000.000.000								
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar	65.75 %	100%	69.82 %	71.51 %	80.00 %	85.00 %	85.00 %	50.565.096.170	23.376.327.002	20.031.149.757	4.511.178.481	11.000.000.000								
	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	532.349.000	129.708.000	11.016.000	11.135.721	75.000.000	Dinas Kesehatan							
	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas	71.43 %	71.43 %	100%	100%	100%	100%	100%	1.229.090.250	1.339.711.230	7.803.350.853	4.390.358.500	5.000.000.000								
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1 : 2.889 Rasio	1 : 2.197 Rasio	1 : 1.997 Rasio	1 : 1.625 Rasio	1 : 1.625 Rasio	1 : 1.625 Rasio	1 : 1.625 Rasio	31.118.744.000	30.086.082.306	49.454.611.391	22.183.922.908	30.279.960.301								
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	41.01 %	73%	51%	66%	80%	85%	85%	-	-	-	-	-								
	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	80%	-	-	-	-	-	BLUD RSD Aeramo							
	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit	80%	80%	80%	82%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-								
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														-	-	-	10.514.021.224	10.500.000.000		
	Persentase pemenuhan pelayanan Rumah Sakit	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100%	100%	-	-	-	10.514.021.224	10.500.000.000	BLUD RSD Aeramo							

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat								4.218.315.850	3.976.231.000	5.355.273.307	7.222.111.192	4.590.394.950	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4.218.315.850	3.976.231.000	5.355.273.307	7.222.111.192	4.590.394.950	
	Persentase bumil KEK	N/A	12.84 %	19.01 %	20.60 %	15%	10%	10%	379.759.000	617.286.000	462.415.120	892.414.596	1.145.165.050	
	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	4(159/100.000 KH)	2 (91/100.000 KH)	4 (160/ 100.000 KH)	2 (84/100.000 KH)	0	0	0	358.087.500	227.175.750	963.435.950	677.346.600	464.322.300	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	36(14,3:1.000 KH)	6(2,5/1000 KH)	11 (4,4/1000 KH)	9 (3,8/1000KH)	0	0	0	358.087.500	227.175.750	489.829.870	669.347.600	585.598.000	
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	80%	92.15 %	99.7 %	99.2 %	100%	100%	100%	358.087.500	227.175.750	963.435.950	707.346.600	464.322.300	
	Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5 (2:1.000 KH)	2 (0,8/1000KH)	2 (0,8/1000KH)	4 (1,7/1000KH)	0	0	0	358.087.500	227.175.750	715.353.870	917.822.600	300.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	76.04 %	68.50 %	76.20 %	100%	100%	100%	100%	248.773.400	458.870.000	394.748.504	669.564.600	250.000.000	
	Prevalensi Wasting pada balita	2.10 %	3.60 %	4.30 %	7,00%	2,50%	2,00%	2,00%	717.399.225	1.201.265.000	428.679.034	1.433.412.500	430.987.300	
	Persentase posyandu aktif	52.57 %	58.10 %	40.10 %	45.40 %	70,00%	100%	100%	717.399.225	350.505.000	428.679.034	716.706.250	800.000.000	
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	93.60 %	92,40%	88,40%	93%	95%	100%	100%	722.635.000	439.602.000	508.695.975	538.149.846	150.000.000	
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan								4.040.720.300	3.654.807.016	5.702.029.280	8.288.903.570	1.946.021.000	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4.040.720.300	3.654.807.016	5.702.029.280	8.288.903.570	1.946.021.000	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	82.08 %	85%	89%	100%	100%	100%	574.463.400	700.129.936	469.522.775	1.300.208.981	346.021.000	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.29 %	45.60 %	50%	58.27 %	100%	100%	100%	574.463.400	700.129.936	621.080.575	1.014.989.981	200.000.000	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35.14 %	30.60 %	48.70 %	53%	100%	100%	100%	775.852.000	225.725.000	594.345.775	1.219.219.981	200.000.000	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.87 %	18%	20.50 %	95.40 %	100%	100%	100%	501.909.433	344.014.902	487.259.870	888.449.981	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.63 %	36.80 %	100%	100%	100%	100%	100%	501.909.433	344.014.903	472.619.870	1.166.662.701	450.000.000	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68.12 %	74.40 %	100%	100%	100%	100%	100%	501.909.433	344.014.903	483.148.775	1.083.111.981	250.000.000	
	Angka kesakitan malaria (API)	N/A	N/A	0	0	0	0	0	610.213.201	296.647.500	1.287.025.820	808.129.982	200.000.000	
	Cakupan vaksinasi Covid-19	N/A	0	0	36.74 %	64%	100%	100%	-	700.129.936	1.287.025.820	808.129.982	100.000.000	
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat								19.927.721.599	24.058.089.329	15.552.847.040	14.844.812.444	12.749.427.600	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								19.927.721.599	24.058.089.329	15.552.847.040	14.844.812.444	12.749.427.600	
	Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan	68.87 %	60.80 %	24.50 %	89%	100%	100%	100%	19.927.721.599	24.058.089.329	15.552.847.040	14.844.812.444	12.749.427.600	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar								248.066.150	293.923.000	2.022.200.000	1.892.235.000	2.700.920.000	
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								248.066.150	293.923.000	2.022.200.000	1.892.235.000	2.650.920.000	
	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	N/A	60%	62%	50%	60%	65%	65%	248.066.150	293.923.000	2.022.200.000	1.892.235.000	2.450.920.000	Dinas Kesehatan
		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	-	-	-	-	200.000.000	BLUD RSD Aeramo
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	-	-	-	50.000.000	
	Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-	-	-	-	50.000.000	BLUD RSD Aeramo

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
8	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan								272.670.000	254.403.000	-	83.160.000	100.000.000	
1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								272.670.000	254.403.000	-	83.160.000	100.000.000	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	N/A	0%	100%	100%	100%	100%	100%	272.670.000	254.403.000	-	83.160.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
9	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS								2.341.195.350	2.594.955.000	2.207.978.296	2.931.450.000	1.316.114.000	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								2.341.195.350	2.594.955.000	2.207.978.296	2.931.450.000	1.316.114.000	
	Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS	14.27 %	30,23%	37.11 %	28.65 %	40%	45%	45%	-	-	-	-	-	
	Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih	90.50 %	93%	93%	93%	95%	95%	95%	776.330.066	1.011.580.000	934.982.392	379.617.000	1.058.874.000	
	Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	76.40 %	91.30 %	92%	96.80 %	97%	100%	100%	1.014.595.216	679.570.500	628.736.904	580.925.500	168.840.000	Dinas Kesehatan
	Presentase Desa STBM	10.16 %	10.60 %	13.30 %	14.20 %	25%	50%	50%	510.430.068	858.219.500	549.899.000	1.653.044.500	20.400.000	
	Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	57.70 %	64.10 %	81.80 %	27.60 %	80%	85%	85%	39.840.000	45.585.000	94.360.000	317.863.000	68.000.000	
10	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana								3.564.863.000	2.796.274.498	3.200.270.213	3.615.677.082	4.189.288.000	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1.258.478.000	2.319.109.998	882.619.000	1.208.110.000	1.595.964.000	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	N/A	35.09	33.17	31.4	29.76	28.25	28.25	1.258.478.000	2.319.109.998	882.619.000	1.208.110.000	1.595.964.000	
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	-	-	-	-	-	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								1.782.189.000	424.178.500	2.259.851.213	2.238.669.282	2.407.536.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	24.11 %	20.80 %	20.21 %	19.62 %	19.03 %	18.44 %	18.44 %	1.782.189.000	424.178.500	2.259.851.213	2.238.669.282	2.407.536.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								524.196.000	52.986.000	57.800.000	168.897.800	185.788.000	
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	3.40	2.70	2.67	2.64	2.61	2.58	2.58	524.196.000	52.986.000	57.800.000	168.897.800	185.788.000	
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan													MISI 3
									43.048.019.035	53.349.945.967	39.190.655.432	54.002.067.000	61.845.000.000	
11	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang								1.128.562.010	994.214.500	3.211.845.177	5.775.066.400	6.300.000.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.128.562.010	994.214.500	3.211.845.177	5.775.066.400	6.300.000.000	
	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras	N/A	4%	8%	10%	20%	30%	30%	1.128.562.010	994.214.500	3.009.700.160	5.078.721.300	6.000.000.000	
	Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras	N/A	25%	35,12%	55%	56%	60%	60%	-	-	-	442.271.000	-	
	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	N/A	63,11%	65,25%	72,34%	75,16%	90%	90%	-	-	-	64.660.000	-	
	Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	N/A	10%	15%	20%	25%	30%	30%	-	-	-	-	-	
	Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.55	1.65	1.75	1.75	-	-	-	-	-	
	Rata-rata kekompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	N/A	N/A	N/A	1.44	1.54	1.64	1.64	-	-	108.307.335	106.750.100	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.74	1.74	1.94	1.94	-	-	93.837.682	82.664.000	150.000.000	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.65	1.74	1.84	1.84	-	-	-	-	-	
12	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang								40.841.613.412	51.655.381.567	35.978.810.255	47.927.000.600	55.000.000.000	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								40.841.613.412	51.655.381.567	35.978.810.255	47.927.000.600	55.000.000.000	
	APM PAUD	0%	44%	56,66%	72,11%	73%	74%	74%	-	-	-	-	-	
	APM SD/MI	98.79	99,48	98,7	89,11	90	92	92	24.040.143.015	17.255.381.567	24.157.865.255	26.592.270.600	30.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SMP/MTs	73.69	73,96	75,5	67,35	75	76	76	16.801.470.397	34.400.000.000	11.820.945.000	21.334.730.000	25.000.000.000	
13	Menguatnya karakter peserta didik								-	-	-	150.000.000	250.000.000	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								-	-	-	150.000.000	250.000.000	
	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100.000.000	150.000.000	
	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	-	-	-	50.000.000	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	50.000.000	
14	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel								1.077.843.613	700.349.900	-	100.000.000	220.000.000	
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								1.077.843.613	700.349.900	-	100.000.000	120.000.000	
	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.077.843.613	700.349.900	-	100.000.000	120.000.000	
	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs	N/A	50%	60%	80%	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB	N/A	10%	30%	50%	60%	80%	80%	-	-	-	-	-	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								-	-	-	-	100.000.000	
	Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan								-	-	-	50.000.000	75.000.000	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								-	-	-	50.000.000	75.000.000	
	Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal	N/A	0%	0%	0%	50%	50%	50%	-	-	-	50.000.000	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari													MISI
	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari													4
									4.965.182.000	14.847.487.410	14.670.815.217	60.000.000	100.000.000	
16	Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim								4.965.182.000	14.847.487.410	14.670.815.217	60.000.000	100.000.000	
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								-	-	-	60.000.000	100.000.000	
	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	750 Ha	172 Ha	922 Ha	-	-	-	30.000.000	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	750 Ha	172 Ha	922 Ha	-	-	-	30.000.000	50.000.000	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								162.892.000	42.362.000	17.925.192	23.542.200	35.000.000	
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan,izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162.892.000	42.362.000	17.925.192	23.542.200	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								-	-	21.940.111	11.828.000	50.000.000	
	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	21.940.111	11.828.000	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								3.138.453.000	13.708.610.000	13.801.246.681	2.826.177.204	20.864.000.000	
	Persentase penanganan pra bencana	15%	96,09%	99,94%	91,62%	100%	100%	100%	2.955.585.000	13.490.066.000	13.664.470.181	2.782.617.204	20.274.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	15%	50%	87,70%	74,12%	100%	100%	100%	182.868.000	218.544.000	136.776.500	43.560.000	90.000.000	
	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	250.000.000	
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	250.000.000	
5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								-	-	-	-	50.000.000	
	Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH	N/A	N/A	N/A	N/A	1 MHA	1 MHA	2 MHA	-	-	-	-	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								-	-	-	-	200.000.000	
	Besaran Energi Baru Terbarukan	N/A	3%	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	-	-	200.000.000	Sekretariat Daerah
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								157.548.000	284.113.160	117.132.063	200.933.600	205.000.000	
	Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan	10 Jenis	11 Jenis	12 Jenis	15 Jenis	20 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	157.548.000	284.113.160	117.132.063	200.933.600	205.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								454.824.000	34.011.000	337.912.163	147.288.000	200.000.000	
	Jumlah pengurangan timbulan sampah	582,18 Ton/Tahun	424,95 Ton/Tahun	506,71 Ton/Tahun	274,04 Ton/Tahun	6494,18 Ton/Tahun	6494,18 Ton/Tahun	6.494,18 Ton/Tahun	454.824.000	34.011.000	337.912.163	147.288.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah penanganan timbulan sampah	1,85 Ton/Tahun	1,85 Ton/Tahun	63,36 Ton/Tahun	63,36 Ton/Tahun	17.317,82 Ton/Tahun	17.317,82 Ton/Tahun	17.317,82 Ton/Tahun	-	-	-	-	100.000.000	
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								32.599.000	15.926.000	16.216.509	17.599.900	130.000.000	
	Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	32.599.000	15.926.000	16.216.509	17.599.900	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								908.102.000	718.009.250	142.505.320	234.487.400	300.000.000	
	Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	908.102.000	718.009.250	142.505.320	234.487.400	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								39.859.000	-	-	-	30.000.000	
	Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten	2 Org/Kelompok	0 Org/Kelompok	0 Org/Kelompok	0 Org/Kelompok	0 Org/Kelompok	3 Org/Kelompok	3 Org/Kelompok	39.859.000	-	-	-	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
12	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								-	-	-	-	75.000.000	
	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	-	-	-	-	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
13	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								70.905.000	44.456.000	215.937.178	274.261.000	750.000.000	
	Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70.905.000	44.456.000	215.937.178	274.261.000	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023			
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.											MISI 5				
								9.852.197.782	6.089.448.324	17.234.919.373	11.713.621.500		10.753.291.000			
17	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan															
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											237.483.300	321.541.800	81.858.738	158.472.200	145.500.000
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64.153.000	50.117.000	13.600.000	9.520.000	10.000.000	Kecamatan Aesesa		
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	38.707.800	77.725.800	-	22.437.000	25.000.000	Kecamatan Boawae			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.642.000	83.614.000	52.263.100	35.760.000	18.000.000	Kecamatan Mauponggo			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	24.705.200	25.000.000	Kecamatan Nangaroro			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	18.150.000	29.317.000	4.875.638	8.690.000	9.000.000	Kecamatan Wolowae			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	36.215.000	34.004.000	6.630.000	7.420.000	8.500.000	Kecamatan Keo Tengah			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	46.615.500	46.764.000	4.490.000	49.940.000	50.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan			
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											-	-	193.144.160	148.930.500	390.000.000
	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	N/A	5	5	5	5	5	5	-	-	193.144.160	148.930.500	390.000.000			
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											-	103.379.100	74.270.664	100.000.000	100.000.000
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	N/A	50%	50%	60%	70%	75%	75%	-	103.379.100	74.270.664	100.000.000	100.000.000			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											142.353.800	42.460.000	143.066.336	73.059.000	250.000.000
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan	N/A	60%	65%	65%	67%	75%	75%	-	-	-	-	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Persentasae kampung adat yang direvitalisasi	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	142.353.800	42.460.000	143.066.336	73.059.000	100.000.000			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											403.651.300	7.425.000	-	-	40.000.000
	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan	N/A	10%	20%	25%	30%	35%	35%	-	-	-	-	20.000.000			
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/ menonton secara langsung pertunjukan seni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	403.651.300	7.425.000	-	-	20.000.000			
6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											1.654.398.000	449.063.222	10.410.797.046	3.967.310.100	980.000.000
	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	41.63 %	99%	98%	76,39%	87,96%	99,57%	99,57%	1.654.398.000	449.063.222	10.410.797.046	3.967.310.100	980.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
7	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											-	-	3.083.465	10.266.000	476.590.000
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	13.24 %	15%	20%	25%	50%	80%	80%	-	-	3.083.465	10.266.000	476.590.000			
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											18.973.000	-	49.999.807	83.055.000	100.000.000
	Persentase Desa Layak Anak	N/A	38,93%	38,93%	48,67%	57,52%	66,37%	66,37%	18.973.000	-	49.999.807	83.055.000	100.000.000			
9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											281.183.000	264.454.500	178.801.760	280.488.800	355.000.000
	Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan	N/A	30%	35%	40%	45%	50%	50%	281.183.000	264.454.500	178.801.760	280.488.800	355.000.000	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											-	-	-	-	50.000.000
	Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	50.000.000			

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023								
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															-	-	-	-	100.000.000	
	Persentase ormas yang aktif	30%	36%	36%	40%	45%	60%	60%	-	-	-	-	-	100.000.000							
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															-	-	45.045.696	61.213.000	100.000.000	
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud	N/A	50%	55%	60%	65%	70%	70%	-	-	45.045.696	61.213.000	100.000.000								
13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															180.806.000	268.620.000	49.130.813	135.727.900	200.000.000	
	Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	N/A	10.52 %	11.76 %	13.33 %	15.38 %	18.18 %	18.18 %	180.806.000	268.620.000	49.130.813	135.727.900	200.000.000								
14	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															996.182.000	797.884.000	1.474.714.176	1.615.244.250	1.800.000.000	
	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	N/A	20.59 %	25.93 %	10.00 %	16.67 %	20.00 %	20.00 %	996.182.000	797.884.000	1.474.714.176	1.615.244.250	1.800.000.000								
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															1.129.086.000	526.825.800	1.374.009.518	1.729.658.300	1.802.624.000	
	Persentase cabang olahraga yang dibina	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	70%	1.129.086.000	526.825.800	1.374.009.518	1.729.658.300	1.802.624.000								
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															925.398.000	136.755.000	331.460.114	403.252.000	443.577.000	
	Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader	N/A	99.3 %	9.3 %	9.3 %	29.3 %	100%	100%	925.398.000	136.755.000	331.460.114	403.252.000	443.577.000								
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															-	-	163.588.313	300.000.000	330.000.000	
	Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan	N/A	80%	80%	80%	90%	95%	100%	-	-	163.588.313	300.000.000	330.000.000								
18	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															145.696.000	116.107.000	102.697.000	71.457.000	175.000.000	
	Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan	30%	30%	40%	35%	40%	45%	45%	145.696.000	116.107.000	102.697.000	71.457.000	175.000.000								
19	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															92.386.000	170.886.000	464.168.000	666.213.650	800.000.000	
	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.386.000	170.886.000	464.168.000	666.213.650	800.000.000								
20	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															71.763.000	60.973.000	704.671.412	764.206.800	800.000.000	
	Persentase parpol yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.763.000	60.973.000	704.671.412	764.206.800	800.000.000								
21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															18.973.000	100.729.000	-	-	50.000.000	
1	Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja	0%	97%	97,10%	97,10%	98%	98,10%	98.10 %	18.973.000	100.729.000	-	-	50.000.000								
2	Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi	0%	0,80%	0,38%	0,80%	0,50%	0,38%	0,38%	-	-	-	-	-								
22	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															-	-	-	-	95.000.000	
	Angka kekerasan pada anak	12	44	17	13	5	0	0	-	-	-	-	95.000.000								
23	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															-	-	91.289.581	55.500.000	60.000.000	
	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penanganan dan layanan komprehensif dari P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	91.289.581	55.500.000	60.000.000								
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															3.553.865.382	2.722.344.902	1.299.122.774	1.089.567.000	1.110.000.000	
	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.593.257.374	1.400.057.902	744.706.314	641.316.000	650.000.000	Kecamatan Aesesa							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.635.976.008	985.705.000	347.158.994	171.109.000	180.000.000	Kecamatan Boawae							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67.797.000	83.803.000	10.477.466	69.464.000	70.000.000	Kecamatan Mauponggo							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	208.863.000	224.205.000	171.800.000	175.800.000	175.000.000	Kecamatan Nangaroro							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	5.074.000	7.200.000	9.192.000	10.000.000	Kecamatan Wolowae							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	13.620.000	19.498.000	20.000.000	Kecamatan Keo Tengah							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47.972.000	23.500.000	4.160.000	3.188.000	5.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan							

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023						
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT															MISI 6			
	Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT																		
													35.150.648.950	28.636.289.505	20.505.133.457	14.611.165.576	29.933.000.000		
18	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan																		
													34.667.502.700	28.340.218.605	19.192.789.899	13.685.221.576	29.005.000.000		
1	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				-	-	-	-	-		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																		
	Produksi Perikanan Budidaya	70,6 ton	92,85 ton	92,31 ton	93,85 ton	100 ton	150 ton	529,01 ton		1.464.767.600	1.549.543.275	593.293.752	1.662.430.800	1.400.000.000				Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Produksi Garam rakyat	2264 ton	2.743,75 ton	2.707 ton	2.739,80 ton	2.801 ton	2.900 ton	13.891,55 ton		162.607.000	14.587.000	551.118.000	142.500.000	350.000.000					
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																		
	Produksi Perikanan Tangkap	2.374 ton	2.421,84 ton	2.987,88 ton	3.077,48 ton	3.300 ton	3.600 ton	15.387,20 ton		1.414.564.100	1.988.075.975	314.396.515	604.369.500	600.000.000					
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																		
	Konsumsi Ikan per kapita per tahun	17,12 kg/kapita/tahun	17,41 kg/kapita/tahun	18,71 kg/kapita/tahun	19,85 kg/kapita/tahun	20,61 kg/kapita/tahun	22,06 kg/kapita/tahun	22,06 kg/kapita/tahun		319.415.000	226.031.000	340.917.251	303.582.000	350.000.000					
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																		
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		124.642.500	338.758.000	-	-	1.000.000.000				Dinas Pertanian	
	Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan	100%	100%	92,92 %	85,84 %	100%	100%	100%		-	-	-	-	500.000.000				Dinas Peternakan	
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100%	100%	28,57 %	42,86 %	100%	100%	100%		2.139.437.000	2.424.669.000	925.369.978	633.000.200	1.975.000.000				Dinas Peternakan	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		
	Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani	58,8 Ha	181,8 Ha	769,8 Ha	1.228,8 Ha	1.228,8 Ha	1.428,8 Ha	1.428,8 Ha		10.759.973.320	5.689.208.414	4.219.523.866	666.489.676	10.600.000.000					
	Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi	100 Ha	150 Ha	150 Ha	200 Ha	200 Ha	250 Ha	250 Ha		-	-	-	-	-				Dinas Pertanian	
	Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian	1176 Ha	4952 Ha	4952 Ha	5187 Ha	5187 Ha	5187 Ha	5187 Ha		-	-	-	-	-					
	Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (Ha)	551,52	1.494,23	2.584,44	2.584,44	2.584,44	2.712,70	2.712,70		5.690.856.507	4.459.519.650	3.836.323.226	1.238.540.000	900.000.000				Dinas Peternakan	
	Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (Ha)	38,83	39,4	39,49	40,08	45,97	86,19	86,19		109.836.493	654.880.000	629.018.019	250.000.000	4.600.000.000					
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																		
	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	3,68%	7,51%	-17%	-33%	2%	2%	2%		6.760.316.294	7.537.222.200	4.899.904.604	6.490.848.500	2.900.000.000					
	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	-35,94 %	-8,40%	49,10%	10,80%	10,00%	12,00%	12,00%		-	-	-	-	-				Dinas Pertanian	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	0,2 %	-0,40%	-19,10%	29,60%	1,00%	1,00%	1,00%		-	-	-	-	-					
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	8,57 %	15,80 %	17,60 %	20,10 %	22,20 %	24,40 %	24,40 %		3.368.203.000	2.105.701.638	1.494.130.378	870.840.700	2.000.000.000				Dinas Peternakan	
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																		
	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian	1289 Kelompok	1252 Kelompok	1278 Kelompok	1358 Kelompok	1423 Kelompok	1450 Kelompok	1450 Kelompok		2.095.072.886	1.186.788.453	1.186.385.484	722.620.200	2.000.000.000				Dinas Pertanian	
	Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan	39 Kelompok	75 Kelompok	103 Kelompok	152 Kelompok	163 Kelompok	175 Kelompok	175 Kelompok		257.811.000	165.234.000	202.408.826	100.000.000	250.000.000				Dinas Peternakan	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI						TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD			
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023						
10	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													-	-	-	-	80.000.000	
	Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih	N/A	10.45 %	5%	9%	9%	10%	10%	-	-	-	-	-	30.000.000	Dinas Pertanian				
	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak	40	45	300	309	320	330	1.304	-	-	-	-	-	50.000.000	Dinas Peternakan				
19	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan													483.146.250	296.070.900	1.312.343.558	925.944.000	928.000.000	
1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													17.509.000	14.514.300	24.835.386	25.000.000	20.000.000	
	Persentase daerah rentan pangan	0%	44.25 %	19.47 %	51.33 %	45,00%	35,00%	35,00%	17.509.000	14.514.300	24.835.386	25.000.000	20.000.000						
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													52.031.000	39.878.600	-	86.081.000	100.000.000	
	Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	65%	70%	80%	85%	90%	92%	92%	52.031.000	39.878.600	-	-	-	86.081.000	100.000.000				
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN													-	-	72.574.370	243.880.000	250.000.000	Dinas Pangan
	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan	25%	25%	25%	25%	35%	50%	50%	-	-	72.574.370	243.880.000	250.000.000						
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													413.606.250	241.678.000	1.214.933.802	570.983.000	558.000.000	
	Persentase cadangan pangan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	385.385.250	214.762.700	1.214.933.802	505.275.000	498.000.000						
	Skor Pola Pangan Harapan	65.80	57.2	53	62.1	65	66	66	28.221.000	26.915.300	-	65.708.000	60.000.000						
7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM																		MISI 7
	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan																		
														10.908.587.896	5.273.291.950	7.527.008.989	5.929.437.508	8.528.597.732	
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah													10.652.320.896	4.907.050.200	6.870.807.853	5.290.898.408	7.788.978.085	
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													70.760.000	580.128.000	547.100.539	397.829.000	137.829.000	
	Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara	N/A	6%	17%	20%	20%	20%	20%	70.760.000	580.128.000	547.100.539	397.829.000	137.829.000						
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													105.658.000	388.096.000	122.467.142	200.877.000	110.877.000	
	Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub	N/A	4	4	4	4	4	8	105.658.000	388.096.000	122.467.142	200.877.000	110.877.000						
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													661.434.000	337.194.000	1.125.767.990	809.871.900	809.871.900	Dinas Pariwisata
	Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif	N/A	200 orang	80 orang	310 orang	250 orang	513 orang	1378 orang	661.434.000	337.194.000	1.125.767.990	809.871.900	809.871.900						
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													2.403.586.000	752.524.500	1.221.895.682	1.918.365.212	1.752.300.000	
	Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar	N/A	1	1	1	4	4	4	2.403.586.000	752.524.500	1.221.895.682	1.918.365.212	1.752.300.000						
5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM													-	-	-	-	36.000.000	
	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	83.95 %	83.95 %	99%	74%	75%	75%	75%	-	-	-	-	-	36.000.000					
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													-	183.596.000	123.913.382	25.044.300	27.549.000	
	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi	83.95 %	83.95 %	67.00 %	98.08 %	100%	100%	100%	-	183.596.000	123.913.382	25.044.300	27.549.000						
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													88.960.000	146.564.000	204.636.390	27.202.000	29.922.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	25.25 %	25.69 %	26.13 %	26.57 %	36.36 %	44.44 %	44.44 %	88.960.000	146.564.000	204.636.390	27.202.000	29.922.000						
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													478.400.000	506.354.700	335.008.494	400.799.850	440.879.835	
	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	39.51 %	76.54 %	23,00%	41.00 %	60.78 %	63.73 %	63.73 %	478.400.000	506.354.700	335.008.494	400.799.850	440.879.835						
9	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													-	62.134.000	59.757.207	50.534.000	55.588.000	
	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	62.134.000	59.757.207	50.534.000	55.588.000						

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023								
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															-	-	145.782.844	50.000.000	55.000.000	
	Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	145.782.844	50.000.000	55.000.000								
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR															-	-	-	-	-	
	Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan	941/13.258 Ton/Hewan	1.049/11.567 Ton/Hewan	1.750/8.500 Ton/Hewan	290/8.351 Ton/Hewan	50/8.500 Ton/Hewan	600/9.000 Ton/Hewan	600/9.000 Ton/Hewan	-	-	-	-	-								
12	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															-	81.275.000	419.100.645	90.438.000	57.862.000	
	Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	-	81.275.000	419.100.645	90.438.000	57.862.000								
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA															-	-	-	-	25.000.000	
	Persentase pengendalian izin usaha industri	N/A	N/A	5%	10%	15%	20%	20%	-	-	-	-	25.000.000								
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															-	-	-	-	30.000.000	
	Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	30.000.000								
15	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															-	-	16.328.804	28.881.700	31.770.000	
	Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	33.33 %	33.33 %	30.00 %	38.46 %	43.27 %	45.19 %	45.19 %	-	-	16.328.804	28.881.700	31.770.000								
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															5.073.614.312	1.254.405.000	480.298.781	31.499.000	3.000.000.000	
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.073.614.312	1.254.405.000	480.298.781	31.499.000	3.000.000.000								
17	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															611.849.844	452.997.000	1.898.089.679	1.014.318.946	933.768.000	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	8.46 %	10.66 %	15.95 %	20.17 %	25.94 %	30.21 %	30.21 %	611.849.844	452.997.000	1.898.089.679	1.014.318.946	933.768.000								
18	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN															-	-	-	-	25.000.000	
	Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	N/A	N/A	30.00 %	35,00%	40,00%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	25.000.000								
19	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															-	14.594.000	31.633.936	80.249.000	48.274.000	
	Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	-	14.594.000	31.633.936	80.249.000	48.274.000								
	Persentase kenaikan harga yang ber gejolak terhadap harga pangan	0%	0%	0%	0%	0.25 %	0.25 %	0.25 %	-	-	-	-	-								
20	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															1.158.058.740	147.188.000	139.026.338	164.988.500	181.487.350	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.158.058.740	-	27.544.856	73.094.500	80.403.950								
	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	147.188.000	111.481.482	91.894.000	101.083.400								
21	Meningkatnya Iklim Investasi															256.267.000	366.241.750	656.201.136	638.539.100	739.619.647	
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															125.537.000	142.444.000	152.317.039	124.769.000	141.384.917	
	Waktu penerbitan izin	21 Hari	14 Hari	7 Hari	4 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	125.537.000	142.444.000	152.317.039	124.769.000	141.384.917								
2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															10.374.000	19.916.750	50.018.579	15.425.200	50.018.579	
	Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.374.000	19.916.750	50.018.579	15.425.200	50.018.579								
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															46.062.000	101.246.000	42.804.648	28.782.000	100.000.000	
	Nilai realisasi investasi	300.000.000.000	333.660.490.900	405.660.490.900	532.462.572.822	608.860.572.822	664.521.972.822	664.521.972.822	46.062.000	101.246.000	42.804.648	28.782.000	100.000.000								

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023								
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													56.889.000	61.392.000	392.100.735	388.653.900	367.307.151			
	Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	50%	57,95%	65,91%	77,27%	82,95%	88,64%	88,64%	56.889.000	61.392.000	392.100.735	388.653.900	367.307.151								
5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													17.405.000	41.243.000	18.960.135	80.909.000	80.909.000			
	Besaran Rencana Investasi yang diajukan	300.000.000.000	410.000.000.000	482.000.000.000	589.000.000.000	698.140.000.000	809.462.800.000	809.462.800.000	17.405.000	41.243.000	18.960.135	80.909.000	80.909.000								
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah																				MISI 8
	Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah													134.261.017.989	94.434.698.075	131.308.268.895	137.428.134.255	171.761.740.354			
22	Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah													751.437.000	1.466.805.700	8.806.896.909	2.051.410.700	4.290.000.000			
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													64.593.000	52.163.000	49.802.480	45.007.000	120.000.000			
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0%	0.57 %	1.13 %	1.06 %	5%	10%	10%	46.878.000	30.638.000	34.485.000	20.000.000	50.000.000								
	Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17.715.000	21.525.000	15.317.480	25.007.000	70.000.000								
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													214.084.000	806.120.700	634.545.571	399.699.300	650.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri	25%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	214.084.000	806.120.700	634.545.571	399.699.300	650.000.000								
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													69.576.000	7.961.000	4.616.750.337	236.843.400	1.400.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	69.576.000	7.961.000	4.616.750.337	236.843.400	1.400.000.000								
4	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													-	-	-	30.951.000	1.120.000.000			
	Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja	0%	0%	0%	0%	28,57%	100%	100%	-	-	-	30.951.000	1.120.000.000								
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													403.184.000	600.561.000	3.505.798.521	1.338.910.000	1.000.000.000			
	Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	403.184.000	600.561.000	3.505.798.521	1.338.910.000	1.000.000.000								
23	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi													120.920.966.521	71.081.270.656	101.601.415.793	125.140.215.565	153.749.966.964			
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA													1.392.625.000	1.139.941.700	880.650.773	424.750.000	430.000.000			
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City	N/A	N/A	20%	30%	50%	60%	60%	1.392.625.000	1.139.941.700	880.650.773	424.750.000	430.000.000								
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													135.169.000	228.059.000	234.579.689	736.551.478	620.000.000			
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan	22%	44%	68%	90%	91%	93%	93%	135.169.000	228.059.000	234.579.689	736.551.478	620.000.000								
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													-	-	-	1.662.954.800	4.300.000.000			
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14%	14%	-	-	-	1.662.954.800	4.300.000.000								
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													-	-	-	-	150.000.000			
	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas	N/A	20%	30%	40%	45%	50%	50%	-	-	-	-	150.000.000								
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													3.877.531.971	2.351.183.398	311.876.922	2.736.675.280	2.594.900.250			
	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	50%	3.877.531.971	2.351.183.398	311.876.922	2.736.675.280	2.594.900.250								
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													1.954.190.000	-	2.727.181.780	2.558.915.000	4.037.000.000			
	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	N/A	22 Desa/Kel.	22 Desa/Kel.	22 Desa/Kel.	23 Desa/Kel.	23 Desa/Kel.	113 Desa/Kel.	1.954.190.000	-	2.727.181.780	2.558.915.000	4.037.000.000								

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI							TARGET			REALISASI					PROYEKSI		PD		
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023								
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															-	-	-	50.000.000	300.000.000	
	Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	50.000.000	300.000.000								
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															465.893.000	220.728.000	126.155.536	-	200.000.000	
	Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU	N/A	1 Permukiman	0 Permukiman	1 Permukiman	0 Permukiman	1 Permukiman	3 Permukiman	465.893.000	220.728.000	126.155.536	-	200.000.000								
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															3.513.917.000	6.702.855.500	16.627.827.400	20.829.804.000	264.471.925	
	Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	70%	72%	75%	80%	85%	85%	85%	3.513.917.000	6.702.855.500	16.627.827.400	20.829.804.000	264.471.925								
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															195.000.000	500.000.000	199.950.000	64.857.528	900.000.000	
	Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman priroritas	N/A	1 Permukiman	2 Permukiman	2 Permukiman	2 Permukiman	3 Permukiman	3 Permukiman	195.000.000	500.000.000	199.950.000	64.857.528	900.000.000								
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															8.771.720.301	20.969.046.805	13.067.028.120	9.245.573.458	19.750.000.000	
	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	52.968 M3	55.396 M3	62.000 M3	64.006 M3	66.000 M3	68.000 M3	68.000 M3	1.380.531.336	4.194.658.540	2.876.339.368	502.855.000	1.250.000.000		BLUD SPAM						
	Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan	58.264,8 M3	60.935,6 M3	68.200 M3	70.406,6 M3	72.600 M3	74.800 M3	74.800 M3	7.391.188.965	16.774.388.265	10.190.688.752	8.742.718.458	18.500.000.000								
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															9.036.016.328	11.154.483.217	6.183.195.065	4.662.492.198	4.336.954.789	
	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	43.000 M3	43.000 M3	43.000 M3	43.000 M3	43.000 M3	45.000 M3	45.000 M3	-	-	-	-	-								
	Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	9.036.016.328	11.154.483.217	6.183.195.065	4.662.492.198	4.336.954.789								
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															-	-	-	-	-	
	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-								
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN															16.835.388.116	6.054.342.044	8.021.874.776	18.776.136.207	16.800.000.000	
	Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman	2	3	2	4	5	3	17	16.835.388.116	6.054.342.044	8.021.874.776	18.776.136.207	16.800.000.000								
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															545.225.000	525.973.500	523.082.000	1.300.000.000	4.100.000.000	
	Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	545.225.000	525.973.500	523.082.000	1.300.000.000	4.100.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
16	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															-	960.000.000	197.090.000	9.986.150	904.050.000	
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas	N/A	77.5 %	78%	80%	82%	85%	85%	-	960.000.000	197.090.000	9.986.150	904.050.000								
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															2.344.859.664	2.529.640.000	3.167.800.000	616.514.086	950.000.000	
	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	52.968 M3	55.396 M3	62.000 M3	64.006 M3	66.000 M3	68.000 M3	68.000 M3	2.344.859.664	2.529.640.000	3.167.800.000	616.514.086	950.000.000		BLUD SPAM						
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															70.340.053.141	16.527.242.665	40.222.682.014	49.504.866.940	89.000.000.000	
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	N/A	N/A	38.03 %	46.06 %	51.94 %	52.00 %	52.00 %	70.340.053.141	16.527.242.665	40.222.682.014	49.504.866.940	89.000.000.000								
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	N/A	N/A	49.38 %	46.54 %	35.80 %	35.00 %	3500%	-	-	-	-	-								
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	N/A	N/A	3.03 %	5.31 %	9.46 %	7.00 %	7.00 %	-	-	-	-	-								
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	N/A	N/A	9.56 %	2.27 %	2.80 %	15.80 %	15.80 %	-	-	-	-	-								

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								713.841.000	564.106.827	657.390.964	1.073.400.000	889.590.000	
	Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang	10%	25%	30%	50%	80%	90%	90%	690.586.000	421.224.827	499.998.334	993.800.000	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	80%	80%	80%	80%	90%	95%	95%	23.255.000	55.613.000	57.393.803	-	58.000.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang	80%	80%	80%	80%	90%	95%	95%	-	87.269.000	99.998.827	79.600.000	81.590.000	
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								631.142.000	190.165.000	242.614.762	2.276.905.000	1.180.000.000	
	Rasio Konektivitas Darat	0,43	0,48	0,53	0,59	0,64	0,8	0,8	631.142.000	190.165.000	242.614.762	2.276.905.000	1.180.000.000	
21	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								156.640.000	235.260.000	8.181.385.992	8.567.133.640	2.000.000.000	
	Rasio Konektivitas Perairan	50	60	62	85	100	30	30	156.640.000	235.260.000	8.181.385.992	8.567.133.640	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN								11.755.000	228.243.000	29.050.000	42.699.800	43.000.000	
	Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	N/A	N/A	N/A	5%	10%	15%	15%	11.755.000	228.243.000	29.050.000	42.699.800	43.000.000	
24	Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan								12.588.614.468	21.886.621.719	20.899.956.193	10.236.507.990	13.721.773.390	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								417.265.000	314.933.000	373.716.520	848.424.900	1.633.267.000	
	Jumlah desa maju	4 Desa	4 Desa	9 Desa	10 Desa	11 Desa	12 Desa	12 Desa	377.911.000	262.183.000	373.716.520	630.862.900	933.267.000	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah desa berkembang	32 Desa	52 Desa	61 Desa	63 Desa	65 Desa	66 Desa	66 Desa	-	-	-	-	-	
	Jumlah desa tertinggal	36 Desa	36 Desa	25 Desa	23 Desa	20 Desa	18 Desa	18 Desa	-	-	-	-	-	
	Jumlah desa sangat tertinggal	5 Desa	5 Desa	2 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	-	-	-	-	-	
	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	-	-	-	217.562.000	100.000.000	Kecamatan Boawae
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Kecamatan Aesesa
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Kecamatan Mauponggo
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Kecamatan Nangaroro
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	39.354.000	52.750.000	-	-	100.000.000	Kecamatan Wolowae
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Kecamatan Keo Tengah
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	-	100.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								9.894.615.468	18.739.306.919	18.502.901.495	7.188.263.590	7.495.000.000	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.459.542.626	6.802.258.019	6.854.508.258	2.388.849.590	2.500.000.000	Kecamatan Aesesa
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.800.069.842	9.221.126.400	9.303.313.456	3.859.061.000	4.000.000.000	Kecamatan Boawae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	701.233.000	1.297.240.500	1.154.050.000	497.590.000	500.000.000	Kecamatan Mauponggo
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	785.912.700	1.353.021.000	1.083.474.076	326.637.000	350.000.000	Kecamatan Nangaroro
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.537.000	21.810.000	50.113.758	45.962.000	50.000.000	Kecamatan Wolowae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	117.874.000	34.131.000	40.051.947	33.074.000	35.000.000	Kecamatan Keo Tengah
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.446.300	9.720.000	17.390.000	37.090.000	60.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan
3	PROGRAM PENATAAN DESA								67.822.000	252.249.000	429.897.902	688.250.000	750.000.000	
	Jumlah desa persiapan yang ditetapkan	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	67.822.000	252.249.000	429.897.902	688.250.000	750.000.000	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								-	-	-	-	50.379.000	
	Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi	11	13	0	15	15	20	63	-	-	-	-	50.379.000	
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								-	-	-	-	250.000.000	
	Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	30%	-	-	-	-	100.000.000	Sekretariat Daerah
	Cakupan peta kadastral kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	10%	-	-	-	-	-	
	Persentase bidang tanah aset pemda dan masyarakat miskin yang disertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40%	40%	-	-	-	-	150.000.000	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD			
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023				
6	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								-	-	-	-	150.000.000	Sekretariat Daerah			
	Cakupan penetapan tanah ulayat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	0%	-	-	-	-	150.000.000				
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI								-	-	-	30.000.000	50.000.000	Sekretariat Daerah			
	Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	80%	80%	-	-	-	30.000.000	50.000.000				
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								393.395.000	2.051.718.800	860.258.904	1.017.816.900	1.119.598.590	Sekretariat Daerah			
	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	393.395.000	2.051.718.800	860.258.904	1.017.816.900	1.119.598.590				
9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								278.489.000	332.794.000	217.267.660	203.208.000	223.528.800	Sekretariat Daerah			
	Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan	50%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	278.489.000	332.794.000	217.267.660	203.208.000	223.528.800				
10	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								-	-	-	-	200.000.000	Sekretariat Daerah			
	Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Didistribusi	60%	65%	70%	80%	80%	90%	90%	-	-	-	-	200.000.000				
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								-	-	25.264.172	39.828.800	300.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian	10%	10%	10%	30%	50%	90%	90%	-	-	25.264.172	39.828.800	300.000.000				
12	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								1.401.393.000	85.702.000	-	-	1.150.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman	35,01%	35,02%	35,02%	35,03%	37,15%	40,33%	40,33%	1.401.393.000	85.702.000	-	-	1.150.000.000				
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								135.635.000	109.918.000	490.649.540	220.715.800	350.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun	2,80%	2,82%	2,82%	3,06%	3,28%	4,81%	4,81%	135.635.000	109.918.000	490.649.540	220.715.800	350.000.000				
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi												MISI 9				
	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan																
													490.769.070.354	502.295.017.411	486.305.842.364	468.853.742.229	546.139.889.121
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN												490.088.349.354	501.829.913.083	486.016.509.025	468.417.287.429	545.714.715.121
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								358.930.000	418.246.000	1.184.232.664	1.117.429.100	1.230.000.000	Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	358.930.000	418.246.000	1.184.232.664	1.117.429.100	1.230.000.000				
2	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								-	-	-	-	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
	Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	25%	-	-	-	-	100.000.000				
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.255.129.350	1.129.501.000	4.865.970.247	3.976.812.800	3.539.494.080	Sekretariat Daerah			
	Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	N/A	80%	85%	90%	95%	100%	100%	1.255.129.350	1.129.501.000	4.865.970.247	3.976.812.800	3.539.494.080				
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								2.775.757.000	1.342.094.250	1.029.293.484	1.277.640.000	1.405.404.000	Sekretariat Daerah			
	Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B	N/A	80%	85%	90%	95%	100%	100%	2.775.757.000	1.342.094.250	1.029.293.484	1.277.640.000	1.405.404.000				
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								297.721.984.229	284.214.627.597	309.639.534.906	304.535.934.504	369.722.669.201	Sekretariat Daerah			
	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	60.00	65.00	65.00	294.085.869.479	282.212.652.797	306.658.652.310	300.547.013.311	365.609.855.889				
	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.636.114.750	2.001.974.800	2.980.882.596	3.988.921.193	4.112.813.312				
6	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								5.501.091.000	6.631.392.000	5.472.680.094	6.490.061.000	6.062.844.300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
	Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.501.091.000	6.631.392.000	5.472.680.094	6.490.061.000	6.062.844.300				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								201.299.200	365.952.800	560.214.005	466.966.700	480.000.000	
	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.142.000	62.375.000	87.800.000	87.270.000	85.000.000	Kecamatan Aesesa
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.142.000	215.390.800	159.865.683	131.457.000	135.000.000	Kecamatan Boawae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.256.000	-	78.479.471	20.683.000	25.000.000	Kecamatan Mauponggo
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106.186.000	-	98.014.705	68.013.000	70.000.000	Kecamatan Nangaroro
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	7.045.000	25.205.308	34.886.700	35.000.000	Kecamatan Wolowae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	4.200.000	19.040.000	61.098.000	65.000.000	Kecamatan Keo Tengah
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.573.200	76.942.000	91.808.838	63.559.000	65.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								781.980.550	691.699.000	171.502.575	192.794.200	273.000.000	
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	248.984.000	204.846.000	23.708.288	58.434.000	60.000.000	Kecamatan Aesesa
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	382.084.550	315.499.000	40.740.000	-	30.000.000	Kecamatan Boawae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37.868.000	20.348.000	8.500.000	9.357.000	30.000.000	Kecamatan Mauponggo
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.222.000	64.295.000	32.519.762	51.409.200	55.000.000	Kecamatan Nangaroro
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17.917.000	11.215.000	21.319.525	17.577.000	18.000.000	Kecamatan Wolowae
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.962.000	56.014.000	42.165.000	47.177.000	50.000.000	Kecamatan Keo Tengah
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.943.000	19.482.000	2.550.000	8.840.000	30.000.000	Kecamatan Aesesa Selatan
9	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1.107.284.000	1.028.514.205	758.751.581	900.371.000	1.820.779.100	
	Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	874.315.000	933.862.205	473.476.485	617.747.500	1.470.779.100	
	Solvabilitas Jangka Panjang	1.528.653.759,50 6,72	1.566.246.563,26 1,76	1.644.395.036,81 4,99	1.869.810.294,90 8,78	1.865.837.144,58 8,02	1.895.269.096,99 7,31	1.895.269.096,99 7,31	116.484.500	47.326.000	142.637.548	141.311.750	175.000.000	
	Solvabilitas Layanan	10.952.046,25	11.084.547,51	11.515.371,41	12.947.569,45	11.331.315,94	11.457.800,15	11.457.800,15	116.484.500	47.326.000	142.637.548	141.311.750	175.000.000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								168.061.821.025	197.368.841.117	149.221.979.161	138.605.380.425	148.463.016.400	
	Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.545.331.000	1.401.236.000	609.975.547	618.816.200	562.579.440	
	Fleksibilitas Keuangan	2,22 %	2,16 %	2,22 %	2,12 %	2,23 %	2,38 %	2,48 %	53.950.727.965	63.443.414.064	47.939.018.792	49.239.618.485	47.947.213.004	
	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakteristik Kualitatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.198.311.550	1.812.537.600	602.941.866	567.239.400	595.601.370	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	3.465.994.580	3.824.825.325	4.192.005.372	1.535.015.500	3.463.196.574	
	Solvabilitas Jangka Pendek	10,96 %	4,46 %	4,17 %	5,92 %	7,67 %	9,42 %	9,42 %	53.950.727.965	63.443.414.064	47.939.018.792	43.822.345.420	47.947.213.006	
	Solvabilitas Operasional	1,19	1,23	1,16	0,78	0,82	0,86	0,86	53.950.727.965	63.443.414.064	47.939.018.792	42.822.345.420	47.947.213.006	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.941.274.000	1.476.866.750	1.372.684.160	2.557.010.000	2.369.860.500	
	Persentase pertumbuhan PAD	-33,17%	0,71%	6,73%	0,35%	5,10%	5,50%	5,50%	1.941.274.000	1.476.866.750	1.372.684.160	2.557.010.000	2.369.860.500	
12	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1.524.147.000	1.129.951.300	1.809.312.004	1.108.899.000	1.650.000.000	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	1.524.147.000	1.129.951.300	1.312.649.150	686.387.000	950.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	-	-	496.662.854	422.512.000	700.000.000	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REALISASI				TARGET			REALISASI			PROYEKSI		PD
		AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR	2019	2020	2021	2022	2023	
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								4.485.576.000	1.050.311.292	5.004.433.954	1.937.794.600	2.131.575.000	
	Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional	30%	30%	30%	42%	60%	70%	70%	4.485.576.000	1.050.311.292	5.004.433.954	1.937.794.600	2.131.575.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1.731.766.500	1.579.422.000	1.804.957.946	2.285.795.100	2.710.113.140	
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	83%	86%	82%	93%	95%	100%	100%	1.731.766.500	1.579.422.000	1.804.957.946	2.285.795.100	2.710.113.140	Inspektorat
15	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								221.927.500	872.079.500	577.947.410	652.979.700	1.005.959.400	
	Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	73%	83%	85%	87%	95%	100%	100%	221.927.500	872.079.500	577.947.410	652.979.700	1.005.959.400	Inspektorat
16	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1.569.337.000	2.097.191.072	1.770.294.587	1.770.464.800	2.000.000.000	
	Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	60	75	70	85	90	100	100	1.569.337.000	2.097.191.072	1.770.294.587	1.770.464.800	2.000.000.000	
	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-	-	-	-	-	
17	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								849.045.000	433.223.200	772.720.247	540.954.500	750.000.000	
	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	849.045.000	433.223.200	772.720.247	540.954.500	750.000.000	
26	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan								680.721.000	465.104.328	289.333.339	436.454.800	425.174.000	
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								414.665.000	195.046.000	62.841.114	123.627.000	87.000.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung	52%	52%	67%	67%	67%	70%	70%	414.665.000	195.046.000	62.841.114	123.627.000	87.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								-	-	58.322.815	31.249.000	34.374.000	
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	N/A	N/A	N/A	I	I	I	-	-	58.322.815	31.249.000	34.374.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								109.109.000	106.788.000	99.488.610	117.948.000	129.800.000	
	Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data	25%	33%	36%	78%	93%	100%	100%	109.109.000	106.788.000	99.488.610	117.948.000	129.800.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								156.947.000	163.270.328	68.680.800	139.630.700	150.000.000	
	Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar	2%	5%	32%	33%	35%	38%	38%	156.947.000	163.270.328	68.680.800	139.630.700	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								-	-	-	24.000.100	24.000.000	
	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	25%	-	-	-	24.000.100	24.000.000	

P-RPJMD

2018-2023



8

BAB VIII

**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah**



BAB VIII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui tingkat pencapaian Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; sementara penetapan IKK dimaksudkan untuk mengarahkan program dan output yang harus dihasilkan melalui penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Rincian tentang IKU dan IKK adalah sebagai berikut.

8.1 Indikator Makro Daerah

Indikator kinerja makro daerah merupakan tolak ukur capaian aspek kesejahteraan masyarakat melalui kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Maka dari itu capaian dan target indikator makro tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk mendukung visi misi RPJMD Kabupaten Nagekeo. Pada Perda No. 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah ditetapkan 17 Indikator Makro, namun demikian dengan pertimbangan efektifitas penetapan target, maka pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 Indikator Makro dirumuskan lebih ringkas benar-benar pada Indikator yang makro saja menjadi 6 (enam) Indikator Makro dan hal ini sejalan dengan Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan asumsi skenario terbaik, dimana pada tahun 2023 diharapkan akan tumbuh pada angka 7,00% sesuai dengan amanat dalam RPJPD Nagekeo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8-1.





8.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran, berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 khususnya pada target indikator tahunan di tahun 2022-2023, dengan pertimbangan efektifitas pengukuran dan ketersediaan data maka Indikator Kinerja Utama dirumuskan menjadi lebih padat dan jelas. Pada RPJMD induk terdapat 178 indikator dan disederhanakan menjadi 84 indikator. Maka dari itu penentuan target dan realisasi 2 (dua) tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 - 2023 diharapkan lebih terukur dan lebih jelas.

8.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja urusan pemerintahan dan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 6, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 19, Urusan Pemerintahan Pilihan dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 6 dengan didukung pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum serta Unsur Kewilayahan.





Tabel 8-1 Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR
			REALISASI			TARGET		
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,18	65.88	65.81	65.82	66.00 – 66.50	66.50	66.50
2	Angka kemiskinan (%)	13,49	12.85	12.61	12.91	12.65 – 12.50	12.71	12.71
3	Angka Pengangguran (%)	3,8	2.76	3.09	0.97	3.2 – 3.0	<3%	<3%
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	4.31	0.63	1.95	2.15 - 2.85	3.00	3.00
5	PDRB per Kapita (rupiah)	14.547.000	15.367.000	15.451.000	15.500.000	15.500.000 – 16.000.000	16.000.000	16.000.000
6	Ketimpangan Pendapatan (poin)	0,380	0.339	0.318	0.310	0.310 – 0.300	0,3	0,3



Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2022-2023

**NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN SEJAHTERA, NYAMAN DAN BERMARTABAT
MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PEERTANIAN DAN PARIWISATA**

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir	
				1	2	3	4	5		
1	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak									
	Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial									
		Angka Kemiskinan (%)	12.98 %	12.85 %	12.61 %	12.91 %	12.65 %	12.60 %	12.60 %	
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan	1	Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati	60,26	61,65 %	69,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	80.46	81,53 %	81,42 %	77,65 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %
		3	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	45.13	47,42 %	47,13 %	34,79 %	45,00 %	47,42 %	47,42 %
2	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan									
	Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan									
		Usia Harapan Hidup	66.62	67.03	67.13	67.25	67.32	67.50	67.50	
3	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten	N/A	Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Madya
4	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	5	Persentase FKTP sesuai standar	N/A	68,33 %	69,82 %	71,51 %	75,61 %	80 %	80 %
		6	Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun	3	2	2	15	0	0	0
		7	Cakupan Desa UCI	91	90.30 %	96.50 %	96.90 %	97 %	98 %	98 %
		8	Desa/Kelurahan dengan prevalensi stunting dibawah 10%	N/A	24	39	62	70	80	80
		9	Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun	5	2	4	2	0	0	0
		10	Angka Kematian Bayi (AKB) per tahun	15	6	11	9	0	0	0
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	11	Pervalensi balita stunting	37.01	21,40 %	13,79 %	9,16 %	10 %	9 %	9 %
		12	Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat	13	Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani	N/A	-	0(0:27)	0,015(20:1.376)	0,012(7/564)	0	0
		14	Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan	68.67	60,80 %	24,50 %	89 %	100 %	100 %	100 %



No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir	
				1	2	3	4	5		
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	15	Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)	50	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		16	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	17	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	75	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %
9	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS	18	Indeks Keluarga Sehat	0,15	0,20 %	0,30 %	0,60 %	0,80 %	0,90 %	0,90 %
10	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	19	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	N/A	N/A	40 %	42 %	45 %	45 %
3	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan									
	Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan									
			Harapan Lama Sekolah	12,46 Tahun	12,47 Tahun	12,48 Tahun	12,49 Tahun	12,50 Tahun	12,52 Tahun	12,52 Tahun
			Rata-rata Lama Sekolah	7.82 Tahun	7.83 Tahun	7.89 Tahun	7.90 Tahun	7.92 Tahun	7.95 Tahun	7.95 Tahun
11	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	20	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		21	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	15 %	15 %	35 %	40 %	50 %	50 %
12	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	22	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD)	25,50	26,07 %	26,1 %	30,31 %	35 %	37 %	37 %
		23	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI)	98,79	98,92 %	98,87 %	98,82 %	99 %	100 %	100 %
		24	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs)	94,07	94,71 %	95,35 %	95,02 %	96 %	97 %	97 %
13	Menguatnya karakter peserta didik	25	Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi	N/A	N/A %	N/A %	25 %	75 %	100 %	100 %
14	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	26	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya	0	85 %	85 %	88 %	90 %	100 %	100 %
		27	Angka Melek Huruf	0	95,66 %	95,8 %	97,58 %	98,25 %	98,55 %	98,55 %



No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	
15	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	28 Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal	N/A	N/A	N/A	10 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah
4	Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari								
	Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari								
		Penuntasan pencapaian target SDG's Nasional (168 indikator)	16.07 %	17.26 %	20.24 %	22.00 %	23.00 %	25.00 %	25.00 %
16	Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim	29 Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu	N/A	N/A	N/A	2	5	25	25
		30 Indeks Kerentanan (SIDIK)	N/A	N/A	106,47	98,21	100	100	100
		31 Bauran Energi Baru Terbarukan	1	1 %	2 %	2 %	3 %	4 %	4 %
		32 Indeks Risiko Bencana	156	156	156	156	150	145	145
		33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.47	60 %	65 %	68 %	70 %	72 %	72 %
		34 Indeks Kualitas Air	57.5	70	68	62	62,10	70	70
		35 Indeks Kualitas Udara	88.02	89,28	90,82	91,10	91,15	91,20	91,20
		36 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	20	22	25	30	35	35
5	Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan								
	Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo								
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan)	N/A	N/A	N/A	6	12	15	15
17	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan	37 Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34	27	20	18	15	12	12
		38 Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	19	17	15	13	11	9	9
		39 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	N/A	N/A	53	55	57	60	60
		40 Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		41 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,15	99,16	99,18	99,20	99,25	99,30	99,30
		42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,11	53,15	53,20	53,25	53,50	53,55	53,55
		43 Indeks Pemenuhan Hak Anak	46.87	48.26	50.14	51.20	67.60	69.44	69.44
		44 Indeks Perlindungan Anak	47.68	51.15	48.44	49.50	69,87	71,66	71,66
		45 Angka kejadian konflik sosial	20	0	0	0	0	0	0
		46 Angka partisipasi pemilu	83.38	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %
		47 Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat	30	36 %	36 %	40 %	45 %	50 %	50 %
		48 Nilai kegemaran membaca masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	40 %	45 %	45 %
		49 Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	50	60 %	65 %	65 %	67 %	75 %	75 %



No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir	
				1	2	3	4	5		
6	Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT									
	Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT									
			Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB	688.797,74 juta rupiah	703.702,50 juta rupiah	706.852,34 juta rupiah	724.828,00 juta rupiah	730.000,00 juta rupiah	740.000,00 juta rupiah	740.000,00 juta rupiah
	18	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	50	Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS)	-	-	-	250 Ha	1600 Ha	2500 Ha
		51	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK)	2.87	2.32 %	0.38 %	2.45 %	2.50 %	2.55 %	2.55 %
		52	Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian	33.38	28.83 juta rupiah	26.15 juta rupiah	27.00 juta rupiah	28.00 juta rupiah	29.00 juta rupiah	29.00 juta rupiah
19	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	53	Indeks ketahanan pangan	68.90	77,82 %	77,84 %	77,89 %	77,90 %	78,00 %	78,00 %
7	Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM									
	Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan									
			Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB	624.642,57 juta rupiah	666.293,02 juta rupiah	671.818,96 juta rupiah	681.532 juta rupiah	690.000 juta rupiah	700.000 juta rupiah	700.000 juta rupiah
	20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah	54	Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB	7.17	8.74 %	-4.74 %	6.00 %	7.00 %	8.00 %
		55	Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB	6.85	6.26 %	1.94 %	5.00 %	6.00 %	7.00 %	7.00 %
		56	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata	12.727	13.000 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang	12.000 Orang	15.000 Orang	15.000 Orang
		57	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1	1,5 hari	1,5 hari	1,5 hari	1,6 hari	1,7 hari	1,7 hari
		58	Persentase koperasi sehat	30,86	35,80 %	30,00 %	39,42 %	44,12 %	47,06 %	47,06 %
21	Meningkatnya Iklim Investasi	59	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	N/A	11.22 %	21.58 %	31.26 %	14.35 %	9.14 %	9.14 %
8	Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah									
	Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah									
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	N/A	N/A	1,6088	2,2960	2,3500	2,5100	2,5100
	22	Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah	60	Indeks Inovasi Daerah	N/A	N/A	12	12	50	100
		61	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA	11.037	12.284 Orang	14.697 Orang	14.980 Orang	15.350 Orang	15.600 Orang	15.600 Orang
		62	Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi	7.834	6.621 Orang	9.722 Orang	10.850 Orang	11.000 Orang	12.000 Orang	12.000 Orang
		63	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,80	67,14 %	70,05 %	73 %	76 %	79 %	79 %



No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir	
				1	2	3	4	5		
23	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi	64	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	79.35	76.73 %	78.75 %	82.47 %	85.7 %	86.45 %	86.45 %
		65	Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet	25	25 %	40 %	52 %	59.6 %	75 %	75 %
		66	Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)	12	13	16	17	21	28	28
		67	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
		68	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	28,82	30,65	35,04	36,30	38,19	40,35	40,35
		69	Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi	1995.01 Ha	2005.45 Ha	2698.64 Ha	3065.39 Ha	3128.74 Ha	3326.69 Ha	3326.69 Ha
		70	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber)	83.89	92.50 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		71	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	70	77.50 %	78.10 %	80.50 %	82.00 %	85.00 %	85.00 %
		72	Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman	50	324.5 Ha	125 Ha	116 Ha	100 Ha	150 Ha	150 Ha
		73	Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	12	15 %	18 %	31.50 %	40 %	70 %	70 %
		74	Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung	4.53	5.05 %	5.38 %	5.43 %	5.69 %	10.77 %	10.77 %
		75	Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Permukiman	4 Permukiman	3 Permukiman	5 Permukiman	6 Permukiman	4 Permukiman	24 Permukiman
		76	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	N/A	N/A %	47.66 %	49.83 %	55.05 %	56.00 %	56.00 %
		77	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	20	20 %	20 %	20 %	20 %	30 %	30 %
		78	Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	38	47 %	50 %	62 %	84 %	92 %	92 %
		79	Persentase Rumah Layak Huni	50.13	52.97 %	55.72 %	61.57 %	65.19 %	68.56 %	68.56 %
		80	Rasio Konektivitas Daerah	0,299	0,336	0,373	0,411	0,523	0,710	0,710
24	Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan	81	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.5997	0.6009	0.6282	0.6446	0.6588	0.6750	0.6750
		82	Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	225	250	300	300
		83	Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal	38	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %



No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	
9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi								
	Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan								
		Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	48.41	49.96	50.25	50.25
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN	84 Nilai SAKIP Daerah	61.82	62.35	62.67	62.91	65.00	70.00	70.00
		85 Nilai MCP Pengawasan	34	3 %	20 %	40 %	45 %	50 %	50 %
		86 Indeks Kapasitas Fiskal	0.423	0.315	0.332	0.318	0.335	0.337	0.337
		87 Nilai MCP tata kelola keuangan desa	10	35 %	5 %	62 %	65 %	70 %	70 %
		88 Nilai MCP pengadaan barang dan jasa	20	33 %	24 %	57 %	60 %	65 %	65 %
		89 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	N/A	N/A	N/A	74.500	78.000	78.000
		90 Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi	0	%	%	%	%	%	0 %
		91 Maturitas SPIP	2	2 Level	2 Level	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
		92 Level Kapabilitas APIP	3 DC	3 DC Level	3 DC Level	3 DC Level	3 Level	3 Level	3 Level
		93 Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	50	60	60
		94 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	N/A	21.28	21.38	21.41	23.00	25.00	25.00
		95 Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		96 Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	N/A	0,41-0,60	0,61-0,80	0,61-0,80	0,61-0,80
		97 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja	N/A	16.09	16.15	16.22	18.00	20.00	20.00
98 Indeks Pencapaian SPM	N/A	N/A	100	100	100	100	100		
99 Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran	28	60 %	17 %	76 %	80 %	85 %	85 %		
100 Opini LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
101 Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	1.83	1.85	1.90	1.95	1.95		
26	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	102 Kualitas Pengelolaan Arsip	N/A	30	37.16	100	100	100	100
		103 Indeks SDI	N/A	N/A	N/A	38 %	39 %	40 %	40 %
		104 Indeks SPBE	N/A	2.00	N/A	1.6	2.3	2.6	2.6



Tabel 8-3 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras	N/A	4 %	8 %	10 %	20 %	30 %	30 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				3	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras	N/A	25 %	35,12 %	55 %	56 %	60 %	60 %	
				4	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras	N/A	63,11 %	65,25 %	72,34 %	75,16 %	90 %	90 %	
				5	Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras	N/A	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	30 %	
				6	Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				7	Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				8	Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				9	Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.55	1.65	1.75	1.75	
				10	Rata-rata kekompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	N/A	N/A	N/A	1.44	1.54	1.64	1.64	
				11	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.74	1.74	1.94	1.94	
				12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	1.65	1.74	1.84	1.84	
				13	APM PAUD	N/A	44 %	56,66 %	72,11 %	73 %	74 %	74 %	
				14	APM SD/MI	98.79	99,48	98,70	89,11	90	92	92	
				15	APM SMP/MTs	73.69	73,96	75,50	67,35	75	76	76	
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	16	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				17	Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	
				18	Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab		
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5				
1	1	4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	19	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			20	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI	N/A	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %		100 %
			21	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs	N/A	50 %	60 %	80 %	90 %	100 %		100 %
			22	Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB	N/A	10 %	30 %	50 %	60 %	80 %		80 %
1	1	5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	23	Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	6 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	24	Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal	N/A	-	-	-	50 %	50 %		50 %
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	2	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1:2.889	1:2.197	1:1.997	1:1.625	1:1.625	1:1.625	1:1.625	Dinas Kesehatan
			2	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	41.01 %	73 %	51 %	66 %	80 %	85 %	85 %	
			3	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	N/A	-	20 %	30 %	70 %	80 %	80 %	
			4	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS	71.43 %	80 %	80 %	82 %	100 %	100 %	100 %	
			5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar	65.75 %	100 %	69.82 %	71.51 %	80.00 %	85.00 %	85.00 %	
			6	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			7	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinkes untuk kebutuhan Puskesmas	71.43 %	71.43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			8	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1:2.889	1:2.197	1:1.997	1:1.625	1:1.625	1:1.625	1:1.625	BLUD RSD Aeram
			9	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	41.01 %	73 %	51 %	66 %	80 %	85 %	85 %	
			10	Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbaru, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 %	80 %	
			11	Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS	80 %	80 %	80 %	82 %	100 %	100 %	100 %	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5		
		12 Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	4	2	4	2	0	0	0	Dinas Kesehatan
		13 Persentase bumil KEK	N/A	12.84 %	19.01 %	20.60 %	15 %	10 %	10 %	
		14 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	36	6	11	9	0	0	0	
		15 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 %	92.15 %	99.7 %	99.2 %	100 %	100 %	100 %	
		16 Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	2	2	4	0	0	0	
		17 Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	76.04 %	68.50 %	76.20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		18 Prevalensi Wasting pada balita	2.10 %	3.60 %	4.30 %	7,00 %	2,50 %	2,00 %	2,00 %	
		19 Persentase posyandu aktif	52.57 %	58.10 %	40.10 %	45.40 %	70,00 %	100 %	100 %	
		20 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	93.60 %	92,40 %	88,40 %	93 %	95 %	100 %	100 %	
		21 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.63 %	36.80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		22 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	68.12 %	74.40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		23 Angka kesakitan malaria (API)	N/A	N/A	0	0	0	0	0	
		24 Cakupan vaksinasi Covid-19	N/A	-	-	36.74 %	64%	100 %	100 %	
		25 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	82.08 %	85 %	89 %	100 %	100 %	100 %	
		26 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.29 %	45.60 %	50 %	58.27 %	100 %	100 %	100 %	
		27 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35.14 %	30.60 %	48.70 %	53 %	100 %	100 %	100 %	
		28 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.87 %	18 %	20.50 %	95.40 %	100 %	100 %	100 %	
		29 Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan	68.87 %	60.80 %	24.50 %	89 %	100 %	100 %	100 %	
1	2	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
		30 Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	N/A	60 %	62 %	50 %	60 %	65 %	65 %	BLUD RSD Aeram
		31 Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	32	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	N/A	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	33	Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS	14.27 %	30,23 %	37.11 %	28.65 %	40 %	45 %		45 %
		34		Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih	90.50 %	93 %	93 %	93 %	95 %	95 %	95 %		95 %
		35		Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	76.40 %	91.30 %	92 %	96.80 %	97 %	100 %	100 %		100 %
		36		Presentase Desa STBM	10.16 %	10.60 %	13.30 %	14.20 %	25 %	50 %	50 %		50 %
		37	Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	57.70 %	64.10 %	81.80 %	27.60 %	80 %	85 %	85 %	85 %		
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2		Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %		
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan SPAM	3	Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan	58.264,8	60.935,6	68.200	70.406,6	72.600	74.800	74.800	BLUD SPAM
		4		Jumlah Air Minum yang Disalurkan	52968	55396	62000	64006	66000	68000	68000		
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas	N/A	77.5 %	78 %	80 %	82 %	85 %	85 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	N/A	22 Desa/ Kelurahan	22 Desa/ Kelurahan	22 Desa/ Kelurahan	23 Desa/ Kelurahan	23 Desa/ Kelurahan	113 Desa/ Kelurahan	
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	7	Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman priroritas	N/A	1 Permukiman	2 Permukiman	2 Permukiman	2 Permukiman	3 Permukiman	3 Permukiman	
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	8	Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman	2	3	2	4	5	3	17	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	9	Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung	N/A	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	50 %	
1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	10	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas	N/A	20 %	30 %	40 %	45 %	50 %	50 %	
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	11	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	N/A	N/A	38.03 %	46.06 %	51.94 %	52.00 %	52.00 %	
		12		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	N/A	N/A	9.56 %	2.27 %	2.80 %	15.80 %	15.80 %		
		13		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	N/A	N/A	3.03 %	5.31 %	9.46 %	7.00 %	7.00 %		
		14		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	N/A	N/A	49.38 %	46.54 %	35.80 %	35.00 %	3500 %		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab		
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5				
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	15	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	16	Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang	10 %	25 %	30 %	50 %	80 %	90 %		90 %
				17	Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	80 %	80 %	80 %	80 %	90 %	95 %		95 %
			18	Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang	80 %	80 %	80 %	80 %	90 %	95 %	95 %		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	14 %	14 %		
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3	Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	70 %	72 %	75 %	80 %	85 %	85 %		
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	4	Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU	N/A	1 Permukiman	0 Permukiman	1 Permukiman	0 Permukiman	1 Permukiman		3 Permukiman
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil	-	-	-	-	1	1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	N/A	20.59 %	25.93 %	10.00 %	16.67 %	20.00 %	20.00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	2	Persentase penanganan pra bencana	15 %	96,09 %	99,94 %	91,62 %	100 %	100 %	100 %	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
				3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	15 %	50 %	87,70 %	74,12 %	100 %	100 %	100 %	
				4	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				5	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6	Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran	N/A	10.52 %	11.76 %	13.33 %	15.38 %	18.18 %	18.18 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab		
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5				
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	6	2 Program Pemberdayaan Sosial	1	Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan	N/A	38,10 %	31,03 %	44,74 %	36,36 %	37,33 %	37,33 %	Dinas Sosial
1	6	3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	6	4 Program Rehabilitasi Sosial	3	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar	33,78 %	34,51 %	34,17 %	30,73 %	32,65 %	37,58 %	37,58 %	
1	6	5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4	Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	80,46 %	86,79 %	92,96 %	93,78 %	94,55 %	95,12 %	95,12 %	
			5	Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial	21,88 %	35,42 %	34,72 %	40,51 %	53,24 %	57,87 %	57,87 %	
1	6	6 Program Penanganan Bencana	6	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	6	7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	7	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan keseteiakawanan sosial	N/A	500 Orang	500 Orang	500 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	3.500 Orang	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2	7	2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja	-	-	-	-	28,57 %	100 %	100 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri	25 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %	
2	7	4 Program Penempatan Tenaga Kerja	3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %	
2	7	5 Program Hubungan Industrial	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	0,57 %	1,13 %	1,06 %	5 %	10 %	10 %	
			5	Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	8	2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan	N/A	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	50 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3 Program Perlindungan Perempuan	2	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penanganan dan layanan komprehensif dari P2TP2A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab	
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5			
2 8 4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3	Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja	0 %	97 %	97,10 %	97,10 %	98 %	98,10 %	98.10 %	
		4	Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi	0 %	0,80 %	0,38 %	0,80 %	0,50 %	0,38 %	0,38 %	
2 8 5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5	Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	
2 8 6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	6	Persentase Desa Layak Anak	N/A	38,93 %	38,93 %	48,67 %	57,52 %	66,37 %	66,37 %	
2 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	7	Angka kekerasan pada anak	12	44	17	13	5	0	0	
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2 9 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan	25 %	25 %	25 %	25 %	35 %	50 %	50 %	
2 9 3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2	Persentase cadangan pangan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		3	Skor Pola Pangan Harapan	65.80	57.2	53	62.1	65,00	66,00	66,00	
2 9 4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4	Persentase daerah rentan pangan	0 %	44.25 %	19.47 %	51.33 %	45,00 %	35,00 %	35,00 %	
2 9 5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	5	Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	65 %	70 %	80 %	85 %	90 %	92 %	92 %	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2 10 2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1	Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	N/A	N/A	N/A	N/A	70 %	80 %	80 %	Sekretariat Daerah
2 10 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan	50 %	60 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	
2 10 5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0 %	%	%	%	%	%	0 %	
2 10 6	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	4	Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Diredistribusi	60 %	65 %	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %	
2 10 7	Program Penetapan Tanah Ulayat	5	Cakupan penetapan tanah ulayat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 %	0 %	Sekretariat Daerah
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	6	Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	30%	
		7	Persentase bidang tanah aset pemda dan masyarakat miskin yang disertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40 %	40 %	
		8	Cakupan peta kadastral kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 %	10 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3	Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan	10 Jenis	11 Jenis	12 Jenis	15 Jenis	20 Jenis	21 Jenis		
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	4	Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	6	Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH	N/A	N/A	N/A	N/A	1 MHA	1 MHA		2 MHA
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	0 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8	Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten	2 Orang/ Kelompok	0 Orang/ Kelompok	0 Orang/ Kelompok	0 Orang/ Kelompok	0 Orang/ Kelompok	3 Orang/ Kelompok	3 Orang/ Kelompok	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	10	Jumlah pengurangan timbulan sampah	582,18 Ton/Thn	424,95 Ton/Thn	506,71 Ton/Thn	274,04 Ton/Thn	6494,18 Ton/Thn	6494,18 Ton/Thn		6.494,18 Ton/Thn
				11	Jumlah penanganan timbulan sampah	1,85 Ton/Thn	1,85 Ton/Thn	63,36 Ton/Thn	63,36 Ton/Thn	17.317,82 Ton/Thn	17.317,82 Ton/Thn	17.317,82 Ton/Thn	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	86.50 %	83.15 %	86.63 %	82.32 %	93.77 %	95.00 %	95.00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	76.35 %	80.00 %	81.10 %	84.59 %	92.00 %	95.00 %	95.00 %	
				3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	N/A	5.72 %	20.94 %	40.00 %	50.00 %	50.00 %	
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	90.08 %	92.00 %	95.54 %	94.51 %	95 %	97 %	97 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				6	Persentase kepemilikan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin	44.10 %	51.04 %	63.12 %	62.79 %	87.76 %	90.00 %	90.00 %	
				7	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				8	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	37.78 %	41.09 %	47.40 %	49.68 %	87.93 %	90 %	90 %	
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9	Persentase pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	25 %	40 %	60 %	60 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				10	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Database	Database	Database	Database	Database	Database	Database	
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	11	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				12	Cakupan profil kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	2	Program Penataan Desa	1	Jumlah desa persiapan yang ditetapkan	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	33 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	2	Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi	11	13	0	15	15	20	63	
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar	50 %	50 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4	Jumlah desa maju	4 Desa	4 Desa	9 Desa	10 Desa	11 Desa	12 Desa	12 Desa	
				5	Jumlah desa berkembang	32 Desa	52 Desa	61 Desa	63 Desa	65 Desa	66 Desa	66 Desa	
				6	Jumlah desa tertinggal	36 Desa	36 Desa	25 Desa	23 Desa	20 Desa	18 Desa	18 Desa	
				7	Jumlah desa sangat tertinggal	5 Desa	5 Desa	2 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	
				8	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	Kec. AeSelatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun"	3.40	2.70	2.67	2.64	2.61	2.58	2.58	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	24.11 %	20.80 %	20.21 %	19.62 %	19.03 %	18.44 %	18.44 %	
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	N/A	35.09	33.17	31.4	29.76	28.25	28.25	
		4		Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %		
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Rasio Konektivitas Darat	0,43	0,48	0,53	0,59	0,64	0,80	0,80	Dinas Perhubungan
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	2	Rasio Konektivitas Perairan	50	60	62	85	100	30	30	
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	3	Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	N/A	N/A	N/A	5 %	10 %	15 %	15 %	
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan	22 %	44 %	68 %	90 %	91 %	93 %	93 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City	N/A	N/A	20 %	30 %	50 %	60 %	60 %	
		3		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung	52 %	52 %	67 %	67 %	67 %	70 %	70 %		
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	17	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	83.95 %	83.95 %	99 %	74 %	75 %	75 %	75 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3	Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	33.33 %	33.33 %	30.00 %	38.46 %	43.27 %	45.19 %	45.19 %	
2	17	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	4	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	39.51 %	76.54 %	23,00 %	41.00 %	60.78 %	63.73 %	63.73 %	
2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi	83.95 %	83.95 %	67.00 %	98.08 %	100 %	100 %	100 %	
2	17	7	Program Pemberdayaan UMKM	6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	25.25 %	25.69 %	26.13 %	26.57 %	36.36 %	44.44 %	44.44 %	
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	7	Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2 18 2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Nilai realisasi investasi (RP)	300.000.000.000	333.660.490.900	405.660.490.900	532.462.572.822	608.860.572.822	664.521.972.822	664.521.972.822	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 3	Program Promosi Penanaman Modal	2 Besaran Rencana Investasi yang diajukan (RP)	300.000.000.000	410.000.000.000	482.000.000.000	589.000.000.000	698.140.000.000	809.462.800.000	809.462.800.000	
2 18 4	Program Pelayanan Penanaman Modal	3 Waktu penerbitan izin	21 Hari	14 Hari	7 Hari	4 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	
2 18 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	50 %	57,95 %	65,91 %	77,27 %	82,95 %	88,64 %	88,64 %	
2 18 6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5 Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2 19 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader	N/A	99.3 %	9.3 %	9.3 %	29.3 %	100 %	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2 Persentase cabang olahraga yang dibina	N/A	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	
2 19 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3 Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan	N/A	80 %	80 %	80 %	90 %	95 %	100 %	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2 20 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data	25 %	33 %	36 %	78 %	93 %	100 %	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2 21 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2 22 2	Program Pengembangan Kebudayaan	1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan	N/A	60 %	65 %	65 %	67 %	75 %	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Persentase kampung adat yang direvitalisasi	30 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60 %	
2 22 3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/menonton secara langsung pertunjukan seni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab		
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5				
		4 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan	N/A	10 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %			
2	22	4 Program Pembinaan Sejarah	5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	N/A	50 %	50 %	60 %	70 %	75 %	75 %	
2	22	5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	N/A	5	5	5	5	5	5	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	2 Program Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	41.63 %	99 %	98 %	76,39 %	87,96 %	99,57 %	99,57 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	3 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	2	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	13.24 %	15 %	20 %	25 %	50 %	80 %	80 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2	24	2 Program Pengelolaan Arsip	1	Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar	2 %	5 %	32 %	33 %	35 %	38 %	38 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	3 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	2	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 %	25 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	4 Program Perizinan Penggunaan Arsip	3	Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 %	25 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Produksi Perikanan Tangkap	2.374 ton	2.421,84 ton	2.987,88 ton	3.077,48 ton	3.300 ton	3.600 ton	15.387,20 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	Produksi Perikanan Budidaya	70,6 ton	92,85 ton	92,31 ton	93,85 ton	100 ton	150 ton	529,01 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	4	Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	5	Konsumsi Ikan per kapita per tahun (kg/perkapita/tahun)	17.12	17.41	18.71	19.85	20.61	22.06	22.06	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3	26	2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar	NA	1	1	1	4	4	4	Dinas Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	2	Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara	N/A	6 %	17 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan HAKI	3	Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub	N/A	4	4	4	4	4	8	
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4	Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif	N/A	200 orang	80 orang	310 orang	250 orang	513 orang	1378 orang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	3,68 %	7,51 %	-17 %	-33 %	2 %	2 %	2 %	Dinas Pertanian
				2	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	-35.94 %	-8,4 %	49,1 %	10,8 %	10,0 %	12,0 %	12,0 %	
				3	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	0.2 %	-0,4 %	-19,1 %	29,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	
				4	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	8.57 %	15.80 %	17.60 %	20.10 %	22.20 %	24.40 %	24.40 %	
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5	Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani	58.8	181,8	769,8	1.228,80	1.228,8	1.428,80	1.428,80	Dinas Pertanian
				6	Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi	100	150	150	200	200	250	250	
				7	Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian	1.176	4.952	4.952	5.187	5.187	5.187	5.187	
				8	Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (HA)	551.52	1.494,23	2.584,44	2.584,44	2.584,44	2.712,70	2.712,70	
				9	Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (HA)	38.83	39.4	39.49	40.08	45.97	86.19	86.19	
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100 %	100 %	28.57 %	42.86 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Peternakan
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	11	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				12	Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan	100 %	100 %	92.92 %	85.84 %	100 %	100 %	100 %	
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	13	Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih	N/A	10.45 %	5 %	9 %	9 %	10 %	10 %	Dinas Pertanian
				14	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak	40	45	300	309	320	330	1.304	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5		
3 27 7	Program Penyuluhan Pertanian	15 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian	1289 Kelompok	1252 Kelompok	1278 Kelompok	1358 Kelompok	1423 Kelompok	1450 Kelompok	1450 Kelompok	
		16 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan	39 Kelompok	75 Kelompok	103 Kelompok	152 Kelompok	163 Kelompok	175 Kelompok	175 Kelompok	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3 28 4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu	-	-	-	-	750 Ha	172 Ha	922 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3 29 5	Program Pengelolaan EBT	1 Besaran Energi Baru Terbarukan	N/A	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Sekretariat Daerah
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3 30 2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1 Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	N/A	N/A	30,00 %	35,00 %	40,00 %	50,00 %	50,00 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3 30 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		4 Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan	-	-	-	-	0,25 %	0,25 %	0,25 %	
3 30 5	Program Pengembangan Ekspor	5 Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan	941/13.258 Ton/Hewan	1.049/11.567 Ton/Hewan	1.750/8.500 Ton/Hewan	290/8.351 Ton/Hewan	50/8.500 Ton/Hewan	600/9.000 Ton/Hewan	600/9.000 Ton/Hewan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	6 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		7 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3 30 7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	8 Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3 31 2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	8,46 %	10,66 %	15,95 %	20,17 %	25,94 %	30,21 %	30,21 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	2 Persentase pengendalian izin usaha industri	N/A	N/A	5 %	10 %	15 %	20 %	20 %	
3 31 4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3 Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3	32	2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1	Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman	35,01 %	35,02 %	35,02 %	35,03 %	37,15 %	40,33 %	40,33 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2	Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun	2,80 %	2,82 %	2,82 %	3,06 %	3,28 %	4,81 %	4,81 %	
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian	10 %	10 %	10 %	30 %	50 %	90 %	90 %	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	1	SEKRETARIAT DAERAH											
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B	N/A	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	Sekretariat Daerah
4	1	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B	N/A	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	
4	2	SEKRETARIAT DPRD											
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1	Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	1	PERENCANAAN											
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	60	75	70	85	90	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2		Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	
		3		Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5		Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		6		Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD	60	75	70	85	90	100	100		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab	
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5			
		7 Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
5	2	KEUANGAN									
5	2	2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Keuangan Daerah	
			2 Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakteristik Kualitatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			3 Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			4 Fleksibilitas Keuangan	2.22 %	2.16 %	2.22 %	2.12 %	2.23 %	2.38 %		
			5 Solvabilitas Operasional	1.19	1.23	1.16	0.78	0.82	0.86		
			6 Solvabilitas Jangka Pendek	10.96 %	4.46 %	4.17 %	5.92 %	7.67 %	9.42 %		
			7 Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %		
5	2	3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Solvabilitas Jangka Panjang	1.528.653.759.506,72	1.566.246.563.261,76	1.644.395.036.814,99	1.869.810.294.908,78	1.865.837.144.588,02	1.895.269.096.997,31	1.895.269.096.997,31	Badan Keuangan Daerah
			9 Solvabilitas Layanan	10.952.046,25	11.084.547,51	11.515.371,41	12.947.569,45	11.331.315,94	11.457.800,15		
			10 Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
5	2	4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Persentase pertumbuhan PAD	(33,17) %	0,71 %	6,73 %	0,35 %	5,10 %	5,50 %	5,50 %	
5	3	KEPEGAWAIAN									
5	3	2 Program Kepegawaian Daerah	1 Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			2 Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi	60 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %		
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	4	2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional	30 %	30 %	30 %	42 %	60 %	70 %	70 %	
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	5	2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1 Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bappelitbangda	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	INSPEKTORAT DAERAH										
6	1	2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	83 %	86 %	82 %	93 %	95 %	100 %	Inspektorat	
			2 Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	73 %	83 %	85 %	87 %	95 %	100 %		
7	UNSUR KEWILAYAHAN										



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
7	1	KECAMATAN											
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4	Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah
		6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Aesesa
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Boawae
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Mauponggo
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Nangaroro
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Wolowae
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec. Keo Tengah





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab			
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan	30 %	30 %	40 %	35 %	40 %	45 %	45 %	Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	Persentase parpol yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	1	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3	Persentase ormas yang aktif	30 %	36 %	36 %	40 %	45 %	60 %	60 %	
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	60.00	65.00	65.00	
				2	Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat Daerah
				3	Jumlah Air Minum yang Disalurkan	52.968 M ³	55.396 M ³	62.000 M ³	64.006 M ³	66.000 M ³	68000 M ³	68.000 M ³	BLUD SPAM
				4	Persentase pemenuhan pelayanan RS	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100 %	100 %	BLUD RSD Aeramo
				5	Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	

P-RPJMD

2018-2023



9

BAB IX
PENUTUP



BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dimana untuk tahun 2019-2021 berpedoman pada Perda No 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nagekeo, sementara untuk perencanaan tahun selanjutnya di tahun 2022-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 ini juga merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Mengingat Tahun 2024 adalah tahun transisi, maka substansi perencanaan strategis yang ada dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2024.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 melalui sinkronisasi dengan pemerintah dan pemerintahan provinsi serta kolaborasi dengan masyarakat, LSM, dunia usaha, akademisi dan media.





4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Tahun 2018-2023.
5. Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Nagekeo berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
6. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, pada saat RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 – 2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 dalam tahun bekenan dan memperhatikan kelanjutan kebijakan pembangunan tahun sebelumnya sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun





2018-2023, RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan program strategis nasional dan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Nagekeo Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta kebutuhan prioritas pembangunan lainnya bagi masyarakat.

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk membiayai program/kegiatan yang memiliki nilai prioritas tinggi seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan dapat dilakukan dengan arah sebagai berikut:

1. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerja sama Pemerintah Daerah dan Swasta (*Public-Private Partnership*) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur Kerjasama daerah, diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,





meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan berpedoman pada kaedah regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang ada.



BUPATI NAGEKEO,
JOHANNES DON BOSCO DO

"NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN YANG SEJAHTERA, NYAMAN, DAN BERMARTABAT
MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA"

